



STATISTIK

BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN



TAHUN 2019

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

STATISTIK

BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2019

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jakarta, Juni 2020

STATISTIK

BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

TAHUN 2019

Penyusun & Penyunting:
Subbagian Data dan Informasi
Bagian Program dan Evaluasi
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Desain sampul & layout:
Tenang Carles Rinaldi Silitonga, S.Komp.

Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Gedung Manggala Wanabakti
Blok I Lantai 7, Cq. Bagian Program dan Evaluasi
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp/Fax: (021) 5730289/ (021) 5734632
Email: datainformasi.planologi@gmail.com

ISBN 978-602-70660-7-6



Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 ini merupakan penerbitan lanjutan dari Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun sebelumnya yang disusun berdasarkan hasil kompilasi data dari Unit Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) sampai dengan 31 Desember 2019. Adapun acuan dalam penyusunan buku Statistik ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Data dan Informasi tentang pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan sekaligus menyempurnakan data dan informasi sebelumnya, yang disajikan dalam bentuk Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019.

Kami menyadari bahwa dalam Buku Statistik ini kemungkinan masih ada kekurangan, namun harapan kami semoga Buku Statistik ini dapat memberikan manfaat terutama bagi yang berkepentingan.

Jakarta, Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL



**Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP.19610202 198603 1 003**

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN	
TABEL I.1 REKAPITULASI LUAS PENUTUPAN LAHAN DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN PER PROVINSI TAHUN 2019 (Ribu Ha)	7
TABEL I.2 ANGKA DEFORESTASI INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN PER PROVINSI TAHUN 2018 – 2019 (Ha)	14
TABEL I.3 POTENSI TEGAKAN HUTAN DI INDONESIA	26
II. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN	
TABEL II.1 PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN HUTAN S.D. DESEMBER 2019.....	29
TABEL II.2 PERKEMBANGAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM PROSES REVIEW RTRWP S.D DESEMBER 2019.....	33
TABEL II.3 PROGRES PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN DALAM USULAN REVISI RTRWP S.D. DESEMBER 2019	38
III. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN	
TABEL III.1 LUAS KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN SK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN S.D. DESEMBER 2019	45
TABEL III.2 PERKEMBANGAN PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN PARSIAL S.D. DESEMBER 2019.....	46
TABEL III.3 PERKEMBANGAN PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN S.D. DESEMBER 2019	47
TABEL III.4 PERKEMBANGAN PENGESAHAN BERITA ACARA TATA BATAS S.D. DESEMBER 2019.....	48
TABEL III.5 PERKEMBANGAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN PER PROVINSI S.D. DESEMBER 2019	49
TABEL III.6 PERKEMBANGAN TATA BATAS IUPHHK-HA DAN IUPHHK-HT S.D. DESEMBER 2019.....	50
IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN	
TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI.....	51
TABEL IV.2 PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (TAHAP SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN)	72
TABEL IV.3 PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK NON KEHUTANAN LAINNYA (TAHAP SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN).....	73
TABEL IV.4 PERKEMBANGAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN.....	74
TABEL IV.5 REALISASI PENYELESAIAN PENYEDIAAN KAWASAN HUTAN UNTUK TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) S.D DESEMBER 2019	75
V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)	
TABEL V.1 PERKEMBANGAN PENETAPAN WILAYAH KPH (KPHP DAN KPHL)	77
TABEL V.2 PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL	80

TABEL V.3	PENETAPAN WILAYAH KPH KONSERVASI	84
TABEL V.4	DAFTAR KPH BERLEMBAGA DAN UNIT-UNIT YANG DINAUNGI.....	88
TABEL V.5	PENETAPAN KPH FASILITASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2019.....	96
TABEL V.6	PENGESAHAN RPHJP KPH	104

VI. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

TABEL VI.1	PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI (TAMBANG) S.D. DESEMBER 2019	113
TABEL VI.2	PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI (NON TAMBANG) S.D. DESEMBER 2019.....	114
TABEL VI.3	PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK OPERASI PRODUKSI (TAMBANG) S.D. DESEMBER 2019.....	115
TABEL VI.4	PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK NON TAMBANG S.D. DESEMBER 2019	116
TABEL VI.5	PERKEMBANGAN LAHAN KOMPENSASI (s.d. Tahap Berita Acara Serah Terima) S.D. DESEMBER 2019	117
TABEL VI.6	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PKH) S.D. DESEMBER 2019	118

VII. KOMISI PENILAI AMDAL, AUDIT DAN DOKUMEN LINGKUNGAN

TABEL VII.1	DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKOMENDASI DAN IZIN LINGKUNGAN TAHUN 2013-2019.....	119
TABEL VII.2	DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN IZIN LINGKUNGAN S.D. DESEMBER 2019.....	120
TABEL VII.3	PERKEMBANGAN PENETAPAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP	121
TABEL VII.4	PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT PERMASALAHAN DOKUMEN LINGKUNGAN.....	121
TABEL VII.5	DAFTAR JUMLAH KOMISI PENILAI AMDAL DI INDONESIA	121

VIII. KLHS DAN EKOREGION

TABEL VIII.1	JUMLAH SATUAN DAN LUAS EKOREGION PULAU DAN KEPULAUAN S.D. DESEMBER 2019.....	123
TABEL VIII.2	LUAS WILAYAH EKOREGION LAUT S.D. DESEMBER 2019.....	126
TABEL VIII.3	KEGIATAN REVIEW DAN BIMBINGAN TEKNIS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	127
TABEL VIII.4	STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) PERIODE TAHUN 2017-2019	128
TABEL VIII.5	STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (RTR KSP) PERIODE TAHUN 2017-2019	129
TABEL VIII.6	STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PERIODE TAHUN 2017-2019..	130
TABEL VIII.7	STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) PERIODE TAHUN 2017-2019	131
TABEL VIII.8	PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL S.D. DESEMBER 2019	132
TABEL VIII.9	PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI S.D. DESEMBER 2019	133

TABEL VIII.10	PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA S.D. DESEMBER 2019.....	135
TABEL VIII.11	KECENDERUNGAN PERUBAHAN KINERJA JASA LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PENGHATUR AIR PERIODE TAHUN 1996-2019	139

IX. DUKUNGAN MANAJEMEN

TABEL IX.1	REKAPITULASI SEBARAN PNS DAN CPNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH S.D. DESEMBER 2019	141
TABEL IX.2	SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH S.D. DESEMBER 2019	143
TABEL IX.3	PERKEMBANGAN JUMLAH PNS BERDASARKAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH S.D. DESEMBER 2019	145
TABEL IX.4	PERKEMBANGAN DIKLAT PENJENJANGAN PNS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN S.D. DESEMBER 2019	147
TABEL IX.5	PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN S.D. DESEMBER 2019	149
TABEL IX.6	REKAPITULASI PERKEMBANGAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN S.D. DESEMBER 2019	158
TABEL IX.7	PERKEMBANGAN REALISASI KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN S.D. DESEMBER 2019	161

PENDAHULUAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

A. Landasan Pembangunan

Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ke depan memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional terutama terkait dengan agenda perbaikan tata kelola kawasan hutan, pengelolaan sumber daya alam, mewujudkan kemandirian pangan, air, dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan perlu menetapkan langkah-langkah strategis untuk dapat memenuhi peran dan sasaran tersebut.

Program kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dilaksanakan sesuai yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu 1) Inventarisasi hutan; 2) Pengukuhan Kawasan Hutan; 3) Penatagunaan Kawasan Hutan; 4) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; 5) Penyusunan rencana kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu 1) Inventarisasi Lingkungan Hidup; 2) Penetapan Wilayah Ekoregion; 2) Penyusunan RPPLH; 3) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui Instrumen KLHS, AMDAL, UKL-UPL, serta Izin Lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup.

B. Strategi

Peran dan fokus utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 ketiga yaitu *melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan*.

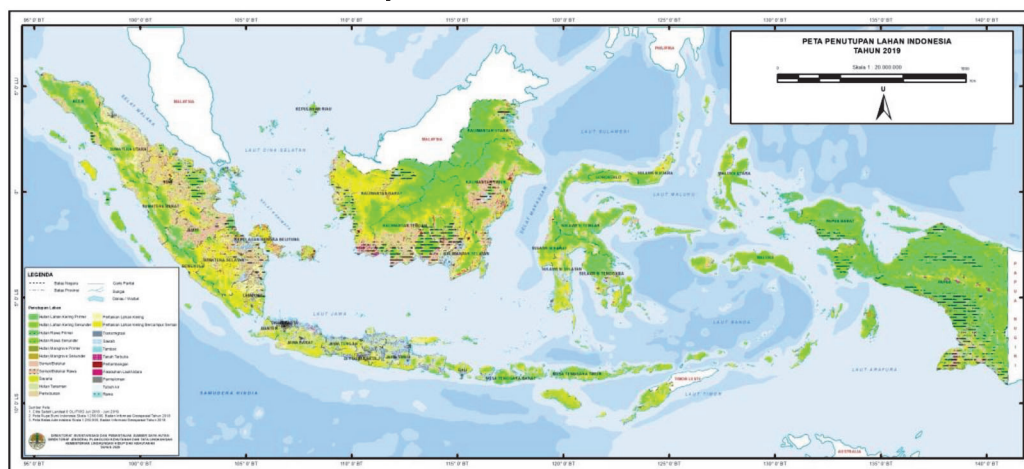
Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, maka tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah *memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional*, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan melalui, inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung daya tampung, *services* pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

C. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan

Monitoring sumber daya hutan secara periodik dengan interval 3 (tiga) tahunan telah dilaksanakan sejak tahun 2000-2009. Dengan perkembangan teknologi penginderaan jauh, maka sejak tahun 2011, monitoring sumber daya hutan telah dilakukan setiap tahun. Monitoring sumber daya hutan dilaksanakan melalui kegiatan penafsiran penutupan lahan seluruh Indonesia dengan menggunakan citra satelit resolusi sedang. Hasil penafsiran penutupan lahan selanjutnya digunakan untuk rekalkulasi penutupan lahan dan penghitungan laju deforestasi.

Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2019



Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2018-2019



Dalam rangka inventarisasi hutan nasional, sejak tahun 1990 telah dilaksanakan pengukuran *Temporary Sample Plot (TSP)* dan *Permanent Sample Plot (PSP)* di kawasan hutan di bawah ketinggian 1.000 mdpl di seluruh Indonesia. Pengukuran TSP dilaksanakan untuk mengetahui potensi tegakan hutan, sedangkan PSP dilaksanakan untuk mengetahui riap tegakan dan monitoring perubahan tegakan hutan. Sampai dengan saat ini kegiatan PSP masih dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Dari hasil pengukuran TSP dan PSP telah dilakukan penghitungan taksiran potensi tegakan per hektar semua jenis di masing-masing Provinsi dan secara nasional.

D. Perencanaan Kawasan Hutan

Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Kehutanan adalah produk perencanaan kehutanan yang dituangkan dalam bentuk dokumen rencana spasial dan numerik serta disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan dan jenis-jenis pengelolaannya serta dalam jangka waktu pelaksanaan dan dalam penyusunannya telah memperhatikan tata ruang wilayah dan kebijakan prioritas pembangunan.

Ruang Lingkup perencanaan terdiri dari:

- 1) Rencana Kawasan Hutan; dan
- 2) Rencana Pembangunan Kehutanan.

Rencana kawasan hutan berupa Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota, adalah perencanaan kehutanan yang memuat arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan jangka panjang untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dan dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan tata ruang wilayah.

Rencana Pembangunan Kehutanan adalah Rencana Kehutanan dalam jangka waktu dan skala geografis tertentu, yang merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional dan Wilayah dengan memperhatikan arahan spasial Rencana Kawasan Hutan dan dalam penyusunannya mengikuti siklus perencanaan pembangunan Nasional.

E. Pengukuhan Kawasan Hutan

Pengukuhan kawasan hutan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap suatu wilayah tertentu yang bukan kawasan hutan sehingga dapat diproses menjadi kawasan hutan. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi proyeksi batas, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan patok dan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan Berita Acara Tata Batas. Pemetaan dalam rangka kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan pada seluruh proses pengukuhan kawasan hutan, yang berupa peta:

1. Penunjukkan kawasan hutan;
2. Rencana trayek batas;
3. Pemancangan patok batas sementara;
4. Pemetaan batas kawasan hutan;
5. Penetapan kawasan hutan.

Selanjutnya, penetapan kawasan hutan adalah penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan tetap dengan keputusan Menteri.

Kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan merupakan upaya memberikan kepastian hukum dengan adanya kejelasan atas fungsi letak batas, luas kawasan hutan dan status hukum (legal) atas kawasan hutan, untuk mendapatkan pengakuan/legitimasi publik serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang berbatasan dan atau berada di sekitar kawasan hutan. Dari luas kawasan hutan ± 120 juta Ha, realisasi sampai dengan Desember 2019, penetapan kawasan hutan yang sudah dicapai adalah ± 88 juta ha.

F. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain. Sebagai contoh perubahan fungsi dari kawasan hutan lindung menjadi hutan konservasi. Sedangkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan, diantaranya melalui mekanisme tukar menukar kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan dan perubahan peruntukan untuk wilayah Provinsi.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat Kawasan Hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan Kawasan Hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

G. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Pembentukan KPH adalah serangkaian proses perencanaan/penyusunan desain kawasan hutan ke dalam wilayah-wilayah pengelolaan hutan yang didasarkan atas fungsi pokok dan peruntukannya menjadi KPH. Dengan pembentukan KPH, maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH, dimana KPH menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, Provinsi dan kabupaten/kota. Tujuan Pembentukan KPH adalah untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari.

Pada dasarnya seluruh kawasan hutan yang terdiri dari 3 (tiga) fungsi pokok yaitu konservasi, lindung dan produksi terbagi habis dalam KPH-KPH. KPH tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih fungsi hutan yang penamaannya sesuai fungsi pokok yang dominan.

H. Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Penggunaan kawasan hutan dapat bersifat komersial maupun non komersial. Penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan. Sedangkan penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Penggunaan kawasan hutan hanya dapat diberikan di dalam *Kawasan Hutan*

Produksi dan/atau Kawasan Hutan Lindung. Penggunaan kawasan hutan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

I. AMDAL, UKL-UPL

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dokumen lingkungan hidup dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun:

- a. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); dan
- c. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL tercantum di dalam Peraturan MENLH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL.

UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota. Dalam menetapkan rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL, gubernur atau bupati/walikota dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L). Hanya rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal dan UKL-UPL yang wajib memiliki izin lingkungan. Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL tidak wajib memiliki izin lingkungan.

Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

J. KLHS dan Ekoregion

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusun, Pelaksana, Dan Penyelenggara KLHS adalah

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pembuat Kebijakan Rencana dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Hasil penilaian kelayakan KLHS berupa Rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Gubernur tentang Layak/Tidak Layak KRP dilaksanakan. Apabila hasil penilaian kelayakan KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

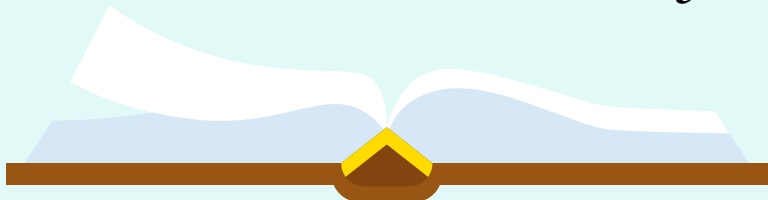
- a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Ekoregion adalah geografis ekosistem, artinya pola susunan berbagai ekosistem dan proses di antara ekosistem tersebut yang terikat dalam suatu satuan geografis. Penetapan ekoregion menghasilkan batas (boundary) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumberdaya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion. Dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan SDA, pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, UU Nomor 32/2009 memandatkan perlu diperkuatnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan LH (RPPLH). Rencana perlindungan dan pengelolaan LH terdiri dari empat muatan, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, UU Nomor 32 Tahun 2009 memandatkan bahwa untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan LH harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah.



PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

***Direktorat Inventarisasi
dan Pemantauan Sumber Daya Hutan***



TABEL I.1. REKAPITULASI LUAS PENUTUPAN LAHAN DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN PER PROVINSI TAHUN 2019 (Ribu Ha)

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	Jumlah	Jumlah	%			
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ACEH													
	A. Hutan	766,7	1.640,8	115,1	376,9	2.899,6	2,4	2.902,0	253,6	3.155,6	55,9			
	- Hutan Primer	551,1	1.170,7	50,2	124,3	1.896,2	0,0	1.896,2	29,4	1.925,6	34,1			
	- Hutan Sekunder	208,3	461,4	55,9	205,9	931,5	1,8	933,2	179,8	1.113,0	19,7			
	- Hutan Tanaman *	7,4	8,7	9,1	46,7	71,9	0,6	72,5	44,5	117,0	2,1			
	B. Non Hutan	77,5	140,8	30,1	172,9	421,3	13,0	434,3	2.057,4	2.491,7	44,1			
	Total	844,3	1.781,7	145,2	549,8	3.320,9	15,4	3.336,3	2.311,0	5.647,3	100,0			
2	SUMATERA UTARA													
	A. Hutan	379,0	688,5	318,8	314,5	1.700,8	5,2	1.706,0	147,3	1.853,4	26,1			
	- Hutan Primer	291,4	251,6	34,1	2,7	579,9	0,9	580,7	2,3	583,0	8,2			
	- Hutan Sekunder	87,4	412,6	281,4	192,3	973,7	4,4	978,1	132,5	1.110,6	15,6			
	- Hutan Tanaman *	0,2	24,3	3,3	119,5	147,2	-	147,2	12,6	159,8	2,3			
	B. Non Hutan	48,0	518,4	323,0	390,0	1.279,3	70,4	1.349,8	3.898,8	5.248,6	73,9			
	Total	427,0	1.206,9	641,8	704,5	2.980,1	75,7	3.055,8	4.046,2	7.102,0	100,0			
3	SUMATERA BARAT													
	A. Hutan	677,9	586,5	149,2	251,8	1.665,4	79,1	1.744,5	162,6	1.907,1	45,6			
	- Hutan Primer	387,7	201,0	5,6	5,8	600,0	4,2	604,2	13,8	618,0	14,8			
	- Hutan Sekunder	290,2	385,2	141,5	236,7	1.053,6	67,5	1.121,1	143,7	1.264,8	30,2			
	- Hutan Tanaman *	-	0,3	2,1	9,4	11,8	7,3	19,1	5,2	24,3	0,6			
	B. Non Hutan	91,9	205,2	84,0	108,8	489,9	108,6	598,4	1.678,3	2.276,8	54,4			
	Total	769,8	791,7	233,2	360,6	2.155,3	187,6	2.342,9	1.841,0	4.183,9	100,0			
4	RIAU													
	A. Hutan	477,2	88,0	316,7	1.435,5	2.317,4	59,0	2.376,5	82,7	2.459,2	27,7			
	- Hutan Primer	148,0	22,4	22,7	19,2	212,2	1,6	213,8	0,9	214,8	2,4			
	- Hutan Sekunder	310,5	63,8	240,1	612,5	1.226,9	47,0	1.273,8	50,6	1.324,5	14,9			
	- Hutan Tanaman *	18,7	1,8	54,0	803,8	878,3	10,5	888,8	31,2	920,0	10,4			
	B. Non Hutan	153,5	145,9	700,6	904,1	1.904,1	1.126,4	3.030,5	3.393,1	6.423,6	72,3			
	Total	630,8	233,9	1.017,3	2.339,6	4.221,6	1.185,4	5.407,0	3.475,8	8.882,8	100,0			
5	JAMBI													
	A. Hutan	546,8	131,7	118,8	391,4	1.188,7	0,1	1.188,8	64,4	1.253,2	25,9			
	- Hutan Primer	451,4	83,1	34,7	68,8	637,9	-	637,9	26,0	663,9	13,7			
	- Hutan Sekunder	95,4	48,5	79,9	91,6	315,4	0,0	315,4	28,3	343,7	7,1			
	- Hutan Tanaman *	-	0,1	4,2	231,1	235,4	0,1	235,4	10,1	245,5	5,1			
	B. Non Hutan	138,7	47,9	139,5	572,4	898,4	11,3	909,8	2.669,4	3.579,2	74,1			
	Total	685,5	179,6	258,3	963,8	2.087,1	11,4	2.098,5	2.733,8	4.832,3	100,0			
6	SUMATERA SELATAN													
	A. Hutan	405,3	251,5	79,8	628,3	1.364,9	0,1	1.364,9	80,1	1.445,0	16,8			
	- Hutan Primer	289,9	96,3	11,3	6,7	404,2	-	404,2	2,8	407,0	4,7			
	- Hutan Sekunder	111,4	152,4	48,9	58,2	371,0	0,0	371,0	46,2	417,2	4,8			
	- Hutan Tanaman *	3,9	2,8	19,7	563,3	589,7	0,0	589,7	31,0	620,8	7,2			
	B. Non Hutan	336,4	326,7	134,1	1.084,5	1.881,8	160,9	2.042,7	5.139,1	7.181,9	83,2			
	Total	741,7	578,3	213,9	1.712,8	3.246,7	161,0	3.407,7	5.219,2	8.626,9	100,0			

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP							HPK	Jumlah	JUMLAH		%	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7	KEP. BANGKA BELITUNG													
	A. Hutan	8,4	67,5	-	80,7	156,6	0,0	156,6	35,5	192,1	11,6			
	- Hutan Primer	1,5	19,4	-	6,9	27,8	0,0	27,8	3,3	31,1	1,9			
	- Hutan Sekunder	6,9	48,2	-	73,7	128,8	0,0	128,8	32,2	161,0	9,7			
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0			
	B. Non Hutan	26,1	98,8	-	361,4	486,3	0,7	487,0	980,6	1.467,6	88,4			
	Total	34,5	166,4	-	442,1	642,9	0,7	643,6	1.016,1	1.659,7	100,0			
8	BENGKULU													
	A. Hutan	399,4	169,3	62,1	14,4	645,2	0,1	645,3	29,3	674,6	33,7			
	- Hutan Primer	345,8	102,8	16,2	2,9	467,7	-	467,7	0,7	468,4	23,4			
	- Hutan Sekunder	53,5	66,4	45,9	11,5	177,3	0,0	177,3	23,9	201,2	10,0			
	- Hutan Tanaman *	0,2	-	-	-	0,2	0,1	0,2	4,7	5,0	0,2			
	B. Non Hutan	63,6	81,5	111,1	11,5	267,7	11,7	279,3	1.049,0	1.328,3	66,3			
	Total	463,0	250,8	173,3	25,9	912,9	11,8	924,6	1.078,3	2.002,9	100,0			
9	LAMPUNG													
	A. Hutan	253,3	50,6	2,7	13,5	320,1	-	320,1	15,8	335,9	9,8			
	- Hutan Primer	151,1	2,3	1,1	-	154,5	-	154,5	0,6	155,1	4,5			
	- Hutan Sekunder	102,2	48,3	1,6	0,1	152,2	-	152,2	12,4	164,6	4,8			
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	13,4	13,4	-	13,4	2,8	16,2	0,5			
	B. Non Hutan	208,7	267,0	30,7	178,2	684,6	-	684,6	2.414,9	3.099,5	90,2			
	Total	462,0	317,6	33,4	191,7	1.004,7	-	1.004,7	2.430,6	3.435,4	100,0			
10	KEP. RIAU													
	A. Hutan	1,1	52,1	66,4	49,4	169,0	43,5	212,5	59,1	271,6	33,2			
	- Hutan Primer	-	0,6	3,6	4,8	9,0	2,7	11,7	1,3	13,1	1,6			
	- Hutan Sekunder	1,1	51,5	62,8	44,5	159,9	40,8	200,7	56,5	257,2	31,5			
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	0,0	0,0	-	0,0	1,3	1,3	0,2			
	B. Non Hutan	3,6	45,2	52,5	29,5	130,8	38,6	169,4	376,1	545,4	66,8			
	Total	4,7	97,4	118,8	78,8	299,8	82,1	381,8	435,2	817,0	100,0			
	PULAU SUMATERA													
	A. Hutan	3.915,1	3.726,6	1.229,6	3.556,4	12.427,7	189,5	12.617,2	930,4	13.547,6	28,7			
	- Hutan Primer	2.617,7	1.950,2	179,5	242,1	4.989,5	9,4	4.999,0	81,1	5.080,0	10,8			
	- Hutan Sekunder	1.267,0	1.738,3	957,9	1.527,1	5.490,3	161,5	5.651,7	706,0	6.357,7	13,5			
	- Hutan Tanaman *	30,4	38,1	92,3	1.787,2	1.947,9	18,6	1.966,5	143,4	2.109,9	4,5			
	B. Non Hutan	1.148,0	1.877,5	1.605,5	3.813,2	8.444,3	1.541,6	9.985,8	23.656,8	33.642,6	71,3			
	Total	5.063,2	5.604,1	2.835,2	7.369,5	20.872,0	1.731,0	22.603,0	24.587,2	47.190,2	100,0			
11	BANTEN													
	A. Hutan	76,1	6,4	25,4	9,0	116,9	-	116,9	30,2	147,1	15,7			
	- Hutan Primer	8,2	-	0,1	0,0	8,3	-	8,3	0,0	8,3	0,9			
	- Hutan Sekunder	57,1	4,2	3,2	0,7	65,3	-	65,3	2,8	68,1	7,3			
	- Hutan Tanaman *	10,8	2,1	22,0	8,4	43,4	-	43,4	27,4	70,7	7,5			
	B. Non Hutan	36,9	6,0	24,1	18,0	84,9	-	84,9	707,2	792,1	84,3			
	Total	113,0	12,4	49,4	27,0	201,8	-	201,8	737,4	939,2	100,0			

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP							HPK	Jumlah	JUMLAH		%	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
12	DKI JAKARTA													
	A. Hutan	0,1	0,0	-	0,0	0,2	-	0,2	0,2	0,3	0,5			
	- Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Hutan Sekunder	0,1	0,0	-	0,0	0,2	-	0,2	0,2	0,3	0,5	0,0		
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	B. Non Hutan	0,2	0,0	-	0,2	0,3	-	0,3	64,7	65,0	99,5	0,0		
	Total	0,3	0,0	-	0,2	0,5	-	0,5	64,9	65,3	100,0	0,0		
13	JAWA BARAT													
	A. Hutan	109,4	188,0	107,8	112,9	518,1	-	518,1	279,1	797,2	21,6			
	- Hutan Primer	7,6	1,3	0,0	1,2	10,1	-	10,1	0,1	10,2	0,3			
	- Hutan Sekunder	72,3	71,8	15,4	18,1	177,6	-	177,6	9,6	187,2	5,1			
	- Hutan Tanaman *	29,5	114,9	92,4	93,6	330,4	-	330,4	269,4	599,8	16,2			
	B. Non Hutan	22,8	103,3	82,3	90,1	298,5	-	298,5	2.602,9	2.901,4	78,4			
	Total	132,2	291,3	190,2	203,0	816,6	-	816,6	2.882,0	3.698,6	100,0			
14	JAWA TENGAH													
	A. Hutan	12,1	73,2	166,4	282,1	533,8	-	533,8	131,3	665,1	19,2			
	- Hutan Primer	-	7,7	0,5	0,0	8,2	-	8,2	0,0	8,2	0,2			
	- Hutan Sekunder	5,0	30,7	36,2	5,6	77,5	-	77,5	17,8	95,3	2,8			
	- Hutan Tanaman *	7,1	34,8	129,7	276,5	448,1	-	448,1	113,4	561,5	16,2			
	B. Non Hutan	4,3	11,2	17,5	80,3	113,3	-	113,3	2.678,1	2.791,4	80,8			
	Total	16,4	84,4	183,9	362,4	647,1	-	647,1	2.809,4	3.456,6	100,0			
15	DI YOGYAKARTA													
	A. Hutan	0,7	1,5	-	11,5	13,8	-	13,8	18,8	32,6	10,2			
	- Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0			
	- Hutan Sekunder	0,4	-	-	-	0,4	-	0,4	0,1	0,4	0,1			
	- Hutan Tanaman *	0,4	1,5	-	11,5	13,4	-	13,4	18,8	32,2	10,1			
	B. Non Hutan	0,2	0,5	-	2,4	3,0	-	3,0	283,8	286,8	89,8			
	Total	0,9	2,1	-	13,9	16,8	-	16,8	302,6	319,4	100,0			
16	JAWA TIMUR													
	A. Hutan	185,2	265,8	-	582,4	1.033,5	-	1.033,5	173,8	1.207,3	25,0			
	- Hutan Primer	26,0	12,9	-	4,1	43,0	-	43,0	1,6	44,6	0,9			
	- Hutan Sekunder	150,0	165,9	-	58,5	374,3	-	374,3	39,1	413,4	8,5			
	- Hutan Tanaman *	9,3	87,1	-	519,8	616,2	-	616,2	133,1	749,3	15,5			
	B. Non Hutan	44,9	78,9	-	200,4	324,2	-	324,2	3.306,2	3.630,4	75,0			
	Total	230,1	344,7	-	782,8	1.357,6	-	1.357,6	3.480,0	4.837,7	100,0			
PULAU JAWA														
	A. Hutan	383,7	535,0	299,6	997,9	2.216,2	-	2.216,2	633,5	2.849,7	21,4			
	- Hutan Primer	41,8	21,8	0,6	5,3	69,5	-	69,5	1,8	71,3	0,5			
	- Hutan Sekunder	284,9	272,6	54,9	82,8	695,2	-	695,2	69,6	764,8	5,7			
	- Hutan Tanaman *	57,1	240,5	244,1	909,7	1.451,5	-	1.451,5	562,1	2.013,5	15,1			
	B. Non Hutan	109,2	200,0	123,9	391,2	824,3	-	824,3	9.642,8	10.467,1	78,6			
	Total	492,9	734,9	423,5	1.389,1	3.040,5	-	3.040,5	10.276,3	13.316,8	100,0			

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP							HPK	Jumlah	JUMLAH		%	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
17	KALIMANTAN BARAT													
	A. Hutan	1.157,8	1.791,8	1.374,1	750,2	5.073,9	58,0	5.132,0	455,1	5.587,0	38,3			
	- Hutan Primer	973,9	941,6	293,5	28,2	2.237,2	1,3	2.238,5	5,0	2.243,5	15,4			
	- Hutan Sekunder	183,9	850,2	1.080,0	672,3	2.786,3	56,8	2.843,1	446,3	3.289,4	22,6			
	- Hutan Tanaman *	-	-	0,7	49,7	50,4	-	50,4	3,8	54,1	0,4			
	B. Non Hutan	272,3	519,1	758,3	1.377,2	2.926,8	139,9	3.066,7	5.919,1	8.985,7	61,7			
	Total	1.430,1	2.310,9	2.132,4	2.127,4	8.000,7	197,9	8.198,7	6.374,1	14.572,8	100,0			
18	KALIMANTAN SELATAN													
	A. Hutan	131,0	362,9	69,5	270,4	833,8	11,9	845,7	81,3	926,9	25,0			
	- Hutan Primer	17,5	40,5	1,7	0,4	60,0	-	60,0	2,2	62,2	1,7			
	- Hutan Sekunder	78,8	322,1	67,4	212,9	681,2	10,8	692,0	48,2	740,2	19,9			
	- Hutan Tanaman *	34,7	0,4	0,4	57,2	92,6	1,1	93,7	30,9	124,5	3,4			
	B. Non Hutan	82,3	163,5	57,2	491,8	794,8	139,5	934,3	1.852,7	2.787,0	75,0			
	Total	213,3	526,4	126,7	762,2	1.628,6	151,4	1.780,0	1.934,0	3.713,9	100,0			
19	KALIMANTAN TENGAH													
	A. Hutan	1.046,5	923,7	2.816,6	1.873,3	6.660,1	574,3	7.234,4	162,2	7.396,6	48,5			
	- Hutan Primer	295,3	438,1	345,9	25,7	1.105,0	2,8	1.107,8	0,4	1.108,2	7,3			
	- Hutan Sekunder	751,2	485,5	2.484,8	1.714,4	5.416,0	557,2	5.973,2	140,6	6.113,8	40,0			
	- Hutan Tanaman *	-	0,1	5,8	133,2	139,1	14,3	153,4	21,2	174,6	1,1			
	B. Non Hutan	561,8	422,4	500,9	2.008,5	3.493,5	1.969,2	5.462,7	2.406,8	7.869,6	51,5			
	Total	1.608,3	1.346,1	3.317,5	3.881,8	10.153,6	2.543,5	12.697,2	2.569,0	15.266,2	100,0			
20&21	KALIMANTAN TIMUR & KAL. UTARA													
	A. Hutan	1.407,5	2.736,0	4.631,9	2.563,7	11.339,1	106,6	11.445,7	1.360,8	12.806,4	65,7			
	- Hutan Primer	1.202,2	2.152,3	2.107,8	363,6	5.825,9	4,1	5.830,0	270,2	6.100,2	31,3			
	- Hutan Sekunder	204,7	583,0	2.516,0	1.702,3	5.005,9	99,0	5.104,9	1.051,5	6.156,4	31,6			
	- Hutan Tanaman *	0,6	0,7	8,1	497,9	507,3	3,5	510,8	39,0	549,8	2,8			
	B. Non Hutan	297,2	112,3	413,3	1.458,6	2.281,3	105,0	2.386,3	4.312,1	6.698,4	34,3			
	Total	1.704,7	2.848,2	5.045,2	4.022,3	13.620,4	211,6	13.831,9	5.672,9	19.504,8	100,0			
	PULAU KALIMANTAN													
	A. Hutan	3.742,8	5.814,3	8.892,1	5.457,7	23.906,9	750,8	24.657,7	2.059,3	26.717,0	50,4			
	- Hutan Primer	2.489,0	3.572,4	2.748,9	417,8	9.228,1	8,2	9.236,3	277,8	9.514,1	17,9			
	- Hutan Sekunder	1.218,6	2.240,8	6.128,2	4.301,9	13.889,4	723,8	14.613,2	1.686,7	16.299,8	30,7			
	- Hutan Tanaman *	35,3	1,2	15,0	738,0	789,4	18,9	808,3	94,9	903,1	1,7			
	B. Non Hutan	1.213,5	1.217,3	1.729,6	5.336,0	9.496,4	2.353,6	11.850,0	14.490,7	26.340,7	49,6			
	Total	4.956,3	7.031,6	10.621,7	10.793,7	33.403,3	3.104,5	36.507,7	16.550,0	53.057,7	100,0			
22	SULAWESI UTARA													
	A. Hutan	211,5	111,8	142,4	30,0	495,6	12,2	507,8	47,6	555,4	38,6			
	- Hutan Primer	129,1	63,6	35,0	10,4	238,0	-	238,0	7,4	245,4	17,0			
	- Hutan Sekunder	82,4	48,2	107,4	19,6	257,6	12,2	269,7	40,2	310,0	21,5			
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0			
	B. Non Hutan	33,7	50,0	66,5	34,4	184,6	2,5	187,2	697,0	884,2	61,4			
	Total	245,2	161,8	208,9	64,4	680,2	14,7	694,9	744,6	1.439,5	100,0			

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP							HPK	Jumlah	JUMLAH		%	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
23	GORONTALO													
	A. Hutan	186,9	179,8	198,7	65,8	631,2	35,0	666,2	51,4	717,6	59,9			
	- Hutan Primer	129,9	78,0	60,1	6,2	274,1	1,7	275,8	1,9	277,7	23,2			
	- Hutan Sekunder	57,0	101,8	132,8	55,2	346,8	31,1	377,9	49,1	427,0	35,6			
	- Hutan Tanaman *	-	-	5,9	4,4	10,3	2,1	12,4	0,4	12,9	1,1			
	B. Non Hutan	9,8	24,8	52,4	24,1	111,0	47,4	158,5	322,4	480,9	40,1			
	Total	196,7	204,6	251,1	89,9	742,2	82,4	824,7	373,8	1.198,5	100,0			
24	SULAWESI TENGAH													
	A. Hutan	559,1	1.156,8	1.169,5	290,6	3.176,0	158,6	3.334,6	481,7	3.816,3	63,2			
	- Hutan Primer	461,6	896,0	705,0	166,9	2.229,5	77,0	2.306,4	143,3	2.449,7	40,6			
	- Hutan Sekunder	97,5	260,9	464,4	123,7	946,4	81,6	1.028,0	337,7	1.365,7	22,6			
	- Hutan Tanaman *	-	-	0,1	-	0,1	-	0,1	0,7	0,8	0,0			
	B. Non Hutan	89,3	119,3	221,5	111,2	541,3	58,7	600,0	1.618,5	2.218,5	36,8			
	Total	648,4	1.276,1	1.391,0	401,8	3.717,2	217,3	3.934,6	2.100,1	6.034,7	100,0			
25	SULAWESI TENGGARA													
	A. Hutan	196,7	950,0	369,3	199,1	1.715,2	31,4	1.746,6	114,8	1.861,4	51,5			
	- Hutan Primer	11,4	795,7	272,7	80,6	1.160,3	12,4	1.172,8	19,7	1.192,4	33,0			
	- Hutan Sekunder	185,3	154,4	96,6	117,2	553,5	18,9	572,4	94,7	667,1	18,5			
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	1,4	1,4	0,1	1,5	0,4	1,9	0,1			
	B. Non Hutan	86,2	131,4	97,5	202,4	517,6	62,2	579,8	1.170,4	1.750,2	48,5			
	Total	282,9	1.081,5	466,9	401,6	2.232,8	93,6	2.326,4	1.285,2	3.611,6	100,0			
26	SULAWESI BARAT													
	A. Hutan	203,1	311,7	231,9	43,3	790,0	4,5	794,5	28,9	823,3	49,0			
	- Hutan Primer	124,1	124,1	74,0	10,6	332,8	0,1	333,0	0,2	333,1	19,8			
	- Hutan Sekunder	79,0	187,6	157,8	32,7	457,2	4,4	461,5	28,7	490,2	29,2			
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0			
	B. Non Hutan	12,1	140,3	98,8	28,6	279,8	18,1	297,9	559,0	856,9	51,0			
	Total	215,2	452,0	330,7	71,9	1.069,8	22,6	1.092,4	587,9	1.680,2	100,0			
27	SULAWESI SELATAN													
	A. Hutan	177,0	817,3	301,0	52,3	1.347,5	11,6	1.359,1	98,8	1.457,8	32,4			
	- Hutan Primer	98,6	368,7	122,2	2,3	591,9	5,4	597,3	7,8	605,2	13,5			
	- Hutan Sekunder	77,9	446,9	172,8	48,3	745,9	6,1	752,0	88,2	840,3	18,7			
	- Hutan Tanaman *	0,5	1,6	6,0	1,7	9,7	-	9,7	2,7	12,4	0,3			
	B. Non Hutan	54,1	345,2	178,6	87,7	665,6	4,8	670,4	2.370,2	3.040,6	67,6			
	Total	231,0	1.162,5	479,5	140,0	2.013,1	16,4	2.029,5	2.468,9	4.498,4	100,0			
PULAU SULAWESI														
	A. Hutan	1.534,2	3.527,4	2.412,8	681,1	8.155,5	253,2	8.408,8	823,1	9.231,8	50,0			
	- Hutan Primer	954,7	2.326,0	1.269,0	277,0	4.826,7	96,7	4.923,4	180,2	5.103,6	27,6			
	- Hutan Sekunder	579,1	1.199,8	1.131,8	396,6	3.307,3	154,3	3.461,6	638,7	4.100,3	22,2			
	- Hutan Tanaman *	0,5	1,6	12,0	7,5	21,6	2,2	23,8	4,2	28,0	0,2			
	B. Non Hutan	285,1	811,1	715,3	488,4	2.299,9	193,8	2.493,7	6.737,5	9.231,2	50,0			
	Total	1.819,3	4.338,5	3.128,1	1.169,5	10.455,4	447,0	10.902,5	7.560,6	18.463,1	100,0			

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP							Jumlah	JUMLAH	%			
		HK	HL	HPT	HP	HPK	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
28	BALI													
	A. Hutan	19,4	73,9	3,0	0,5	96,9	-	96,9	3,0	99,8	17,6			
	- Hutan Primer	2,9	39,9	0,0	-	42,9	-	42,9	0,1	42,9	7,6			
	- Hutan Sekunder	14,6	33,1	1,3	0,4	49,3	-	49,3	2,9	52,1	9,2			
	- Hutan Tanaman *	1,9	0,9	1,7	0,2	4,7	-	4,7	0,1	4,8	0,8			
	B. Non Hutan	3,5	21,9	3,7	1,4	30,4	-	30,4	436,6	467,0	82,4			
	Total	22,9	95,8	6,7	1,9	127,3	-	127,3	439,6	566,9	100,0			
29	NUSA TENGGARA BARAT													
	A. Hutan	77,9	380,0	225,5	82,1	765,5	-	765,5	113,0	878,6	44,4			
	- Hutan Primer	38,4	207,8	69,8	10,7	326,7	-	326,7	2,7	329,4	16,6			
	- Hutan Sekunder	39,4	171,2	155,3	70,2	436,1	-	436,1	109,3	545,4	27,5			
	- Hutan Tanaman *	0,1	1,0	0,3	1,2	2,7	-	2,7	1,0	3,7	0,2			
	B. Non Hutan	90,0	50,5	61,2	68,6	270,3	-	270,3	831,3	1.101,6	55,6			
	Total	167,9	430,5	286,7	150,7	1.035,8	-	1.035,8	944,3	1.980,2	100,0			
30	NUSA TENGGARA TIMUR													
	A. Hutan	167,2	424,0	94,5	171,9	857,6	18,6	876,2	842,9	1.719,2	36,4			
	- Hutan Primer	113,3	158,7	18,9	65,6	356,4	3,2	359,6	199,5	559,1	11,8			
	- Hutan Sekunder	52,9	264,0	74,7	105,2	496,8	15,4	512,1	641,6	1.153,8	24,4			
	- Hutan Tanaman *	1,0	1,4	1,0	1,1	4,4	-	4,4	1,8	6,3	0,1			
	B. Non Hutan	97,8	260,5	75,2	116,3	549,8	59,9	609,7	2.393,7	3.003,4	63,6			
	Total	264,9	684,6	169,7	288,2	1.407,4	78,5	1.485,9	3.236,6	4.722,5	100,0			
	PULAU BALI NUSA TENGGARA													
	A. Hutan	264,5	878,0	323,0	254,5	1.720,0	18,6	1.738,6	958,9	2.697,5	37,1			
	- Hutan Primer	154,6	406,4	88,7	76,3	726,0	3,2	729,2	202,3	931,5	12,8			
	- Hutan Sekunder	106,8	468,3	231,3	175,7	982,1	15,4	997,5	753,7	1.751,3	24,1			
	- Hutan Tanaman *	3,0	3,3	3,0	2,5	11,9	-	11,9	2,9	14,8	0,2			
	B. Non Hutan	191,2	332,9	140,1	186,3	850,5	59,9	910,4	3.661,6	4.572,0	62,9			
	Total	455,7	1.210,8	463,1	440,9	2.570,5	78,5	2.649,0	4.620,5	7.269,6	100,0			
31	MALUKU													
	A. Hutan	371,5	512,6	761,4	421,4	2.066,9	797,6	2.864,4	148,2	3.012,6	65,2			
	- Hutan Primer	72,7	40,0	29,5	70,4	212,6	157,4	370,0	12,8	382,8	8,3			
	- Hutan Sekunder	298,8	472,6	731,9	350,9	1.854,3	640,2	2.494,5	135,4	2.629,9	56,9			
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0			
	B. Non Hutan	48,8	114,6	132,9	222,3	518,7	527,3	1.046,0	563,5	1.609,5	34,8			
	Total	420,3	627,3	894,3	643,7	2.585,5	1.324,9	3.910,4	711,7	4.622,1	100,0			
32	MALUKU UTARA													
	A. Hutan	204,6	496,0	550,9	363,5	1.615,0	292,8	1.907,8	106,3	2.014,1	64,3			
	- Hutan Primer	62,8	146,8	100,6	15,5	325,8	15,3	341,1	16,0	357,0	11,4			
	- Hutan Sekunder	141,7	348,9	446,3	317,7	1.254,6	275,8	1.530,4	90,3	1.620,7	51,8			
	- Hutan Tanaman *	-	0,2	4,0	30,3	34,6	1,7	36,3	0,0	36,4	1,2			
	B. Non Hutan	13,9	88,1	115,9	118,2	336,1	271,3	607,4	509,1	1.116,5	35,7			
	Total	218,5	584,1	666,9	481,7	1.951,1	564,1	2.515,2	615,4	3.130,6	100,0			

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	JUMLAH	%				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
PULAU MALUKU														
	A. Hutan	576,1	1.008,6	1.312,3	784,9	3.681,9	1.090,4	4.772,2	254,5	5.026,7	64,8			
	- Hutan Primer	135,5	186,8	130,1	85,9	538,4	172,7	711,0	28,8	739,8	9,5			
	- Hutan Sekunder	440,6	821,6	1.178,1	668,6	3.108,9	916,0	4.024,9	225,7	4.250,6	54,8			
	- Hutan Tanaman *	-	0,2	4,0	30,4	34,6	1,7	36,3	0,0	36,4	0,5			
	B. Non Hutan	62,7	202,7	248,8	340,5	854,8	798,6	1.653,4	1.072,6	2.726,0	35,2			
	Total	638,8	1.211,3	1.561,1	1.125,4	4.536,7	1.888,9	6.425,6	1.327,1	7.752,8	100,0			
33	PAPUA													
	A. Hutan	5.347,4	6.986,0	5.217,1	3.989,2	21.539,7	2.634,5	24.174,1	994,6	25.168,7	81,0			
	- Hutan Primer	4.551,8	6.204,7	4.146,4	2.570,0	17.473,0	1.596,3	19.069,3	525,8	19.595,1	63,1			
	- Hutan Sekunder	795,7	781,2	1.068,5	1.418,6	4.063,9	1.037,5	5.101,4	468,5	5.569,8	17,9			
	- Hutan Tanaman *	-	0,1	2,2	0,5	2,8	0,7	3,5	0,3	3,8	0,0			
	B. Non Hutan	1.388,8	829,3	744,1	750,2	3.712,5	1.481,9	5.194,4	713,8	5.908,2	19,0			
	Total	6.736,3	7.815,3	5.961,2	4.739,3	25.252,1	4.116,4	29.368,5	1.708,4	31.076,9	100,0			
34	PAPUA BARAT													
	A. Hutan	1.643,7	1.485,5	1.724,2	2.093,2	6.946,6	1.368,2	8.314,7	560,2	8.874,9	92,2			
	- Hutan Primer	1.507,7	1.189,6	1.192,7	992,9	4.882,9	660,9	5.543,8	189,3	5.733,1	59,6			
	- Hutan Sekunder	136,0	295,9	531,5	1.100,3	2.063,7	707,2	2.771,0	370,8	3.141,8	32,6			
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0			
	B. Non Hutan	68,2	146,0	54,3	94,9	363,5	106,5	470,0	279,9	750,0	7,8			
	Total	1.711,9	1.631,6	1.778,5	2.188,2	7.310,1	1.474,7	8.784,8	840,1	9.624,9	100,0			
PULAU PAPUA														
	A. Hutan	6.991,1	8.471,5	6.941,3	6.082,4	28.486,2	4.002,6	32.488,9	1.554,8	34.043,6	83,6			
	- Hutan Primer	6.059,5	7.394,3	5.339,1	3.562,9	22.355,8	2.257,2	24.613,0	715,2	25.328,2	62,2			
	- Hutan Sekunder	931,7	1.077,1	1.599,9	2.518,9	6.127,6	1.744,7	7.872,3	839,3	8.711,7	21,4			
	- Hutan Tanaman *	-	0,1	2,2	0,5	2,8	0,7	3,5	0,3	3,8	0,0			
	B. Non Hutan	1.457,1	975,4	798,4	845,1	4.076,0	1.588,4	5.664,4	993,8	6.658,2	16,4			
	Total	8.448,2	9.446,9	7.739,7	6.927,5	32.562,3	5.591,0	38.153,3	2.548,5	40.701,8	100,0			
34	INDONESIA													
	A. Hutan	17.407,6	23.961,4	21.410,7	17.814,8	80.594,5	6.305,1	86.899,6	7.214,5	94.114,1	50,1			
	- Hutan Primer	12.452,8	15.858,0	9.755,9	4.667,5	42.734,1	2.547,3	45.281,5	1.487,0	46.768,5	24,9			
	- Hutan Sekunder	4.828,6	7.818,5	11.282,2	9.671,6	33.600,8	3.715,6	37.316,4	4.919,8	42.236,2	22,5			
	- Hutan Tanaman *	126,2	284,9	372,7	3.475,8	4.259,6	42,1	4.301,7	807,7	5.109,4	2,7			
	B. Non Hutan	4.466,9	5.616,8	5.361,7	11.400,8	26.846,1	6.535,9	33.382,0	60.255,8	93.637,8	49,9			
	Total	21.874,5	29.578,2	26.772,4	29.215,6	107.440,6	12.841,0	120.281,6	67.470,3	187.751,9	100,0			

Sumber: - Hasil Penafsiran citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2019, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

- Data digital Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia per Desember 2019, Direktorat Pengkukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ket : Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.

* : Hutan tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah kelas penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan tanaman baik Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT maupun Hutan tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan; terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya.

Luas penutupan lahan ini berdasarkan data digital hasil penafsiran citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2019

TABEL I.2. ANGKA DEFORESTASI INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN PER PROVINSI TAHUN 2018- 2019 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP											
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ACEH												
	A. Hutan Primer	133,4	653,4	90,7	104,5	981,9	-	981,9	340,2	1.322,1			
	- Hutan lahan kering primer	133,4	653,4	90,7	104,5	981,9	-	981,9	340,2	1.322,1			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	459,0	3.056,9	350,7	1.754,2	5.620,8	82,9	5.703,7	4.526,0	10.229,7			
	- Hutan lahan kering sekunder	441,0	3.035,3	350,7	1.751,1	5.578,1	76,8	5.654,9	3.795,2	9.450,1			
	- Hutan rawa sekunder	18,0	-	-	3,1	21,1	6,1	27,2	727,5	754,6			
	- Hutan mangrove sekunder	-	21,7	-	-	21,7	-	21,7	3,3	25,0			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	49,5	49,5	2,4	51,8	4,3	56,2			
	TOTAL	592,4	3.710,3	441,4	1.908,1	6.652,2	85,3	6.737,5	4.870,5	11.608,0			
2	SUMATERA UTARA												
	A. Hutan Primer	5,8	44,5	-	-	50,3	-	50,3	0,0	50,3			
	- Hutan lahan kering primer	5,8	44,5	-	-	50,3	-	50,3	0,0	50,3			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	65,3	740,9	1.156,8	685,1	2.648,1	53,4	2.701,5	2.169,5	4.871,0			
	- Hutan lahan kering sekunder	59,9	671,5	1.147,9	603,3	2.482,5	53,4	2.535,9	1.665,6	4.201,5			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	8,9	80,1	89,0	-	89,0	494,5	583,6			
	- Hutan mangrove sekunder	5,4	69,4	-	1,8	76,5	-	76,5	9,4	85,9			
	C. Hutan Tanaman*	-	7,1	10,4	6.814,6	6.832,1	-	6.832,1	649,0	7.481,1			
	TOTAL	71,1	792,5	1.167,2	7.499,7	9.530,5	53,4	9.583,9	2.818,5	12.402,4			
3	RIAU												
	A. Hutan Primer	76,6	82,2	69,0	-	227,8	0,8	228,6	-	228,6			
	- Hutan lahan kering primer	76,6	82,2	4,9	-	163,7	0,8	164,5	-	164,5			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	64,1	-	64,1	-	64,1	-	64,1			
	B. Hutan Sekunder	741,3	751,6	5.823,3	4.140,7	11.457,0	1.206,6	12.663,6	2.546,5	15.210,1			
	- Hutan lahan kering sekunder	455,9	741,6	2.893,5	117,9	4.208,9	289,8	4.498,6	322,8	4.821,4			
	- Hutan rawa sekunder	41,1	10,1	188,2	3.975,2	4.214,5	388,4	4.602,9	1.303,2	5.906,1			
	- Hutan mangrove sekunder	244,3	-	2.741,6	47,7	3.033,6	528,5	3.562,1	920,5	4.482,5			

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP											
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	C. Hutan Tanaman*	451,3	12,9	2.669,0	120.603,8	123.737,0	369,1	124.106,1	2.466,4	126.572,4			
	TOTAL	1.269,2	846,7	8.561,3	124.744,6	135.421,7	1.576,5	136.998,3	5.012,9	142.011,1			
4	SUMATERA BARAT												
	A. Hutan Primer	535,5	281,4	57,7	0,0	874,5	28,1	902,6	101,3	1.003,9			
	- Hutan lahan kering primer	535,5	281,4	57,7	-	874,5	28,1	902,6	83,0	985,6			
	- Hutan rawa primer	-	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	18,3	18,3			
	B. Hutan Sekunder	1.206,7	1.399,4	1.049,2	2.010,0	5.665,3	711,7	6.377,0	1.569,0	7.946,0			
	- Hutan lahan kering sekunder	1.206,7	1.396,0	1.049,2	1.077,7	4.729,5	695,4	5.424,9	1.462,9	6.887,8			
	- Hutan rawa sekunder	-	3,4	-	932,3	935,7	16,3	952,1	69,5	1.021,6			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	36,6	36,6			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	60,4	45,3	105,7	240,7	346,4	28,5	374,9			
	TOTAL	1.742,1	1.680,8	1.167,4	2.055,3	6.645,5	980,4	7.626,0	1.698,9	9.324,8			
5	JAMBI												
	A. Hutan Primer	2.165,0	91,7	298,2	467,1	3.022,0	-	3.022,0	296,9	3.318,9			
	- Hutan lahan kering primer	2.165,0	91,7	242,3	467,1	2.966,1	-	2.966,1	276,9	3.243,1			
	- Hutan rawa primer	-	-	55,9	-	55,9	-	55,9	-	55,9			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	19,9	19,9			
	B. Hutan Sekunder	623,2	86,1	1.464,3	1.201,0	3.374,6	3,9	3.378,5	756,6	4.135,2			
	- Hutan lahan kering sekunder	619,9	84,2	1.282,8	1.112,1	3.099,1	3,9	3.103,0	531,9	3.634,9			
	- Hutan rawa sekunder	-	1,8	181,5	88,9	272,2	-	272,2	11,6	283,8			
	- Hutan mangrove sekunder	3,3	-	-	-	3,3	-	3,3	213,2	216,5			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	243,8	19.464,2	19.708,0	1,1	19.709,1	218,8	19.927,9			
	TOTAL	2.788,2	177,7	2.006,3	21.132,3	26.104,6	5,0	26.109,6	1.272,3	27.382,0			
6	SUMATERA SELATAN												
	A. Hutan Primer	4,3	131,1	24,4	-	159,8	-	159,8	4,8	164,5			
	- Hutan lahan kering primer	4,3	131,1	24,4	-	159,8	-	159,8	4,8	164,5			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	18,5	3.025,3	449,0	86,4	3.579,1	1,0	3.580,1	2.131,1	5.711,2			
	- Hutan lahan kering sekunder	18,4	268,2	449,0	31,0	766,6	-	766,6	255,9	1.022,5			
	- Hutan rawa sekunder	-	509,1	-	47,4	556,5	-	556,5	348,4	904,9			

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP											
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	- Hutan mangrove sekunder	0,0	2.248,0	-	8,0	2.256,0	1,0	2.257,0	1.526,8	3.783,7			
	C. Hutan Tanaman*	5,0	11,6	428,1	53.673,0	54.117,8	-	54.117,8	661,7	54.779,4			
	TOTAL	27,8	3.168,0	901,5	53.759,4	57.856,6	1,0	57.857,6	2.797,5	60.655,1			
7	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG												
	A. Hutan Primer	7,0	14,8	-	40,1	61,9	-	61,9	108,7	170,6			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	81,4	81,4			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	2,2	2,2	-	2,2	-	2,2			
	- Hutan mangrove primer	7,0	14,8	-	37,8	59,6	-	59,6	27,3	87,0			
	B. Hutan Sekunder	-	197,2	-	1.315,2	1.512,4	-	1.512,4	471,5	1.983,9			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	169,7	-	816,1	985,8	-	985,8	186,0	1.171,8			
	- Hutan rawa sekunder	-	7,9	-	461,8	469,7	-	469,7	26,7	496,3			
	- Hutan mangrove sekunder	-	19,6	-	37,3	56,9	-	56,9	258,8	315,7			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	7,0	212,0	-	1.355,3	1.574,3	-	1.574,3	580,2	2.154,4			
8	BENGKULU												
	A. Hutan Primer	176,2	109,2	119,3	-	404,7	-	404,7	0,7	405,4			
	- Hutan lahan kering primer	176,2	109,2	119,3	-	404,7	-	404,7	0,7	405,4			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	259,8	412,1	610,2	272,6	1.554,7	-	1.554,7	190,0	1.744,6			
	- Hutan lahan kering sekunder	259,8	412,1	610,2	272,6	1.554,7	-	1.554,7	190,0	1.744,6			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	10,6	10,6			
	TOTAL	436,0	521,3	729,5	272,6	1.959,4	-	1.959,4	201,2	2.160,6			
9	LAMPUNG												
	A. Hutan Primer	21,4	58,0	0,5	-	79,9	-	79,9	-	79,9			
	- Hutan lahan kering primer	21,4	58,0	0,5	-	79,9	-	79,9	-	79,9			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	41,4	47,8	8,9	-	98,0	-	98,0	5,4	103,4			
	- Hutan lahan kering sekunder	41,4	47,8	8,9	-	98,0	-	98,0	4,3	102,3			

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					Jumlah						
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK	Jumlah	HPK	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	-	-	
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	4,3	4,3	-	4,3	437,8	442,1	-	-	
	TOTAL	62,8	105,8	9,4	4,3	182,3	-	182,3	443,2	625,4	-	-	
10	KEPULAUAN RIAU												
	A. Hutan Primer	-	-	0,7	2,7	3,5	-	3,5	-	3,5	-	-	
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan mangrove primer	-	-	0,7	2,7	3,5	-	3,5	-	3,5	-	-	
	B. Hutan Sekunder	0,1	76,3	103,4	125,0	304,9	48,4	353,2	205,3	558,6	-	-	
	- Hutan lahan kering sekunder	-	44,5	93,9	28,4	166,8	26,9	193,8	156,3	350,1	-	-	
	- Hutan rawa sekunder	-	-	0,2	76,7	76,9	19,2	96,1	21,2	117,3	-	-	
	- Hutan mangrove sekunder	0,1	31,8	9,3	19,9	61,1	2,3	63,4	27,8	91,2	-	-	
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	0,1	76,3	104,2	127,7	308,3	48,4	356,7	205,3	562,0	-	-	
11	BANTEN												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B. Hutan Sekunder	3,5	-	-	-	3,5	-	3,5	-	3,5	-	-	
	- Hutan lahan kering sekunder	1,3	-	-	-	1,3	-	1,3	-	1,3	-	-	
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan mangrove sekunder	2,3	-	-	-	2,3	-	2,3	-	2,3	-	-	
	C. Hutan Tanaman*	-	10,0	23,2	30,6	63,8	-	63,8	16,1	79,9	-	-	
	TOTAL	3,5	10,0	23,2	30,6	67,3	-	67,3	16,1	83,4	-	-	
12	DKI JAKARTA												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B. Hutan Sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah					
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	JAWA BARAT												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	-	6,3	6,8	12,1	25,2	-	25,2	13,1	38,3			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	6,3	6,8	12,1	25,2	-	25,2	10,1	35,3			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0			
	C. Hutan Tanaman*	270,2	54,0	2.087,5	1.345,6	3.757,3	-	3.757,3	1.181,8	4.939,1			
	TOTAL	270,2	60,2	2.094,3	1.357,7	3.782,4	-	3.782,4	1.194,9	4.977,4			
14	JAWA TENGAH												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	-	10,4	6,6	4,5	21,5	-	21,5	4,2	25,7			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	10,4	6,6	-	17,0	-	17,0	3,9	20,9			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	4,5	4,5	-	4,5	0,3	4,8			
	C. Hutan Tanaman*	-	135,8	301,5	1.400,8	1.838,1	-	1.838,1	40,2	1.878,3			
	TOTAL	-	146,1	308,1	1.405,3	1.859,6	-	1.859,6	44,5	1.904,0			
15	D.I. YOGYAKARTA												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					Jumlah						
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C. Hutan Tanaman*	33,9	1,3	-	106,2	141,4	-	141,4	185,0	326,4			
	TOTAL	33,9	1,3	-	106,2	141,4	-	141,4	185,0	326,4			
16	JAWA TIMUR												
	A. Hutan Primer	84,4	7,2	-	9,8	101,4	-	101,4	9,1	110,5			
	- Hutan lahan kering primer	84,4	0,3	-	3,8	88,5	-	88,5	-	88,5			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	6,9	-	6,0	12,9	-	12,9	9,1	22,0			
	B. Hutan Sekunder	148,1	1.048,7	-	394,9	1.591,7	-	1.591,7	259,0	1.850,7			
	- Hutan lahan kering sekunder	148,1	1.047,2	-	394,4	1.589,7	-	1.589,7	257,9	1.847,6			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	1,5	-	0,5	2,0	-	2,0	1,1	3,1			
	C. Hutan Tanaman*	13,6	695,4	-	2.664,3	3.373,3	-	3.373,3	470,2	3.843,5			
	TOTAL	246,1	1.751,4	-	3.068,9	5.066,4	-	5.066,4	738,3	5.804,7			
17	KALIMANTAN BARAT												
	A. Hutan Primer	32,6	148,7	74,5	35,4	291,2	-	291,2	5,8	296,9			
	- Hutan lahan kering primer	32,6	148,7	74,5	35,4	291,2	-	291,2	5,8	296,9			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	53,2	417,4	1.418,5	1.901,5	3.790,6	208,0	3.998,6	8.894,8	12.893,5			
	- Hutan lahan kering sekunder	49,7	364,0	1.348,8	968,0	2.730,4	41,6	2.772,0	3.750,9	6.522,8			
	- Hutan rawa sekunder	3,5	29,2	52,8	930,0	1.015,5	166,5	1.182,0	5.062,1	6.244,1			
	- Hutan mangrove sekunder	-	24,2	16,9	3,5	44,7	-	44,7	81,9	126,5			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	51,0	10.768,3	10.819,3	-	10.819,3	85,3	10.904,6			
	TOTAL	85,8	566,1	1.544,0	12.705,2	14.901,1	208,0	15.109,1	8.985,9	24.095,0			
18	KALIMANTAN SELATAN												
	A. Hutan Primer	-	0,1	3,7	-	3,8	-	3,8	1,4	5,2			
	- Hutan lahan kering primer	-	0,1	3,7	-	3,8	-	3,8	-	3,8			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	124,5	259,8	667,9	3.170,7	4.222,9	4,5	4.227,3	1.313,2	5.540,5			
	- Hutan lahan kering sekunder	4,1	259,8	667,9	3.159,0	4.090,8	3,2	4.094,1	1.143,1	5.237,1			

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP											
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	- Hutan rawa sekunder	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0			
	- Hutan mangrove sekunder	120,4	-	-	11,7	132,0	1,2	133,3	170,1	303,4			
	C. Hutan Tanaman*	203,7	-	2,2	1.850,9	2.056,8	22,0	2.078,7	474,9	2.553,6			
	TOTAL	328,2	259,9	673,7	5.021,6	6.283,4	26,4	6.309,9	1.789,4	8.099,3			
19	KALIMANTAN TENGAH												
	A. Hutan Primer	188,1	4,4	940,3	5,1	1.137,9	-	1.137,9	-	1.137,9			
	- Hutan lahan kering primer	188,1	4,4	940,3	-	1.132,8	-	1.132,8	-	1.132,8			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	5,1	5,1	-	5,1	-	5,1			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	27,9	32,4	1.508,7	3.876,5	5.445,6	1.025,7	6.471,2	8.218,4	14.689,7			
	- Hutan lahan kering sekunder	19,1	5,8	1.508,6	3.352,3	4.885,9	712,4	5.598,3	4.726,0	10.324,3			
	- Hutan rawa sekunder	8,1	26,6	0,1	524,0	558,8	310,3	869,1	3.484,4	4.353,5			
	- Hutan mangrove sekunder	0,7	-	-	0,2	0,9	3,0	3,9	8,0	11,9			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	3,6	10.361,5	10.365,2	-	10.365,2	47,4	10.412,6			
	TOTAL	216,0	36,8	2.452,7	14.243,2	16.948,7	1.025,7	17.974,3	8.265,8	26.240,2			
20	KALIMANTAN TIMUR												
	A. Hutan Primer	-	-	98,2	0,1	98,3	-	98,3	27,2	125,5			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	98,2	0,1	98,3	-	98,3	8,6	106,9			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	18,6	18,6			
	B. Hutan Sekunder	158,0	61,3	1.292,0	6.202,7	7.714,0	336,0	8.050,0	19.834,5	27.884,5			
	- Hutan lahan kering sekunder	4,2	61,3	1.292,0	5.952,3	7.309,9	315,6	7.625,4	19.618,2	27.243,7			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	32,6	32,6	20,4	53,0	106,8	159,8			
	- Hutan mangrove sekunder	153,7	-	-	217,8	371,6	-	371,6	109,4	481,0			
	C. Hutan Tanaman*	5,2	-	1.407,5	24.939,4	26.352,1	0,5	26.352,6	433,8	26.786,5			
	TOTAL	163,1	61,3	2.797,7	31.142,2	34.164,4	336,5	34.500,9	20.295,5	54.796,5			
21	KALIMANTAN UTARA												
	A. Hutan Primer	1,2	4,2	178,6	93,8	277,7	3,0	280,7	205,2	485,9			
	- Hutan lahan kering primer	1,2	4,2	178,6	92,9	276,8	3,0	279,8	5,3	285,1			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	9,2	9,2			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	0,9	0,9	-	0,9	190,6	191,5			
	B. Hutan Sekunder	0,4	19,8	729,0	2.041,3	2.790,6	16,5	2.807,1	5.965,7	8.772,8			
	- Hutan lahan kering sekunder	0,4	19,8	729,0	1.501,8	2.251,0	14,2	2.265,2	2.215,2	4.480,4			

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					Jumlah		HPK	Jumlah			
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	157,0	157,0	2,3	159,3	3.211,7	3.371,0			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	382,6	382,6	-	382,6	538,8	921,4			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	59,2	5.383,6	5.442,9	-	5.442,9	86,5	5.529,4			
	TOTAL	1,6	24,0	966,9	7.518,7	8.511,2	19,5	8.530,7	6.257,4	14.788,1			
22	SULAWESI UTARA												
	A. Hutan Primer	32,9	4,5	3,7	1,0	42,1	-	42,1	23,8	65,9			
	- Hutan lahan kering primer	32,9	4,4	3,7	1,0	42,1	-	42,1	23,8	65,8			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	0,1	-	-	0,1	-	0,1	0,0	0,1			
	B. Hutan Sekunder	42,3	53,8	56,8	14,8	167,7	3,2	170,9	24,0	194,9			
	- Hutan lahan kering sekunder	42,3	49,8	56,8	14,8	163,6	3,2	166,8	19,7	186,6			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	4,1	-	-	4,1	-	4,1	4,3	8,4			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	75,2	58,3	60,5	15,8	209,8	3,2	213,0	47,8	260,8			
23	GORONTALO												
	A. Hutan Primer	2,7	-	1,1	-	3,8	-	3,8	6,0	9,8			
	- Hutan lahan kering primer	2,7	-	1,1	-	3,8	-	3,8	6,0	9,8			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	22,7	51,9	569,3	21,6	665,5	8,7	674,2	118,8	793,0			
	- Hutan lahan kering sekunder	22,7	37,6	569,3	21,6	651,3	8,7	660,0	104,2	764,2			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	14,2	-	-	14,2	-	14,2	14,6	28,8			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	(108,3)	(281,0)	(389,2)	(27,5)	(416,7)	(7,9)	(424,6)			
	TOTAL	25,5	51,9	462,1	(259,4)	280,1	(18,8)	261,3	116,8	378,1			
24	SULAWESI TENGAH												
	A. Hutan Primer	62,6	227,5	238,1	33,6	561,7	40,8	602,5	385,7	988,3			
	- Hutan lahan kering primer	62,6	227,5	238,1	33,6	561,7	40,8	602,5	380,2	982,8			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5			
	B. Hutan Sekunder	94,5	226,0	799,2	317,2	1.436,8	253,1	1.689,9	1.113,7	2.803,6			
	- Hutan lahan kering sekunder	94,5	214,9	799,2	317,2	1.425,7	253,1	1.678,8	1.080,2	2.759,0			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	8,4	8,4			

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP											
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	- Hutan mangrove sekunder	-	11,1	-	-	11,1	-	-	25,1	36,2			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	157,0	453,5	1.037,3	350,8	1.998,6	293,9	2.292,4	1.499,4	3.791,8			
25	SULAWESI TENGGARA												
	A. Hutan Primer	56,7	944,3	929,5	830,0	2.760,5	22,8	2.783,3	200,4	2.983,7			
	- Hutan lahan kering primer	56,7	944,3	929,5	830,0	2.760,5	22,8	2.783,3	144,4	2.927,7			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	0,0	-	-	0,0	-	0,0	55,9	56,0			
	B. Hutan Sekunder	134,6	165,6	296,4	951,9	1.548,4	186,7	1.735,1	1.812,8	3.547,9			
	- Hutan lahan kering sekunder	134,6	107,2	296,4	913,0	1.451,1	185,3	1.636,4	1.664,0	3.300,4			
	- Hutan rawa sekunder	-	24,0	-	37,9	61,9	-	61,9	14,3	76,2			
	- Hutan mangrove sekunder	-	34,4	-	0,9	35,4	1,4	36,8	134,4	171,2			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	25,6	25,6	-	25,6	-	25,6			
	TOTAL	191,3	1.110,0	1.225,9	1.807,5	4.334,6	209,5	4.544,1	2.013,1	6.557,2			
26	SULAWESI BARAT												
	A. Hutan Primer	9,4	0,1	-	-	9,5	-	9,5	-	9,5			
	- Hutan lahan kering primer	9,4	0,1	-	-	9,5	-	9,5	-	9,5			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	3,9	(517,1)	180,9	74,2	(258,1)	19,4	(238,8)	0,4	(238,4)			
	- Hutan lahan kering sekunder	3,9	(518,2)	142,3	74,2	(297,7)	16,3	(281,4)	(8,7)	(290,1)			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	1,1	38,6	-	39,6	3,1	42,7	9,1	51,7			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	13,3	(517,0)	180,9	74,2	(248,6)	19,4	(229,2)	0,4	(228,8)			
27	SULAWESI SELATAN												
	A. Hutan Primer	-	260,2	15,5	-	275,7	-	275,7	9,7	285,4			
	- Hutan lahan kering primer	-	260,2	15,5	-	275,7	-	275,7	6,3	282,0			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	10,1	631,7	394,7	71,6	1.108,1	-	1.108,1	588,4	1.696,5			
	- Hutan lahan kering sekunder	6,4	623,1	394,7	71,6	1.095,8	-	1.095,8	510,0	1.605,7			

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HUTAN LINDUNG						
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK	Jumlah	HPK	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	- Hutan rawa sekunder	3,7	-	-	-	3,7	-	3,7	-	3,7			
	- Hutan mangrove sekunder	-	8,6	-	-	8,6	-	8,6	78,4	87,1			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	0,6	3,3	3,9	-	3,9	29,9	33,8			
	TOTAL	10,1	891,9	410,8	74,9	1.387,7	-	1.387,7	628,0	2.015,7			
28	BALI												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	(0,7)	86,2	-	-	85,5	-	85,5	1,7	87,2			
	- Hutan lahan kering sekunder	(0,7)	86,2	-	-	85,5	-	85,5	1,7	87,2			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C. Hutan Tanaman*	3,9	-	-	-	3,9	-	3,9	-	3,9			
	TOTAL	3,2	86,2	-	-	89,3	-	89,3	1,7	91,0			
29	NUSA TENGGARA BARAT												
	A. Hutan Primer	56,3	337,4	314,7	99,6	807,9	-	807,9	10,0	817,9			
	- Hutan lahan kering primer	56,3	337,4	314,7	99,6	807,9	-	807,9	10,0	817,9			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	1.335,3	2.949,0	3.771,1	3.364,8	11.420,1	-	11.420,1	3.489,0	14.909,1			
	- Hutan lahan kering sekunder	1.335,3	2.949,0	3.771,1	3.364,8	11.420,1	-	11.420,1	3.489,0	14.909,1			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	0,0	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0			
	C. Hutan Tanaman*	-	123,6	6,3	24,5	154,4	-	154,4	90,5	244,9			
	TOTAL	1.391,6	3.409,9	4.092,1	3.488,9	12.382,4	-	12.382,4	3.589,4	15.971,9			
30	NUSA TENGGARA TIMUR												
	A. Hutan Primer	45,3	345,3	52,6	118,1	561,3	-	561,3	618,6	1.180,0			
	- Hutan lahan kering primer	45,3	345,3	52,6	118,1	561,3	-	561,3	562,1	1.123,4			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	213,1	255,3	51,5	180,6	700,5	17,3	717,8	1.610,7	2.328,5			
	- Hutan lahan kering sekunder	213,1	252,4	51,5	180,6	697,7	17,3	715,0	1.465,7	2.180,7			

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HUTAN LINDUNG						
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK	Jumlah	HLK	HLH	HPH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	2,8	-	-	2,8	-	2,8	145,0	147,8			
C. Hutan Tanaman*		-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,3			
	TOTAL	258,4	600,6	104,1	298,7	1.261,9	17,3	1.279,2	2.233,6	3.512,8			
31	MALUKU UTARA												
	A. Hutan Primer	-	9,5	2,2	-	11,7	3,3	15,0	-	15,0			
	- Hutan lahan kering primer	-	6,2	2,2	-	8,4	2,3	10,7	-	10,7			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	3,4	-	-	3,4	1,0	4,4	-	4,4			
	B. Hutan Sekunder	-	57,1	342,7	873,2	1.273,1	489,5	1.762,7	546,2	2.308,8			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	57,1	342,7	873,2	1.273,1	489,5	1.762,7	546,2	2.308,8			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	3,0	3,0	-	3,0	-	3,0			
	TOTAL	-	66,7	344,9	876,2	1.287,8	492,8	1.780,7	546,2	2.326,8			
32	MALUKU												
	A. Hutan Primer	6,5	0,6	7,2	-	14,3	9,8	24,1	-	24,1			
	- Hutan lahan kering primer	6,5	-	7,2	-	13,7	9,8	23,5	-	23,5			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	0,6	-	-	0,6	0,0	0,6	-	0,6			
	B. Hutan Sekunder	56,4	410,0	236,9	229,9	933,1	257,5	1.190,6	57,2	1.247,8			
	- Hutan lahan kering sekunder	51,0	408,5	236,9	229,7	926,0	211,1	1.137,1	51,9	1.189,0			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	21,1	21,1	-	21,1			
	- Hutan mangrove sekunder	5,4	1,5	-	0,2	7,1	25,3	32,4	5,3	37,7			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	62,9	410,6	244,0	229,9	947,4	267,2	1.214,7	57,2	1.271,8			
33	PAPUA												
	A. Hutan Primer	70,2	548,4	1.509,4	809,9	2.937,9	267,4	3.205,3	3.197,8	6.403,1			
	- Hutan lahan kering primer	17,3	409,0	1.495,6	782,3	2.704,3	214,7	2.919,0	3.150,7	6.069,7			
	- Hutan rawa primer	8,7	79,1	12,0	27,6	127,5	47,4	174,8	27,7	202,5			
	- Hutan mangrove primer	44,1	60,2	1,8	-	106,2	5,3	111,5	19,4	130,9			
	B. Hutan Sekunder	335,4	293,0	2.883,0	277,7	3.789,1	505,9	4.295,0	1.542,9	5.838,0			
	- Hutan lahan kering sekunder	42,2	106,3	1.820,2	151,4	2.120,2	394,3	2.514,4	1.264,0	3.778,4			
	- Hutan rawa sekunder	268,2	176,0	1.062,8	126,3	1.633,2	111,7	1.744,9	266,0	2.010,9			

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	- Hutan mangrove sekunder	25,0	10,7	-	-	35,7	-	35,7	12,9	48,7			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-1.032,5	-	-1.032,5	0,4	-1.032,2	3,4	-1.028,8			
	TOTAL	405,6	841,4	3.359,8	1.087,6	5.694,5	773,6	6.468,1	4.744,1	11.212,2			
34	PAPUA BARAT												
	A. Hutan Primer	3,7	18,5	282,2	548,8	853,2	85,5	938,6	1.247,3	2.186,0			
	- Hutan lahan kering primer	3,7	18,5	279,2	509,3	810,6	83,2	893,8	907,5	1.801,3			
	- Hutan rawa primer	-	-	3,1	39,5	42,6	2,2	44,8	339,8	384,7			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	73,9	183,8	67,2	366,7	691,7	225,0	916,7	2.193,4	3.110,1			
	- Hutan lahan kering sekunder	73,9	183,8	52,1	95,6	405,4	220,9	626,3	2.102,8	2.729,1			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	15,2	170,6	185,8	0,0	185,8	88,8	274,6			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	100,5	100,5	4,1	104,6	1,9	106,5			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	77,5	202,3	349,5	915,5	1.544,8	310,5	1.855,3	3.440,8	5.296,1			
	INDONESIA												
	A. Hutan Primer	3.778	4.327	5.312	3.200	16.616	461	17.078	6.801	23.878			
	- Hutan lahan kering primer	3.718	4.162	5.175	3.078	16.132	406	16.537	5.998	22.535			
	- Hutan rawa primer	9	79	71	75	233	50	283	377	660			
	- Hutan mangrove primer	51	86	67	47	251	6	257	426	684			
	B. Hutan Sekunder	6.252	16.496	26.295	35.938	84.982	5.665	90.647	72.173	162.820			
	- Hutan lahan kering sekunder	5.349	13.203	21.979	27.458	67.989	4.033	72.022	52.587	124.608			
	- Hutan rawa sekunder	343	788	1.510	7.644	10.284	1.062	11.346	15.245	26.592			
	- Hutan mangrove sekunder	561	2.505	2.806	837	6.709	570	7.279	4.341	11.620			
	C. Hutan Tanaman*	987	1.052	6.214	259.282	267.534	609	268.142	7.618	275.761			
	TOTAL	11.017	21.875	37.821	298.420	369.132	6.735	375.867	86.592	462.458			

Ket.

* : Hutan Tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan Tanaman

baik Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT maupun Hutan Tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan; terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dgn lingkungan sekitarnya.

Deforestasi pada Hutan Tanaman di dalam kawasan hutan KSA-KPA dan/atau HL, tidak diklasifikasikan sebagai Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT

Sumber: - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2018 dan 2019, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Data digital Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia per Desember 2019, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TABEL I.3. POTENSI TEGAKAN HUTAN DI INDONESIA

No	Provinsi	Penutupan Lahan	Jumlah Plot	Potensi Tegakan Pohon (m ³ /ha)	
				Diameter 20 cm ke atas	Diameter 50 cm ke atas
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	Hutan lahan kering primer	14	182,94	110,46
		Hutan lahan kering sekunder	16	226,80	138,89
2	Bali	Hutan lahan kering primer	11	154,43	96,71
		Hutan lahan kering sekunder	4	55,72	30,55
3	Banten	Hutan lahan kering sekunder	3	131,90	100,45
		Hutan tanaman	5	73,90	33,07
4	Bengkulu	Hutan lahan kering primer	17	194,77	122,13
		Hutan lahan kering sekunder	13	129,85	59,49
5	Gorontalo	Hutan lahan kering primer	8	203,69	139,00
		Hutan lahan kering sekunder	15	191,12	121,02
6	Jambi	Hutan lahan kering primer	19	214,13	135,30
		Hutan lahan kering sekunder	10	113,58	55,86
7	Jawa Barat	Hutan lahan kering sekunder	17	85,81	52,15
		Hutan tanaman	10	112,68	57,69
8	Jawa Tengah	Hutan lahan kering primer	2	57,94	32,10
		Hutan lahan kering sekunder	2	47,77	26,04
		Hutan tanaman	2	82,28	41,55
9	Jawa Timur	Hutan lahan kering sekunder	43	110,09	85,45
		Hutan tanaman	1	143,78	110,69
10	Kalimantan Barat	Hutan lahan kering primer	58	191,20	117,08
		Hutan lahan kering sekunder	78	170,53	107,22
		Hutan rawa sekunder	31	115,83	43,40
11	Kalimantan Selatan	Hutan lahan kering primer	4	147,19	84,39
		Hutan lahan kering sekunder	34	142,72	79,55
12	Kalimantan Tengah	Hutan lahan kering primer	1	199,21	74,75
		Hutan lahan kering sekunder	13	166,85	97,11
		Hutan rawa sekunder	14	81,77	12,74
13	Kalimantan Timur	Hutan lahan kering primer	9	162,49	103,75
		Hutan lahan kering sekunder	89	114,22	59,72
14	Kalimantan Utara	Hutan lahan kering primer	10	173,65	116,62
		Hutan lahan kering sekunder	25	123,56	72,51
15	Kepulauan Bangka Belitung	Hutan lahan kering sekunder	9	60,13	22,80
		Hutan rawa sekunder	4	41,48	11,97
16	Kepulauan Riau	Hutan lahan kering sekunder	30	105,54	38,58
17	Lampung	Hutan lahan kering primer	25	244,75	172,83
		Hutan lahan kering sekunder	14	120,01	77,92
		Hutan rawa sekunder	3	108,90	50,60
18	Maluku	Hutan lahan kering primer	13	149,49	83,72
		Hutan lahan kering sekunder	51	138,30	84,15
		Hutan rawa sekunder	1	120,42	74,16
19	Maluku Utara	Hutan lahan kering primer	3	118,05	67,53
		Hutan lahan kering sekunder	20	138,07	84,79

No	Provinsi	Penutupan Lahan	Jumlah Plot	Potensi Tegakan Pohon (m ³ /ha)	
				Diameter 20 cm ke atas	Diameter 50 cm ke atas
1	2	3	4	5	6
20	Nusa Tenggara Barat	Hutan lahan kering primer	56	133,12	80,50
		Hutan lahan kering sekunder	31	73,03	34,91
21	Nusa Tenggara Timur	Hutan lahan kering primer	12	121,55	77,18
		Hutan lahan kering sekunder	39	73,54	39,66
22	Papua	Hutan lahan kering primer	38	136,59	77,76
		Hutan lahan kering sekunder	47	116,86	62,95
		Hutan rawa primer	6	91,44	52,09
		Hutan rawa sekunder	5	57,25	28,12
23	Papua Barat	Hutan lahan kering primer	15	212,16	120,89
		Hutan lahan kering sekunder	32	149,48	87,52
		Hutan rawa primer	1	102,34	51,58
24	Riau	Hutan lahan kering primer	10	136,44	55,03
		Hutan lahan kering sekunder	14	177,43	88,26
		Hutan rawa primer	2	137,16	29,17
		Hutan rawa sekunder	21	134,60	50,57
25	Sulawesi Barat	Hutan lahan kering sekunder	7	191,12	118,79
26	Sulawesi Selatan	Hutan lahan kering primer	9	86,44	28,28
		Hutan lahan kering sekunder	25	89,67	31,17
27	Sulawesi Tengah	Hutan lahan kering primer	62	155,25	77,12
		Hutan lahan kering sekunder	54	112,62	53,95
28	Sulawesi Tenggara	Hutan lahan kering primer	2	76,68	17,53
		Hutan lahan kering sekunder	8	36,35	10,12
29	Sulawesi Utara	Hutan lahan kering primer	8	248,09	175,47
		Hutan lahan kering sekunder	12	204,08	135,97
30	Sumatera Barat	Hutan lahan kering primer	5	149,44	81,98
		Hutan lahan kering sekunder	17	154,97	80,91
		Hutan rawa sekunder	1	76,92	5,72
31	Sumatera Selatan	Hutan lahan kering primer	23	164,06	97,05
		Hutan lahan kering sekunder	20	120,14	65,79
		Hutan rawa sekunder	3	40,73	17,05
32	Sumatera Utara	Hutan lahan kering primer	25	210,59	124,01
		Hutan lahan kering sekunder	32	180,96	101,37

Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

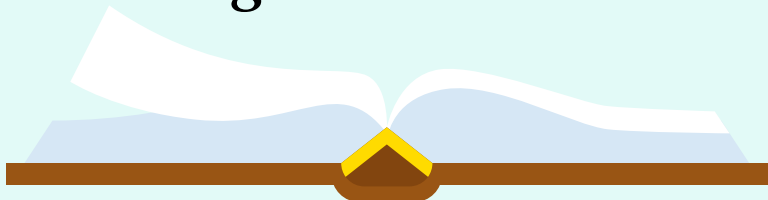
Keterangan:

1. Data yang digunakan adalah data plot PSP kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional Tahun 2013-2018 (update)
2. Nilai potensi tegakan adalah nilai potensi untuk seluruh jenis pohon



PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

*Direktorat Rencana,
Penggunaan dan Pembentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan*



TABEL II.1. PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN HUTAN S.D. DESEMBER 2019

1. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)

No.	Jenis Rencana	Pengesahan
1	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Revisi I)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/ROKUM-1/7/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030, telah diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 19 Agustus 2019.

**2. Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan
(Sesuai mandat Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan)**

No.	Jenis Rencana	Progres			Keterangan
		Belum Menyusun	Draft	Pengesahan	
1	Rencana Makro Rehabilitasi Hutan dan Lahan		√		
2	Rencana Makro Pemantapan Hutan			√	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2013, tanggal 25 Juni 2013
3	Rencana Makro Pemberdayaan Masyarakat	√			
4	Rencana Makro Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan		√		
5	Rencana Makro Pemanfaatan Hutan		√		
6	Rencana Makro Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Kehutanan	√			
7	Rencana Makro Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	√			
8	Rencana Makro Penyuluhan Kehutanan	√			
9	Rencana Makro Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan	√			
10	Rencana Makro Pengendalian dan Pengawasan Pengurusan Hutan	√			

No.	Jenis Rencana	Progres			Keterangan
		Belum Menyusun	Draft	Pengesahan	
11	Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Regional Sumatera		✓		
12	Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Regional Jawa		✓		Masih bergabung dengan regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
13	Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Regional Kalimantan		✓		
14	Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Regional Sulawesi dan Maluku		✓		Masih bergabung dengan regional Sulawesi, Maluku, Papua
15	Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Regional Bali dan Nusa Tenggara		✓		Masih bergabung dengan regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
16	Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Regional Papua		✓		Masih bergabung dengan regional Sulawesi, Maluku, Papua
Jumlah		6	9	1	

3. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)

No.	Provinsi	Progres			Keterangan
		Belum Menyusun	Draft	Pengesahan	
1	Aceh		✓		
2	Sumatera Utara		✓		
3	Sumatera Barat			✓	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012
4	Jambi		✓		
5	Riau		✓		
6	Kepulauan Riau	✓*			* Tahap pengumpulan data dan informasi
7	Bengkulu			✓	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2013, tanggal 27 Desember 2013

No.	Provinsi	Progres				Keterangan
		Belum Menyusun	Draft	Pengesahan	Proses Revisi	
8	Kepulauan Bangka Belitung			✓		Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2014, tanggal 23 Juli 2014
9	Sumatera Selatan		✓			
10	Lampung		✓			
11	Banten		✓			
12	DKI Jakarta		✓			
13	Jawa Barat			✓	✓	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014
14	Jawa Tengah			✓		Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2012, 28 September 2012
15	D.I. Yogyakarta			✓		Keputusan Gubernur DIY No. 10/KEP/2012, tanggal 9 Januari 2012
16	Jawa Timur			✓		Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013, tanggal 10 Juli 2013
17	Bali			✓		Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014
18	Nusa Tenggara Barat			✓		Peraturan Gubernur NTB Nomor 33 Tahun 2013, tanggal 2 November 2013
19	Nusa Tenggara Timur			✓		Peraturan Gubernur NTT Nomor 34 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013
20	Kalimantan Barat			✓		Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2016, tanggal 3 Oktober 2016
21	Kalimantan Selatan			✓		Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 50 Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015
22	Kalimantan Tengah		✓			
23	Kalimantan Timur			✓		Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2012, tanggal 5 Juli 2012
24	Kalimantan Utara		✓			
25	Sulawesi Utara			✓		Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 33 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015

No.	Provinsi	Progres				Keterangan
		Belum Menyusun	Draft	Pengesahan	Proses Revisi	
26	Gorontalo			✓		Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 56 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014
27	Sulawesi Tengah			✓		Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 68 Tahun 2013, tanggal 8 November 2013
28	Sulawesi Selatan			✓		Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 147 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018
29	Sulawesi Barat			✓		Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014
30	Sulawesi Tenggara			✓		Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 47 Tahun 2015, tanggal 9 September 2015
31	Maluku Utara			✓		Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 31.1 Tahun 2016, tanggal 22 November 2016
32	Maluku		✓			
33	Papua		✓			
34	Papua Barat		✓			
Jumlah		1	13	18	2	

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Catatan: Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTk) terhenti dikarenakan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

TABEL II.2. PERKEMBANGAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM PROSES REVIEW RTRWP S.D. DESEMBER 2019

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				PERSETUJUAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KSA/KPA	18.462	3.331	3.568	2.613	2.630	3.028	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS		
		HL	64.654	67.488	18.224	60.590	35.010	7.864			
		HPT	4.517	5.496	5.743	654	960	10.113			
		HP	91.903	55.402	1.137	66.685	41.656	5.456			
		HPK	-	-	2.603	-	-	-			
		JUMLAH	179.536	131.717	31.275	130.542	80.256	26.461			
2	SUMATERA UTARA	KSA/KPA	-	4.850	-	-	-	1.140	Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan mengenai kawasan hutan provinsi Sumatera Utara Nomor SK.579/Menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014, menindaklanjuti keputusan MA no 47P/HUM/2011 tanggal 23 Desember 2013		
		HL	50.783	461.527	10.857	104.444	208.305	8.598			
		HPT	104.210	319.449	2.291	3.467	176.722	2.326			
		HP	141.270	447.156	21.577	28.504	222.009	5.830			
		HPK	-	36.302	704	70.947	35.680	-			
		JUMLAH	296.263	1.269.284	35.429	207.362	642.716	17.894			
3	SUMATERA BARAT	KSA/KPA	4.852	7.560	882	-	1.070	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.304/Menhut-II/2011, tanggal 9-6-2011 dan SK.141/Menhut-II/2012 tanggal 15/03/2011		
		HL	86.339	97.563	3.650	87.456	50.887	3.412			
		HPT	23.606	25.709	6.098	21.541	21.293	6.098			
		HP	97.062	50.204	1.045	33.621	36.230	253			
		HPK	4.330	30.350	1.869	4.595	16.806	143			
		JUMLAH	216.189	211.386	13.544	147.213	126.286	9.906			
4	RIAU	KSA/KPA	4.577	25.469	5.521	2.186	-	5.796	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Riau.		
		HL	16.864	32.256	12.331	17.636	-	5			
		HPT	597.466	546.252	8.875	481.978	173.039	4.846	2. Rekomendasi Ombudsman RI No. 0002/REK/0361.2015/ PBP-41/II/2016 tanggal 16 Februari 2016		
		HP	296.400	327.677	19.491	11.493	84.446	905	3. Menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK.314/Menhut/ Sejten/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 jo SK.393/Menhut/ Sejten/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016		
		HPK	172.400	2.599.042	696	204.250	1.445.889	-	4. Persub S.438/Menhut-PKTL/Ren/PLA.0/4/2016 tanggal 25 April 2016		
		JUMLAH	1.087.707	3.530.696	46.914	717.543	1.703.374	11.552	5. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.220/Menhut/Sejten/PLA.3/4/2016 tanggal 20 April 2016.		
									6. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.		
5	JAMBI	KSA/KPA	-	1.582	-	-	336	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.727/Menhut-II/2012, tanggal 10-12-2012 dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS;		
		HL	-	303	-	271	-	-			
		HPT	63.411	5.010	-	1.323	167	-			
		HP	8.834	100.152	10.908	18.935	13.545	-			
		HPK	-	-	-	-	-	-			
		JUMLAH	72.245	107.047	10.908	20.529	14.048	-			

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				PERSETUJUAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PERUNJUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PERUNJUKAN BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
6	SUMATERA SELATAN	KSA/KPA	607	22.145	6.207	607	21.903	7.624	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.822/Menhut-II/2013 tanggal 19 September 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS; Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 190/Menhk/Sejen/PLA.0/4/2018 tanggal 20 April 2018 sebagai tindaklanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI No. 254/ORI-SRT/II/2018 tanggal 22 Februari 2018; 4. Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.823/Menhk/Sejen/PLA.10/4/2019 tanggal 17 Oktober 2019 sebagai tindaklanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI, persetujuan KH-APL (SM-APL seluas 9.329 ha)		
		HL	55.562	25.653	2.224	8.436	7.071	1.891			
		HPT	23.838	9.432	1.493	24.099	1.912	1.493			
		HP	-	88.932	36.054	6.970	31.106	30.183			
		HPK	2.818	264.388	1.485	4.187	177.541	-			
		JUMLAH	82.825	410.550	47.463	44.299	239.533	41.191			
7	BENGKULU	KSA/KPA	9.573	7.545	-	-	-	-	1. Usulan Gubernur Bengkulu Nomor 522/011/DLHK/2019 tanggal 8 Januari 2019 & surat Nomor 522/758/DLHK/2019 tanggal 17 Desember 2019.		
		HL	-	3.917	-	-	-	-	2. Telah dilakukan pembahasan awal terkait usulan RTRWP oleh Timdu (belum dilakukan field study).		
		HPT	333	25.326	-	-	-	-			
		HP	-	2.953	-	-	-	-			
		HPK	-	2.219	-	-	-	-			
		JUMLAH	9.906	41.960	-	-	-	-			
8	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan		
9	KEP. BANGKA BELITUNG	KSA/KPA	772	420	-	190	-	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.798/Menhut-II/2012, tanggal 27-12-2012		
		HL	-	33.012	1.993	2.529	-	1.993			
		HPT	-	-	-	-	-	-			
		HP	8.589	100.158	1.225	8.159	19.131	1.225			
		HPK	-	-	-	-	-	-			
		JUMLAH	9.361	133.590	3.218	10.878	19.131	3.218			
10	KEP. RIAU	KSA/KPA	3.120	12.943	3	4014	1.571	-	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Kepri dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014; telah diterbitkan Keutusan Menteri LHK No SK.76/Menhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kepri; 2. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 272/Menhk/Sejen/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Prov. Kepri sebagai tindaklanjut Persetujuan Sebagian DPCLS Provinsi Kepri didasarkan atas Surat DPR RI Nomor PW 105706/DPR RI/III/2018 tanggal 21 Maret 2018		
		HL	13.197	36.317	2.085	11.733	5.163	2.108			
		HPT	11.374	114.252	282	25.807	67.243	-			
		HP	163	6.461	-	720	8949	262			
		HPK	30.869	362.981	-	104.688	256.152	-			
		JUMLAH	58.723	532.954	2.370	146.962	339.078	2.370			
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan		
12	JAWA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan		
13	JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan		
14	DI. YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan		
15	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan		
16	BANTEN	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan		
17	BALI	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan		
18	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan		

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				PERSETUJUAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PERUNJUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
19	NUSA TENGGARA TIMUR	KSA/KPA Darat	3.613	7.352	5.328	617			5.328	Terdapat Usulan sesuai Surat Gubernur NTT, Nomor :	
		KSA/KPA Air		1.963							
		HL	-	74.606	5.064		12.492		551		
		HPT	-	23.800	34		4.307		35		
		HP	6.263	59.939	14.092	3.499	10.307		5.897		
		HPK	11.472	45.535	-	8.052	27.057				Update per 31 Des 2015 adalah Review RTRW NTT dalam tahap finalisasi
20	KALIMANTAN BARAT	JUMLAH	21.348	213.195	24.518	12.168	54.163	11.811		Telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK. 357/Menhk/Setjen/PLA.o/5/2016; 11 Mei 2016	
		HL	198.125	220.648	77.186	66.048	-		29.156		Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.
		HPT	235.863	637.048	51.984	149.567	189.460		2.977		SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 dan telah diterbitkan Keputusan
		HP	126.769	1.064.863	87.434	41.681	294.912		20.253		Menteri Kehutanan Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014
		HPK	111.339	211.200	5.768	77.007	69.765		-		mengenai penunjukan kawasan hutan prov.Kalbar
		JUMLAH	714.792	2.560.149	271.408	358.639	554.137		76.008		
21	KALIMANTAN TENGAH	KSA/KPA	148.512	38.856	15.169	48.412	-		13.601		Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.
		HL	180.947	5.426	50.472	33.116	-		9.968		SK.292/Menhut-II/2011, tanggal 31-5-2011 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri
		HPT	636.399	124.183	17.933	86.977	101.157		3.179		Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2014 mengenai
		HP	2.401.681	840.773	40.234	402.043	333.261		2.720		penunjukan kawasan hutan prov. Kalteng
		HPK	533.117	1.913.076	820.907	119.118	734.238		204		
		JUMLAH	3.900.656	2.922.312	944.715	689.666	1.168.656		29.672		
22	KALIMANTAN SELATAN	KSA/KPA	29.092	1.372	6.556	1.240	8.749		6.556		Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
		HL	17.249	52.711	18.247	6.795	563		15.733		SK.435/Menhut-II/2009, tanggal 23 Juli 2009 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri
		HPT	8.170	51.308	1.312	28.168	31		4.355		Kehutanan Nomor SK.432/Menhut-II/2014 tanggal 22 Juli 2014 mengenai penunjukan
		HP	133.764	174.716	14.644	63.391	14.227		13.103		kawasan hutan prov. Kalsel
		HPK	82.018	212	7.092	-	35.933		-		
		JUMLAH	270.293	280.319	47.851	99.594	59.503		39.747		
23	KALIMANTAN TIMUR	KSA/KPA	-	176.708	14.006	-	48.732		-		Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.
		HL	14.796	85.973	21.705	7.677	24.999		11.732		SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan telah diterbitkan Keputusan
		HPT	482.778	582.195	15.760	53.799	108.063		-		Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 mengenai
		HP	127.752	1.689.617	121.359	214.764	287.533		-		penunjukan kawasan hutan prov.Kalim
		HPK	-	25	-	-	25		-		
		JUMLAH	625.326	2.534.518	172.830	276.240	469.352		11.732		
24	SULAWESI UTARA	KSA/KPA	793	12.421		465	182				Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.
		HL	6.457	15.278	1.423	296	521		290		SK.434/Menhut-II/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri
		HPT		16.545	1.166		5.264				Kehutanan Nomor SK.734/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 mengenai
		HP		3.821			904				penunjukan kawasan hutan prov.Sulut
		HPK		526			166				
		JUMLAH	7.250	48.591	2.589	761	7.037		290		

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				PERSETUJUAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
25	SULAWESI TENGAH	KSA/KPA	-	28.133	57	-	-	-	1. Usulan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 650/376/DBMPR tanggal 19 Juli 2019 dan terakhir dengan surat Nomor 650/041/DBMPR tanggal 11 Desember 2019.		
		HL	31.753	33.229	-	-	-	-	2. Telah dilakukan pembahasan Timdu.		
		HPT	2.592	42.838	-	-	-	-			
		HP	-	5.698	-	-	-	-			
		HPK	-	40.800	-	-	-	-			
		JUMLAH	34.345	150.697	57	-	-	-			
26	SULAWESI SELATAN	KSA/KPA	22.595	13.266	-	24.662	1.645	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019		
		HL	76.036	98.388	886	49.291	45.726	170			
		HPT	13.403	50.105	160	10.079	23.683	139			
		HP	-	32.598	1.314	-	13.719	1.529			
		HPK	-	9.478	-	-	6.564	-			
		JUMLAH	112.034	203.836	2.360	84.032	91.337	1.838			
27	SULAWESI TENGGARA	KSA/KPA	28.823	8.334	-	8.061	-	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011		
		HL	187.128	30.236	-	52.660	-	-			
		HPT	23.706	29.427	-	15.773	13.059	-			
		HP	61.714	154.376	-	34.078	52.287	-			
		HPK	3.553	87.792	-	4.539	44.759	-			
		JUMLAH	304.924	310.165	-	115.111	110.105	-			
28	GORONTALO	KSA/KPA	17.031	-	-	15.024	167	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.324/ Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Gorontalo		
		HL	8.353	5.550	37	28.603	5.095	-			
		HPT	55.850	22.428	1.550	8.265	13.779	1.055			
		HP	14.161	4.535	2.316	3.661	2.055	1.194			
		HPK	-	3.319	2.048	-	1.509	1.538			
		JUMLAH	95.395	35.832	5.951	55.553	22.605	3.787			
29	SULAWESI BARAT	KSA/KPA	-	825	-	-	825	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.726/Menhut-II/2012, tanggal 10-12-2012 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.862/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2010 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Sulbar		
		HL	214.184	44.126	-	214.184	8.470	-			
		HPT	80.446	44.566	-	37.416	11.671	-			
		HP	-	48.258	-	-	28.618	-			
		HPK	-	31.085	-	-	23.972	-			
		JUMLAH	294.630	168.860	-	251.600	73.556	-			
30	MALUKU	KSA/KPA	3.484	17.256	-	-	2	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.871/Menhut-II/2013 tanggal 6 Desember 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS		
		HL	30.670	75.645	6.125	-	3.955	2.326			
		HPT	204.600	117.452	987	4.785	11.482	987			
		HP	41.439	84.196	-	12.264	26.863	-			
		HPK	16.352	1.230.827	578	3.619	321.813	-			
		JUMLAH	296.545	1.525.376	-	20.668	364.115	3.313			
31	MALUT	KSA/KPA	28.650	1.656	444	-	-	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.490/Menhut-II/2012 tanggal 5-9-2012		
		HL	180.735	56.260	6.017	29.001	1.662	2.892			
		HPT	92.591	77.108	10.065	22.994	8.599	710			
		HP	40.641	136.148	1.122	9.585	15.648	1.479			
		HPK	42.156	679.564	7.071	30.642	247.452	-			
		JUMLAH	384.773	950.736	24.719	92.222	273.361	5.081			

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				PERSETUJUAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
32	PAPUA	KSA/KPA	8.108	133.814	521	763	9.662	521	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.458/Menhut-II/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Papua		
		HL	405.429	269.758	10.661	395.176	44.532	7.742			
		HPT	156.662	80.581	18.189	133.115	39.468	18.282			
		HP	3.570.941	126.766	14.307	3.404.532	50.426	14.307			
		HPK	2.058.356	667.704	4.482	1.803.244	232.297	4.406			
		JUMLAH	6.199.496	1.278.623	48.160	5.736.830	376.385	45.258			
33	PAPUA BARAT	KSA/KPA	238.324	35.714	4	5.835	-	4	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.710/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Papua Barat		
		HL	97.990	145.399	1.687	8.388	-	59			
		HPT	92.203	102.674	2.150	23.532	44.817	2.633			
		HP	136.735	132.632	3.080	-	61.594	-			
		HPK	467.507	563.033	16.949	400.465	136.634	1.238			
		JUMLAH	1.032.759	979.452	23.870	438.220	243.045	3.934			

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Keterangan: pm = pro memory

TABEL II.3. PROGRES PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN DALAM USULAN REVISI RTRWP S.D. DESEMBER 2019

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
1	Aceh	Peruntukan : 131.717 Ha Fungsi : 179.536 Ha Penunjukan : 31.275 Ha	Peruntukan : 80.256 Ha Fungsi : 130.542 Ha Penunjukan : 26.461 Ha SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 Persub : S.33/Menhut-VII/2014, 16 Januari 2014. Persetujuan DPR RI terkait DPCLS sesuai Surat Wakil Ketua DPR Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tgl 25 September 2014 (DPCLS sudah di Include-kan seluas 37.640 ha)	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Aceh. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
2	Sumatera Utara	Peruntukan : 1.269.284 Ha Fungsi : 296.263 Ha Penunjukan : 35.429 Ha	Peruntukan : 642.716 Ha Fungsi : 207.362 Ha Penunjukan : 17.894 Ha Persub : S.407/Menhut-VII/2014, 18 September 2014	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara menindaklanjuti keputusan MA no 47p/HUM/2011 tanggal 23 Desember 2013 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
3	Sumatera Barat	Peruntukan : 211.386 Ha Fungsi : 216.189 Ha Penunjukan : 13.544 Ha	Peruntukan : 126.286 Ha Fungsi : 147.213 Ha Penunjukan : 9.906 Ha SK.304/Menhut-II/2011; 9 Juni 2011 dan SK.141/Menhut-II/2012; 15 Maret 2012 (DPR setuju untuk areal DPCLS) Persub : S.628/Menhut-VII/2009; 12 Agustus 2009	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang perubahan Keputusan Menhut No. 422/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
4	Riau	Peruntukan : 3.530.696 Ha Fungsi : 1.087.707 Ha Penunjukan : 46.914 Ha	Peruntukan : 1.703.374 Ha Fungsi : 717.543 Ha Penunjukan : 1.152 Ha SK.673/Menhut-II/2014, 8 Agustus 2014, menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI terdapat tambahan perubahan peruntukan seluas 65.125 ha → SK.314/Menhk/Setjen/PLA.2/2016 jo SK.393/Menhk/Setjen/PLA.0/2016	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Riau. 2. Rekomendasi Ombudsman RI No. 0002/REK/0361.2015/PBP-41/II/2016 tanggal 16 Februari 2016. 3. Menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK.314/Menhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 jo SK.393/Menhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016. 4. Persub S.438/Menhk-PKTL/Ren/PLA.0/4/2016 tanggal 25 April 2016. 5. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.220/Menhk/Setjen/PLA.3/4/2016 tanggal 20 April 2016. 6. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
5	Kepulauan Riau	Peruntukan : 532.954 Ha Fungsi : 58.723 Ha Penunjukan : 2.370 Ha	Peruntukan : 399.078 Ha Fungsi : 146.962 Ha Penunjukan : 2.370 Ha SK. 76/Menlhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Kepri. 2. Menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI No. 0014/REK/0906.2013/PBP.41/XII/2014, telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No SK.76/Menlhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kepri 3. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.91/Menlhk-II/2015 tanggal 6 Maret 2015. 4. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
6	Jambi	Peruntukan : 107.047 Ha Fungsi : 72.245 Ha Penunjukan : 10.908 Ha	Peruntukan : 14.048 Ha Fungsi : 20.529 Ha SK.727/Menhut-II/2012; 10 Desember 2012 Persub : S.11/Menhut-VII/2013; 8 Januari 2013 Persetujuan DPR RI terkait DPCLS sesuai Surat Wakil Ketua DPR Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tgl 24 September 2014 (DPCLS sudah di Include-kan seluas 336 ha)	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Jambi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
7	Bengkulu	Peruntukan : 41.960 Ha Fungsi : 9.906 Ha Penunjukan : 0 Ha	Masih dalam proses	1. Usulan Gubernur Bengkulu Nomor 522/011/DLHK/2019 tanggal 8 Januari 2019 dan surat Nomor 522/758/DLHK/2019 tanggal 17 Desember 2019. 2. Telah dilakukan pembahasan awal terkait usulan RTRWP oleh Timdu (belum dilakukan field study).
8	Kepulauan Bangka Belitung	Peruntukan : 133.590 Ha Fungsi : 9.361Ha Penunjukan : 3.218Ha	Peruntukan : 19.131 Ha Fungsi : 10.878 Ha Penunjukan : 3.210 Ha SK. 798/Menhut-II/2012; 27 Desember 2012 Persub : S.110/Menhut-VII/2013; 8 Januari 2013	1. Akan diterbitkan Keputusan Menhut mengenai Perubahan atas Keputusan No. SK.357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
9	Sumatera Selatan	Peruntukan : 410.550 Ha Fungsi : 82.825Ha Penunjukan : 47.463Ha	Peruntukan : 239.533 Ha Fungsi : 44.299 Ha Penunjukan : 41.191 Ha SK.822/Menhut-II/2013; 19 November 2013 Persub : S.32/Menhut-VII/2014, 16 Januari 2014 Persetujuan DPR RI terkait DPCLS sesuai Surat Wakil Ketua DPR Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tgl 25 September 2014 (DPCLS pertama sudah di Include-kan seluas 19.045 ha); SK. 190/Menlhk/Sejten/PLA.0/4/2018 tanggal 20	1. Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS 2. Telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK nomor SK.454/Menlhk/Sejten/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 mengenai Kawasan Hutan Prov. Sumsel. 3. Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.190/Menlhk/Sejten/PLA.0/4/2018 tanggal 20 April 2018 sebagai tindaklanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI No. 254/ORI-SRT/III/2018 tanggal 22 Februari 2018. 4. Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
			April 2018 sebagai tindak lanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI No. 254/ORI-SRT/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 → persetujuan KH-APL (HPT-APL seluas 1.061 ha); Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.823/Menhk/Setjen/PLA.10/4/2019 tanggal 17 Oktober 2019 sebagai tindak lanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI → persetujuan KH-APL (SM-APL seluas 9.329 ha).	SK.823/Menhk/Setjen/PLA.10/4/2019 tanggal 17 Oktober 2019 sebagai tindak lanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI → persetujuan KH-APL (SM-APL seluas 9.329 ha) 5. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
10	Lampung	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.519/Menhut-VII/2009; 6 Juli 2009	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
11	DKI Jakarta	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.97/Menhut-VII/2011; 3 Maret 2011	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
12	Jawa Barat	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.276/Menhut-VII/2010; 10 Juni 2010	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
13	Banten	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.277/Menhut-VII/2010; 10 Juni 2010	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
14	Jawa Tengah	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.933/Menhut-VII/2009; 11 Desember 2009	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
15	DI. Yogyakarta	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.932/Menhut-VII/2009; 11 Desember 2009	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
16	Jawa Timur	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.581/Menhut-VII/2010; 11 November 2010	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK. 395/Menhut-II/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
17	Bali	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.728/Menhut-VII/2009; 14 September 2009	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
18	Nusa Tenggara Barat	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.727/Menhut-VII/2009; 14 September 2009	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK. 598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
19	Nusa Tenggara Timur	Peruntukan : 213.195 Ha Fungsi : 21.461 Ha Penunjukan : 24.518 Ha	Peruntukan : 54.163 Ha Fungsi : 12.168 Ha Penunjukan : 11.811 Ha SK. 357/Menhk/Setjen/PLA.0/5/2016; 11 Mei 2016 Persub : S.582/Menhk-PKTL/REN/PLA.0/6/2016 tgl 13 Juni 2016	1. Pemerintah NTT telah mengajukan usulan perubahan Kawasan hutan sesuai Surat Gubernur NTT : • Surat Gubernur Nomor BU.522/14/DISHUT/2013 tanggal 11 Oktober 2013. • Surat Gubernur No. BU.522/19/DISHUT/2013 tanggal 20 November 2013 • Surat Gubernur No. BU.522/13/DISHUT/2014 tanggal 5 Juni 2014 • Surat Gubernur No. BU.522/03/DISHUT/2015 tanggal 15 April 2015. 2. Telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK. 357/Menhk/Setjen/PLA.0/5/2016; 11 Mei 2016 3. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.237/Menhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 11 Mei 2016.
20	Kalimantan Barat	Peruntukan : 2.355.730 Ha Fungsi : 727.727Ha Penunjukan : 236.133Ha	Peruntukan : 554.137 Ha Fungsi : 352.772 Ha Penunjukan : 52.386 Ha SK.936/Menhut-II/2013, 20 Desember 2013. Persub No : S.26/Menhut-VII/2014; 10 Januari 2014.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat. 2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K. 3. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan keputusan areal yang DPCLS seluas 69.294 Ha.
21	Kalimantan Tengah	Peruntukan : 2.922.312 Ha Fungsi : 3.900.656Ha Penunjukan : 944.715Ha	Peruntukan : 1.168.656 Ha Fungsi : 689.666 Ha Penunjukan : 29.672 Ha SK.292/Menhut-II/2011; 31 Mei 2011. Persub No : S.431/Menhut-VII/2012; 28 September 2012.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang perubahan atas Keputusan Mentan No. 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. 2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
22	Kalimantan Timur	Peruntukan : 2.534.518 Ha Fungsi : 625.326 Ha Penunjukan : 172.830 Ha	Peruntukan : 469.352 Ha Fungsi : 276.240 Ha Penunjukan : 11.732 Ha SK.554/Menhut-II/2013; 2 Agustus 2013. Persub No : S.519/Menhut-VII/2013; 5 September 2013.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. 2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
23	Kalimantan Selatan	Peruntukan : 270.293 Ha Fungsi : 47.851 Ha Penunjukan : 280.319 Ha	Peruntukan : 59.503 Ha Fungsi : 99.594 Ha Penunjukan : 39.747 Ha SK.432/Menhut-II/2009; 22 Juli 2009. Persub No : S.518/Menhut-VII/2009; 6 Juli 2009.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
24	Gorontalo	Peruntukan : 35.832 Ha Fungsi : 95.395 Ha Penunjukan : 5.951 Ha	Peruntukan : 23.604 Ha Fungsi : 55.553 Ha Penunjukan : 3.787 Ha SK.324/Menhut-II/2010; 25 Mei 2010. Persub No : S.238/Menhut-VII/2010; 14 Mei 2010.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Gorontalo. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
25	Sulawesi Utara	Peruntukan : 48.591 Ha Fungsi : 7.250 Ha Penunjukan : 2.589 Ha	Peruntukan : 7.037 Ha Fungsi : 761 Ha Penunjukan : 290 Ha SK.434/Menhut-II/2013; 17 Juni 2013. Persub No : S.521/Menhut-VII/2013; 5 September 2013.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.734/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
26	Sulawesi Tengah	Peruntukan : 150.697 Ha Fungsi : 34.345 Ha Penunjukan : 57 Ha	Masih dalam proses	1. Usulan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 650/376/DBMPR tanggal 19 Juli 2019 dan terakhir dengan surat Nomor 650/041/DBMPR tanggal 11 Desember 2019. 2. Telah dilakukan pembahasan Timdu.
27	Sulawesi Selatan	Peruntukan : 203.836 Ha Fungsi : 112.034 Ha Penunjukan : 2.360 Ha	Peruntukan : 91.337 Ha Fungsi : 84.032 Ha Penunjukan : 1.838 Ha SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019; 28 Mei 2019. Persub No. S.371/MENLHK/PKTL/PLA.O/6/2019; 13 Juni 2019.	1. Akan diterbitkan Keputusan mengenai Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
28	Sulawesi Tenggara	Peruntukan : 310.165 Ha Fungsi : 304.924 Ha	Peruntukan : 110.105 Ha Fungsi : 115.111 Ha SK.465/Menhut-II/2011; 9 Agustus 2011. Persub No : S. 61/Menhut-VII/2013; 30 Januari 2013.	1. Akan diterbitkan Keputusan Menhut mengenai Perubahan atas Keputusan Menhut No. 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K. 3. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan keputusan areal yang DPCLS seluas 49.195 Ha.

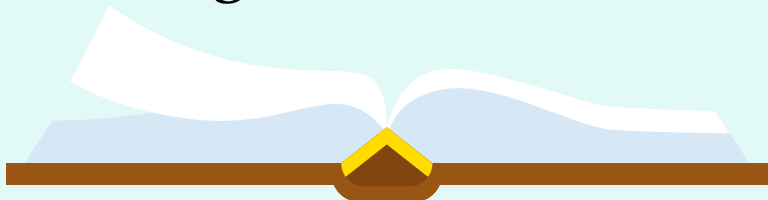
No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
29	Sulawesi Barat	Peruntukan : 168.860 Ha Fungsi : 294.630 Ha	Peruntukan : 73.556 Ha Fungsi : 251.600 Ha SK. 726/Menhut-II/2012; 10 Desember 2012 Persub No : S. 62/Menhut-VII/2013; 30 Januari 2013	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.862/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
30	Maluku	Peruntukan : 1.525.376 Ha Fungsi : 296.545 Ha Penunjukan : 7.691 Ha	Peruntukan : 364.115 Ha Fungsi : 20.668 Ha Penunjukan : 3.313 Ha SK. 871/Menhut-II/2013; 6 Desember 2013. Persub No. S.27/Menhut-VII/2014; 10 Januari 2014.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
31	Maluku Utara	Peruntukan : 950.736 Ha Fungsi : 384.773 Ha Penunjukan : 24.719 Ha	Peruntukan : 273.361 Ha Fungsi : 92.222 Ha Penunjukan : 5.081 Ha SK.490/Menhut-II/2012; 5 September 2012 Persub No : S.427/Menhut-VII/2012; 26 September 2012	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.302/Menhut-II/2014 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 415/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
32	Papua	Peruntukan : 1.278.623 Ha Fungsi : 6.199.496 Ha Penunjukan : 48.160 Ha	Peruntukan : 376.385 Ha Fungsi : 5.736.830 Ha Penunjukan : 45.258 Ha SK.458/Menhut-II/2012; 15 Agustus 2012 Persub No : S. 409/Menhut-VII/2012; 11 September 2011	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menhut No. 891/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah TK I Irian Jaya. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
33	Papua Barat	Peruntukan : 979.452 Ha Fungsi : 1.032.759 Ha Penunjukan : 23.870 Ha	Peruntukan : 243.045 Ha Fungsi : 438.220 Ha Penunjukan : 23.934 Ha SK.710/Menhut-II/2014; 27 Agustus 2014 Persub No. S.406/Menhut-VII/2014; 18 September 2014	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K. 3. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan keputusan areal yang DPCLS seluas 50.356 Ha.

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan



PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

*Direktorat Pengukuhan
dan Penatagunaan Kawasan Hutan*



TABEL III.1. LUAS KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN SK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN S.D. DESEMBER 2019

No.	Provinsi	SK	Tanggal	KONSERVASI (Ha)			HL (Ha)	HPT (Ha)	HP (Ha)	HPK (Ha)	Luas Darat (Ha)	Luas Darat dan Perairan (Ha)	Luas Provinsi (Ha)	Proporsi Luas KH (Daratan) (%)
				Perairan	Daratan	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	D. I. Aceh	580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018	17/12/2018	0,00	1.058.364,40	1.058.364,40	1.781.677,92	145.178,34	549.794,88	15.374,69	3.550.390,23	3.550.390,23	5.795.600	61,3
2	Sumatera Utara	579/Menhut-II/2014	24/06/2014	0,00	427.008,00	427.008,00	1.206.881,00	641.769,00	704.452,00	75.884,00	3.055.795,00	3.055.795,00	7.298.123	41,9
3	Sumatera Barat	35/Menhut-II/2013	15/01/2013	37.164,00	769.775,00	806.939,00	791.671,00	233.211,00	360.608,00	187.629,00	2.342.894,00	2.342.894,00	4.201.289	55,8
4	Riau	903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016	07/12/2016	0,00	630.753,00	630.753,00	233.910,00	1.017.318,00	2.339.578,00	1.185.433,00	5.406.992,00	5.406.992,00	8.702.366	62,1
5	Jambi	863/Menhut-II/2014	29/09/2014	0,00	685.471,00	685.471,00	179.588,00	258.285,00	963.792,00	11.399,00	2.098.535,00	2.098.535,00	5.005.816	41,9
6	Sumatera Selatan	454/MenLHK/Sejten/PLA.2/6/2016 & 190/MenLHK/Sejten/PLA.0/4/2018	17 Juni /2016 & 20 April 2018	49.104,00	741.681,00	790.785,00	578.279,00	213.918,00	1.712.819,00	160.995,00	3.407.693,00	3.456.797,00	9.159.243	37,2
7	Bengkulu	784/Menhut-II/2012	27/12/2012	0,00	462.965,00	462.965,00	250.750,00	173.280,00	25.873,00	11.763,00	924.631,00	924.631,00	1.991.933	46,4
8	Lampung	256/Kpts-II/2000	23/08/2000	0,00	462.030,00	462.030,00	317.615,00	33.358,00	191.732,00	0,00	1.004.735,00	1.004.735,00	3.462.380	29,0
9	Kep. Bangka Belitung	798/Menhut-II/2012	27/12/2012	0,00	34.500,00	34.500,00	166.371,00	0,00	442.051,00	693,00	643.615,00	643.615,00	1.642.406	39,2
10	Kepulauan Riau	76/MenLHK-II/2015 & 272/MenLHK/Sejten/PLA.0/6/2018	06/03/2015 & 6 Juni 2018	0,00	4.734.73	4.734.73	97.362,65	118.832,99	78.830,62	82.071,11	381.832,10	381.832,10	820.172	46,6
11	DKI Jakarta	220/Kpts-II/2000	02/08/2000	108.000,00	272.34	108.272,34	44.76	0,00	158,35	0,00	475,45	108.475,45	66.401	0,7
12	Jawa Barat	195/Kpts-II/2003	04/07/2003	0,00	132.180,00	132.180,00	291.306,00	190.152,00	202.965,00	0,00	816.603,00	816.603,00	3.537.776	23,1
13	Jawa Tengah	359/Menhut-II/2004	01/10/2004	110.117,00	16.413,00	126.530,00	84.430,00	183.930,00	362.360,00	0,00	647.133,00	757.250,00	3.280.069	19,7
14	D.I Yogyakarta	171/Kpts-II/2000	29/06/2000	0,00	910,34	910,34	2.057,90	0,00	13.851,28	0,00	16.819,52	16.819,52	313.115	5,4
15	Jawa Timur	395/Menhut-II/2011	21/07/2011	3.506,00	230.126,00	233.632,00	344.742,00	0,00	782.772,00	0,00	1.357.640,00	1.381.146,00	4.779.975	28,4
16	Banten	419/Kpts-II/1999	15/06/1999	51.467,00	112.991,00	164.458,00	12.359,00	49.439,00	26.998,00	0,00	201.787,00	253.254,00	966.292	20,9
17	B a l i	433/Kpts-II/1999	15/06/1999	3.415,00	22.878,59	26.293,59	95.766,06	6.719,26	1.907,10	0,00	127.271,01	130.686,01	578.006	22,0
18	N T B	598/Menhut-II/2009 & 270/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017	2 Oktober 2009 & 5 Juni 2017	11.121,00	167.913,00	179.034,00	430.485,00	286.700,00	150.740,00	0,00	1.035.838,00	1.046.959,00	1.857.232	55,8
19	N T T	357/MenLHK/Sejten/PLA.0/5/2016	11/05/2016	256.482,00	264.930,00	521.412,00	684.572,00	169.707,00	288.214,00	78.494,00	1.485.917,00	1.742.399,00	4.871.810	30,5
20	Kalimantan Barat	733/Menhut-II/2014	02/09/2014	190.945,00	1.430.101,00	1.621.046,00	2.310.874,00	2.132.398,00	2.127.385,00	197.918,00	8.198.656,00	8.389.600,00	14.730.700	55,7
21	Kalimantan Tengah	529/Menhut-II/2012	25/09/2012	22.542,00	1.608.286,00	1.630.828,00	1.346.066,00	3.317.461,00	3.881.817,00	2.543.535,00	12.697.165,00	12.719.707,00	15.356.450	82,7
22	Kalimantan Selatan	435/Menhut-II/2009	23/07/2009	0,00	213.285,00	213.285,00	526.425,00	126.660,00	762.188,00	151.424,00	1.779.982,00	1.779.982,00	3.874.423	45,9
23	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	718/Menhut-II/2014 & 278/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017 & 254/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2018 & 136/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2019	29 Agustus 2014 & 9 Juni 2017 & 30 Mei 2018, 13 Februari 2019	0,00	1.704.666,00	1.704.666,00	2.846.243,00	5.045.164,45	4.022.293,32	211.575,88	13.831.942,65	13.831.942,65	20.453.434	67,6
24	Sulawesi Utara	734/Menhut-II/2014	02/09/2014	69.800,00	245.165,00	314.965,00	161.784,00	208.927,00	64.367,00	14.696,00	694.939,00	764.739,00	1.385.164	50,2
25	Sulawesi Tengah	869/Menhut-II/2014	29/09/2014	340.119,00	648.374,00	988.493,00	1.276.087,00	1.390.971,00	401.814,00	217.322,00	3.934.568,00	4.274.687,00	6.184.129	63,6
26	Sulawesi Selatan	362/MenLHK/Sejten/PLA.0/5/2019	28/05/2019	606.804,00	231.029,00	837.833,00	1.162.498,00	479.518,00	140.036,00	16.412,00	2.029.493,00	2.636.297,00	4.671.748	43,4
27	Sulawesi Tenggara	465/Menhut-II/2011	09/08/2011	1.504.160,00	282.924,00	1.787.084,00	1.081.489,00	466.854,00	401.581,00	93.571,00	2.326.419,00	3.830.579,00	3.806.770	61,1
28	Gorontalo	325/Menhut-II/2010	25/05/2010	0,00	196.653,00	196.653,00	204.608,00	251.097,00	89.879,00	82.431,00	824.668,00	824.668,00	1.125.707	73,3
29	Sulawesi Barat	862/Menhut-II/2014	29/09/2014	0,00	215.190,00	215.190,00	452.030,00	330.700,00	71.859,00	22.597,00	1.092.376,00	1.092.376,00	1.678.718	65,1
30	Maluku	854/Menhut-II/2014	29/09/2014	9.206,00	420.330,00	429.538,00	627.256,00	894.258,00	643.699,00	1.324.866,00	3.910.409,00	3.919.617,00	4.691.403	83,4
31	Maluku Utara	302/Menhut-II/2013	01/05/2013	0,00	218.499,00	218.499,00	584.058,00	666.851,00	481.730,00	564.082,00	2.515.220,00	2.515.220,00	3.198.250	78,6
32	Papua Barat	783/Menhut-II/2014	22/09/2014	928.350,00	1.711.908,00	2.640.258,00	1.631.589,00	1.778.480,00	2.188.160,00	1.474.650,00	8.784.787,00	9.713.137,00	9.967.163	88,1
33	Papua	782/Menhut-II/2012	27/12/2012	1.019.017,00	6.736.267,00	7.755.284,00	7.815.283,00	5.961.240,00	4.739.327,00	4.116.365,00	29.368.482,00	30.387.499,00	31.903.605	92,1
				5.321.326,00	22.088.579,40	27.409.901,40	29.578.166,29	26.772.386,04	29.215.621,55	12.840.992,68	120.495.714,96	125.817.021,96	191.357.882,00	63,0

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penastagunaan Kawasan Hutan

Catatan:

- 1 Luas kawasan hutan berfungsi didasarkan/mencuplik pada lembar SK kawasan hutan yang di terbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2 Luas Provinsi www.bps.co.id
- 3 Luas APL dihitung berdasarkan data provinsi point 2 dikurangi dengan luas kawasan hutan daratan (dimungkinkan masih terdapat APL pada Kawasan Konservasi Perairan yang tidak terhitung)

TABEL III.2. PERKEMBANGAN PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN PARSIAL S.D. DESEMBER 2019

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		S/D Tahun 2019	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Aceh	2	15.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15.400,00
2	Bali	13	1.059,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1.059,35
3	Banten	6	5.336,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5.336,78
4	Bengkulu	2	7,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7,12
5	DI. Yogyakarta	5	2.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.140,00
6	Gorontalo	2	55.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	55.000,00
7	Jambi	4	32.479,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	32.479,50
8	Jawa Barat	59	560.258,89	2	72,68	2	27,16	1	38,43	2	1.501,23	-	-	66	561.898,39
9	Jawa Tengah	16	355,75	3	179,93	2	238,94	-	-	-	-	1	4,00	22	778,62
10	Jawa Timur	8	905,44	3	703,06	4	95,53	-	-	-	-	-	-	15	1.704,02
11	Kalimantan Barat	22	1.121.215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1.121.215,00
12	Kalimantan Selatan	4	3.198,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.198,70
13	Kalimantan Tengah	1	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000,00
14	Kalimantan Timur	12	317.247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	317.247,00
15	Kep. Bangka Belitung	1	177,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	177,42
16	Kepulauan Riau	3	24.280,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24.280,50
17	Lampung	4	74.200,00	-	-	1	3.327,00	-	-	-	-	-	-	5	77.527,00
18	Maluku	3	115.734,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	115.734,46
19	Maluku Utara	1	1.475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.475,00
20	Papua	6	3.829.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.829.100,00
21	Papua Barat	5	1.615.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.615.000,00
22	Riau	2	8.027,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8.027,00
23	Sulawesi Barat	1	230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	230,00
24	Sulawesi Selatan	10	780.282,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	780.282,70
25	Sulawesi Tengah	7	55.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	55.700,00
26	Sulawesi Tenggara	3	398.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	398.250,00
27	Sulawesi Utara	2	99.934,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	99.934,00
28	Sumatera Barat	2	39.927,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39.927,50
29	Sumatera Selatan	5	106.091,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	106.091,78
30	Sumatera Utara	5	48.025,50	-	-	-	-	-	-	1	480,00	-	-	6	48.505,50
JUMLAH		216	9.316.039,39	8	955,67	9	3.688,63	1	38,43	3	1.981,23	1	4,00	238	9.322.707,35

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

TABEL III.3. PERKEMBANGAN PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN S.D. DESEMBER 2019

NO.	PROVINSI	S/D TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Aceh	4.430,93	1.097,67	152,70	135,76	165,55	-	162,13	24,32	162,13	24,32	185,14	-
2	Sumatera Utara	7.840,46	1.883,54	205,45	118,57	556,35	-	425,70	-	425,70	-	-	-
3	Sumatera Barat	3.914,23	1.589,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	8.760,42	1.407,16	203,62	113,38	213,14	-	297,74	-	297,74	-	116,16	-
5	Jambi	3.728,34	800,17	-	-	3,44	-	1,56	3,85	1,56	3,85	-	-
6	Sumatera Selatan	4.513,52	1.044,58	98,24	-	202,00	-	76,00	32,00	76,00	32,00	-	-
7	Bengkulu	1.658,49	489,85	-	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	3.238,66	25,01	34,36	-	-	-	21,00	0,00	21,00	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	504,21	66,00	43,99	-	100,31	11,42	56,65	0,00	56,65	-	-	-
10	Kepulauan Riau	18,04	805,17	654,27	56,74	527,92	-	-	-	-	-	6,25	-
11	DKI Jakarta	44,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	20.021,78	2,84	167,53	14,43	23,54	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	19.064,65	-	-	-	-	-	-	2,30	-	2,30	-	-
14	D.I. Yogyakarta	276,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	19.394,80	43,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	46,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	1.610,00	208,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	4.806,47	856,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	5.273,67	13,30	167,67	-	138,00	-	127,91	-	127,91	-	-	-
20	Kalimantan Barat	9.718,34	8.394,53	110,52	265,77	633,65	37,57	100,29	170,52	100,29	170,52	32,42	-
21	Kalimantan Tengah	3.635,73	3.304,19	334,17	364,03	288,64	87,45	765,66	-	765,66	-	470,50	-
22	Kalimantan Selatan	11.077,68	3.341,58	431,14	-	124,81	93,90	98,25	20,19	98,25	20,19	181,13	-
23	Kalimantan Timur	8.348,74	11.245,43	1.046,42	30,48	369,00	7,03	-	-	-	-	212,30	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	2.674,56	7.449,10	101,00	324,00	62,50	-	31,37	-	31,37	-	6,58	-
26	Sulawesi Tengah	11.134,81	6.536,68	288,86	77,94	238,00	-	312,59	-	312,59	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	710,63	1.653,77	-	-	-	-	65,51	-	65,51	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	5.789,45	4.228,80	-	-	-	-	218,00	-	218,00	-	-	-
29	Gorontalo	5.864,06	1.007,60	134,58	5,93	132,22	4,87	22,74	-	22,74	-	144,06	-
30	Sulawesi Barat	794,94	1.226,81	-	105,12	118,91	-	105,24	-	105,24	-	-	-
31	Maluku	7.616,84	3.954,72	198,74	33,49	97,70	12,20	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	317,70	1.611,67	55,67	324,24	121,29	202,04	28,67	25,63	28,67	25,63	-	-
33	Papua Barat	1.343,96	2.859,85	199,73	341,75	167,95	-	29,01	22,06	29,01	22,06	-	-
34	Papua	11.829,45	11.690,35	87,06	200,45	90,88	-	99,30	-	99,30	-	-	-
JUMLAH		190.002,75	78.838,72	4.715,71	2.512,08	4.380,70	456,49	3.045,33	300,87	3.045,33	300,87	1.354,55	0,00
												206.544,37	82.409,04

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Ket: (-) tidak ada data

TABEL III.4. PERKEMBANGAN PENGESAHAN BERITA ACARA TATA BATAS S.D. DESEMBER 2019

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		S/D TAHUN 2019	
		BA	KM	BA	KM	BA	KM	BA	KM	BA	KM	BA	KM	BA	KM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Aceh	71	5.807,32	-	-	18	248,73	6	77,80	12	318,13	-	-	107	6.451,98
2	Sumatera Utara	88	13.218,76	-	-	12	112,37	20	1.096,28	20	861,76	13	1.004,94	153	16.294,11
3	Sumatera Barat	172	6.350,62	-	-	5	98,00	2	29,53	7	127,08	2	48,75	188	6.653,98
4	Riau	122	11.589,34	-	-	5	411,05	3	122,10	4	383,44	-	-	134	12.505,93
5	Jambi	90	5.535,33	4	21.110,52	3	13,77	-	-	2	24,02	2	5,41	101	26.689,05
6	Sumatera Selatan	193	7.545,27	-	-	4	201,78	2	39,33	10	147,59	9	580,90	218	8.514,87
7	Bengkulu	120	2.467,04	-	-	-	-	-	-	4	52,71	1	5,79	125	2.525,54
8	Lampung	80,0	4.166,59	-	-	-	-	-	-	3	131,75	-	-	83	4.298,34
9	Kep. Bangka Belitung	40	548,01	-	-	11	94,00	11	83,35	11	159,90	-	-	73	885,26
10	Kepulauan Riau	8	115,79	-	-	-	-	1	644,31	1	69,55	-	-	10	829,65
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	124	513,16	3	7,28	8	56,01	6	194,95	2	251,68	3	9,41	146	1.032,49
13	Jawa Tengah	57	85,58	-	-	1	15,01	3	4,11	-	-	2	16,97	63	121,66
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	32	510,23	3	24,43	1	3,41	6	198,88	-	-	1	6,65	43	743,59
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	40	1.625,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1.625,80
18	Nusa Tenggara Barat	100	5.365,80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11,95	101	5.377,75
19	Nusa Tenggara Timur	101	7.219,37	2	28,45	15	185,68	18	400,06	-	-	4	71,67	140	7.905,23
20	Kalimantan Barat	268	14.383,50	22	1.108,58	5	296,87	2	222,01	15	284,69	10	190,35	322	16.486,00
21	Kalimantan Tengah	58	4.306,94	7	297,59	21	1.063,00	3	197,89	6	76,50	16	750,99	111	6.692,91
22	Kalimantan Selatan	66	3.861,77	11	475,55	8	371,70	4	169,14	5	261,57	7	195,55	101	5.335,28
23	Kalimantan Timur	288	18.078,54	24	1.321,40	-	-	1	9,35	-	-	14	459,60	327	19.868,89
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	6	357,35	11	607,59	17	964,94
25	Sulawesi Utara	73	6.953,03	-	-	8	179,89	-	-	-	-	1	11,05	82	7.143,97
26	Sulawesi Tengah	263	15.366,60	9	219,73	-	-	-	-	-	-	7	100,52	279	15.686,85
27	Sulawesi Selatan	140	10.457,65	-	-	2	32,66	-	-	-	-	-	-	142	10.490,31
28	Sulawesi Tenggara	126	11.343,88	4	299,85	-	-	-	-	-	-	-	-	130	11.643,73
29	Gorontalo	43	1.445,27	13	134,39	3	140,52	-	-	-	-	-	-	59	1.720,18
30	Sulawesi Barat	6	255,75	5	1.059,57	1	91,32	-	-	-	-	-	-	12	1.406,64
31	Maluku	190	9.689,87	-	-	-	-	30	557,99	-	-	-	-	220	10.247,86
32	Maluku Utara	43	1.505,90	-	-	-	-	51	896,50	14	134,68	3	97,11	111	2.634,18
33	Papua Barat	191	16.247,35	-	-	1	14,89	-	-	-	-	-	-	192	16.262,25
34	Papua	110	10.832,31	-	-	21	1.200,75	-	-	-	-	-	-	131	12.033,06
JUMLAH		3.303	197.392,38	107	26.087,34	153	4.831,38	169	4.943,59	122	3.642,38	107	4.175,18	3.961	241.072,25

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Ket: (-) tidak ada data

TABEL III.5. PERKEMBANGAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN S.D. DESEMBER 2019

No	Provinsi	S/D TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		S/D TAHUN 2019	
		UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Aceh	14	914.306,92	1	5.326,23	-	-	-	-	-	-	4	6.564,90	19	926.198,05
2	Bali	25	137.428,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	137.428,10
3	Bangka Belitung	79	537.894,36	-	-	4	3.035,84	4	890,89	-	-	-	-	87	541.821,09
4	Banten	12	120.932,47	-	-	9	81.494,91	-	-	-	-	-	-	21	202.427,38
5	Bengkulu	53	702.623,42	-	-	-	-	-	-	1	2.724,46	-	-	54	705.347,88
6	DI. Yogyakarta	9	8.860,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8.860,94
7	DKI. Jakarta	4	107.856,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	107.856,20
8	Gorontalo	22	759.001,29	8	16.771,84	2	29.515,63	-	-	-	-	-	-	32	805.288,76
9	Jambi	27	968.216,30	5	192.026,59	14	553.278,31	1	18.140,32	-	-	-	-	47	1.731.661,52
10	Jawa Barat	100	559.980,50	4	300,84	10	321.876,71	27	70.500,81	-	-	-	-	141	952.658,85
11	Jawa Tengah	96	469.515,59	-	-	37	317.593,30	4	68,20	-	-	-	-	137	787.177,10
12	Jawa Timur	72	314.485,83	4	616,95	60	601.724,48	10	54.373,83	-	-	-	-	146	971.201,09
13	Kalimantan Barat	133	5.901.322,48	18	119.015,98	4	74.549,16	-	-	8	46.065,56	-	-	163	6.140.953,18
14	Kalimantan Selatan	41	1.446.236,38	-	-	1	57.541,50	-	-	-	-	-	-	42	1.503.777,88
15	Kalimantan Tengah	19	3.403.553,20	-	-	4	334.471,35	3	40.543,91	4	315.587,35	-	-	30	4.094.155,81
16	Kalimantan Timur	75	7.618.640,04	8	144.913,39	2	130.089,68	1	64.814,98	-	-	-	-	86	7.958.458,09
17	Kalimantan Utara	10	2.374.096,56	3	182.752,03	3	787.448,63	2	73.792,49	-	-	-	-	18	3.418.089,71
18	Kep. Riau	27	104.105,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	104.105,77
19	Lampung	23	299.422,76	3	250.438,98	2	25.031,79	1	28.343,91	-	-	-	-	29	603.237,44
20	Maluku	115	2.662.823,09	-	-	-	-	-	-	3	5.969,03	-	-	118	2.668.792,12
21	Maluku Utara	55	1.243.487,93	1	103.253,90	-	-	-	-	-	-	-	-	56	1.346.741,83
22	Nusa Tenggara Barat	56	1.159.236,72	-	-	4	8.584,31	2	19.759,95	-	-	-	-	62	1.187.580,98
23	Nusa Tenggara Timur	83	512.574,50	5	145.846,63	45	132.456,39	2	237.178,06	-	-	-	-	135	1.028.055,58
24	Papua	86	22.756.123,90	-	-	6	1.860.981,60	-	-	-	-	-	-	92	24.617.105,50
25	Papua Barat	36	7.034.362,47	1	244.980,05	2	842.556,11	-	-	-	-	5	63.416,35	44	8.185.314,98
26	Riau	43	1.197.845,02	4	855.740,95	-	-	-	-	-	-	-	-	47	2.053.585,97
27	Sulawesi Barat	10	326.677,49	6	422.700,84	3	312.616,07	-	-	-	-	-	-	19	1.061.994,40
28	Sulawesi Selatan	65	1.964.107,89	-	-	3	71.190,61	-	-	-	-	-	-	68	2.035.298,50
29	Sulawesi Tengah	49	2.083.625,90	13	480.071,45	-	-	-	-	-	-	-	-	62	2.563.697,35
30	Sulawesi Tenggara	38	2.728.321,45	8	535.336,16	-	-	-	-	-	-	-	-	46	3.263.657,61
31	Sulawesi Utara	54	262.202,19	1	208,81	5	118.948,44	-	-	-	-	-	-	60	381.359,44
32	Sumatera Barat	49	1.395.513,96	-	-	2	18.344,98	-	-	-	-	-	-	51	1.413.858,94
33	Sumatera Selatan	51	2.982.021,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	2.982.021,41
34	Sumatera Utara	41	1.725.266,43	-	-	-	-	-	-	-	-	7	33.441,95	48	1.758.708,38
	JUMLAH	1.672	76.782.669,45	93	3.700.301,61	222	6.683.329,79	57	608.407,36	16	370.346,40	16	103.423,20	2.076	88.248.477,81

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan

Catatan : Apabila terdapat ketidaksesuaian luas dan jumlah SK yang tercantum dalam matrik, maka perbaikan/koreksi mengacu pada fisik luas yang tercantum dalam SK. Sampai dengan Desember 2018 terdapat perbaikan database pada tahun lama yakni belum masuk thd tahun ybs, sehingga diakumulaskan pada Bulan Desember 2018

TABEL III.6. PERKEMBANGAN TATA BATAS IUPHHK-HA DAN IUPHHK-HT S.D. DESEMBER 2019

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		HA (Km)	HT (Km)	HA (Km)	HT (Km)	HA (Km)	HT (Km)	HA (Km)	HT (Km)	HA (Km)	HT (Km)	HA (Km)	HT (Km)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Aceh	2.366,97	1.066,00	-	-	107,15	-	-	-	-	-	2.474,12	1.066,00
2	Sumatera Utara	1.973,28	1.832,73	-	-	53,50	203,19	-	-	-	-	2.080,32	2.035,92
3	Sumatera Barat	1.698,74	2.189,16	-	-	-	-	-	-	-	-	1.872,82	2.189,16
4	Riau	7.648,64	2.130,08	-	84,93	-	1.145,03	-	-	-	-	7.648,64	3.360,04
5	Jambi	3.161,87	1.299,58	-	69,46	-	-	-	-	-	-	3.161,87	1.369,04
6	Sumatera Selatan	2.554,95	1.936,28	-	140,94	-	113,383	-	-	-	-	2.554,95	2.190,60
7	Bengkulu	356,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356,98	-
8	Lampung	52,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,35	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	457,78	231,47	-	-	-	-	-	-	-	-	457,78	231,47
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	9.629,87	260,97	-	130,84	148,05	479,38	294,87	1.227,30	-	-	10.072,79	2.524,83
21	Kalimantan Timur	13.833,10	2.575,34	240,41	-	410,49	316,37	841,76	519,78	-	-	15.539,24	3.411,49
22	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	115,13	-	-	-	115,13	-
23	Kalimantan Selatan	1.559,10	581,68	-	-	285,69	-	815,86	115,13	-	-	2.660,65	904,68
24	Kalimantan Tengah	14.517,14	417,36	99,00	9,79	90,12	154,66	90,12	403,46	-	-	15.883,38	1.595,26
25	Sulawesi Utara	1.531,72	-	82,06	-	-	-	-	-	-	-	1.613,78	-
26	Sulawesi Tengah	3.852,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.852,04	-
27	Sulawesi Selatan	1.188,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.188,61	-
28	Sulawesi Tenggara	920,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920,05	-
29	Gorontalo	-	-	-	101,32	-	-	0	56,39	-	-	-	157,71
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	7.275,38	162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.275,38	162,00
32	Maluku Utara	246,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,47	-
33	Papua Barat	11.456,82	-	-	-	161,28	-	-	-	-	-	11.618,10	-
34	Papua	114,49	-	-	-	134,12	-	-	-	-	-	248,61	-
	JUMLAH	86.396,35	14.682,65	421,47	537,28	1.390,40	2.412,02	2.157,74	2.322,06	-	-	1.528,10	1.244,20
												91.894,06	21.198,21

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

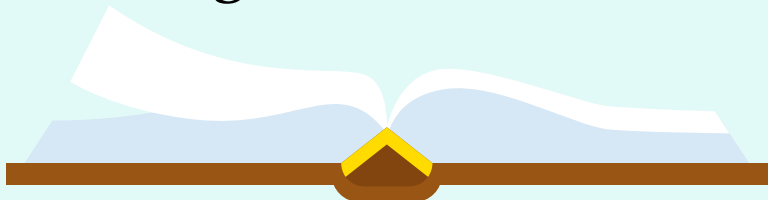
Keterangan:

- IUPHHK-HA: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
- IUPHHK-HT: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman



PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

*Direktorat Pengukuhan
dan Penatagunaan Kawasan Hutan*



TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

1) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	180,00	-	-	-	-	-	180,00
3	Sumatera Barat	29.486,00	-	-	-	-	-	29.486,00
4	Riau	133.238,00	-	-	-	-	-	133.238,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	15.269,75	-	-	-	-	-	15.269,75
21	Kalimantan Tengah	84.948,00	-	-	-	-	12.224,00	97.172,00
22	Kalimantan Timur	53.760,00	-	-	-	-	-	53.760,00
23	Kalimantan Selatan	38.630,00	-	-	-	-	11.656,00	50.286,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	17.555,00	-	-	-	-	-	17.555,00
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	1.905,00	1.905,00
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	2.860,00	-	-	-	-	-	2.860,00
33	Papua	234.730,00	89.951,00	-	-	-	-	324.681,00
34	Papua Barat	4.076,00	-	-	-	-	-	4.076,00
JUMLAH		614.732,75	89.951,00	-	-	-	25.785,00	730.468,75

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d. Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

2) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) MENJADI Hutan Lindung (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	21.750,00	-	-	-	-	-	21.750,00
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	79,75	-	-	-	-	-	79,75
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	49.400,00	-	-	-	-	-	49.400,00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	6.572,00	-	-	-	-	6.572,00
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		71.229,75	6.572,00	-	-	-	-	77.801,75

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d. Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

3) Perkembangan Perubahan Fungsi Antar Kawasan Konservasi (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	5.688,65	-	-	-	60,94	-	5.749,59
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	28.238	-	-	-	28.238,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	27.200,00	-	-	425,50	-	-	27.625,50
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	87,00	87,00
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	14.295,75	-	-	-	4.382,00	-	18.677,75
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	6,50	-	-	-	-	-	6,50
15	D.I. Yogyakarta	283,58	-	-	-	-	-	283,58
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	71.645,64	-	-	-	-	71.645,64
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	300.040,00	-	-	-	-	-	300.040,00
22	Kalimantan Timur	61.850,00	-	-	-	-	-	61.850,00
23	Kalimantan Selatan	7.563,60	-	-	-	-	1.239,00	8.802,60
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	24.669,00	-	-	2.605,63	-	-	27.274,63
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	15.381,90	-	-	-	-	263,00	15.644,90
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	15,00	-	-	-	15,00
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	1.396,00	1.396,00
JUMLAH		456.978,98	71.645,64	28.253,00	3.031,13	4.442,94	2.985,00	567.336,69

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d. Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

4) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Konservasi (KK) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	490,00	-	-	-	-	-	490,00
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	4.158,00	-	-	-	4.158,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	27.594,89	745,00	-	-	-	-	28.339,89
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	171,00	171,00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	575,00	575,00
JUMLAH		28.084,89	745,00	4.158,00	-	-	746,00	33.733,89

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d. Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

5) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Konservasi (KK) menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonservasi (HPK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	169,95	-	-	-	-	-	169,95
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	25,00	-	-	-	-	-	25,00
23	Kalimantan Selatan	465,00	-	-	-	-	-	465,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		659,95	-	-	-	-	-	659,95

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d. Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

6) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Konservasi (KK) menjadi Hutan Lindung (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	3.738,00	-	-	-	3.738,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	285,55	-	-	285,55
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	3.738,00	285,55	-	-	4.023,55

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d. Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

7) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Konservasi (KK) menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	9.477,00	-	-	-	9.477,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	341,55	-	-	341,55
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	9.477,00	341,55	-	-	9.818,55

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d. Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

8) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	386,50	-	-	386,50
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	40,84	40,84
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	103,00	-	404,00	507,00
34	Papua Barat	-	-	-	271,00	-	-	271,00
JUMLAH		-	-	-	760,50	-	444,84	1.205,34

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d. Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

9) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	12.150	-	-	-	-	-	12.150,00
4	Riau	49.700	-	-	-	-	-	49.700,00
5	Kepulauan Riau	3.902	-	-	-	-	50,00	3.952,00
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	2.988	2.988,00
22	Kalimantan Timur	1.820	-	-	-	-	-	1.820,00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	18.445	-	-	-	-	-	18.445,00
30	Sulawesi Barat	9.125	-	-	-	-	-	9.125,00
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	2.856	-	-	-	-	-	2.856,00
JUMLAH		97.998,00	-	-	-	-	3.038,00	101.036,00

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d. Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

10) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) menjadi Kawasan Konservasi (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	5.920,00	-	-	-	-	-	5.920,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	58.450,00	-	3.297,00	-	-	-	61.747,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	3.221,00	-	-	-	-	-	3.221,00
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		67.591,00	-	3.297,00	-	-	-	70.888,00

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d. Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

11) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	800,00	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	9.840,00	-	-	-	-	-	-
4	Riau	6.000,00	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	29.924,85	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	261,00	-	76.532,00	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	6.303,00	7.730,57	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	64,00	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	3.915,00	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	2.436,00	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		59.543,85	7.730,57	76.532,00	-	-	-	-

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d. Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

12) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	1.200,00	-	-	-	-	-	-	1.200,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	59.120,00	-	-	-	-	-	-	59.120,00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		60.320,00	-	-	-	-	-	-	60.320,00

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d. Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

13) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi Hutan Lindung (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	11.595,00	-	-	-	-	-	11.595,00
23	Kalimantan Selatan	66.000,00	-	-	-	-	-	66.000,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		77.595,00	-	-	-	-	-	77.595,00

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d. Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

14) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi Kawasan Konservasi (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	43.100,00	-	-	-	-	-	43.100,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	3.242,00	-	-	-	3.242,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	25.560,00	-	-	-	-	-	25.560,00
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	24.804,80	-	-	-	-	-	24.804,80
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	617,00	-	-	-	-	-	617,00
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	352,62	-	-	-	-	-	352,62
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	600.250,00	-	-	-	-	-	600.250,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	11.759,00	-	-	-	-	-	11.759,00
28	Sulawesi Selatan	10.355,00	-	-	-	-	-	10.355,00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	6.075,00	-	-	-	-	-	6.075,00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		722.873,42	-	3.242,00	-	-	-	726.115,42

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

15) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Hutan Lindung (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	14.780	-	-	-	-	-	14.780,00
5	Kepulauan Riau	12.950	-	-	-	-	-	12.950,00
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	133.075	-	-	-	-	-	133.075,00
22	Kalimantan Timur	31.685	-	-	-	-	-	31.685,00
23	Kalimantan Selatan	5.900	-	-	-	-	-	5.900,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		198.390,00	-	-	-	-	-	198.390,00

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

16) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	213.221,00	-	-	-	-	-	213.221,00
3	Sumatera Barat	11.148,00	-	-	-	-	-	11.148,00
4	Riau	194.440,00	-	-	-	-	-	194.440,00
5	Kepulauan Riau	342,82	-	-	-	-	-	342,82
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2.710,00	-	-	-	-	-	2.710,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	20.160,00	-	-	-	-	-	20.160,00
22	Kalimantan Timur	77.010,00	-	-	-	-	-	77.010,00
23	Kalimantan Selatan	31.790,00	-	-	-	-	-	31.790,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		550.821,82	-	-	-	-	-	550.821,82

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

17) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	14.747,00	-	-	-	-	-	14.747,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	13.388,00	-	-	-	-	-	13.388,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	144,00	-	144,00
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	1.218,43	-	-	-	-	1.218,43
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	234,50	-	-	-	-	-	234,50
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	3.200,00	-	-	-	-	-	3.200,00
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	1.030,00	-	-	-	-	-	1.030,00
JUMLAH		32.599,50	1.218,43	-	-	-	144,00	33.961,93

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

18) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Kawasan Konservasi (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	6.163,75	-	-	-	-	-	6.163,75
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	137.376,00	-	-	-	-	-	137.376,00
5	Kepulauan Riau	0,00	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	20.700,00	-	-	-	-	-	20.700,00
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	41.025,56	-	-	-	-	-	41.025,56
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	649,00	-	-	-	649,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	193,00	-	-	-	-	-	193,00
28	Sulawesi Selatan	145,00	-	-	-	-	-	145,00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	7.650,00	-	-	-	-	-	7.650,00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		213.253,31	-	649,00	-	-	-	213.902,31

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

19) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL) Menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	20.290,00	-	-	-	-	-	20.290,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	55,00	-	-	-	-	-	55,00
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	2.958,00	-	-	-	2.958,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	48.021,12	-	-	-	-	-	48.021,12
21	Kalimantan Tengah	53.125,00	-	-	-	-	-	53.125,00
22	Kalimantan Timur	59.285,00	-	-	-	-	-	59.285,00
23	Kalimantan Selatan	56.007,21	-	-	-	-	-	56.007,21
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	959,71	301,00	-	1.260,71
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	1.962,75	-	-	-	-	-	1.962,75
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	6.549,76	-	-	-	-	-	6.549,76
33	Papua	-	-	-	44.599,00	-	-	44.599,00
34	Papua Barat	-	-	-	1.137,00	-	-	1.137,00
JUMLAH		245.295,84	-	2.958,00	46.695,71	301,00	-	295.250,55

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

20) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Lindung (HL) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	2.725,00	-	-	-	-	-	2.725,00
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	167,40	3,00	-	-	170,40
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	6.351,22	-	-	-	-	-	6.351,22
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	583,00	-	-	-	-	-	583,00
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	102,00	-	102,00
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	5.170,00	-	-	-	-	-	5.170,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	1.942,00	-	17,30	-	-	-	1.959,30
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2.990,00	-	165,00	-	-	-	3.155,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	8.750,00	-	-	-	-	-	8.750,00
22	Kalimantan Timur	2.460,00	-	-	-	-	-	2.460,00
23	Kalimantan Selatan	11.926,54	-	-	-	-	-	11.926,54
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	295,40	-	-	-	-	-	295,40
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	83.185,00	-	-	83.185,00
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		43.193,16	-	349,70	83.188,00	102,00	-	126.832,86

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

21) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Kawasan Konservasi (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	S/D TAHUN 2019 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	70.755	-	-	-	-	-	70.755,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	40.390	-	-	-	-	-	40.390,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	32.686	-	-	-	-	-	32.686,70
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	11.076	-	-	-	-	-	11.075,56
15	D.I. Yogyakarta	1.001	-	-	-	-	-	1.000,66
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	3.155	-	-	-	-	-	3.155,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	3.923,00	3.923,00
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	6.514,95	-	6.514,95
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	10.659	-	-	-	-	-	10.659,00
28	Sulawesi Selatan	22.063	-	-	-	-	-	22.063,10
29	Sulawesi Tenggara	4.000	-	-	-	-	-	4.000,00
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	153.575	-	-	-	-	-	153.575,00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		349.359,02	-	-	-	6.514,95	3.923,00	359.796,97

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.2. PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (TAHAP SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN)

NO	PROVINSI	S/D	TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		S/D TAHUN 2019	
			UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Aceh	12	39.376,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	39.376,65	
2	Sumatera Utara	12	28.054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	28.054,00	
3	Sumatera Barat	10	17.433,85	-	-	1	900,75	-	-	-	-	-	-	11	18.334,60	
4	Riau	12	68.812,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	68.812,98	
5	Jambi	14	78.412,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	78.412,53	
6	Sumatera Selatan	33	122.140,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	122.140,80	
7	Bengkulu	5	14.327,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14.327,45	
8	Lampung	16	134.147,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	134.147,20	
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kepulauan Riau	2	7.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.530,00	
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Nusa Tenggara Barat	2	2.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.950,00	
19	Nusa Tenggara Timur	2	1.137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.137,00	
20	Kalimantan Barat	17	28.804,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	28.804,72	
21	Kalimantan Tengah	34	71.387,87	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.194,85	35	72.582,72	
22	Kalimantan Selatan	9	31.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	31.916,00	
23	Kalimantan Timur	7	36.600,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	36.600,08	
24	Kalimantan Utara	2	3.291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.291,00	
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Sulawesi Tengah	18	21.558,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	21.558,15	
27	Sulawesi Selatan	6	4.015,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4.015,35	
28	Sulawesi Tenggara	21	37.035,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	37.035,71	
29	Gorontalo	3	5.089,56	-	-	1	571,74	-	-	-	-	-	-	4	5.661,30	
30	Sulawesi Barat	2	2.486,00	-	-	1	1244,78	-	-	-	-	-	-	3	3.730,78	
31	Maluku	3	5.664,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.664,58	
32	Maluku Utara	11	19.654,14	-	-	1	1057,16	-	-	-	-	2	1.577,61	14	22.288,91	
33	Papua	16	92.336,70	-	-	-	-	1	195,76	-	-	-	-	17	92.532,46	
34	Papua Barat	8	16.397,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16.397,74	
JUMLAH		277	893.851,07	-	-	4	3.774,43	1	195,76	-	-	3	2.772,46	285	897.302,71	

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d. Desember 2019

Keterangan

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.3. PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK NON KEHUTANAN LAINNYA
(Tahap SK Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		S/D TAHUN 2019	
		UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Aceh	58	265.743,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	265.743,70
2	Sumatera Utara	28	143.194,23	-	-	-	-	-	-	1	386,72	-	-	29	143.580,95
3	Sumatera Barat	27	164.385,89	-	-	1	5.370,25	-	-	-	-	-	-	28	169.756,14
4	Riau	137	1.535.043,10	1	3.393,00	1	4.629,40	-	-	-	-	8	17.253,65	147	1.560.319,15
5	Jambi	43	349.236,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	349.236,98
6	Sumatera Selatan	44	359.637,74	-	-	2	5.259,85	2	904,38	1	65,18	2	1.570,97	51	367.438,12
7	Bengkulu	11	57.581,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	57.581,25
8	Lampung	7	59.959,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	59.959,45
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	9	65.027,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	65.027,87
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	3	846,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	846,86
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	24	273.271,97	2	5.427,30	-	-	-	-	-	-	-	-	26	278.699,27
21	Kalimantan Tengah	107	979.869,32	12	65.546,05	9	32.151,29	14	65.183,77	6	16.948,48	6	20.050,77	154	1.179.749,68
22	Kalimantan Selatan	19	215.659,06	-	-	-	-	1	7.231,96	2	2.716,88	-	-	22	225.607,90
23	Kalimantan Timur	49	417.594,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	417.594,56
24	Kalimantan Utara	10	111.090,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	111.090,13
25	Sulawesi Utara	1	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000,00
26	Sulawesi Tengah	9	78.532,90	-	-	-	-	-	-	1	9.964,00	-	-	10	88.496,90
27	Sulawesi Selatan	5	5.452,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.452,64
28	Sulawesi Tenggara	3	20.784,20	-	-	1	4.003,45	-	-	2	17.820,40	-	-	6	42.608,05
29	Gorontalo	6	62.829,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	62.829,68
30	Sulawesi Barat	10	103.776,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	103.776,71
31	Maluku	13	13.044,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13.044,07
32	Maluku Utara	11	59.949,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	59.949,14
33	Papua	37	938.618,53	-	-	1	12.245,80	5	102.150,14	1	28.817,42	2	21.162,53	46	1.102.994,42
34	Papua Barat	19	352.752,34	2	31.917,40	-	-	3	57.600,86	-	-	2	15.238,26	26	457.508,86
JUMLAH		690	6.635.882,32	17*	106.283,75	15*	63.660,04	25*	233.071,11	14*	76.719,08	20	75.276,18	781	7.190.892,48

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d. Desember 2019

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

*) : Perubahan terjadi karena ada hasil pencermatan proses TMKH dan Pelepasan Kawasan Hutan (termasuk proses pelepasan sesuai mekanisme PP 60 Tahun 2012 dan Pasal 51 PP 104 Tahun 2015)

TABEL IV.4. PERKEMBANGAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2014				TAHUN 2015				TAHUN 2016				TAHUN 2017				TAHUN 2018				TAHUN 2019				SID TAHUN 2019					
		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar			
		Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Sumatera Utara	1	277,30	1	271,10	-	-	-	-	1	13.571,00	1	12.781,10	1	480	1	480,11	-	-	-	-	-	-	-	3	14.328,30	3	13.532,31	-	-	
3	Sumatera Barat	1	13.414,00	1	13.414,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.414,00	1	13.414,00	-	-	
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4200	1	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Lampung	2	1.464	1	30	1	1.373,67	1	1.308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Kepulauan Riau	1	850,50	1	119,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Jawa Barat	10	5.269	10	1.127	1	10,00	1	10,28	-	-	-	-	1	90,40	1	45,04	1	8,100	1	7,746	1	11	1	11	14	5.388,48	14	1.200,74		
13	Jawa Tengah	7	362,22	6	121,89	-	-	-	-	1	177,8	1	163,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3,20	9	544,02	8	288,99
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Jawa Timur	23	1.773,07	22	1.152,48	-	-	-	-	4	79,52	4	61,17	3	10,980	3	10,814	2	67,07	2	33,45	1	23	1	17,26	33	1.953,93	32	1.275,17	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Bali	15	103,00	15	76,00	1	84,14	1	62,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	187,14	16	138,14	-	-
18	NTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	NTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Kalimantan Selatan	2	1.198,00	1	578,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.670,00	1	8.670,00	1	8.670,00	
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18.198,00	2	17.708,50	3	19.396,00	
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.905,00	1	1.814,40	1	1.905,00	
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Sumber : Direktorat Pengkuan dan Penatgunaan Kawasan Hutan, Data s.d Desember 2019

Ket : TM : Tanah Masuk / Compensated area for forest

TK : Tanah Keluar / Converted forest area for non forest

- : Nilai/Tidak ada kegiatan

*) : Perubahan terjadi karena ada hasil pencermatan proses TMKH dan Pelepasan Kawasan Hutan (termasuk proses pelepasan sesuai mekanisme PP 60 Tahun 2012 dan Pasal 51 PP 104 Tahun 2015)

TABEL IV.5. REALISASI PENYELESAIAN PENYEDIAAN KAWASAN HUTAN UNTUK TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) S.D. DESEMBER 2019

No	Kriteria	Luas Peta Indikator TORA Revisi IV	Target 2015-2019	Progres Capaian Tahun								Total 2015-2019 (5+6+7+8+9+10+11+12)	Persen Capaian	
				2015	2016	2017	2018	s.d. Desember 2019						
								Persetujuan PPTKH Periode 1	Persetujuan PPTKH Periode 2	RTRW*	Addendum IUPHHK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Non-Eksisting (Non-Inver)	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	437.936	0	341.731	33.392	54.235					429.358	98%	
2		Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif	1.590.000	0	0	0	938.878					938.878	59%	
3		Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	67.028	0	0	0	39.229					39.229	59%	
		Jumlah non eksisting	1.723.061	2.094.964	0	341.731	33.392	1.032.342					1.407.465	67%
4	Eksisting (Inver)	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	502.382	0	41.367	9.342	213.870					264.579	53%	
5		Permukiman fasos dan fasum	642.835	0		0								
6		Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	366.504	0	307.516	0			179.145	151.212	296.061	51.029	984.963	62%
7		Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	590.000	0		0								
	Jumlah eksisting	3.248.038	2.101.721	0	348.883	9.342	213.870	179.145	151.212	296.061	51.029	1.249.542	59%	
	Jumlah Total	4.971.099	4.196.685	0	690.614	42.734	1.246.212					2.657.007	63%	

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Keterangan:

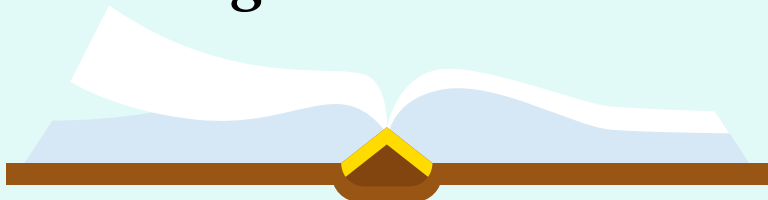
- a) Angka 1 masih menunggu PP untuk menarik 20% (429.358 ha) di lokasi pelepasan.
b) Angka 2 (938.878 ha) masih perlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah sesuai Permenko.
c) Angka 3 (39.229 ha) masih perlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah sesuai Permenko.
d) Angka 4 sudah dikeluarkan SK Pelepasan (264.578,31 ha) di clear jadi APL, tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN (sudah terbit sertifikat seluas 16.340 ha untuk 6.515 KK pada 41 lokasi)
e) Angka 5,6, dan 7 terdiri dari :
- Data Realisasi Tata Batas 2014 sd 2018 di 307.516 ha (clear jadi APL), tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN.
- Realisasi perubahan kawasan hutan dalam rangka RTRWP Kalimantan (16.503 ha), Kepri (207.000 ha), Sulsel (72.558 ha) di 296.061 ha (clear jadi APL), tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN
- Adendum IUPHHK di 34.134 ha (clear jadi APL), tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN.
- Adendum IUPHHK di 16.895 ha (Kawasan Hutan), tindak lanjut Perhutanan Sosial.
- SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten: 109.960,4 ha (perubahan batas)
- SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten: 69.176,5 ha (perhutanan sosial)
- SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten: 94.702 ha (perubahan batas)
- SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten: 56.503,5 ha (perhutanan sosial)

*) SK Penyelesaian Pola PPTKH di 130 Kabupaten, saat ini tengah dilakukan tata batas di lapangan. Sudah ada SK Perubahan Batas di Kalbar, Kalteng, dan Kalsel (sudah dibagi dalam acara Penyerahan Hasil TORA oleh Presiden di Pontianak, 5 September 2019)



PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

***Direktorat Rencana,
Penggunaan dan Pembentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan***



TABEL V.1. PERKEMBANGAN PENETAPAN WILAYAH KPH (KPHP DAN KPHL)

NO	PROVINSI	TAHAPAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	TAHUN																	
					SID 2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019			
					Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.	Aceh	1. Rancang Bangun	S.1737/VII-WP3H/2013 SK.932/Menhut-II/2014	31 Desember 2013 31 Desember 2014	0	-	-	2.544.205	6	2.521.333												
		0			-																	
		0			-																	
		0			-																	
2.	Sumatera Utara	1. Rancang Bangun	SK. 102/Menhut-II/2010	5 Maret 2010	0	-																
		35			3.202.990,00																	
		33			3.204.780,00																	
		33			3.196.381,00																	
3.	Sumatera Barat	1. Rancang Bangun	SK.798/Menhut-VIII/2009	7 Desember 2009	0	-																
		9			1.681.204,00																	
		9			1.681.204,00																	
		11			1.679.564,00																	
4.	Riau	1. Rancang Bangun	S.632/VII-WP3H/2010 SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.07/2019	15 September 2010 18 Juli 2019	38	3.634.974,00																
		30			3.661.304,87																	
		0			-																	
		0			-																	
5.	Kepulauan Riau	1. Rancang Bangun	S.257/VII-WP3H/2010 522/969/set SK.452/Menhk/Seijen/PLA.06/2016	6 Mei 2010 30 September 2015 17 Juni 2016	0	-																
		6			259.617,00																	
		0			-																	
		0			-																	
6.	Jambi	1. Rancang Bangun	SK. 77/Menhut-VIII/2010	10 Pebruari 2010	18	1.503.320,00																
		17			1.444.198,00																	
		17			1.461.000,00																	
		17			1.458.934,00																	
7.	Bengkulu	1. Rancang Bangun	SK. 91/Menhut-VIII/2010	19 Pebruari 2010	0	-																
		5			462.734,00																	
		7			481.195,00																	
		7			472.664,00																	
8.	Bangka Belitung	1. Rancang Bangun	SK. 797/Menhut-VIII/2009	7 Desember 2009	0	-																
		13			628.165,00																	
		13			-																	
		13			641.801,00																	
9.	Sumatera Selatan	1. Rancang Bangun	SK. 76/Menhut-II/2010	10 Pebruari 2010	0	-																
		20			2.601.689,00																	
		24			2.433.934,00																	
		24			2.558.407,00																	
10.	Lampung	1. Rancang Bangun	SK. 68/Menhut-II/2010	28 Januari 2010	0	-																
		12			501.549,00																	
		16			542.704,80																	
		16			518.913,00																	
11.	DI Yogyakarta	1. Rancang Bangun	SK.122/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	5 Maret 2018	0	-																
		0			-																	
		1			16.358,60																	
		1			16.358,60																	
12.	Bali	1. Rancang Bangun	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.02/2018	12 Februari 2018	0	-																
		3			106.427,00																	
		4			110.309,62																	
		4			105.765,92																	

NO	PROVINSI	TAHAPAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	TAHUN																	
					SID 2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019			
					Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)		
26.	Maluku Utara	1. Rancang Bangun 2. Arahkan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK. 73/Menhut-II/2010		0 16 0 16	- 1.730.281,00 - 1.768.424,00																
27	Papua	1. Rancang Bangun 2. Arahkan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan		8 Februari 2010	0 56 56 56	- 18.180.146,00 18.239.238,00 18.180.201,00																
28	Papua Barat	1. Rancang Bangun 2. Arahkan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK. 481/Menhut-II/2009	18 Agustus 2009	0 21 21 21	- 5.388.407,00 5.404.745,00 5.404.745,00																

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d. 31 Desember 2019

Ket :

Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak memiliki wilayah KPH
Wilayah KPH di Provinsi Kalimantan Utara masih tergabung dalam Provinsi Kalimantan Timur

TABEL V.2. PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN						
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikonversi	Tahura	Luas (ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Aceh	Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Kota Langsa	KPHL Unit III Aceh	SK. 992/Menhut-II/2013	27/12/2013	406.273	276.118	-	-	-	682.391	
2	Sumatera Utara	Mandailing Natal	KPHP Mandailing Natal	SK. 332/Menhut/II/2010	25/05/2010	12.881	14.704	131.781	-	-	159.166	
3	Sumatera Utara	Toba Samosir dan Labuhan Batu Utara	KPHL Unit XXII	SK. 993/Menhut-II/2013	27/12/2013	65.038	-	51.189	-	-	116.227	
4	Sumatera Utara	Toba Samosir	KPHL Tobasamir	SK. 866/Menhut-II/2013	06/12/2013	75.762	5.191	6.294	-	-	87.247	
5	Sumatera Barat	Dharmasraya	KPHP Dharmasraya	SK. 695/Menhut-II/2013	21/11/2013	-	17.721	15.829	-	-	33.550	
6	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	KPHP Pesisir Selatan	SK. 696/Menhut-II/2013	21/11/2013	9.091	4.563	48.274	-	-	59.928	
7	Sumatera Barat	Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok dan Tanah Datar	KPHL Bukit Barisan	SK. 867/Menhut-II/2013	05/12/2013	69.504	16.759	245	-	-	86.508	
8	Sumatera Barat	Lima Puluh Kota	KPHL Lima Puluh Kota (Unit II)	SK. 44/Menhut/II/2012	02/02/2012	94.883	5.286	17.383	-	-	117.552	
9	Sumatera Barat	Sijunjung	KPHL Sijunjung	SK. 331/Menhut/II/2010	25/05/2010	83.952	40.785	25.755	-	-	150.492	
10	Sumatera Barat	Solok	KPHL Solok (unit VI)	SK. 42/Menhut/II/2012	02/02/2012	114.061	3.481	12.804	-	-	130.346	
11	Sumatera Selatan	Banyuasin	KPHL Banyuasin	SK. 961/Menhut-II/2013	27/12/2013	69.147	5.660	-	-	-	74.807	
12	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	KPHP Meranti	SK. 689/Menhut-VIII/2012	29/11/2012	20.082	134.597	97.588	-	-	252.267	
13	Sumatera Selatan	Musi Rawas	KPHP Rawas	SK. 688/Menhut-VIII/2012	29/11/2012	-	89.511	32.074	-	-	121.585	
14	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu, Muara Enim dan Lahat	KPHP Unit XIV Benakat Revisi	SK. 827/Menhut-II/2013	19/11/2013	-	256.594	-	-	-	256.594	
15	Sumatera Selatan	Mus Rawas	KPHP Lakitan Unit VI	SK. 790/Menhut/II/2009	07/12/2009	-	76.776	-	-	-	76.776	
16	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	KPHP Lalan	SK. 789/Menhut/II/2009	07/12/2009	-	265.953	-	-	-	265.953	
17	Kepulauan Riau	Karimun	KPHL Karimun	SK. 442/Menhut/II/2012	09/08/2012	9.605	-	8.002	-	-	17.607	
18	Riau	Siak, Kampar dan Kota Pekanbaru	KPHP Minas Tahura	SK. 765/Menhut-II/2012	26/12/2012	-	-	140.562	-	6.172	146.734	
19	Riau	Kampar	KPHP Kampar Kiri (Unit XVIII)	SK. 640/Menhut/II/2011	07/11/2011	24.028	-	119.755	-	-	143.783	
20	Riau	Kepulauan Meranti	KPHP Tebing Tinggi (Unit XXIV)	SK. 343/Menhut/II/2011	28/06/2011	412	-	69.335	-	-	69.747	
21	Riau	Pelalawan, Siak	KPHP Tasik Besar Serkap	SK. 509/Menhut/II/2010	21/09/2010	-	491.768	2.660	18.848	-	513.276	
22	Kep. Bangka Belitung	Bangka	KPHP Sigambir-Kolawaringin	SK. 962/Menhut-II/2013	27/12/2013	4.769	30.169	-	-	-	34.938	
23	Kep. Bangka Belitung	Bangka Tengah	KPHP Sungai Sembulan	SK. 329/Menhut/II/2010	25/05/2010	5.185	34.228	-	-	-	39.413	
24	Kep. Bangka Belitung	Bangka Barat	KPHP Rambat Menduyung	SK. 763/Menhut-II/2012	26/12/2012	8.803	50.819	-	-	-	59.622	
25	Kep. Bangka Belitung	Belitung Timur	KPHP Gunung Duren	SK. 764/Menhut-II/2012	26/12/2012	12.615	45.620	-	-	-	58.235	
26	Bengkulu	Bengkulu Utara	KPHP Bengkulu Utara	SK. 995/Menhut-II/2013	27/12/2013	165	9.546	42.640	-	-	52.351	
27	Bengkulu	Muko-Muko	KPHP Muko-Muko	SK. 330/Menhut/II/2010	25/05/2010	-	11.937	66.337	-	-	78.274	
28	Bengkulu	Rejang Lebong	KPHL Bukit Balai Rejang	SK. 994/Menhut-II/2013	27/12/2013	16.059	-	-	-	-	16.059	
29	Jambi	Kerinci	KPHP Kerinci	SK. 960/Menhut-II/2013	27/12/2013	-	34.250	-	-	-	34.250	
30	Jambi	Merangin	KPHP Bukit Lubuk Pekak-Hulu Landai	SK. 43/Menhut/II/2012	02/02/2012	36.088	9.944	30.105	-	-	76.137	
31	Jambi	Sarolangun	KPHP Limau unit VII	SK. 714/Menhut/II/2011	19/12/2011	54.793	43.807	22.502	-	-	121.102	
32	Jambi	Tanjung Jabung Barat	KPHL Sungai Beram Hitam	SK. 787/Menhut/II/2009	07/12/2009	15.965	-	-	-	-	15.965	
33	Lampung	Pesawaran	KPHL Pesawaran	SK. 438/Menhut-II/2012	09/08/2012	9.944	1.260	-	-	-	11.204	
34	Lampung	Way Kanan	KPHP Bukit Punggur	SK. 439/Menhut-II/2012	09/08/2012	19.131	21.995	-	-	-	41.126	
35	Lampung	Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus	KPHL Batu Teqi	SK. 650/Menhut/II/2010	22/11/2010	58.162	-	-	-	-	58.162	

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN					
				NO SK	TANGGAL	Luas (ha)					
						Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikonversi	Tahura	Luas Total (ha)
36	Lampung	Lampung Selatan	KPHL Rajabasa (Unit XIV)	SK.367/Menhut/II/2011	07/07/2011	5.160	-	-	-	-	5.160
37	Lampung	Lampung Selatan, Lampung Timur	KPHP Gedong Wani (Unit XVI)	SK.427/Menhut/II/2011	27/07/2011	-	30.243	-	-	-	30.243
38	Lampung	Lampung Tengah	KPHP Register 47 Way Terusan	SK. 794/Menhut/II/2009	07/12/2009	-	12.500	-	-	-	12.500
39	Lampung	Mesuji	KPHP Sungai Buaya	SK.996/Menhut-II/2013	27/12/2013	-	44.249	-	-	-	44.249
40	Lampung	Tanggamus	KPHL Kotaagung Utara (Unit X)	SK.379/Menhut/II/2011	18/07/2011	56.020	-	-	-	-	56.020
41	Lampung	Tulang Bawang, Way Kanan	KPHP Muara Dua	SK.236/Menhut/II/2011	10/05/2012	-	49.134	-	-	-	49.134
42	DI Yogyakarta	Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo	KPHP Yogyakarta	SK. 721/Menhut/II/2011	20/12/2011	2.313	13.412	-	-	-	15.725
43	Bali	Buleleng, Bangli, Tabanan, Badung	KPHL Bali Tengah (Unit II)	SK. 620/Menhut/II/2011	01/11/2011	14.651	-	-	-	-	14.651
44	Bali	Buleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung	KPHL Bali Timur (Unit III)	SK. 621/Menhut/II/2011	01/11/2011	21.891	1.087	-	-	-	22.978
45	Bali	Jembrana, Buleleng, Tabanan	KPHL Bali Barat	SK. 784/Menhut/II/2009	07/12/2009	59.848	1.892	1.610	-	-	63.350
46	Nusa Tenggara Barat	Bima, Dompu	KPHP Tambora Utara	SK.970/Menhut-II/2013	27/12/2013	-	14.769	12.151	-	-	26.920
47	Nusa Tenggara Barat	Bima dan Kota Bima	KPHP Maria Unit XXIII	SK.752/Menhut-II/2012	26/12/2012	8.515	4.554	14.563	-	-	27.632
48	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	KPHL Ampang	SK.751/Menhut-II/2012	26/12/2012	24.168	8.261	6.252	-	-	38.681
49	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat, Lombok Utara	KPHL Rinjani Barat	SK. 785/Menhut/II/2009	07/12/2009	28.911	5.075	6.977	-	-	40.963
50	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	KPHL Tastura	SK.963/Menhut-II/2013	27/12/2013	11.153	5.000	-	-	-	16.153
51	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	KPHL Rinjani Timur	SK.225/Menhut/II/2012	04/05/2012	31.987	5.602	-	-	-	37.589
52	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	KPHP Batulanteh (Unit IX)	SK.342/Menhut/II/2011	28/06/2011	14.303	14.842	3.631	-	-	32.776
53	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	KPHP Seiorong	SK.971/Menhut-II/2013	27/12/2013	15.762	5.274	19.952	-	-	40.988
54	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	KPHP Rote Ndao	SK. 333/Menhut/II/2010	25/05/2010	15.509	25.221	-	-	-	40.730
55	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	KPHL Flores Timur	SK.972/Menhut-II/2013	27/12/2013	39.856	1.793	13.759	-	-	55.408
56	Nusa Tenggara Timur	Alor	KPHL Alor Pantar	SK.767/Menhut-II/2012	26/12/2012	59.419	22.938	21.977	-	-	104.334
57	Nusa Tenggara Timur	Kupang, Timor Tengah Utara, Timour Tengah Selatan	KPHL Mutis Timau (Unit XIX)	SK.417/Menhut/II/2012	02/02/2012	97.005	-	18.375	-	-	115.380
58	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	KPHP Manggarai Barat	SK.973/Menhut-II/2013	27/12/2013	27.113	18.613	14.571	-	-	60.297
59	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	KPHP Kapuas Hulu (Unit XVIII dan Unit XIX)	SK.380/Menhut/II/2011	18/07/2011	224.522	83.241	150.262	-	-	458.025
60	Kalimantan Barat	Ketapang	KPHP Kendawangan	SK.680/Menhut/II/2012	23/11/2012	16.268	162.583	-	-	-	178.851
61	Kalimantan Barat	Sintang	KPHP Sungai Merakai	SK. 791/Menhut/II/2009	07/12/2009	10.420	46.473	-	-	-	56.893
62	Kalimantan Timur	Berau	KPHP Berau Barat	SK. 649/Menhut/II/2010	22/11/2010	247.025	118.261	410.253	-	-	775.539
63	Kalimantan Timur	Bulungan	KPHP Kayan	SK.223/Menhut/II/2012	04/05/2012	168.198	9.776	309.868	-	-	487.842
64	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan	KPHP Meratus	SK.768/Menhut-II/2012	26/12/2012	-	274.159	113.329	-	-	387.488
65	Kalimantan Timur	Kota Tarakan	KPHL Tarakan	SK. 783/Menhut/II/2009	07/12/2009	2.400	-	2.223	-	-	4.623
66	Kalimantan Timur	Malinau	KPHL Malinau	SK.224/Menhut/II/2012	04/05/2012	220.723	110.518	384.271	-	-	715.512
67	Kalimantan Timur	Paser	KPHP Kendilo	SK.966/Menhut-II/2013	27/12/2013	44.152	61.051	34.032	-	-	139.235
68	Kalimantan Selatan	Banjarnegara	KPHP Banjar	SK. 793/Menhut/II/2009	07/12/2009	42.090	72.513	25.354	-	-	139.957
69	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Selatan	KPHL Hulu Sungai Selatan	SK.750/Menhut-II/2012	26/12/2012	21.221	11.530	52	-	-	32.803
70	Kalimantan Selatan	Kota baru	KPHP Pulau Laut dan Sebuku (UNIT III)	SK.226/Menhut/II/2012	04/05/2012	12.863	99.395	-	-	-	112.258
71	Kalimantan Selatan	Tabalong	KPHP Tabalong	SK.997/Menhut-II/2013	27/12/2013	48.776	44.759	23.822	-	-	117.357
72	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	KPHP Tanah Laut	SK.440/Menhut/II/2012	09/08/2012	15.862	71.490	5.289	-	-	92.641
73	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	KPHL Gerbang Barito	SK.964/Menhut-II/2013	27/12/2013	90.361	43.345	20.961	-	-	154.667

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN					
				Luas (ha)					Tahura	Luas Total (ha)	
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas			Hutan Produksi yang Dikonversi
74	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	KPHP Gunung Mas	SK.974/Menhut-II/2013	27/12/2013	57.337	50.107	187.291	-	-	294.735
75	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	KPHP Kota Waringin Barat	SK.749/Menhut-II/2012	19/12/2011	9.672	257.160	49.303	-	-	316.135
76	Kalimantan Tengah	Lamandau	KPHP Lamandau	SK.717/Menhut-II/2012	26/12/2012	25.432	19.906	180.951	-	-	226.289
77	Kalimantan Tengah	Kapuas	KPHL Kapuas	SK. 247/Menhut/II/2011	02/05/2011	105.372	-	-	-	-	105.372
78	Kalimantan Tengah	Murung Raya	KPHP Murung Raya	SK.965/Menhut-II/2013	27/12/2013	103.578	205.729	598.948	-	-	908.255
79	Kalimantan Tengah	Seruyan	KPHP Seruyan (Unit XXI)	SK. 716/Menhut/II/2011	19/12/2011	38.970	6.112	328.827	-	-	373.909
80	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan	KPHP Poigar	SK. 788/Menhut/II/2009	07/12/2009	5.265	19.739	16.594	-	-	41.598
81	Gorontalo	Boalemo	KPHP Boalemo (Unit V)	SK.402/Menhut/II/2011	21/07/2011	29.383	12.403	55.140	-	-	96.926
82	Gorontalo	Gorontalo	KPHP Gorontalo	SK.976/Menhut-II/2013	27/12/2013	13.126	17.781	40.775	-	-	71.682
83	Gorontalo	Gorontalo Utara	KPHP Gorontalo Utara	SK.766/Menhut-II/2012	26/12/2012	18.632	15.759	71.417	-	-	105.808
84	Gorontalo	Pohuwato	KPHL Unit III Pohuwato	SK. 334/Menhut/II/2010	25/05/2010	59.301	13.605	43.369	-	-	116.275
85	Sulawesi Tengah	Banggai, Tojo Una-Una Morowali	KPHP Toili Baturube	SK.967/Menhut-II/2013	27/12/2013	126.447	55.389	94.800	-	-	276.636
86	Sulawesi Tengah	Donggala, Parigi, Moutong	KPHP Dampelas Tinombo	SK. 792/Menhut/II/2009	07/12/2009	21.017	10.244	69.651	-	-	100.912
87	Sulawesi Tengah	Banggai	KPHP Balantak	SK.754/Menhut-II/2012	26/12/2012	30.418	28.049	58.936	-	-	117.403
88	Sulawesi Tengah	Buol	KPHP Pogogul	SK.756/Menhut-II/2012	26/12/2012	44.257	54.008	101.268	-	-	199.533
89	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong, Sigi, Donggala dan Kota Palu	KPHP Dolago Tanggunung	SK.755/Menhut-II/2012	26/12/2012	67.794	19.008	57.548	-	-	144.350
90	Sulawesi Tengah	Poso	KPHP Sintuwu Maroso/Rano Patanu	SK. 639/Menhut/II/2011	07/11/2011	46.341	28.740	62.349	-	-	137.430
91	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	KPHP Unit XVII Tojo Una-Una	SK.968/Menhut-II/2013	27/12/2013	39.921	10.827	61.744	-	-	112.492
92	Sulawesi Barat	Mamuju, Mamasa	KPHL Ganda Dewata	SK.441/Menhut-II/2012	09/08/2012	157.598	-	-	-	-	157.598
93	Sulawesi Barat	Majene	KPHL Malunda	SK.753/Menhut-II/2012	26/12/2012	45.109	-	6.962	-	-	52.071
94	Sulawesi Barat	Mamasa	KPHL Mamasa Tengah (Unit VIII)	SK.340/Menhut/II/2011	27/06/2011	33.218	-	4.744	-	-	37.962
95	Sulawesi Barat	Mamasa	KPHP Mamasa Barat (Unit VII)	SK.341/Menhut/II/2011	27/06/2011	17.352	-	36.203	-	-	53.555
96	Sulawesi Barat	Mamuju Utara	KPHL Unit II Lanang	SK. 60/Menhut/II/2011	28/02/2011	34.512	2.394	21.010	-	-	57.916
97	Sulawesi Barat	Mamuju, Mamuju Tengah	KPHP Budong-Buddong	SK.998/Menhut-II/2013	27/12/2013	5.463	36.461	86.172	-	-	128.096
98	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	KPHL Mapili	SK. 651/Menhut/II/2010	22/11/2010	53.485	-	23.711	-	-	77.196
99	Sulawesi Tenggara	Bombana	KPHP Tina Orima bombana	SK.426/Menhut-II/2011	27/07/2011	23.659	74.514	17.953	-	-	116.126
100	Sulawesi Tenggara	Buton	KPHP Unit III Lakompa	SK. 795/Menhut/II/2009	07/12/2009	12.432	11.880	6.288	-	-	30.600
101	Sulawesi Tenggara	Buton Utara	KPHL Peropa'Ea Gantara	SK.975/Menhut-II/2013	27/12/2013	15.157	-	2.571	-	-	17.728
102	Sulawesi Tenggara	Konawe	KPHL Konawe	SK.762/Menhut-II/2012	26/12/2012	96.941	8.018	35.668	-	-	140.627
103	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan, Kota Kendari	KPHP Unit XXIV Gularaya	SK. 61/Menhut/II/2011	28/02/2011	41.405	89.343	3.671	-	-	134.419
104	Sulawesi Selatan	Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Takalar, Jeneponbo	KPHP Jeneberang (Unit IX)	SK. 715/Menhut/II/2011	19/12/2011	60.451	45.471	54.932	-	-	160.854
105	Sulawesi Selatan	Luwu Timur	KPHL Larona Malli (Unit I)	SK. 722/Menhut/II/2011	20/12/2011	156.593	6.391	79.008	-	-	241.992
106	Sulawesi Selatan	Wajo	KPHP Awota	SK.979/Menhut-II/2013	27/12/2013	5.539	13.532	-	-	-	19.071
107	Maluku Utara	Halmahera Selatan	KPHP Bacan	SK.969/Menhut-II/2013	27/12/2013	62.836	7.760	70.212	-	-	140.808
108	Maluku Utara	Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan	KPHP Gunung Sinopa	SK. 337/Menhut/II/2010	25/05/2010	21.056	9.604	13.917	-	-	44.577
109	Maluku	Buru	KPHP Wae Apu	SK.770/Menhut-II/2012	26/12/2012	73.478	62.921	96.033	-	-	232.432
110	Maluku	Maluku Tengah	KPHP Wae Sapalewa	SK. 336/Menhut/II/2010	25/05/2010	4.545	34.609	27.903	-	-	67.057
111	Maluku	Buru, Buru Selatan	KPHP Wae Tina	SK.977/Menhut-II/2013	27/12/2013	51.599	86.938	65.847	-	-	204.384
112	Maluku	Seram Bagian Timur	KPHP Wae Bubi	SK.978/Menhut-II/2013	27/12/2013	12.666	11.059	42.739	-	-	66.464
113	Papua Barat	Sorong Selatan	KPHP Sorong Selatan	SK.771/Menhut-II/2012	26/12/2012	121.361	73.189	88.710	-	-	283.260

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN					
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikonversi	Tahura	Luas Total (ha)
114	Papua Barat	Kota Sorong	KPHL Kota Sorong (remu)	SK.999/Menhut-II/2013	27/12/2013	6.602	-	6.173	-	-	12.775
115	Papua Barat	Sorong	KPHP Sorong	SK. 701/MenhutII/2010	20/12/2010	11.789	111.444	100.136	-	-	223.369
116	Papua	Biak Numfor	KPHL Biak Numfor	SK. 648/MenhutII/2010	22/11/2010	120.340	30.527	55.149	-	-	206.016
117	Papua	Keerom	KPHP Keerom Revisi	SK.828/Menhut-II/2013	19/11/2013	49.196	30.330	93.930	-	-	173.456
118	Papua	Sarmi dan Jayapura	KPHP Mamberamo Revisi	SK.829/Menhut-II/2013	19/11/2013	50.492	46.105	159.217	-	-	255.814
119	Papua	Waropen	KPHP Waropen	SK.760/Menhut-II/2012	26/12/2012	83.372	97.691	5.899	-	-	186.962
120	Papua	Kepulauan Yapen	KPHP Yapen	SK. 786/MenhutII/2009	07/12/2009	15.100	90.767	-	-	-	105.867

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d. 31 Desember 2019

TABEL V.3. PENETAPAN WILAYAH KPH KONSERVASI

NO	KPHK	PROVINSI	PENETAPAN KPHK		
			2	3	4
1	2	3	4	5	6
1	TN BALI BARAT	Bali	SK.780/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	19.002,00
2	TN UJUNG KULON	Banten	SK.775/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	122.956,00
3	TN BERBAK	Jambi	SK.774/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	62.700,00
4	TN GUNUNG HALIMUN SALAK	Jawa Barat	SK.776/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	113.357,00
5	TN ALAS PURWO	Jawa Timur	SK.801/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	43.420,00
6	TN MERU BETIRI	Jawa Timur	SK.779/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	58.000,00
7	TN TANJUNG PUTING	Kalimantan Tengah	SK.777/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	415.040,00
8	TN KUTAI	Kalimantan Timur	SK.778/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	198.629,00
9	TN GUNUNG RINJANI	Nusa Tenggara Barat	SK.781/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	41.330,00
10	TN BUNAKEN	Sulawesi Utara	SK.782/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	89.065,00
11	TN BOGANI NANI WARTABONE	Gorontalo	SK.716/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	287.115,00
12	TN BUKIT DUA BELAS	Jambi	SK.720/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	60.500,00
13	TN GUNUNG MERAPI	Jawa Tengah	SK.713/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	6.410,00
14	TN BALURAN	Jawa Timur	SK.718/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	25.000,00
15	TN DANAU SENTARUM	Kalimantan Barat	SK.715/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	132.000,00
16	TN GUNUNG PALUNG	Kalimantan Barat	SK.721/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	90.000,00
17	TN WAY KAMBAS	Lampung	SK.712/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	130.000,00
18	TN LAIWANGI WANGGAMETI	Nusa Tenggara Timur	SK.714/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	47.014,00
19	TN MANUPEU TANAH DARU	Nusa Tenggara Timur	SK.719/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	87.984,00
20	TN BANTIMURUNG BULUSARUNG	Sulawesi Selatan	SK.717/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	43.750,00
21	TN GUNUNG MERBABU	Jawa Tengah	SK.751/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	5.725,00
22	TN KARIMUNJAWA	Jawa Tengah	SK.749/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	111.625,00
23	TN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	Kalimantan Barat	SK.750/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	181.090,00
24	TN KAYAN MENTARANG	Kalimantan Utara	SK.752/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	1.360.500,00
25	TN MANUSELA	Maluku	SK.756/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	189.000,00
26	TN AKETAJAWA LOLOBATA	Maluku Utara	SK.757/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	167.300,00
27	TN KELIMUTU	Nusa Tenggara Timur	SK.754/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	5.356,50
28	TN KOMODO	Nusa Tenggara Timur	SK.753/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	173.000,00
29	TN RAWA AOPA WATUMOHAI	Sulawesi Tenggara	SK.755/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	105.194,00
30	TN SEMBILANG	Sumatera Selatan	SK.748/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	202.896,31
31	TN GUNUNG CIREMAI	Jawa Barat	SK.790/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	15.500,00
32	TN SEBANGAU	Kalimantan Tengah	SK.791/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	588.700,00
33	TN LORENTZ	Papua	SK.792/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	2.354.644,00
34	TN WASUR	Papua	SK.793/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	413.810,00
35	TN BUKIT TIGAPULUH	Riau	SK.789/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	144.223,00
36	TN TESSO NILO	Riau	SK.788/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	38.576,00
37	TN SIBERUT	Sumatera Barat	SK.787/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	190.500,00
38	TN BATANG GADIS	Sumatera Utara	SK.786/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	72.150,00
39	RAWA SINGKIL	Aceh	SK.980/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	102.500
40	NANTU	Gorontalo	SK.990/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	31.215

NO	KPHK	PROVINSI	PENETAPAN KPHK		
			Surat Keputusan	Tanggal	Luas (ha)
41	GUNTUR - PAPANDAYAN	Jawa Barat	SK.984/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	15.318
42	GUNUNG MELINTANG	Kalimantan Barat	SK.987/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	25.127
43	TAMBORA	Nusa Tenggara Barat	SK.985/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	78.116
44	RUTENG	Nusa Tenggara Timur	SK.986/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	32.248
45	KPHK JAYAWIJAYA	Papua	SK.991/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	800.000
46	KERUMUTAN	Riau	SK.981/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	120.000
47	TOWUTI	Sulawesi Selatan	SK.989/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	185.000
48	MOROWALI SK 2013	Sulawesi Tengah	SK.988/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	209.400
49	ARAU HILIR	Sumatera Barat	SK.982/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	105.375
50	DANGKU BENTAYAN	Sumatera Selatan	SK.983/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	89.574
51	BEDUGUL SANGHEH	Bali	SK.475/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	3.635
52	KINTAMANI	Bali	SK.476/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	2.649
53	BUKIT KABA	Bengkulu	SK.469/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	15.133
54	CILACAP	Jawa Tengah	SK.472/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	982
55	PATI BARAT	Jawa Tengah	SK.471/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	1.426
56	KUALA LUPAK	Kalimantan Selatan	SK.466/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	4.008
57	KPHK LAMANDAU	Kalimantan Tengah	SK.474/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	61.425
58	PARAWEN	Kalimantan Tengah	SK.473/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	5.855
59	ARFAK	Papua Barat	SK.458/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	68.325
60	BOLMALIT MAGHLIT	Papua Barat	SK.450/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	9.194
61	GUNUNG MEJA SIDEI KAIRONI	Papua Barat	SK.457/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	968
62	SORONG KLAMONO	Papua Barat	SK.456/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	2.990
63	WAIGEO	Papua Barat	SK.459/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	264.073
64	BUKIT RIMBANG BUKIT BALING	Riau	SK.468/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	142.156
65	GIAM SIAK KECIL BUKIT BATU	Riau	SK.467/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	99.858
66	BAKIRANG	Sulawesi Tengah	SK.461/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	17.479
67	GUNUNG TINOMBALA	Sulawesi Tengah	SK.464/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	38.608
68	KPHK GUNUNG DAKO	Sulawesi Tengah	SK.465/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	21.659
69	MOROWALI SK 2016	Sulawesi Tengah	SK.460/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	216.908
70	PAMONA	Sulawesi Tengah	SK.462/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	35.125
71	PANGI BINANGGA	Sulawesi Tengah	SK.463/Menhut/Setjen/PLA.06/2016	17 Juni 2016	70.997
72	BARUMUN	Sumatera Utara	SK.694/Menhut/Setjen/PLA.09/2016	02 September 2016	36.261
73	LINGGA ISAQ	Aceh	SK.747/Menhut/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	86.634
74	PULAU WEH	Aceh	SK.746/Menhut/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	6.481
75	ENGGANO	Bengkulu	SK.723/Menhut/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	9.281
76	JAKARTA	Jakarta	SK.731/Menhut/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	242
77	DURIAN LUNCUK	Jambi	SK.735/Menhut/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	111
78	HUTAN BAKAU PANTAI TIMUR	Jambi	SK.736/Menhut/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	4.872
79	BURANGRANG TANGKUBAN PERAHU	Jawa Barat	SK.740/Menhut/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	4.772
80	SIMPANG TILU	Jawa Barat	SK.739/Menhut/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	23.356
81	DATARAN TINGGI YANG	Jawa Timur	SK.726/Menhut/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	12.865
82	KAWAH LUEN	Jawa Timur	SK.725/Menhut/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	2.575
83	GUNUNG NYIUT	Kalimantan Barat	SK.738/Menhut/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	91.759
84	MUARA KENDAWANGAN	Kalimantan Barat	SK.737/Menhut/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	147.614

NO	KPHK	PROVINSI	PENETAPAN KPHK		
			Surat Keputusan	Tanggal	Luas (ha)
85	HARLU	Kalimantan Timur	SK.744/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	3.661
86	MUARA KAMAN SEDULANG	Kalimantan Timur	SK.728/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	65.445
87	KEPULAUAN KRAKATAU	Lampung	SK.732/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	13.365
88	GUNUNG SAHUWAI	Maluku	SK.729/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	32.476
89	TALIABU	Maluku	SK.730/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	13.114
90	GUNUNG TUNAK	Nusa Tenggara Barat	SK.742/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	2.225
91	MOYO	Nusa Tenggara Barat	SK.741/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	30.945
92	GUNUNG MUTIS	Nusa Tenggara Timur	SK.745/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	12.315
93	CYCLOOPS YOUTEFA	Papua	SK.727/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	33.289
94	LAMBUSANGO	Sulawesi Tenggara	SK.733/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	28.595
95	PEROPA	Sulawesi Tenggara	SK.734/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	44.012
96	TANGKOKO	Sulawesi Utara	SK.748/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	8.545
97	PADANG SUGIHAN	Sumatera Selatan	SK.743/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	88.148
98	SICIKE CIKE	Sumatera Utara	SK.724/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	6.144
99	KPHK YOGYAKARTA	Yogyakarta	SK.749/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	632
100	SANGIANG	Nusa Tenggara Barat	SK.421/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	11.546
101	SEMONGKAT	Nusa Tenggara Barat	SK.418/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	1.783
102	SURANADI	Nusa Tenggara Barat	SK.420/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	448
103	TALIWANG	Nusa Tenggara Barat	SK.419/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	6608,2
104	ALE AISIO	Nusa Tenggara Timur	SK.429/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	9.825,00
105	CAMPLONG	Nusa Tenggara Timur	SK.428/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	1.015
106	KATERI	Nusa Tenggara Timur	SK.427/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	7.945,32
107	NDETA KILIKIMA	Nusa Tenggara Timur	SK.423/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	1.847
108	RIUNG	Nusa Tenggara Timur	SK.426/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	11.829
109	TELUK KUPANG	Nusa Tenggara Timur	SK.431/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	67.628
110	TELUK MAUMERE	Nusa Tenggara Timur	SK.425/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	9.013,00
111	TUTI ADAGAE	Nusa Tenggara Timur	SK.422/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	7.700
112	WAE WUUL	Nusa Tenggara Timur	SK.424/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	1484,84
113	WATU ATA	Nusa Tenggara Timur	SK.430/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	4898,8
114	NABIRE-TANJUNG WIAI	Papua	SK.432/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	4.462
115	DOLOK SURUNGAN	Sumatera Utara	SK.414/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	22241
116	DOLOK TINGGI RAJA	Sumatera Utara	SK.413/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	408,00
117	HOLIDAY RESORT	Sumatera Utara	SK.415/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	2.100
118	KARANG GADING DAN LANGKAT TIMUR LAUT	Sumatera Utara	SK.410/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	13.474
119	SIBOLANGIT	Sumatera Utara	SK.411/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	596
120	SIJABA HUTAGINJANG	Sumatera Utara	SK.417/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	416,00
121	SIPIROK	Sumatera Utara	SK.412/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	15.330,00
122	TAMAN BURU PULAU PINI	Sumatera Utara	SK.416/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	8.325,00
123	JHANTOI	Aceh	SK.123/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	19.487,00
124	PULAU BANYAK	Aceh	SK.124/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	205.720,24
125	PANTAI PANJANG	Bengkulu	SK.127/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	1.559,00
126	SEBLAT	Bengkulu	SK.126/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	8.138,75
127	SABLOKARE	Jawa Tengah	SK.130/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	292,00
128	BAUNG-ABANG-TRETES	Jawa Timur	SK.134/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	266,00
129	NUSA BARUNG-WATANGAN-CURAH MANIS	Jawa Timur	SK.131/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	7.655,34

NO	KPHK	PROVINSI	PENETAPAN KPHK		
			Surat Keputusan	Tanggal	Luas (ha)
130	PICIS-SIGGOR-NGLIRIP-MANGGIS-BESOWO	Jawa Timur	SK.135/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	245,00
131	PULAU SAOBI	Jawa Timur	SK.133/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	436,83
132	PULAU SEMPUR	Jawa Timur	SK.132/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	977,00
133	KELAM KOMPLEK	Kalimantan Barat	SK.137/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	1.334,00
134	KEPULAUAN KARIMATA	Kalimantan Barat	SK.136/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	190.745,00
135	MANDOR-PASI	Kalimantan Barat	SK.138/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	6.064,00
136	TANAH LAUT-GUNUNG KENTAWAN	Kalimantan Selatan	SK.140/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	8.404,17
137	TANJUNG KELUANG	Kalimantan Tengah	SK.139/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	2.478,17
138	KO MARA	Sulawesi Selatan	SK.144/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	10.196,00
139	MARIO	Sulawesi Selatan	SK.143/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	5.334,00
140	BUTON UTARA	Sulawesi Tenggara	SK.142/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	91.025,00
141	MANGOLO	Sulawesi Tenggara	SK.141/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	4.567,31
142	LIMA PULUH KOTO	Sumatera Barat	SK.125/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	10.829,00
143	GUMAI PASEMAH	Sumatera Selatan	SK.128/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	46.122,60
144	GUNUNG RAYA	Sumatera Selatan	SK.129/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	44.996,11
145	PEWOBA	Jawa Tengah	SK.301/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2018	05 Juli 2018	382,00
146	BAWEAN - NOKO NUSA	Jawa Timur	SK.299/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2018	05 Juli 2018	4.561,00
147	PELANGAN	Nusa Tenggara Barat	SK.302/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2018	05 Juli 2018	2.600,00
148	TAHURA BUNDER	Yogyakarta	SK.351/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019	21 Mei 2019	771,32
TOTAL					12.946.252,40

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d. 31 Desember 2019

TABEL V.4. DAFTAR KPH BERLEMBAGA DAN UNIT-UNIT YANG DINAUNGI

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
Aceh	1	KPH WILAYAH I	UNIT I	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 tahun 2018
	2	KPH WILAYAH II	UNIT II	
	3	KPH WILAYAH III	UNIT III	
	4	KPH WILAYAH IV	UNIT IV	
	5	KPH WILAYAH V	UNIT V	
	6	KPH WILAYAH VI	UNIT VI	
Bengkulu	1	KPHL Bengkulu Selatan	UNIT V	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2017
	2	KPHL Bukit Balai Rejang	UNIT VII	
	3	KPHL Bukit Daun	UNIT III	
	4	KPHL Kaur	UNIT VI	
	5	KPHL Seluma	UNIT IV	
	6	KPHP Bengkulu Utara	UNIT II	
	7	KPHP Muko Muko	UNIT I	
Jambi	1	KPHP BATANGHARI	UNIT XI UNIT XII	Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 1176 tahun 2017
	2	KPHP Bungo	UNIT II	
			UNIT III	
	3	KPHP HILIR SAROLANGUN	UNIT VIII	
	4	KPHP Kerinci	UNIT I	
	5	KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	UNIT VII	
	6	KPHP Merangin	UNIT IV	
			UNIT V	
			UNIT VI	
	7	KPHP MUARO JAMBI	UNIT XIII	
	8	KPHP TANJUNG JABUNG BARAT	UNIT XV	
			UNIT XVI	
			UNIT XVII	
	9	KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR	UNIT XIV	
	10	KPHP Tebo Barat	UNIT IX	
	11	KPHP Tebo Timur	UNIT X	
Kepulauan Bangka Belitung	1	KPHL Belantu Mendanau	UNIT X	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98 Tahun 2017
	2	KPHP Bube Panca	UNIT III	
	3	KPHP Gunung Duren	UNIT XIII	
	4	KPHP Jebu Bembang Antan	UNIT II	
	5	KPHP Muntai Palas	UNIT VIII	
	6	KPHP Rambat Menduyung	UNIT I	
	7	KPHP Sigambir Kotawaringin	UNIT IV	
	8	KPHP Sungai Sembulan	UNIT V	
Kepulauan Riau	1	KPHL Unit II Batam	UNIT II	Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2017
	2	KPHP Unit I Karimun	UNIT I	
	3	KPHP Unit III Lingga	UNIT III	
	4	KPHP Unit IV Bintan	UNIT IV	
	5	KPHP Unit V Natuna	UNIT V	
	6	KPHP Unit VI Anambas	UNIT VI	
Lampung	1	KPHL Batu Serampok	UNIT XIII	Peraturan Gubernur Lampung No. 31 Tahun 2019
	2	KPHL Batu Tegi	IX	
	3	KPHL Gunung Balak	UNIT XV	
	4	KPHL Kota Agung Utara	UNIT X	
	5	KPHL Liwa	UNIT II	
	6	KPHL Pematang Neba	UNIT XI	
	7	KPHL Pesawaran	UNIT XII	
	8	KPHL Tangkit Tebak	UNIT VIII	
	9	KPHL Way Waya	UNIT VII	
	10	KPHP Bukit Punggur	UNIT III	
	11	KPHP Gedong Wani	UNIT XVI	
	12	KPHP Muara Dua	UNIT IV	
	13	KPHP Pesisir Barat	UNIT I	
	14	KPHP Sungai Buaya	UNIT V	
	15	KPHP Way Pisang	UNIT XIV	
	16	KPHP Way Terusan	UNIT VI	

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
Riau	1	KPHP Minas Tahura	UNIT IX	Peraturan Gubernur Riau No. 76 Tahun 2017
	2	UPT KPH Bagan Siapi Api	UNIT I	Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017
			UNIT II	
			UNIT III	
			UNIT XII	
	3	UPT KPH Bengkalis Pulau	UNIT IV	
			UNIT V	
			UNIT VI	
	4	UPT KPH Hutan Mandah	UNIT XXVI	
			UNIT XXVII	
	5	UPT KPH Indragiri	UNIT XXIX	
			UNIT XXVIII	
			UNIT XXX	
	6	UPT KPH Kampar Kiri	UNIT XVIII	
	7	UPT KPH Mandau	UNIT VII	
			UNIT VIII	
			UNIT X	
	8	UPT KPH Rokan	UNIT XI	
			UNIT XIII	
			UNIT XIV	
	9	UPT KPH Singingi	UNIT XXXI	
			UNIT XXXII	
	10	UPT KPH Sorek	UNIT XIX	
			UNIT XX	
			UNIT XXI	
	11	UPT KPH Suligi-Batu Gajah	UNIT XV	
			UNIT XVI	
			UNIT XVII	
	12	UPT KPH Tasik Besar Serkap	UNIT XXII	
	13	UPT KPH Tebing Tinggi	UNIT XXIII	
			UNIT XXIV	
			UNIT XXV	
Sumatera Barat	1	KPH Agam Raya	UNIT III	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017
	2	KPH Bukit Barisan	UNIT IV	
	3	KPH Dharmasraya	UNIT VIII	
	4	KPH Hulu Batanghari	UNIT VII	
	5	KPH Lima Puluh Kota	UNIT II	
	6	KPH Mentawai	UNIT X	
			UNIT XI	
	7	KPH Pasaman Raya	UNIT I	
	8	KPH Sijunjung	UNIT V	
	9	KPH Solok	UNIT VI	
Sumatera Selatan	10	KPHP Pesisir Selatan	UNIT IX	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017
	1	KPH Wilayah I Meranti	UNIT IV	
			UNIT II	
	2	KPH Wilayah II Lalan - Mendis	UNIT III	
			UNIT I	
	3	KPH Wilayah III Palembang-Banyuasin	UNIT I	
	4	KPH Wilayah IV Sungai Lumpur - Riding	UNIT XXIII	
			UNIT XXIV	
	5	KPH Wilayah IX Suban Jeriji	UNIT XIV	
	6	KPH Wilayah V Lempuing - Mesuji	UNIT XXI	
			UNIT XXII	
	7	KPH Wilayah VI Bukit Nanti -	UNIT XV	
			UNIT XX	
	8	KPH Wilayah VII Mekakau - Saka	UNIT XIX	
			UNIT XVI	
			UNIT XVII	
			UNIT XVIII	
	9	KPH Wilayah VIII Semendo	UNIT XIII	
	10	KPH Wilayah X Dempo	UNIT XII	
	11	KPH Wilayah XI Kikim - Pasemah	UNIT IX	
			UNIT X	
			UNIT XI	
	12	KPH Wilayah XII Benakat	UNIT VII	
	13	KPH Wilayah XIII Lakitan - Bukit Cogong	UNIT VI	
			UNIT VIII	
	14	KPH Wilayah XIV Rawas	UNIT V	

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
Sumatera Utara	1	KPH Wilayah I Staba	UNIT I UNIT V	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016
	2	KPH Wilayah II Pematang Siantar	UNIT IX UNIT VI UNIT X UNIT XII	
	3	KPH Wilayah III Kisaran	UNIT III UNIT XIII	
	4	KPH Wilayah IV Balige	UNIT XIV UNIT XXI	
	5	KPH Wilayah IX Panyabungan	XXIX	
	6	KPH Wilayah V Aek Kanopan	UNIT VII UNIT XXII UNIT XXIII	
	7	KPH Wilayah VI Sipirok	UNIT XXVI	
	8	KPH Wilayah VII Gunung Tua	UNIT XI UNIT XXXI	
	9	KPH Wilayah VIII Kotanopan	UNIT XXX	
	10	KPH Wilayah X Padang	UNIT XXVIII	
	11	KPH Wilayah XI Pandan	UNIT XXIV UNIT XXV UNIT XXVII	
	12	KPH Wilayah XII Tarutung	UNIT XVI UNIT XX	
	13	KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul	UNIT XIX UNIT XVII UNIT XVIII	
	14	KPH Wilayah XIV Sidikalang	UNIT VIII UNIT XV	
	15	KPH Wilayah XV Kabanjahe	UNIT II UNIT IV	
	16	KPH Wilayah XVI Gunung Sitoli	UNIT XXXII UNIT XXXIII	
Yogyakarta	1	BKPH Yogyakarta	-	Peraturan Gubernur DIY Nomor. 96 Tahun 2015
Kalimantan Barat	1	KPH Bengkayang	UNIT II	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 147 Tahun 2016
	2	KPH Kapuas Hulu Selatan	UNIT XXI	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 135 Tahun 2016
	3	KPH Kapuas Hulu Timur	UNIT XX	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 136 Tahun 2016
	4	KPH Kapuas Hulu Utara	Unit XVIII Unit XIX	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 137 Tahun 2016
	5	KPH Kayong	UNIT XXV	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 138 Tahun 2016
	6	KPH Ketapang Selatan	UNIT XXIX UNIT XXX UNIT XXXI UNIT XXXII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 139 Tahun 2016
	7	KPH Ketapang Utara	UNIT XXIII UNIT XXVI UNIT XXVII UNIT XXVIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 140 Tahun 2016
	8	KPH Kubu Raya	UNIT XXXIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 141 Tahun 2016
	9	KPH Landak	UNIT VI UNIT VII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 134 Tahun 2016
	10	KPH Melawi	UNIT XIII UNIT XXII UNIT XXIV	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 142 Tahun 2016
	11	KPH Mempawah	UNIT VIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 133 Tahun 2016
	12	KPH Sambas	UNIT I	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 143 Tahun 2016
	13	KPH Sanggau Barat	UNIT III UNIT V	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 144 Tahun 2016

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
	14	KPH Sanggau Timur	UNIT IV UNIT XI	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 145 Tahun 2016
	15	KPH Sekadau	UNIT XII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 146 Tahun 2016
	16	KPH Sintang Timur	UNIT XIV UNIT XV UNIT XVI UNIT XVII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 149 Tahun 2016
	17	KPH Sintang Utara	UNIT IX UNIT X Unit XXXIV	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 148 Tahun 2016
	1	KPH Balangan	UNIT VIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0102 Tahun 2018
	2	KPH Cantung	UNIT II	
	3	KPH Sengayam	UNIT IV	
	4	KPH Hulu Sungai	UNIT IX	
	5	KPH Kayu Tangi	UNIT I	
	6	KPH Kusan	UNIT VI	
	7	KPH Pulau Laut Sebuku	UNIT III	
	8	KPH Tabalong	UNIT V UNIT X	
	9	KPH Tanah Laut	UNIT VII	
Kalimantan Tengah	1	KPHL Gerbang Barito	UNIT IX	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017
	2	KPHL Kapuas - Kahayan	UNIT IV UNIT XXXII UNIT XXXIII	
	3	KPHP Barito Hilir	UNIT VII UNIT XIV	
	4	KPHP Barito Hulu	UNIT V	
	5	KPHP Barito Tengah	UNIT VI UNIT VIII	
	6	KPHP Kahayan Hilir	UNIT XXXI	
	7	KPHP Kahayan Hulu	UNIT XV UNIT XVI	
	8	KPHP Kahayan Tengah	UNIT III UNIT XIII UNIT XVIII	
	9	KPHP Kapuas Hulu	UNIT X UNIT XII	
	10	KPHP Kapuas Tengah	UNIT XI	
	11	KPHP Katingan Hilir	UNIT XXX	
	12	KPHP Katingan Hulu	UNIT XVII	
	13	KPHP Kotawaringin Barat	UNIT XXII UNIT XXVI	
	14	KPHP Mentaya Hulu - Seruyan Tengah	UNIT XIX UNIT XX	
	15	KPHP Mentaya Tengah - Seruyan Hilir	UNIT XXIX UNIT XXVII UNIT XXVIII	
	16	KPHP Murung Raya	UNIT I UNIT II	
	17	KPHP Seruyan Hulu	UNIT XXI	
	18	KPHP Sukamara - Lamandau	UNIT XXIII UNIT XXIV UNIT XXV	
Kalimantan Timur	1	KPHP Bongan	UNIT XVII UNIT XVIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016
	2	KPHP Berau Barat	UNIT XII UNIT XIV UNIT XV UNIT XVI	
	3	KPHP Bongon	UNIT XXX UNIT XXXII	
	4	KPHP Das Belayan	UNIT XXIX UNIT XXVI UNIT XXVIII	
	5	KPHP Batu Ayau	UNIT XXII UNIT XXIII UNIT XXV	

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
	6	KPHP Meratus	UNIT XXIV UNIT XXXI	
	7	KPHP Kendilo	UNIT XXXIII Unit XXXIV	
	8	KPHP Santan	UNIT XIX UNIT XXVII	
Kalimantan Utara	1	KPH Bulungan	UNIT IX UNIT XIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 66 Tahun 2018
	2	KPH Malinau	UNIT II UNIT X UNIT XI UNIT XX UNIT XXI	
	3	KPH Nunukan	UNIT I UNIT III UNIT IV	
	4	KPH Tana Tidung	UNIT V UNIT VII	
	5	KPH Tarakan	UNIT VI UNIT VIII	
Gorontalo	1	KPH Wil. I dan Wil. II Gorontalo Barat	UNIT I UNIT II	Peraturan Gubernur Gorontalo No. 60 Tahun 2017
	2	KPH Wil. III Pahuwato	UNIT III	
	3	KPH Wil. IV Gorontalo Utara	UNIT IV	
	4	KPH Wil. V Boalemo	UNIT V	
	5	KPH Wil. VI Gorontalo	UNIT VI	
	6	KPH Wil. VII Bone Bolango dan Gorontalo Kota	UNIT VII	
Maluku	1	KPH Ambon	UNIT XIII UNIT XIV	Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2017
	2	KPH Buru	UNIT II	
	3	KPH Buru Selatan	UNIT I UNIT III	
	4	KPH Kepulauan Aru	UNIT XXI UNIT XXII	
	5	KPH Kota Tual	UNIT XV	
	6	KPH Maluku Barat Daya	UNIT XIX UNIT XX	
	7	KPH Maluku Tengah	UNIT IX UNIT VI UNIT VII UNIT VIII	
	8	KPH Maluku Tenggara	UNIT XVI	
	9	KPH Maluku Tenggara Barat	UNIT XVII UNIT XVIII	
	10	KPH Seram Bagian Barat	UNIT IV UNIT V	
	11	KPH Seram Bagian Timur	UNIT X UNIT XI UNIT XII	
Maluku Utara	1	KPH Halmahera Barat	UNIT III	Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 69 Tahun 2016
	2	KPH Halmahera Selatan	UNIT XII UNIT XIII UNIT XIV	
	3	KPH Halmahera Tengah	UNIT VI UNIT VII	
	4	KPH Halmahera Timur	UNIT IV UNIT V UNIT VIII	
	5	KPH Halmahera Utara	UNIT II	
	6	KPH Kepulauan Sula	UNIT XV	
	7	KPH Pulau Morotai	UNIT I	
	8	KPH Pulau Taliabu	UNIT XVI	
	9	KPH Temate-Tidore	UNIT XI	
	10	KPH Tidore Kepulauan	UNIT IX UNIT X	

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
Sulawesi Barat	1	KPH Bonehau Kalumpang	UNIT XII	Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46.a Tahun 2016
			UNIT XIII	
	2	KPH Budong-Budong	UNIT V	
	3	KPH Karama	UNIT VI	
	4	KPH Karossa	UNIT IV	
	5	KPH Lariang	UNIT II	
	6	KPH Malunda	UNIT X	
	7	KPH Mamasa Barat	UNIT VII	
	8	KPH Mamasa Tengah	UNIT VIII	
	9	KPH Mamasa Timur	UNIT IX	
	10	KPH Mapilli	UNIT XI	
	11	KPH Pasangkayu	UNIT I	
	12	KPH Sarudu	UNIT III	
Sulawesi Selatan	1	KPH AJATAPPARENG	UNIT II	Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018
	2	KPH BILA	UNIT III	
	3	KPH BULUSARAUNG	UNIT I	
	4	KPH CENRANA	UNIT XIII	
	5	KPH JENEBERANG I	UNIT XIV	
	6	KPH JENEBERANG II	UNIT XV	
	7	KPH KALAENA	UNIT X	
	8	KPH LARONA MALILI	UNIT XI	
	9	KPH LATIMOJONG	UNIT VIII	
	10	KPH MATA ALLO	UNIT V	
	11	KPH RONGKONG	UNIT IX	
	12	KPH SADDANG I	UNIT VI	
	13	KPH SADDANG II	UNIT VII	
	14	KPH SAWITTO	UNIT IV	
	15	KPH SELAYAR	UNIT XVI	
	16	KPH WALANAE	UNIT XII	
Sulawesi Tengah	1	KPH Balantak	UNIT XVIII	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018
			UNIT XX	
	2	KPH Banawa Lalundu	UNIT VII	
	3	KPH Dampelas Tinombo	UNIT III	
			UNIT IV	
	4	KPH Dolago Tanggunung	UNIT V	
			Unit VI	
			Unit IX	
	5	KPH Gunung Dako	UNIT II	
	6	KPH Kulawi	UNIT VIII	
	7	KPH Pogogul	UNIT I	
	8	KPH Pulau Peling	UNIT XXI	
	9	KPH Sintuwu Maroso	UNIT X	
			UNIT XI	
			UNIT XII	
	10	KPH Sivia Patuju	UNIT XVI	
			UNIT XVII	
	11	KPH Toili Baturube	UNIT XIX	
	12	KPH Tepe Asa Moroso	UNIT XIV	
	13	KPH Tepo Asa Aroa	UNIT XIII	
			UNIT XV	
Sulawesi Tenggara	1	KPH UNIT I KAPONTORI	UNIT I	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2017
	2	KPH UNIT II LASALIMU	UNIT II	
	3	KPH UNIT III LAKOMPA	UNIT III	
	4	KPH UNIT IV KATONDOKI	UNIT IV	
	5	KPH UNIT IX PULAU KABAENA	UNIT IX	
	6	KPH UNIT V WAKONTI	UNIT V	
	7	KPH UNIT VI PULAU MUNA	UNIT VI	
	8	KPH UNIT VII PEROPA EA	UNIT VII	
	9	KPH UNIT VIII GANTARA	UNIT VIII	
	10	KPH UNIT X TINA ORIMA	UNIT X	
	11	KPH UNIT XI MEKONGGA	UNIT XI	
	12	KPH UNIT XII LADONGI	UNIT XII	
	13	KPH UNIT XIII MEKONGGA	UNIT XIII	
	14	KPH UNIT XIV UEESI	UNIT XIV	
	15	KPH UNIT XIX LAIWOI UTARA	UNIT XIX	
	16	KPH UNIT XV ALAHA	UNIT XV	

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
	17	KPH Unit XVI Patampunua Selatan	UNIT XVI	
	18	KPH UNIT XVII PATAMPANUA UTARA	UNIT XVII	
	19	KPH UNIT XVIII LAIWOI BARAT	UNIT XVIII	
	20	KPH UNIT XX LAIWOI TENGAH	UNIT XX	
	21	KPH UNIT XXI LAIWOI TENGGARA	UNIT XXI	
	22	KPH UNIT XXII LAIWOI	UNIT XXII	
	23	KPH UNIT XXIII PULAU WAWONII	UNIT XXIII	
	24	KPH UNIT XXIV GULARAYA	UNIT XXIV	
	25	KPH UNIT XXV WAKATOBI	UNIT XXV	
Sulawesi Utara	1	KPHL UNIT III KEP. SANGIHE, KEP. TALAUD, DAN KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	UNIT III	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 98 Tahun 2016
	2	KPHL Unit VI Minahasa Utara - Bitung - Manado	UNIT VI	
	3	KPHP Unit I Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara	UNIT I	
	4	KPHP UNIT II BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	UNIT II	
	5	KPHP Unit IV Model Poigar	UNIT IV	
	6	KPHP UNIT V MINAHASA, TOMOHON, MINAHASA TENGGARA, DAN MINAHASA SELATAN	UNIT V	
Bali	1	KPH BALI BARAT	UNIT I	Peraturan Gubernur Bali Nomor 111 Tahun 2016
	2	KPH BALI SELATAN	UNIT IV	
	3	KPH BALI TIMUR	UNIT III	
	4	KPH BALI UTARA	UNIT II	
Nusa Tenggara Barat	1	Balai KPH Ampang Plampang	UNIT XIII UNIT XIV	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 29 Tahun 2018
	2	Balai KPH Ampang Riwo	UNIT XV	
	3	Balai KPH Batulante	UNIT IX	
	4	Balai KPH Brang Beh	UNIT XI	
	5	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	UNIT VII UNIT VIII	
	6	Balai KPH Madapangga, Rompu, Waworada	UNIT XX UNIT XXI	
	7	Balai KPH Maria Donggomassa	UNIT XXII UNIT XXIII	
	8	Balai KPH Orong Telu	UNIT X	
	9	Balai KPH Pelangan Tastura	UNIT II UNIT III	
	10	Balai KPH Rinjani Barat	UNIT I	
	11	Balai KPH Rinjani Timur	UNIT IV	
	12	Balai KPH Ropang	UNIT XII	
	13	Balai KPH Sejong Matakayang	UNIT V UNIT VI	
	14	Balai KPH Tambora	UNIT XVII UNIT XVIII	
	15	Balai KPH Tofopajo Soromandi	UNIT XIX UNIT XVI	
Nusa Tenggara Timur	1	KPH Wilayah Kabupaten Alor	UNIT X	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 90 Th. 2016
	2	KPH WILAYAH KABUPATEN BELU	XXII	
	3	KPH Wilayah Kabupaten Ende	UNIT VI	
	4	KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur	UNIT VIII	

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN		
1	2	3	4	5		
	5	KPH Wilayah Kabupaten Kupang	UNIT XVII			
	6	KPH Wilayah Kabupaten Lembata	UNIT IX			
	7	KPH Wilayah Kabupaten Malaka	UNIT XIX			
	8	KPH Wilayah Kabupaten Manggarai	UNIT II			
	9	KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Barat	UNIT I			
	10	KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	UNIT III			
	11	KPH Wilayah Kabupaten Nagekeo	UNIT V			
	12	KPH Wilayah Kabupaten Ngada	UNIT IV			
	13	KPH Wilayah Kabupaten Rote Ndao	UNIT XVI			
	14	KPH Wilayah Kabupaten Sabu Raijua	UNIT XV			
	15	KPH Wilayah Kabupaten Sikka	VII			
	16	KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat	UNIT XII			
	17	KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	UNIT XI			
	18	KPH Wilayah Kabupaten Sumba Tengah	UNIT XIII			
	19	KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	XX			
	20	KPH Wilayah Kota Kupang	UNIT XVIII			
	21	KPH Wilayah Timor Tengah Utara	UNIT XXI			
	22	UPT - KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur	UNIT XIV			
	Papua	1	KPHP Unit XXIII Sarmi		UNIT XXIII	Peraturan Gubernur Papua No. 31 Tahun 2017
		2	KPHP UNIT LIII Boven Digoel		UNIT LIII	
		3	KPHL Unit XX Biak Numfor		UNIT XX	
		4	KPHP Unit XVII Waropen		Unit XVII	
	5	KPHP Unit XIX Kepulauan Yapen	UNIT XIX			
	6	KPHP Unit XXIX Keerom	Unit XXIX			
	7	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI - MEMBERAMO	Unit XXI			
	8	KPHL Unit II Nabire	UNIT II			
	9	KPHL Unit VI Mimika	UNIT VI			
	10	KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura	UNIT XXVIII			
	11	KPHL Unit XXXV Pegunungan	UNIT XXXV			
	12	KPHL Unit XLII Jayawijaya	UNIT XLII			
	13	KPHL Unit XLII Lani Jaya				
	14	KPHP Unit XLIII Nduga	UNIT XLIII			
Papua Barat	1	KPHL Unit I Raja Ampat	UNIT I	Peraturan Gubernur Papua Barat No. 5 Tahun 2018		
	2	KPHP Unit II Sorong	UNIT II			
	3	KPHL Unit II Sorong				
	3	KPHL Unit VII Sorong Selatan	UNIT VII			
	4	KPHL Unit XII Manokwari	UNIT XII			
	6	KPHP Unit IV Tambrauw	UNIT IV			
	7	KPHP Unit V Sorong Selatan	UNIT V			
	8	KPHP Unit XV Bintuni	UNIT XV			
	9	KPHP Unit XVI Fakfak	UNIT XVI			

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2019

TABEL V.5. PENETAPAN KPH FASILITASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	UNIT I	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	568.250
2	Aceh	UNIT II	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	253.948
3	Aceh	UNIT IV	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	402.986
4	Aceh	UNIT V	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	290.162
5	Aceh	UNIT VI	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	310.552
6	Sumatera Utara	UNIT XVI	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	72.166
7	Sumatera Utara	UNIT XVII	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	86.555
8	Sumatera Utara	UNIT XVIII	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	49.415
9	Sumatera Utara	UNIT XX	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	88.931
10	Sumatera Utara	UNIT XXIII	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	64.937
11	Sumatera Utara	UNIT XXIV	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	124.347
12	Sumatera Utara	UNIT XXV	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	60.396
13	Sumatera Utara	UNIT XXVI	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	174.395
14	Sumatera Utara	UNIT XXVII	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	38.071
15	Sumatera Utara	UNIT XXVIII	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	127.758
16	Sumatera Utara	UNIT XXXI	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	270.460
17	Sumatera Selatan	UNIT II	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	62.486
18	Sumatera Selatan	UNIT XII	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	26.052
19	Sumatera Selatan	UNIT XIII	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	69.431
20	Sumatera Selatan	UNIT XIV	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	179.044
21	Sumatera Selatan	UNIT XV	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	94.847
22	Sumatera Selatan	UNIT XVI	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	29.706
23	Kep. Riau	UNIT III	SK.634/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	98.752
24	Kep. Riau	UNIT IV	SK.634/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	46.756
25	Riau	UNIT V	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	23.438
26	Riau	UNIT VII	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	102.958
27	Riau	UNIT XIV	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	67.118
28	Riau	UNIT XX	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	168.458
29	Riau	UNIT XXI	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	124.109
30	Riau	UNIT XXX	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	150.718
31	Riau	UNIT XXXI	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	88.870
32	Kep. Bangka Belitung	UNIT II	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	103.539
33	Kep. Bangka Belitung	UNIT III	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	89.310
34	Kep. Bangka Belitung	UNIT VIII	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	171.189
35	Kep. Bangka Belitung	UNIT X	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	97.508
36	Bengkulu	UNIT III	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	96.125
37	Bengkulu	UNIT IV	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	82.242
38	Bengkulu	UNIT V	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	48.686
39	Bengkulu	UNIT VI	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	78.232
40	Jambi	UNIT IX	SK.632/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	142.967
41	Jambi	UNIT X	SK.632/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	103.650
42	Lampung	UNIT II	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	42.074
43	Lampung	UNIT VII	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	24.337
44	Lampung	UNIT VIII	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	21.117
45	Lampung	UNIT XV	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	24.285
46	Nusa Tenggara Barat	UNIT XVI	SK.631/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	25.422
47	Nusa Tenggara Barat	UNIT XX	SK.631/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	45.663
48	Nusa Tenggara Timur	UNIT II	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	17.736
49	Nusa Tenggara Timur	UNIT III	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	50.952

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
50	Nusa Tenggara Timur	UNIT IV	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	35.734
51	Nusa Tenggara Timur	UNIT IX	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	49.182
52	Nusa Tenggara Timur	UNIT V	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	32.791
53	Nusa Tenggara Timur	UNIT VI	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	57.740
54	Nusa Tenggara Timur	UNIT VII	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	36.999
55	Nusa Tenggara Timur	UNIT XI	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	20.647
56	Nusa Tenggara Timur	UNIT XX	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	69.461
57	Nusa Tenggara Timur	UNIT XXI	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	105.632
58	Nusa Tenggara Timur	UNIT XXII	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	46.537
59	Kalimantan Barat	UNIT XXIII	SK.620/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	189.599
60	Kalimantan Barat	UNIT XXIV	SK.620/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	179.461
61	Kalimantan Barat	UNIT XXV	SK.620/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	318.717
62	Kalimantan Utara	UNIT VII	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	120.789
63	Kalimantan Timur	UNIT XXIX	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	109.314
64	Kalimantan Timur	UNIT XXVI	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	979.933
65	Kalimantan Timur	UNIT XXVII	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	263.467
66	Kalimantan Timur	UNIT XXX	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	15.130
67	Kalimantan Timur	UNIT XXXII	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	333.166
68	Kalimantan Timur	UNIT XXXIII	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	255.245
69	Kalimantan Selatan	UNIT IX	SK.624/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	62.186
70	Kalimantan Selatan	UNIT VI	SK.624/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	262.919
71	Kalimantan Tengah	UNIT III	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	59.185
72	Kalimantan Tengah	UNIT V	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	334.069
73	Kalimantan Tengah	UNIT XIV	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	48.400
74	Kalimantan Tengah	UNIT XXIX	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	200.518
75	Kalimantan Tengah	UNIT XXXI	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	378.819
76	Sulawesi Utara	UNIT VI	SK.625/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	27.101
77	Gorontalo	UNIT VII	SK.639/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	35.784
78	Sulawesi Tengah	UNIT II	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	162.785
79	Sulawesi Tengah	UNIT VII	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	109.923
80	Sulawesi Tengah	UNIT XIV	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	190.830
81	Sulawesi Tengah	UNIT XXI	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	117.079
82	Sulawesi Barat	UNIT IV	SK.636/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	63.110
83	Sulawesi Barat	UNIT VI	SK.636/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	156.917
84	Sulawesi Tenggara	UNIT V	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	12.179
85	Sulawesi Tenggara	UNIT VI	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	73.726
86	Sulawesi Tenggara	UNIT XI	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	46.580
87	Sulawesi Tenggara	UNIT XII	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	47.088
88	Sulawesi Tenggara	UNIT XIII	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	125.717
89	Sulawesi Tenggara	UNIT XIV	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	163.744
90	Sulawesi Tenggara	UNIT XIX	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	113.580
91	Sulawesi Tenggara	UNIT XXV	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	10.022
92	Sulawesi Selatan	UNIT X	SK.616/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	20.901
93	Maluku Utara	UNIT IV	SK.619/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	199.327
94	Maluku Utara	UNIT IX	SK.619/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	17.998
95	Maluku Utara	UNIT XVI	SK.619/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	168.726
96	Maluku	UNIT I	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	144.539
97	Maluku	UNIT XIV	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	10.288
98	Maluku	UNIT XVI	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	11.836
99	Maluku	UNIT XVIII	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	132.339
100	Maluku	UNIT XXI	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	70.159

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
101	Maluku	UNIT XXII	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	132.116
102	Papua Barat	UNIT I	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	192.142
103	Papua Barat	UNIT IV	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	139.738
104	Papua Barat	UNIT XV	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	640.508
105	Papua Barat	UNIT XVI	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	209.554
106	Papua	UNIT II	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	359.135
107	Papua	UNIT LI	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	666.097
108	Papua	UNIT VI	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	273.223
109	Papua	UNIT X	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	627.940
110	Papua	UNIT XLII	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	139.928
111	Papua	UNIT XLIII	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	257.531
112	Papua	UNIT XXII	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	185.260
113	Papua	UNIT XXVIII	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	47.726
114	Papua	UNIT XXXV	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	299.129
115	Sumatera Barat	UNIT I	SK.832/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	323.501
116	Sumatera Barat	UNIT III	SK.832/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	62.368
117	Sumatera Utara	UNIT I	SK.831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	69.878
118	Sumatera Utara	UNIT II	SK.831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	80.002
119	Sumatera Utara	UNIT XII	SK.831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	56.223
120	Sumatera Utara	UNIT XV	SK.831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	89.851
121	Kalimantan Selatan	UNIT XIX	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	32.419
122	Kalimantan Selatan	UNIT XX	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	27.076
123	Kalimantan Selatan	UNIT XXI	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	44.592
124	Kalimantan Selatan	UNIT XXII	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	91.392
125	Kalimantan Selatan	UNIT XXIII	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	206.254
126	Kalimantan Selatan	UNIT XXIV	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	407.604
127	Kalimantan Barat	UNIT I	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	127.794
128	Kalimantan Barat	UNIT VIII	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	94.544
129	Kalimantan Barat	UNIT XIII	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	56.013
130	Kalimantan Barat	UNIT XV	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	207.079
131	Kalimantan Barat	UNIT XVI	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	324.662
132	Kalimantan Barat	UNIT XXX	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	70.458
133	Kalimantan Barat	UNIT XXXI	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	261.701
134	Kalimantan Barat	UNIT XXXIII	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	318.804
135	Kalimantan Timur	UNIT XXII	SK.835/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	658.129
136	Kalimantan Selatan	UNIT VIII	SK.836/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	141.349
137	Maluku Utara	UNIT XII	SK.838/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	170.442
138	Sulawesi Utara	UNIT V	SK.837/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	13.356
139	Sulawesi Utara	UNIT VIII	SK.837/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	27.101
140	Sulawesi Utara	UNIT IX	SK.837/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	13.272
141	Sulawesi Barat	UNIT IX	SK.840/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	51.086
142	Sulawesi Selatan	UNIT V	SK.839/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	143.751
143	Sulawesi Selatan	UNIT VI	SK.839/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	59.954
144	Sulawesi Selatan	UNIT VII	SK.839/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	130.508
145	Nusa Tenggara Barat	UNIT VI	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	32.340
146	Nusa Tenggara Barat	UNIT VII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	40.645
147	Nusa Tenggara Barat	UNIT VIII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	44.461
148	Nusa Tenggara Barat	UNIT X	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	55.226
149	Nusa Tenggara Barat	UNIT XI	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	64.134
150	Nusa Tenggara Barat	UNIT XII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	74.733

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
151	Nusa Tenggara Barat	UNIT XIII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	33.610
152	Nusa Tenggara Barat	UNIT XV	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	42.630
153	Nusa Tenggara Barat	UNIT XIX	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	44.082
154	Nusa Tenggara Barat	UNIT XXII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	43.399
155	Maluku	UNIT V	SK.842/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	92.002
156	Maluku	UNIT XII	SK.842/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	193.041
157	Maluku	UNIT XV	SK.842/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	10.067
158	Papua	UNIT III	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	194.846
159	Papua	UNIT XXIII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	122.820
160	Papua	UNIT XXV	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	354.901
161	Papua	UNIT XLVII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	461.382
162	Papua	UNIT XLVIII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	573.543
163	Papua	UNIT XLIX	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	539.996
164	Papua	UNIT LIII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	649.375
165	Papua	UNIT LVI	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	363.877
166	Kep. Riau	UNIT II	SK.844/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	32.472
167	Kep. Riau	UNIT V	SK.844/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	61.403
168	Jambi	UNIT VIII	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	110.327
169	Jambi	UNIT XII	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	79.305
170	Jambi	UNIT XIII	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	103.528
171	Jambi	UNIT XIV	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	80.852
172	Jambi	UNIT XV	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	91.626
173	Jambi	UNIT XVI	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	122.504
174	Kep. Bangka Belitung	UNIT VI	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	27.199
175	Nusa Tenggara Timur	UNIT XIV	SK.847/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	116.160
176	Nusa Tenggara Timur	UNIT XVII	SK.847/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	113.398
177	Gorontalo	UNIT II	SK.848/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	90.644
178	Sulawesi Tengah	UNIT III	SK.849/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	134.726
179	Sulawesi Tengah	UNIT V	SK.849/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	111.273
180	Sulawesi Tengah	UNIT VIII	SK.849/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	220.766
181	Papua Barat	UNIT VI	SK.850/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	225.183
182	Papua Barat	UNIT XII	SK.850/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	256.207
183	Riau	UNIT I	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	110.513
184	Riau	UNIT II	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	141.080
185	Riau	UNIT III	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	1.313.825
186	Riau	UNIT IV	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	80.347
187	Riau	UNIT VI	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	224.663
188	Riau	UNIT XII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	149.905
189	Riau	UNIT XV	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	87.370
190	Riau	UNIT XIX	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	35.000
191	Riau	UNIT XXIII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	69.397
192	Riau	UNIT XXV	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	67.827
193	Riau	UNIT XXVII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	42.898
194	Riau	UNIT XXVIII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	231.490
195	Riau	UNIT XXIX	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	61.182
196	Riau	UNIT XXXII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	96.697
197	Lampung	UNIT XI	SK.852/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	47.746
198	Lampung	UNIT XIII	SK.852/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	8.025
199	Kalimantan Tengah	UNIT IV	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	7.804
200	Kalimantan Tengah	UNIT VII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	158.785

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
201	Kalimantan Tengah	UNIT X	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	244.231
202	Kalimantan Tengah	UNIT XI	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	274.875
203	Kalimantan Tengah	UNIT XVII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	681.864
204	Kalimantan Tengah	UNIT XVIII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	140.418
205	Kalimantan Tengah	UNIT XIX	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	366.726
206	Kalimantan Tengah	UNIT XXIV	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	92.242
207	Kalimantan Tengah	UNIT XXV	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	157.199
208	Kalimantan Tengah	UNIT XXVII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	302.601
209	Kalimantan Tengah	UNIT XXVIII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	144.535
210	Kalimantan Tengah	UNIT XXX	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	217.832
211	Sulawesi Tenggara	UNIT VIII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	18.588
212	Sulawesi Tenggara	UNIT XVI	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	126.917
213	Sulawesi Tenggara	UNIT XX	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	230.547
214	Sulawesi Tenggara	UNIT XXI	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 Nopember 2016	65.901
215	Gorontalo	UNIT I	SK.472/MENLHK/SETJEN/PLA.O/9/2017	07 September 2017	52.326
216	Kalimantan Selatan	UNIT II	SK.469/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	209.297
217	Kalimantan Selatan	UNIT IV	SK.469/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	141.553
218	Kalimantan Selatan	UNIT X	SK.469/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	117.914
219	Kalimantan Tengah	UNIT I	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	1.063.147
220	Kalimantan Tengah	UNIT VI	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	180.311
221	Kalimantan Tengah	UNIT VIII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	107.713
222	Kalimantan Tengah	UNIT XII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	184.028
223	Kalimantan Tengah	UNIT XIII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	182.947
224	Kalimantan Tengah	UNIT XV	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	203.828
225	Kalimantan Tengah	UNIT XX	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	189.920
226	Kalimantan Tengah	UNIT XXXII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	185.915
227	Lampung	UNIT I	SK.473/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	39.001
228	Lampung	UNIT XIV	SK.473/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	9.866
229	Maluku Utara	UNIT I	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	150.493
230	Maluku Utara	UNIT II	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	103.970
231	Maluku Utara	UNIT V	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	78.287
232	Maluku Utara	UNIT VI	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	72.706
233	Maluku Utara	UNIT VII	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	93.115
234	Maluku Utara	UNIT VIII	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	37.199
235	Maluku Utara	UNIT III	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	165.028
236	Maluku Utara	UNIT IX	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	8.477
237	Maluku Utara	UNIT XIV	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	190.756
238	Maluku Utara	UNIT XV	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	97.118
239	Nusa Tenggara Barat	UNIT II	SK.471/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	18.022
240	Nusa Tenggara Barat	UNIT XVII	SK.471/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	32.245
241	Nusa Tenggara Barat	UNIT XXI	SK.471/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	20.900
242	Sulawesi Tengah	UNIT X	SK.476/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	88.200
243	Sulawesi Tengah	UNIT XIII	SK.476/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	170.930
244	Sulawesi Tengah	UNIT XVI	SK.476/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	211.056
245	Sulawesi Tengah	UNIT XII	SK.735/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	92.179
246	Sulawesi Tengah	UNIT XV	SK.735/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	156.582
247	Sulawesi Tengah	UNIT XVIII	SK.735/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	179.581
248	Sumatera Utara	UNIT III	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	28.145
249	Sumatera Utara	UNIT IX	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	9.740
250	Sumatera Utara	UNIT XI	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	42.052

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
251	Sumatera Utara	UNIT XIII	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	54.720
252	Sumatera Utara	UNIT XXX	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	120.968
253	Sumatera Utara	UNIT XXXII	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	143.895
254	Sumatera Utara	UNIT IV	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	42.717
255	Sumatera Utara	UNIT VII	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	32.287
256	Sumatera Utara	UNIT VIII	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	49.236
257	Sumatera Utara	UNIT X	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	4.884
258	Sumatera Utara	UNIT XIX	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	19.808
259	Sumatera Utara	UNIT V	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	37.771
260	Sumatera Utara	UNIT VI	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	45.638
261	Sumatera Utara	UNIT XXI	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	38.277
262	Sumatera Utara	UNIT XXXIII	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	109.733
263	Sumatera Barat	UNIT VII	SK.724/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	182.908
264	Sumatera Barat	UNIT X	SK.724/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	123.467
265	Sumatera Barat	UNIT XI	SK.724/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	134.750
266	Sumatera Selatan	UNIT IX	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	33.553
267	Sumatera Selatan	UNIT X	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	39.912
268	Sumatera Selatan	UNIT XI	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	40.701
269	Sumatera Selatan	UNIT XVII	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	43.001
270	Sumatera Selatan	UNIT XVIII	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	50.894
271	Sumatera Selatan	UNIT VIII	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	6.504
272	Kalimantan Timur	UNIT XIV	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	324.054
273	Kalimantan Timur	UNIT XV	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	326.041
274	Kalimantan Timur	UNIT XVI	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	142.933
275	Kalimantan Timur	UNIT XVII	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	239.921
276	Kalimantan Timur	UNIT XVIII	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	673.912
277	Kalimantan Timur	UNIT XIX	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	928.748
278	Kalimantan Timur	UNIT XXIII	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	201.533
279	Kalimantan Timur	UNIT XXIV	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	534.036
280	Kalimantan Timur	UNIT XXV	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	410.598
281	Kalimantan Timur	UNIT XXVIII	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	296
282	Kalimantan Utara	UNIT I	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	47.189
283	Kalimantan Utara	UNIT II	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	357.466
284	Kalimantan Utara	UNIT III	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	178.204
285	Kalimantan Utara	UNIT IV	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	400.454
286	Kalimantan Utara	UNIT V	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	42.817
287	Kalimantan Utara	UNIT VIII	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	197.730
288	Kalimantan Utara	UNIT XI	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	606.599
289	Kalimantan Utara	UNIT XIII	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	211.140
290	Kalimantan Utara	UNIT XX	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	560.400
291	Kalimantan Utara	UNIT XXI	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	448.602
292	Sulawesi Utara	UNIT III	SK.729/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	26.605
293	Sulawesi Utara	UNIT I	SK.729/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	143.923
294	Sulawesi Utara	UNIT II	SK.729/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	138.402
295	Sulawesi Barat	UNIT I	SK.730/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	23.729
296	Sulawesi Barat	UNIT III	SK.730/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	71.611
297	Kepulauan Riau	UNIT VI	SK.731/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	22.832
298	Jambi	UNIT II	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	45.460
299	Jambi	UNIT III	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	69.492
300	Jambi	UNIT IV	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	50.930

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
301	Jambi	UNIT V	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	53.412
302	Jambi	UNIT XI	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	103.979
303	Kep. Bangka Belitung	UNIT VII	SK.733/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	45.497
304	Kep. Bangka Belitung	UNIT XII	SK.733/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	47.750
305	Kep. Bangka Belitung	UNIT IX	SK.733/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	55.249
306	Kep. Bangka Belitung	UNIT XI	SK.733/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	30.848
307	Nusa Tenggara Timur	UNIT XV	SK.734/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	9.970
308	Riau	UNIT XVI	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	62.723
309	Riau	UNIT VIII	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	105.279
310	Riau	UNIT X	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	64.885
311	Riau	UNIT XI	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	29.812
312	Riau	UNIT XIII	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	72.739
313	Riau	UNIT XVII	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	27.330
314	Riau	UNIT XXVI	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	117.912
315	Bali	UNIT I	SK.83/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	38.537
316	Bali	UNIT II	SK.83/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	35.317
317	Bali	UNIT III	SK.83/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	20.808
318	Bali	UNIT IV	SK.83/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	10.738
319	Maluku	UNIT IV	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	140.952
320	Maluku	UNIT IX	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	79.987
321	Maluku	UNIT VI	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	127.944
322	Maluku	UNIT VIII	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	94.957
323	Maluku	UNIT XI	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	136.401
324	Maluku	UNIT XIII	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	36.529
325	Maluku	UNIT XIX	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	45.765
326	Maluku	UNIT XVII	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	70.874
327	Maluku	UNIT XX	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	64.272
328	Nusa Tenggara Timur	UNIT XII	SK.84/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	7.544
329	Nusa Tenggara Timur	UNIT XIII	SK.84/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	26.165
330	Nusa Tenggara Timur	UNIT XVIII	SK.84/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	1.499
331	Papua	UNIT I	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	144.178
332	Papua	UNIT IV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	317.151
333	Papua	UNIT IX	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	266.595
334	Papua	UNIT L	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	309.709
335	Papua	UNIT LII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	500.736
336	Papua	UNIT LIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	248.976
337	Papua	UNIT LV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	937.070
338	Papua	UNIT V	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	194.489
339	Papua	UNIT VII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	671.385
340	Papua	UNIT VIII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	234.635
341	Papua	UNIT XI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	224.416
342	Papua	UNIT XII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	401.950
343	Papua	UNIT XIII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	631.259
344	Papua	UNIT XIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	199.047
345	Papua	UNIT XL	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	382.624
346	Papua	UNIT XLI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	291.032
347	Papua	UNIT XLIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	880.620
348	Papua	UNIT XLV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	644.413
349	Papua	UNIT XLVI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	449.718
350	Papua	UNIT XV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	472.706

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
351	Papua	UNIT XVI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	314.572
352	Papua	UNIT XVIII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	270.629
353	Papua	UNIT XXIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	236.940
354	Papua	UNIT XXVI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	242.063
355	Papua	UNIT XXVII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	359.330
356	Papua	UNIT XXX	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	150.238
357	Papua	UNIT XXXI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	312.293
358	Papua	UNIT XXXII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	270.264
359	Papua	UNIT XXXIII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	242.459
360	Papua	Unit XXXIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	23.502
361	Papua	UNIT XXXIX	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	219.484
362	Papua	UNIT XXXVI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	88.547
363	Papua	UNIT XXXVII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	112.039
364	Papua	UNIT XXXVIII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	333.836
365	Papua Barat	UNIT III	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	235.899
366	Papua Barat	UNIT IX	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	242.559
367	Papua Barat	UNIT VII	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	130.809
368	Papua Barat	UNIT VIII	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	122.666
369	Papua Barat	UNIT X	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	337.794
370	Papua Barat	UNIT XI	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	302.888
371	Papua Barat	UNIT XIII	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	260.558
372	Papua Barat	UNIT XIV	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	288.745
373	Papua Barat	UNIT XIX	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	235.427
374	Papua Barat	UNIT XVII	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	159.489
375	Papua Barat	UNIT XVIII	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	230.695
376	Papua Barat	UNIT XX	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	399.415
377	Papua Barat	UNIT XXI	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	390.140
378	Sulawesi Barat	UNIT XIII	SK.80/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	42.321
379	Sulawesi Selatan	UNIT II	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	69.848
380	Sulawesi Selatan	UNIT III	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	71.518
381	Sulawesi Selatan	UNIT IV	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	72.999
382	Sulawesi Selatan	UNIT IX	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	457.738
383	Sulawesi Selatan	UNIT V	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	78.271
384	Sulawesi Selatan	UNIT VI	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	113.056
385	Sulawesi Selatan	UNIT VII	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	55.103
386	Sulawesi Selatan	UNIT VIII	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	119.445
387	Sulawesi Selatan	UNIT X	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	162.840
388	Sulawesi Selatan	UNIT XI	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	241.946
389	Sulawesi Selatan	UNIT XII	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	64.592
390	Sulawesi Selatan	UNIT XIII	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	134.513
391	Sulawesi Selatan	UNIT XIV	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	76.962
392	Sulawesi Selatan	UNIT XV	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	30.216
393	Sulawesi Tenggara	UNIT I	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	13.793
394	Sulawesi Tenggara	UNIT II	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	48.282
395	Sulawesi Tenggara	UNIT IV	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	15.701
396	Sulawesi Tenggara	UNIT IX	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	46.315
397	Sulawesi Tenggara	UNIT XV	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	93.115
398	Sulawesi Tenggara	UNIT XVII	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	105.549
399	Sulawesi Tenggara	UNIT XVIII	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	167.626
400	Sulawesi Tenggara	UNIT XXIII	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	36.562

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d. 31 Desember 2019

TABEL V.6. PENGESAHAN RPHJP KPH

No.	Penetapan	Nama KPH	Unit	Jenis KPH	Provinsi	SK RPHJP
1	2	3	4	5	6	7
1	PENETAPAN MODEL	UNIT III ACEH	Unit III	KPHL	Aceh	SK. 6062/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/10/2016
2	PENETAPAN FASILITASI 2015	LINTAS KABUPATEN UNIT I	UNIT I	KPHL	Aceh	SK. 7341/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/10/2018
3	PENETAPAN FASILITASI 2015	LINTAS KABUPATEN UNIT II	UNIT II	KPHL	Aceh	SK. 6943/MENLHK-KPHL/PKPHL/SET.1/12/2017
4	PENETAPAN FASILITASI 2015	LINTAS KABUPATEN UNIT IV	UNIT IV	KPHL	Aceh	SK. 6069/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/6/2019
5	PENETAPAN FASILITASI 2015	LINTAS KABUPATEN UNIT V	UNIT V	KPHL	Aceh	SK. 6068/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/6/2019
6	PENETAPAN FASILITASI 2015	LINTAS KABUPATEN UNIT VI	UNIT VI	KPHL	Aceh	SK. 10198/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2019
7	PENETAPAN FASILITASI 2018	BALI BARAT	UNIT I	KPHL	Bali	SK. 6151/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2018
8	PENETAPAN FASILITASI 2018	BALI UTARA	UNIT II	KPHL	Bali	SK. 6153/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2018
9	PENETAPAN FASILITASI 2018	BALI TIMUR	UNIT III	KPHL	Bali	SK. 6150/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2018
10	PENETAPAN FASILITASI 2018	BALI SELATAN	UNIT IV	KPHL	Bali	SK. 6152/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2018
11	PENETAPAN MODEL	MUKO-MUKO	UNIT I	KPHP	Bengkulu	SK. 3038/Menhut-II/REG.1/2014
12	PENETAPAN MODEL	BUKIT BALAI REJANG	Unit VII	KPHL	Bengkulu	SK. 6481/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016
13	PENETAPAN MODEL	BENGKULU UTARA	Unit II	KPHP	Bengkulu	SK. 1229/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2018
14	PENETAPAN FASILITASI 2015	LINTAS KABUPATEN	UNIT III	KPHL	Bengkulu	SK. 196/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/1/2018
15	PENETAPAN FASILITASI 2015	SELUMA	UNIT IV	KPHL	Bengkulu	SK. 6480/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016
16	PENETAPAN FASILITASI 2015	BENGKULU SELATAN	UNIT V	KPHL	Bengkulu	SK. 2807/MENLHK-KPHL/DAS.3/5/2018
17	PENETAPAN FASILITASI 2015	KAUR	UNIT VI	KPHL	Bengkulu	SK. 3650/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/5/2018
18	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT II GORONTALO	UNIT II	KPHL	Gorontalo	SK. 1244/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/3/2018
19	PENETAPAN MODEL	POHUWATO	Unit III	KPHL	Gorontalo	SK. 6523/Menhut-II/Reg.4-1/2014
20	PENETAPAN MODEL	BOALEMO	Unit V	KPHP	Gorontalo	SK. 108/Menhut-II/Reg.4-2/2014
21	PENETAPAN MODEL	GORONTALO UTARA	Unit IV	KPHP	Gorontalo	SK. 6521/Menhut-II/Reg.4-1/2014
22	PENETAPAN MODEL	GORONTALO	Unit VI	KPHP	Gorontalo	SK. 7315/Menhut-II/Reg.4-1/2014
23	PENETAPAN FASILITASI 2015	BONE BOLANGO	UNIT VII	KPHP	Gorontalo	SK. 6102/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2016
24	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT VIII JAMBI	UNIT VIII	KPHP	Jambi	SK. 1450/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018
25	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XIII JAMBI	UNIT XIII	KPHP	Jambi	SK. 8567/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018
26	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XIV JAMBI	UNIT XIV	KPHP	Jambi	SK. 10483/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019
27	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XVI JAMBI	UNIT XVI	KPHP	Jambi	SK. 10482/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019
28	PENETAPAN MODEL	MERANGIN	Unit VI	KPHP	Jambi	SK. 321/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018
29	PENETAPAN MODEL	LIMAU	Unit VII	KPHP	Jambi	SK. 198/Menhut-II/REG.I/2014
30	PENETAPAN MODEL	SUNGAI BERAM HITAM	UNIT XVII	KPHL	Jambi	SK. 5429/MENLHK/KPHL-PKPHL/DAS.3/10/2017
31	PENETAPAN MODEL	KERINCI	Unit I	KPHP	Jambi	SK. 1983/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2017
32	PENETAPAN FASILITASI 2015	TEBO BARAT	UNIT IX	KPHP	Jambi	SK. 2419/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018
33	PENETAPAN FASILITASI 2015	TEBO TIMUR	UNIT X	KPHP	Jambi	SK. 4748/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/7/2018
34	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT II JAMBI	UNIT II	KPHP	Jambi	SK. 8658/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018
35	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT III JAMBI	UNIT III	KPHP	Jambi	SK. 10485/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019
36	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT VIII KALBAR	UNIT VIII	KPHP	Kalimantan Barat	SK. 6989/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2019

No.	Penetapan	Nama KPH	Unit	Jenis KPH	Provinsi	SK RPHJP
1	2	3	4	5	6	7
37	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XV KALBAR	UNIT XV	KPHP	Kalimantan Barat	SK. 5930/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2019
38	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XXXIII KALBAR	UNIT XXXIII	KPHP	Kalimantan Barat	SK. 6677/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2019
39	PENETAPAN MODEL	UNIT XXVIII KALBAR	Unit XXVIII	KPHL	Kalimantan Barat	SK. 5508/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/6/2019
40	PENETAPAN MODEL	SINTANG	UNIT X	KPHP	Kalimantan Barat	SK. 10477/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2019
41	PENETAPAN FASILITASI 2016	KPHL BALANGAN (KPHL UNIT VIII)	UNIT VIII	KPHL	Kalimantan Selatan	SK. 198/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/1/2018
42	PENETAPAN MODEL	KPHP MODEL PULAU LAUT DAN SEBUKU (KPHP UNIT III)	Unit III	KPHP	Kalimantan Selatan	SK. 22/Menhut-II/Reg.III/2014
43	PENETAPAN MODEL	KPHP MODEL TANAH LAUT (KPHP UNIT VII)	Unit VII	KPHP	Kalimantan Selatan	SK. 21/Menhut-II/REG.III/2014
44	PENETAPAN MODEL	HULU SUNGAI	UNIT IX	KPHL	Kalimantan Selatan	SK.3617/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/6/2017
45	PENETAPAN MODEL	KPHP MODEL BANJAR (KPHP UNIT I)	UNIT I	KPHP	Kalimantan Selatan	SK. 15/Menhut-II/REG.III/2014
46	PENETAPAN MODEL	KPHP MODEL TABALONG (KPHP UNIT V)	Unit V	KPHP	Kalimantan Selatan	SK. 10/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
47	PENETAPAN FASILITASI 2015	KPHP TANAH BUMBU (KPHP UNIT VI)	UNIT VI	KPHP	Kalimantan Selatan	SK. 52/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2017
48	PENETAPAN FASILITASI 2017	KPHP CANTUNG (KPHP UNIT II)	UNIT II	KPHP	Kalimantan Selatan	SK.5676/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/10/2017
49	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT VII KALTENG	UNIT VII	KPHP	Kalimantan Tengah	SK.5294/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/5/2019
50	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XI KALTENG	UNIT XI	KPHP	Kalimantan Tengah	SK.8656/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/12/2018
51	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XVII KALTENG	UNIT XVII	KPHP	Kalimantan Tengah	SK.1883/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/4/2018
52	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XVIII KALTENG	UNIT XVIII	KPHP	Kalimantan Tengah	SK.1383/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/2/2019
53	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XIX KALTENG	UNIT XIX	KPHP	Kalimantan Tengah	SK.8215/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/11/2018
54	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XXV KALTENG	UNIT XXV	KPHP	Kalimantan Tengah	SK.8735/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/12/2018
55	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XXVII KALTENG	UNIT XXVII	KPHP	Kalimantan Tengah	SK.9005/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/10/2019
56	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XXVIII KALTENG	UNIT XXVIII	KPHP	Kalimantan Tengah	SK.1449/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/4/2018
57	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XXX KALTENG	UNIT XXX	KPHP	Kalimantan Tengah	SK.1033/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/1/2019
58	PENETAPAN MODEL	UNIT XXXIII KALTENG	UNIT XXXIII	KPHL	Kalimantan Tengah	SK.3616/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/6/2017
59	PENETAPAN MODEL	UNIT XXI KALTENG	Unit XXI	KPHP	Kalimantan Tengah	SK. 6/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
60	PENETAPAN MODEL	UNIT XXIII KALTENG	Unit XXIII	KPHP	Kalimantan Tengah	SK. 8/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
61	PENETAPAN MODEL	UNIT XXII KALTENG	UNIT XXII	KPHP	Kalimantan Tengah	SK.5940/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/9/2018
62	PENETAPAN MODEL	UNIT II KALTENG	Unit II	KPHP	Kalimantan Tengah	SK. 9/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
63	PENETAPAN MODEL	UNIT XVI KALTENG	Unit XVI	KPHP	Kalimantan Tengah	SK. 7/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
64	PENETAPAN MODEL	UNIT IX KALTENG	Unit IX	KPHL	Kalimantan Tengah	SK.5179/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/8/2018
65	PENETAPAN FASILITASI 2015	UNIT III KALTENG	UNIT III	KPHP	Kalimantan Tengah	SK.5841/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/9/2018
66	PENETAPAN FASILITASI 2015	UNIT V KALTENG	UNIT V	KPHP	Kalimantan Tengah	SK.2421/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/4/2018
67	PENETAPAN FASILITASI 2015	UNIT XIV KALTENG	UNIT XIV	KPHP	Kalimantan Tengah	SK.9631/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/11/2019
68	PENETAPAN FASILITASI 2015	UNIT XXXI KALTENG	UNIT XXXI	KPHP	Kalimantan Tengah	SK.8655/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/12/2018
69	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT I KALTENG	UNIT I	KPHP	Kalimantan Tengah	SK.5915/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/6/2019
70	PENETAPAN MODEL	UNIT XXVI KALTENG	UNIT XXVI	KPHP	Kalimantan Tengah	SK.5940/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/9/2018
71	PENETAPAN MODEL	BERAU BARAT	UNIT XII	KPHP	Kalimantan Timur	SK. 19/Menhut-II/REG.III/2014
72	PENETAPAN MODEL	MERATUS	Unit XXXI	KPHP	Kalimantan Timur	SK. 20/Menhut-II/REG.III/2014
73	PENETAPAN MODEL	KENDILO	Unit XXXIV	KPHP	Kalimantan Timur	SK.279/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017
74	PENETAPAN FASILITASI 2015	DAS BELAYAN	UNIT XXVI	KPHP	Kalimantan Timur	SK.290/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018

No.	Penetapan	Nama KPH	Unit	Jenis KPH	Provinsi	SK RPHJP
1	2	3	4	5	6	7
75	PENETAPAN FASILITASI 2015	SANTAN	UNIT XXVII	KPHP	Kalimantan Timur	SK. 284/MenLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/2/2017
76	PENETAPAN FASILITASI 2015	DELTA MAHAKAM	UNIT XXIX	KPHP	Kalimantan Timur	SK. 281/MenLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/2/2017
77	PENETAPAN FASILITASI 2015	SUNGAI WAIN-SUNGAI MANGGAR	UNIT XXX	KPHL	Kalimantan Timur	SK.6940/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2017
78	PENETAPAN FASILITASI 2015	BONGAN	UNIT XXXII	KPHP	Kalimantan Timur	SK. 283/MenLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/2/2017
79	PENETAPAN FASILITASI 2015	TELAKE	UNIT XXXIII	KPHP	Kalimantan Timur	SK. 282/MenLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/2/2017
80	PENETAPAN MODEL	MALINAU	Unit X	KPHP	Kalimantan Utara	SK.2374/MENLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/4/2017
81	PENETAPAN MODEL	TARAKAN	UNIT VI	KPHL	Kalimantan Utara	SK. 18/Menhut-II/REG.III/2014
82	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT III KALTARA	UNIT III	KPHP	Kalimantan Utara	SK.8434/MenLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/12/2018
83	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT IV KALTARA	UNIT IV	KPHP	Kalimantan Utara	SK.1380/MenLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/2/2019
84	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT XIII KALTARA	UNIT XIII	KPHP	Kalimantan Utara	SK.8880/MenLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/10/2019
85	PENETAPAN MODEL	UNIT IX KALTARA	UNIT IX	KPHP	Kalimantan Utara	SK.7232/MenLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/10/2018
86	PENETAPAN MODEL	SUNGAI SEMBULAN	UNIT V	KPHP	Kepulauan Bangka Belitung	SK. 194/Menhut-II/REG.I/2014
87	PENETAPAN MODEL	RAMBAT MENDUYUNG	Unit I	KPHP	Kepulauan Bangka Belitung	SK. 207/MenLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/1/2017
88	PENETAPAN MODEL	GUNUNG DUREN	Unit XIII	KPHP	Kepulauan Bangka Belitung	SK.218/MENLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/1/2018
89	PENETAPAN MODEL	SIGAMBIR KOTAWARINGIN	Unit IV	KPHP	Kepulauan Bangka Belitung	SK. 1088/MenLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/3/2017
90	PENETAPAN FASILITASI 2015	JEBU BEMBANG ANTAN	UNIT II	KPHP	Kepulauan Bangka Belitung	SK.7223/MENLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/9/2019
91	PENETAPAN FASILITASI 2015	BUBUS PANCA	UNIT III	KPHP	Kepulauan Bangka Belitung	SK.9809/MENLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/11/2019
92	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT VII KEP BABEL	UNIT VII	KPHL	Kepulauan Bangka Belitung	SK.4983/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.0/5/2019
93	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT XII KEP BABEL	UNIT XII	KPHL	Kepulauan Bangka Belitung	SK.6395/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019
94	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT II KEPRI	UNIT II	KPHL	Kepulauan Riau	SK.9739/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2019
95	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT V KEPRI	UNIT V	KPHP	Kepulauan Riau	SK.6185/MenLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/7/2019
96	PENETAPAN MODEL	KARIMUN	Unit I	KPHP	Kepulauan Riau	SK.5916/MenLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/6/2019
97	PENETAPAN FASILITASI 2015	BINTAN TANJUNG PINANG	UNIT IV	KPHP	Kepulauan Riau	SK.3192/MenLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/1/2019
98	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XI LAMPUNG	UNIT XI	KPHL	Lampung	SK.6944/MENLHK-KPHL/PKPHL/SET.1/12/2017
99	PENETAPAN MODEL	MUARA DUA	Unit IV	KPHP	Lampung	SK. 294/Menhut-II/REG.I-1/2014
100	PENETAPAN MODEL	UNIT XIV LAMPUNG	Unit XIV	KPHP	Lampung	SK. 268/Menhut-II/REG.I/2014
101	PENETAPAN MODEL	KOTA AGUNG UTARA	Unit X	KPHL	Lampung	SK. 343/Menhut-II/REG.I-1/2014
102	PENETAPAN MODEL	GEDONG WANI	Unit XVI	KPHP	Lampung	SK. 293/Menhut-II/REG.I-1/2014
103	PENETAPAN MODEL	PESAWARAN	Unit XII	KPHL	Lampung	SK. 7370/Menhut-II/REG.1-1/2014
104	PENETAPAN MODEL	BUKIT PUNGUR	Unit III	KPHP	Lampung	SK. 7755/Menhut-II/REG.1-1/2014
105	PENETAPAN MODEL	BATU TEGI	UNIT IX	KPHL	Lampung	SK. 342/Menhut-II/REG.I-1/2014
106	PENETAPAN MODEL	REGISTER 47 WAY TERUSAN	UNIT VI	KPHP	Lampung	SK. 3039/MENHUT-II/REG.I-1/2014
107	PENETAPAN MODEL	SUNGAI BUAYA	Unit V	KPHP	Lampung	SK.4885/MENLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/7/2018
108	PENETAPAN FASILITASI 2015	LIWA	UNIT II	KPHL	Lampung	SK.6945/MENLHK-KPHL/PKPHL/SET.1/12/2017
109	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT V MALUKU	UNIT V	KPHL	Maluku	SK.10001/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2019
110	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XV MALUKU	UNIT XV	KPHL	Maluku	SK.10000/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2019
111	PENETAPAN MODEL	WAE SAPALEWA	UNIT VII	KPHP	Maluku	SK.6881/MENLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/12/2017
112	PENETAPAN MODEL	WAE APU	Unit II	KPHP	Maluku	SK.8723/MenLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/12/2018

No.	Penetapan	Nama KPH	Unit	Jenis KPH	Provinsi	SK RPHJP
1	2	3	4	5	6	7
113	PENETAPAN MODEL	WAE TINA	Unit III	KPHP	Maluku	SK.1077/Menlhk-KPHP/KPHP/HPL.0/1/2019
114	PENETAPAN MODEL	WAE BUBI	Unit X	KPHP	Maluku	SK.3193/Menlhk-KPHP/KPHP/HPL.0/1/2019
115	PENETAPAN FASILITASI 2015	KOTA AMBON	UNIT XIV	KPHL	Maluku	SK.9999/MENLHK-KPHL/KPHL/DAS.3/12/2019
116	PENETAPAN FASILITASI 2015	BUNGAL	UNIT XVIII	KPHP	Maluku	SK.6564/Menlhk-KPHP/KPHP/HPL.0/7/2019
117	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XII MALUT	UNIT XII	KPHP	Maluku Utara	SK.5486/MENLHK-KPHP/HPL.0/10/2017
118	PENETAPAN MODEL	GUNUNG SINOPA	UNIT X	KPHP	Maluku Utara	SK.7578/Menhut-II/Reg.4-1/2014
119	PENETAPAN MODEL	BACAN	Unit XIII	KPHP	Maluku Utara	SK.7580/Menhut-II/Reg.4-1/2014
120	PENETAPAN FASILITASI 2015	OPA	UNIT IX	KPHP	Maluku Utara	SK.5485/MENLHK-KPHP/KPHP/HPL.0/10/2017
121	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT I MALUT	UNIT I	KPHL	Maluku Utara	SK.159/MENLHK-KPHL/KPHL/DAS.3/12/2019
122	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT III MALUT	UNIT III	KPHL	Maluku Utara	SK.8721/MENLHK-KPHL/KPHL/DAS.3/12/2018
123	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT XI MALUT	UNIT XI	KPHL	Maluku Utara	SK.6400/MENLHK-KPHL/KPHL/DAS.3/7/2019
124	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT VI NTB	UNIT VI	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK.5747/MENLHK-KPHL/KPHL/DAS.3/6/2019
125	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT VII NTB	UNIT VII	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK.6479/MENLHK-KPHL/KPHL/DAS.3/11/2016
126	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT VIII NTB	UNIT VIII	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK.6942/MENLHK-KPHL/KPHL/DAS.3/12/2017
127	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XII NTB	UNIT XII	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK.4673/MENLHK-KPHL/KPHL/DAS.3/7/2018
128	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XIX NTB	UNIT XIX	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK.1169/MENLHK-KPHL/KPHL/SET.1/3/2018
129	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XXII NTB	UNIT XXII	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK.5931/MENLHK-KPHL/KPHL/DAS.3/9/2018
130	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT X NTB	UNIT X	KPHP	Nusa Tenggara Barat	SK.10479/Menlhk-KPHP/KPHP/HPL.0/12/2019
131	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XI NTB	UNIT XI	KPHP	Nusa Tenggara Barat	SK.10480/Menlhk-KPHP/KPHP/HPL.0/12/2019
132	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XIII NTB	UNIT XIII	KPHP	Nusa Tenggara Barat	SK.6325/Menlhk-KPHP/KPHP/HPL.0/7/2019
133	PENETAPAN MODEL	RINJANI TIMUR	Unit IV	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK.6466/MENLHK-KPHL/KPHL/DAS.3/7/2019
134	PENETAPAN MODEL	BATULANTEH	UNIT IX	KPHP	Nusa Tenggara Barat	SK.4052/Menhut-II/Reg.2-1/2014
135	PENETAPAN MODEL	AMPANG	Unit XIV	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK.8464/MENLHK-KPHL/KPHL/DAS.3/12/2018
136	PENETAPAN MODEL	MARIA	Unit XXIII	KPHP	Nusa Tenggara Barat	SK.634/Menhut-II/Reg.2-1/2015
137	PENETAPAN MODEL	RINJANI BARAT	UNIT I	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK.5044/Menhut-II/Reg.2-1/2014
138	PENETAPAN MODEL	SEJORONG	Unit V	KPHP	Nusa Tenggara Barat	SK.6102/Menhut-II/Reg.2-1/2014
139	PENETAPAN MODEL	TAMBORA UTARA	Unit XVIII	KPHP	Nusa Tenggara Barat	SK.740/Menhut-II/Reg.2-1/2015
140	PENETAPAN MODEL	TASTURA	Unit III	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK.1018/Menhut-II/Reg.1-2/2015
141	PENETAPAN FASILITASI 2015	TOFFO PAJO	UNIT XVI	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK.6677/MENLHK-KPHL/KPHL/DAS.3/12/2016
142	PENETAPAN FASILITASI 2015	MADAPANGGA ROMPU	UNIT XX	KPHP	Nusa Tenggara Barat	SK.276/Menlhk-KPHP/KPHP/HPL.0/2/2017
143	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XIV NTT	UNIT XIV	KPHL	Nusa Tenggara Timur	SK.6306/MENLHK-KPHL/KPHL/DAS.3/7/2019
144	PENETAPAN MODEL	ROTE NDAO	UNIT XVI	KPHP	Nusa Tenggara Timur	SK.700/Menhut-II/Reg.2-1/2015
145	PENETAPAN MODEL	ALOR PANTAR	Unit X	KPHL	Nusa Tenggara Timur	SK.7734/Menhut-II/Reg.2-1/2014
146	PENETAPAN MODEL	FLORES TIMUR	Unit VIII	KPHL	Nusa Tenggara Timur	SK.4808/MENLHK-KPHL/KPHL/DAS.3/5/2019
147	PENETAPAN FASILITASI 2015	MANGGARAI	UNIT II	KPHL	Nusa Tenggara Timur	SK.6233/MENLHK-KPHL/KPHL/DAS.3/7/2019
148	PENETAPAN FASILITASI 2015	NGADA	UNIT IV	KPHL	Nusa Tenggara Timur	SK.3998/MENLHK-KPHL/KPHL/DAS.3/4/2019
149	PENETAPAN FASILITASI 2015	ENDE	UNIT VI	KPHP	Nusa Tenggara Timur	SK.10478/MENLHK-KPHL/HPL.0/12/2019
150	PENETAPAN FASILITASI 2015	LEMBATA	UNIT IX	KPHL	Nusa Tenggara Timur	SK.6305/MENLHK-KPHL/KPHL/DAS.3/7/2019
151	PENETAPAN FASILITASI 2015	SUMBA BARAT DAYA	UNIT XI	KPHL	Nusa Tenggara Timur	SK.5509/MENLHK-KPHL/KPHL/DAS.3/6/2019

No.	Penetapan	Nama KPH	Unit	Jenis KPH	Provinsi	SK RPHJP
1	2	3	4	5	6	7
152	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT XV NTT	UNIT XV	KPHL	Nusa Tenggara Timur	SK.32/KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019
153	PENETAPAN FASILITASI 2018	UNIT XVIII NTT	UNIT XVIII	KPHL	Nusa Tenggara Timur	SK.1339/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/2/2019
154	PENETAPAN MODEL	BIAK NUMFOR	UNIT XX	KPHL	Papua	SK. 6544/Menhut-II/Reg.4-1/2014
155	PENETAPAN MODEL	WAROPEN	Unit XVII	KPHP	Papua	SK. 5881/Menhut-II/Reg.4-1/2014
156	PENETAPAN MODEL	YAPEN	UNIT XIX	KPHP	Papua	SK.4631/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019
157	PENETAPAN MODEL	KEEROM	Unit XXIX	KPHP	Papua	SK. 6520/Menhut-II/Reg.4-1/2014
158	PENETAPAN MODEL	MEMBERAMO	Unit XXI	KPHP	Papua	SK. 5880/Menhut-II/Reg.4-1/2014
159	PENETAPAN FASILITASI 2015	MIMIKA	UNIT VI	KPHL	Papua	SK.6304/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019
160	PENETAPAN FASILITASI 2015	KOTA JAYAPURA	UNIT XXVIII	KPHP	Papua	SK.5293/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019
161	PENETAPAN FASILITASI 2015	NDUGA	UNIT XLIII	KPHP	Papua	SK.6314/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019
162	PENETAPAN MODEL	SORONG	UNIT II	KPHP	Papua Barat	SK. 7582/Menhut-II/Reg.4-1/2014
163	PENETAPAN MODEL	SORONG SELATAN	UNIT V	KPHP	Papua Barat	SK. 7318/Menhut-II/Reg.4-1/2014
164	PENETAPAN MODEL	REMU	UNIT II	KPHL	Papua Barat	SK. 470/Menhut-II/Reg.4-1/2015
165	PENETAPAN MODEL	TEBING TINGGI	Unit XXIV	KPHP	Riau	SK.277/Menhut-II/Reg.4-1/2014
166	PENETAPAN MODEL	TASIK BESAR SERKAP	UNIT XXII	KPHP	Riau	SK. 7565/Menhut-II/Reg. 1-1/2014
167	PENETAPAN MODEL	KAMPAR KIRI	Unit XVIII	KPHP	Riau	SK. 7204/Menhut-II/Reg. 1/1/2014
168	PENETAPAN MODEL	MINAS TAHURA	UNIT IX	KPHP	Riau	SK. 280/Menhut-II/Reg.4-1/2014
169	PENETAPAN FASILITASI 2015	BENGKALIS	UNIT V	KPHP	Riau	SK.10484/Menhut-II/Reg.4-1/2014
170	PENETAPAN FASILITASI 2015	ROKAN HULU	UNIT XIV	KPHP	Riau	SK.6329/Menhut-II/Reg.4-1/2014
171	PENETAPAN FASILITASI 2015	PELALAWAN XX	UNIT XX	KPHP	Riau	SK.10481/Menhut-II/Reg.4-1/2014
172	PENETAPAN FASILITASI 2015	KUANTAN SINGINGI	UNIT XXXI	KPHP	Riau	SK.6403/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.4/1/2016
173	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT XVI RIAU	UNIT XVI	KPHL	Riau	SK.6303/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019
174	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT XVII RIAU	UNIT XVII	KPHP	Riau	SK.4984/Menhut-II/Reg.4-1/2014
175	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT IX SULBAR	UNIT IX	KPHL	Sulawesi Barat	SK.4809/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/5/2019
176	PENETAPAN MODEL	LARIANG	Unit II	KPHL	Sulawesi Barat	SK. 7317/Menhut-II/Reg.4-1/2014
177	PENETAPAN MODEL	MAMASA TENGAH	Unit VIII	KPHL	Sulawesi Barat	SK. 7584/Menhut-II/Reg.4-1/2014
178	PENETAPAN MODEL	MAMASA BARAT	Unit VII	KPHP	Sulawesi Barat	SK. 5581/Menhut-II/Reg.4-1/2014
179	PENETAPAN MODEL	MAPILI	UNIT XI	KPHL	Sulawesi Barat	SK. 6404/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016
180	PENETAPAN MODEL	MALUNDA	Unit X	KPHL	Sulawesi Barat	SK.1017/Menhut-II/Reg.4-1/2015
181	PENETAPAN MODEL	BUDONG-BUDONG	Unit V	KPHL	Sulawesi Barat	SK. 817/Menhut-II/Reg.4-1/2015
182	PENETAPAN FASILITASI 2015	KAROSSA	UNIT IV	KPHP	Sulawesi Barat	SK.305/MENLHK-KPHL/PKPHL/HPL.0/2/2018
183	PENETAPAN FASILITASI 2015	KARAMA	UNIT VI	KPHP	Sulawesi Barat	SK. 3/PHPL-KPHL/PKPHL/HPL.0/12/2016
184	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT III SULBAR	UNIT III	KPHL	Sulawesi Barat	SK.3575/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/4/2019
185	PENETAPAN FASILITASI 2018	UNIT XIII SULBAR	UNIT XIII	KPHL	Sulawesi Barat	SK.6227/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019
186	PENETAPAN FASILITASI 2018	AJATAPPARENG	UNIT II	KPHL	Sulawesi Selatan	SK.8617/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018
187	PENETAPAN FASILITASI 2018	BILA	UNIT III	KPHL	Sulawesi Selatan	SK.8616/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018
188	PENETAPAN FASILITASI 2018	SAWITTO	UNIT IV	KPHL	Sulawesi Selatan	SK.8618/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018
189	PENETAPAN FASILITASI 2018	RONGKONG	UNIT IX	KPHL	Sulawesi Selatan	SK.8610/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018
190	PENETAPAN FASILITASI 2018	MATA ALLO	UNIT V	KPHL	Sulawesi Selatan	SK.8614/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018

No.	Penetapan	Nama KPH	Unit	Jenis KPH	Provinsi	SK RPHJP
1	2	3	4	5	6	7
191	PENETAPAN FASILITASI 2018	SADDANG I	UNIT VI	KPHL	Sulawesi Selatan	SK. 8613/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018
192	PENETAPAN FASILITASI 2018	SADDANG II	UNIT VII	KPHL	Sulawesi Selatan	SK. 8612/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018
193	PENETAPAN FASILITASI 2018	LATIMOJONG	UNIT VIII	KPHL	Sulawesi Selatan	SK. 8611/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018
194	PENETAPAN FASILITASI 2018	KALAENA	UNIT X	KPHL	Sulawesi Selatan	SK. 8609/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018
195	PENETAPAN FASILITASI 2018	LARONA MALILI	UNIT XI	KPHL	Sulawesi Selatan	SK. 8608/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018
196	PENETAPAN FASILITASI 2018	WALANAE	UNIT XII	KPHL	Sulawesi Selatan	SK. 8607/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018
197	PENETAPAN FASILITASI 2018	JENEBERANG II	UNIT XV	KPHL	Sulawesi Selatan	SK. 8606/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018
198	PENETAPAN PROVINSI	SELAYAR	UNIT XVI	KPHL	Sulawesi Selatan	SK. 8605/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018
199	PENETAPAN PROVINSI	BULUSARAUNG	UNIT I	KPHP	Sulawesi Selatan	SK. 3783/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2019
200	PENETAPAN FASILITASI 2018	CENRANA	UNIT XIII	KPHP	Sulawesi Selatan	SK. 2675/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2019
201	PENETAPAN FASILITASI 2018	JENEBERANG I	UNIT XIV	KPHP	Sulawesi Selatan	SK. 3784/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2019
202	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT III SULTENG	UNIT III	KPHL	Sulawesi Tengah	SK. 4098/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2017
203	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT VIII SULTENG	UNIT VIII	KPHL	Sulawesi Tengah	SK. 197/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/1/2018
204	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT V SULTENG	UNIT V	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 740/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017
205	PENETAPAN MODEL	RANO PATANU	Unit XI	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 3934/Menhut-II/Reg.4-1/2014
206	PENETAPAN MODEL	BALANTAK	Unit XX	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 5579/Menhut-II/Reg.4-1/2014
207	PENETAPAN MODEL	UNIT IX SULTENG	Unit IX	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 3935/Menhut-II/Reg.4-1/2014
208	PENETAPAN MODEL	POGOGUL	Unit I	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 5580/Menhut-II/Reg.4-1/2014
209	PENETAPAN MODEL	DAMPELAS TINOMBO	UNIT IV	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 6942/Menhut-II/Reg.4/2/2013
210	PENETAPAN MODEL	TOILI BATURUBE	Unit XIX	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 6522/Menhut-II/Reg.4-1/2014
211	PENETAPAN MODEL	TOJO UNA-UNA	Unit XVII	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 7316/Menhut-II/Reg.4-1/2014
212	PENETAPAN FASILITASI 2015	GUNUNG DAKO	UNIT II	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 6880/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2017
213	PENETAPAN FASILITASI 2015	BANAWA LALUNDU	UNIT VII	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 741/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017
214	PENETAPAN FASILITASI 2015	MOROWALI	UNIT XIV	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 2420/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018
215	PENETAPAN FASILITASI 2015	PELING	UNIT XXI	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 7152/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2019
216	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT X SULTENG	UNIT X	KPHL	Sulawesi Tengah	SK. 158/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/1/2019
217	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT XIII SULTENG	UNIT XIII	KPHL	Sulawesi Tengah	SK. 1494/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/4/2018
218	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT XVI SULTENG	UNIT XVI	KPHL	Sulawesi Tengah	SK. 10372/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019
219	PENETAPAN MODEL	UNIT VI SULTENG	UNIT VI	KPHL	Sulawesi Tengah	SK. 6225/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019
220	PENETAPAN FASILITASI 2016	PATAMPANUA SELATAN	UNIT XVI	KPHL	Sulawesi Tenggara	SK. 1306/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/2/2019
221	PENETAPAN FASILITASI 2016	LAIWOI TENGAH	UNIT XX	KPHL	Sulawesi Tenggara	SK. 1324/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/2/2019
222	PENETAPAN FASILITASI 2016	LAIWOI TENGGARA	UNIT XXI	KPHL	Sulawesi Tenggara	SK. 156/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/1/2019
223	PENETAPAN FASILITASI 2016	GANTARA	UNIT VIII	KPHP	Sulawesi Tenggara	SK. 9262/MENLHK-KPHP/HPL.0/10/2019
224	PENETAPAN MODEL	GULARAYA	Unit XXIV	KPHP	Sulawesi Tenggara	SK. 6774/MENLHK-KPHP/HPL.0/12/2017
225	PENETAPAN MODEL	TINA ORIMA	Unit X	KPHP	Sulawesi Tenggara	SK. 6780/MENLHK-KPHP/HPL.0/12/2017
226	PENETAPAN MODEL	LAKOMPA	Unit III	KPHP	Sulawesi Tenggara	SK. 764/Menhut-II/Reg.4-1/2015
227	PENETAPAN MODEL	PEROPA EA	Unit VII	KPHL	Sulawesi Tenggara	SK. 7581/Menhut-II/Reg.4-1/2014
228	PENETAPAN FASILITASI 2015	PULAU MUNA	UNIT VI	KPHP	Sulawesi Tenggara	SK. 760/MENLHK-KPHP/HPL.0/2/2018
229	PENETAPAN FASILITASI 2015	MEKONGGA SELATAN	UNIT XI	KPHP	Sulawesi Tenggara	SK. 435/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017

No.	Penetapan	Nama KPH	Unit	Jenis KPH	Provinsi	SK RPHJP
1	2	3	4	5	6	7
230	PENETAPAN FASILITASI 2015	LADONGI	UNIT XII	KPHP	Sulawesi Tenggara	SK. 436/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017
231	PENETAPAN FASILITASI 2015	MEKONGGA UTARA	UNIT XIII	KPHL	Sulawesi Tenggara	SK. 157/MenLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/1/2019
232	PENETAPAN FASILITASI 2015	UEESI	UNIT XIV	KPHL	Sulawesi Tenggara	SK. 4764/MenLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2018
233	PENETAPAN FASILITASI 2015	LAIWOI UTARA	UNIT XIX	KPHP	Sulawesi Tenggara	SK. 2376/MenLHK-KPHP/HPL.0/4/2017
234	PENETAPAN FASILITASI 2018	LASALIMU	UNIT II	KPHP	Sulawesi Tenggara	SK. 8788/MenLHK-KPHP/HPL.0/10/2019
235	PENETAPAN MODEL	POIGAR	UNIT IV	KPHP	Sulawesi Utara	SK. 265/Menhut-II/Reg.4-2/2014
236	PENETAPAN FASILITASI 2015	MINAHASA UTARA, BITUNG, DAN MANADO	UNIT VI	KPHL	Sulawesi Utara	SK. 6676/MenLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2016
237	PENETAPAN FASILITASI 2017	BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	UNIT II	KPHP	Sulawesi Utara	SK. 1920/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2019
238	PENETAPAN FASILITASI 2016	MINAHASA, TOMOHON, MINAHASA TENGGARA, DAN MINAHASA SELATAN	UNIT V	KPHP	Sulawesi Utara	SK. 4174/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2018
239	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT I SUMBAR	UNIT I	KPHL	Sumatera Barat	SK. 6473/MenLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019
240	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT III SUMBAR	UNIT III	KPHL	Sumatera Barat	SK. 6472/MenLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019
241	PENETAPAN MODEL	SOLOK	Unit VI	KPHL	Sumatera Barat	SK. 6468/MenLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019
242	PENETAPAN MODEL	LIMA PULUH KOTA	Unit II	KPHL	Sumatera Barat	SK. 6469/MenLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019
243	PENETAPAN MODEL	SJUNJUNG	UNIT V	KPHL	Sumatera Barat	SK. 8466/MenLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018
244	PENETAPAN MODEL	DHARMASRAYA	Unit VIII	KPHP	Sumatera Barat	SK. 6969/Menhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2019
245	PENETAPAN MODEL	Pesisir Selatan	Unit IX	KPHP	Sumatera Barat	SK. 278/Menhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017
246	PENETAPAN MODEL	BUKIT BARISAN	Unit IV	KPHL	Sumatera Barat	SK. 6471/MenLHK-KPHL/PKPHL/DAS.1/7/2019
247	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT VII SUMBAR	UNIT VII	KPHL	Sumatera Barat	SK. 6467/MenLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019
248	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT X SUMBAR	UNIT X	KPHP	Sumatera Barat	SK. 5224/Menhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/5/2019
249	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT XI SUMBAR	UNIT XI	KPHP	Sumatera Barat	SK. 1990/Menhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018
250	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XX SUMSEL	UNIT XX	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 3614/MenLHK-KPHP/HPL.0/6/2017
251	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XXI SUMSEL	UNIT XXI	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 981/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2018
252	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XXII SUMSEL	UNIT XXII	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 980/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2018
253	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XXIII SUMSEL	UNIT XXIII	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 306/MenLHK-KPHP/HPL.0/2/2018
254	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XXIV SUMSEL	UNIT XXIV	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 291/MenLHK-KPHP/HPL.0/2/2018
255	PENETAPAN MODEL	RAWAS	Unit V	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 940/Menhut-II/Reg.1-1/2015
256	PENETAPAN MODEL	MERANTI	Unit IV	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 7216/Menhut-II/REG.1-1/2014
257	PENETAPAN MODEL	LALAN MANGSANG MENDIS	UNIT III	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 3646/Menhut-II/REG.1-1/2014
258	PENETAPAN MODEL	LAKITAN	UNIT VI	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 255/Menhut-II/REG.1-1/2014
259	PENETAPAN MODEL	BENAKAT	Unit VII	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 7369/Menhut-II/REG.1-1/2014
260	PENETAPAN MODEL	BANYUASIN	Unit I	KPHL	Sumatera Selatan	SK. 4411/MenLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2016
261	PENETAPAN FASILITASI 2015	LALAN SEMBILANG	UNIT II	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 3531/MenLHK-KPHP/HPL.0/6/2017
262	PENETAPAN FASILITASI 2015	DEMPO	UNIT XII	KPHL	Sumatera Selatan	SK. 6482/MenLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016
263	PENETAPAN FASILITASI 2015	OGAN ULU	UNIT XIII	KPHL	Sumatera Selatan	SK. 4097/MenLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2017
264	PENETAPAN FASILITASI 2015	SUBAN JERUJI	UNIT XIV	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 3614/MenLHK-KPHP/HPL.0/6/2017
265	PENETAPAN FASILITASI 2015	BUKIT NANTI	UNIT XV	KPHL	Sumatera Selatan	SK. 4096/MenLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2017

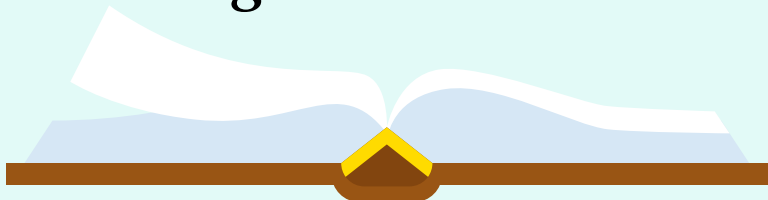
No.	Penetapan	Nama KPH	Unit	Jenis KPH	Provinsi	SK RPHJP
1	2	3	4	5	6	7
266	PENETAPAN FASILITASI 2015	PERADUAN GISTANG	UNIT XVI	KPHL	Sumatera Selatan	SK.6074/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2017
267	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT XI SUMSEL	UNIT XI	KPHL	Sumatera Selatan	SK.1325/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/2/2019
268	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT XVII SUMSEL	UNIT XVII	KPHL	Sumatera Selatan	SK.1340/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/2/2019
269	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT I SUMUT	UNIT I	KPHP	Sumatera Utara	SK.6888/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2017
270	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT II SUMUT	UNIT II	KPHL	Sumatera Utara	SK.5432/MENLHK/KPHL-PKPHL/DAS.3/10/2017
271	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XII SUMUT	UNIT XII	KPHP	Sumatera Utara	SK.6101/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2017
272	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XV SUMUT	UNIT XV	KPHP	Sumatera Utara	SK.289/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018
273	PENETAPAN MODEL	MANDAILING NATAL	UNIT XXIX	KPHP	Sumatera Utara	SK. 199/Menhut-II/REG.1/2014
274	PENETAPAN MODEL	TOBA SAMOSIR	Unit XIV	KPHL	Sumatera Utara	SK.6432/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2017
275	PENETAPAN MODEL	Unit XXII SUMUT	UNIT XXII	KPHL	Sumatera Utara	SK.6070/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/6/2019
276	PENETAPAN FASILITASI 2015	UNIT XVI SUMUT	UNIT XVI	KPHL	Sumatera Utara	SK.9548/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2019
277	PENETAPAN FASILITASI 2015	UNIT XVII SUMUT	UNIT XVII	KPHP	Sumatera Utara	SK.1242/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2018
278	PENETAPAN FASILITASI 2015	UNIT XVIII SUMUT	UNIT XVIII	KPHL	Sumatera Utara	SK.5932/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2018
279	PENETAPAN FASILITASI 2015	UNIT XX SUMUT	UNIT XX	KPHP	Sumatera Utara	SK.1230/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2018
280	PENETAPAN FASILITASI 2015	UNIT XXIII SUMUT	UNIT XXIII	KPHL	Sumatera Utara	SK.10330/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2019
281	PENETAPAN FASILITASI 2015	UNIT XXIV SUMUT	UNIT XXIV	KPHL	Sumatera Utara	SK.1986/MENLHK/KPHL/PKPHL/DAS.3/3/2019
282	PENETAPAN FASILITASI 2015	UNIT XXV SUMUT	UNIT XXV	KPHL	Sumatera Utara	SK. 6941/MENLHK/KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2017
283	PENETAPAN FASILITASI 2015	UNIT XXVI SUMUT	UNIT XXVI	KPHL	Sumatera Utara	SK. 6946/MENLHK/KPHL/PKPHP/SET.1/12/2017
284	PENETAPAN FASILITASI 2015	UNIT XXVII SUMUT	UNIT XXVII	KPHP	Sumatera Utara	SK.788/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018
285	PENETAPAN FASILITASI 2015	UNIT XXVIII SUMUT	UNIT XXVIII	KPHP	Sumatera Utara	SK.3185/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/5/2018
286	PENETAPAN FASILITASI 2015	UNIT XXXI SUMUT	UNIT XXXI	KPHP	Sumatera Utara	SK.3194/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/1/2019
287	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT III SUMUT	UNIT III	KPHP	Sumatera Utara	SK.4961/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/5/2019
288	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT IV SUMUT	UNIT IV	KPHL	Sumatera Utara	SK.6401/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019
289	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT V SUMUT	UNIT V	KPHP	Sumatera Utara	SK.1513/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018
290	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT VI SUMUT	UNIT VI	KPHP	Sumatera Utara	SK.1224/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2019
291	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT VII SUMUT	UNIT VII	KPHL	Sumatera Utara	SK.6423/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019
292	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT VIII SUMUT	UNIT VIII	KPHL	Sumatera Utara	SK.6226/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019
293	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT IX SUMUT	UNIT IX	KPHL	Sumatera Utara	SK.2805/MENLHK-KPHL/DAS.3/5/2018
294	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT X SUMUT	UNIT X	KPHL	Sumatera Utara	SK.2806/MENLHK-KPHL/DAS.3/5/2018
295	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT XI SUMUT	UNIT XI	KPHP	Sumatera Utara	SK.5295/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/5/2019
296	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT XIII SUMUT	UNIT XIII	KPHL	Sumatera Utara	SK.3651/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/5/2018
297	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT XIX SUMUT	UNIT XIX	KPHL	Sumatera Utara	SK.3652/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/5/2018
298	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT XXI SUMUT	UNIT XXI	KPHP	Sumatera Utara	SK.4961/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/5/2019
299	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT XXX SUMUT	UNIT XXX	KPHL	Sumatera Utara	SK.3653/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/5/2018
300	PENETAPAN FASILITASI 2017	UNIT XXXII SUMUT	UNIT XXXII	KPHL	Sumatera Utara	SK.3654/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/5/2018
301	PENETAPAN MODEL	YOGYAKARTA	-	KPHP	Yogyakarta	SK. 4051/Menhut-II/Reg.2-1/2014

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d. 31 Desember 2019



PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

*Direktorat Rencana,
Penggunaan dan Pembentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan*



TABEL VI.1. PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/ EKSPLORASI (TAMBANG) S.D. DESEMBER 2019

NO	PROVINSI	S.D 2014		2015		2016		2017		2018		2019		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ACEH	8	59.845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	59.845,00
2	SUMATERA UTARA	9	76.900,15	5	45.255,78	2	26.592,11	-	-	-	-	1	19.236,00	17	167.984,04
3	SUMATERA BARAT	3	4.720,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.720,53
4	RIAU	8	413.967,37	-	-	-	-	-	-	-	-	3	32.125,63	11	446.093,00
5	JAMBI	41	187.336,12	5	15.024,22	2	4.826,26	2	27.328,97	-	-	3	122,87	53	234.638,44
6	SUMATERA SELATAN	36	136.984,65	2	9.717,45	2	45.726,56	2	21.522,40	1	3,82	5	828,67	48	214.783,55
7	BENGKULU	3	4.087,04	1	1.265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5.352,04
8	LAMPUNG	-	-	-	-	1	8.574,19	-	-	-	-	-	-	1	8.574,19
9	BANGKA BELITUNG	7	20.100,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20.100,72
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	13	9.900,21	-	-	-	-	1	4,98	1	8,87	1	2,45	16	9.916,51
13	JAWA TENGAH	15	13.837,69	2	6.921,55	1	4.013,60	-	-	1	94,56	-	-	19	24.867,40
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TIMUR	17	59.269,31	2	2.714,24	1	2,13	3	3.534,22	1	4.453,81	4	4.842,65	28	74.816,35
16	BANTEN	2	0,65	-	-	1	1.790,00	-	-	-	-	1	114,46	4	1.905,11
17	BALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NUSA TENGGARA BARAT	13	123.635,99	3	15.914,00	-	-	-	-	1	13.767,00	2	3.797,44	19	157.114,43
19	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KALIMANTAN BARAT	7	28.289,00	-	-	1	11.254,26	1	96,03	-	-	-	-	9	39.639,29
21	KALIMANTAN TENGAH	79	504.141,56	2	10.166,70	6	501.309,81	-	-	10	646.218,82	4	8.781,10	101	1.670.617,99
22	KALIMANTAN SELATAN	17	65.558,67	-	-	-	-	2	31.916,98	-	-	1	480,85	20	97.956,50
23	KALIMANTAN TIMUR	99	376.667,38	2	2.036,38	1	13,17	4	22.738,46	4	9.753,14	3	12.336,60	113	423.545,13
24	KALIMANTAN UTARA	21	98.075,30	3	18.303,93	-	-	1	18,83	-	-	3	8.481,81	28	124.879,87
25	SULAWESI UTARA	4	34.695,38	2	7.922,49	-	-	1	8.908,23	1	3.041,13	-	-	8	54.567,23
26	SULAWESI TENGAH	13	84.935,98	-	-	1	2.466,07	2	4.035,12	4	14.832,20	-	-	20	106.269,37
27	SULAWESI SELATAN	5	25.413,95	-	-	-	-	2	6.014,34	1	28.389,50	-	-	8	59.817,79
28	SULAWESI TENGGARA	19	59.187,78	-	-	-	-	1	19.251,69	2	16.216,58	2	160,75	24	94.816,80
29	GORONTALO	5	25.796,00	2	4.561,24	-	-	-	-	-	-	-	-	7	30.357,24
30	SULAWESI BARAT	1	33,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33,55
31	MALUKU	17	13.425,43	1	10,02	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13.435,45
32	MALUKU UTARA	80	262.561,45	4	47.456,35	-	-	-	-	1	5.464,42	2	9.504,65	87	324.986,87
33	PAPUA BARAT	22	44.075,86	1	39,50	3	48.247,81	2	14.409,31	-	-	-	-	28	106.772,48
34	PAPUA	6	78.233,58	1	258,36	-	-	-	-	-	-	3	29.384,47	10	107.876,41
TOTAL		570	2.811.676,29	38	187.567,21	22	654.815,97	24	159.779,56	28	742.243,85	38	130.200,40	720	4.686.283,27

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Catatan : - Rincian izin-izin yang diterbitkan dibatasi oleh jangka waktu sehingga dimungkinkan adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

- Rekap data perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan surat keputusan izin terbaru.

TABEL VI.2 PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI (NON TAMBANG) S.D. DESEMBER 2019

NO	PROVINSI	SID 2014		2015		2016		2017		2018		2019		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ACEH	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,72	-	-	1	10,72
2	SUMATERA UTARA	1	2.028,00	1	344,00	-	-	-	-	-	-	1	5.110,72	3	7.482,72
3	SUMATERA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	679,00	1	679,00
4	SUMATERA SELATAN	1	17,30	1	82,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	99,30
5	BENGKULU	-	-	-	-	1	164,00	-	-	-	-	-	-	1	164,00
6	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,00	-	-	1	50,00
7	BANGKA BELITUNG	1	1.081,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.081,00
8	JAWA BARAT	4	112,00	-	-	1	16,00	-	-	-	-	-	-	5	128,00
9	JAWA TENGAH	1	44,00	1	6,27	-	-	-	-	1	662,50	-	-	3	712,77
10	JAWA TIMUR	1	1,24	-	-	1	1.297,00	1	16,30	1	1.303,00	-	-	4	2.617,54
11	BANTEN	-	-	-	-	-	-	2	8,76	-	-	1	7,95	3	16,71
12	BALI	1	25,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25,28
13	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12,84	1	12,84
14	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,50	1	2,50
15	KALIMANTAN TIMUR	-	-	1	23.870,28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.870,28
TOTAL		10	3.308,82	4	24.302,55	3	1.477,00	3	25,06	4	2.026,22	5	5.813,01	29	36.952,66

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Catatan : - Rincian izin-izin yang diterbitkan dibatasi oleh jangka waktu sehingga dimungkinkan adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

- Rekap data perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan surat keputusan izin terbaru.

TABEL VI.3. PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK OPERASI PRODUKSI (TAMBANG) S.D. DESEMBER 2019

NO	PROVINSI	SID 2014		2015		2016		2017		2018		2019		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ACEH	2	444,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	444,42
2	SUMATERA UTARA	2	66,69	-	-	-	-	1	5,81	1	5,78	3	1,011,76	7	1,090,04
3	SUMATERA BARAT	5	761,10	1	102,22	1	127,31	2	631,26	-	-	1	348,62	10	1,970,51
4	RIAU	6	3,201,35	1	108,22	4	1,344,43	1	1,476,74	1	203,79	9	1,357,26	22	7,691,79
5	JAMBI	39	2,963,19	2	597,89	3	1,486,20	6	44,31	4	138,10	3	1,453,88	57	6,683,58
6	SUMATERA SELATAN	18	4,937,97	2	43,88	9	5,268,53	12	1,735,08	4	979,47	6	16,188,88	51	29,153,81
7	BENGKULU	1	128,58	-	-	1	366,00	1	1,620,52	-	-	3	1,627,61	6	3,742,71
8	LAMPUNG	3	96,05	-	-	2	73,01	2	33,36	-	-	1	44,82	8	247,24
9	BANGKA BELITUNG	13	4,630,69	2	429,59	-	-	3	519,70	1	125,24	9	1,212,96	28	6,918,18
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	1	56,66	-	-	-	-	3	1,220,67	4	1,277,33
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	18	2,096,99	1	5,00	1	25,00	2	29,01	8	70,32	12	212,57	42	2,438,89
13	JAWA TENGAH	5	125,64	1	38,23	5	182,88	1	1,18	2	150,14	4	263,11	18	761,18
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TIMUR	11	371,94	1	6,63	4	945,20	2	147,96	1	9,35	6	1,028,60	25	2,509,69
16	BANTEN	1	16,00	-	-	-	-	-	-	1	62,71	-	-	2	78,71
17	BALI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
18	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7,496,76	3	719,44	6	8,216,20
19	NUSA TENGGARA TIMUR	4	805,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	805,61
20	KALIMANTAN BARAT	8	4,153,19	-	-	1	695,72	2	595,86	2	1,285,77	1	457,79	14	7,188,33
21	KALIMANTAN TENGAH	43	58,772,29	6	4,902,53	5	3,111,00	8	7,062,25	26	20,700,48	24	17,519,33	112	112,067,88
22	KALIMANTAN SELATAN	53	32,638,37	4	313,71	5	530,23	10	6,471,65	22	13,411,49	25	9,901,33	119	63,266,78
23	KALIMANTAN TIMUR	73	142,354,08	1	519,87	4	2,922,05	8	8,940,25	12	16,332,94	22	24,321,64	120	195,390,83
24	KALIMANTAN UTARA	3	5,072,39	-	-	2	3,171,17	4	2,107,86	3	967,70	3	2,504,81	15	13,823,93
25	SULAWESI UTARA	1	443,40	-	-	2	1,160,71	4	677,24	1	50,25	2	287,92	10	2,619,52
26	SULAWESI TENGAH	4	3,167,53	1	1,206,57	2	1,201,56	1	127,40	5	1,802,94	13	8,028,89	26	15,534,89
27	SULAWESI SELATAN	9	334,76	1	48,35	2	52,92	2	35,49	5	8,667,73	4	1,674,18	23	10,813,43
28	SULAWESI TENGGARA	24	18,788,56	1	965,31	3	1,981,40	5	978,95	9	2,391,24	12	4,129,11	54	29,234,57
29	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	999,35	3	1,873,57	4	2,872,92
30	SULAWESI BARAT	1	603,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	603,50
31	MALUKU	3	701,99	-	-	1	6,42	-	-	-	-	-	-	4	708,41
32	MALUKU UTARA	21	10,174,66	-	-	3	2,491,58	9	4,488,42	5	2,513,23	9	3,780,01	47	23,447,90
33	PAPUA BARAT	4	95,49	-	-	1	116,86	-	-	1	603,23	2	10,92	8	826,50
34	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,810,61	-	-	1	3,810,61
TOTAL		376	297,946,43	25	9,288,01	62	27,316,84	86	37,730,30	119	82,778,61	183	101,179,69	851	556,239,88

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Catatan : - Rincian izin-izin yang diterbitkan dibatasi oleh jangka waktu sehingga dimungkinkan adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- Rekap data perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan surat keputusan izin terbaru.

TABEL VI.4. PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK NON TAMBANG S.D. DESEMBER 2019

NO	PROVINSI	S/D 2014		2015		2016		2017		2018		2019		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ACEH	3	18,06	-	-	3	949,98	1	345,08	1	39,14	2	31,02	10	1.383,28
2	SUMATERA UTARA	41	5.005,82	6	905,66	9	722,02	3	91,74	8	243,74	8	324,52	75	7.293,50
3	SUMATERA BARAT	12	509,25	1	14,48	5	65,45	-	-	1	16,57	6	436,63	25	1.042,37
4	RIAU	4	12.366,07	-	-	1	561,72	-	-	1	-	1	133,74	7	13.061,53
5	JAMBI	1	136,18	1	21,28	1	90,33	1	177,27	-	-	2	498,10	6	923,16
6	SUMATERA SELATAN	11	899,90	1	0,04	2	7,72	3	317,16	3	72,21	7	434,40	27	1.731,42
7	BENGKULU	6	195,09	1	17,25	1	5,07	2	146,03	2	117,77	2	143,81	14	625,02
8	LAMPUNG	2	97,38	-	-	4	224,80	-	-	-	-	1	94,66	7	416,84
9	BANGKA BELITUNG	5	86,38	1	1,49	-	-	-	-	2	21,96	1	12,29	9	122,12
10	KEPULAUAN RIAU	1	27,00	-	-	5	398,72	2	17,11	4	393,45	3	82,94	15	919,22
11	DKI JAKARTA	2	1,97	-	-	1	14,25	-	-	-	-	-	-	3	16,22
12	JAWA BARAT	14	432,44	-	-	5	563,82	3	1.397,23	10	895,80	8	252,84	40	3.542,12
13	JAWA TENGAH	28	326,90	-	-	2	68,47	4	178,55	7	338,68	7	335,32	48	1.247,92
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TIMUR	6	68,39	-	-	5	759,82	5	441,60	3	92,02	9	1.074,56	28	2.436,39
16	BANTEN	-	-	-	-	2	202,20	-	-	1	25,65	-	-	3	227,85
17	BALI	17	60,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	60,24
18	NUSA TENGGARA BARAT	10	501,12	1	149,42	3	281,11	-	-	2	266,84	1	14,22	17	1.212,71
19	NUSA TENGGARA TIMUR	5	75,55	-	-	3	91,35	-	-	1	34,87	1	0,66	10	202,43
20	KALIMANTAN BARAT	4	11.884,80	-	-	-	-	2	138,02	-	-	3	902,20	9	12.925,02
21	KALIMANTAN TENGAH	1	710,60	-	-	1	1.211,62	1	152,13	4	902,21	4	3.114,27	11	6.090,83
22	KALIMANTAN SELATAN	2	27,32	1	228,13	-	-	-	-	1	0,11	2	908,99	6	1.164,55
23	KALIMANTAN TIMUR	7	874,55	1	77,81	2	152,43	2	68,64	1	30,02	3	512,29	16	1.715,74
24	KALIMANTAN UTARA	2	494,13	1	225,71	2	2.541,48	1	26,47	1	135,22	2	7,64	9	3.430,65
25	SULAWESI UTARA	2	0,52	-	-	-	-	1	504,33	2	26,34	-	-	5	531,19
26	SULAWESI TENGAH	11	1.057,67	1	19,86	1	37,62	4	148,10	3	93,57	3	19,78	23	1.376,61
27	SULAWESI SELATAN	7	267,91	-	-	1	28,79	5	935,76	-	-	-	-	13	1.232,46
28	SULAWESI TENGGARA	5	138,97	-	-	1	0,29	2	110,61	1	63,53	-	-	9	313,39
29	GORONTALO	2	165,20	-	-	1	38,13	2	9,84	-	-	3	63,76	8	276,93
30	SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU	1	53,97	-	-	-	-	-	-	2	454,51	-	-	3	508,48
32	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11,72	2	31,83	3	43,55
33	PAPUA BARAT	1	5.702,99	-	-	1	669,64	-	-	-	-	1	11,48	3	6.384,11
34	PAPUA	6	2.226,65	1	348,03	1	3,80	1	4,40	1	78,51	-	-	10	2.661,39
TOTAL		219	44.413,00	17	2.009,16	63	9.690,61	45	5.210,08	63	4.354,44	82	9.441,95	489	75.119,23

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Catatan : - Rincian izin-izin yang diterbitkan dibatasi oleh jangka waktu sehingga dimungkinkan adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hui

- Rekap data perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan surat keputusan izin terbaru.

TABEL VI.5. PERKEMBANGAN LAHAN KOMPENSASI (s.d. Tahap Berita Acara Serah Terima) S.D. DESEMBER 2019

PROVINSI	S/D 2014		2015		2016		2017		2018		2019		TOTAL	
	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
BALI	1	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7,50
BANTEN	1	12,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12,01
DKI JAKARTA	2	4,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4,18
JAWA BARAT	62	5.446,69	3	184,91	2	38,43	1	115,50	2	63,50	2	39,50	72	5.888,53
JAWA TENGAH	29	1.426,05	1	17,14	2	26,50	-	-	-	-	-	-	32	1.469,69
JAWA TIMUR	34	2.100,11	2	259,81	3	258,37	-	-	-	-	-	-	39	2.618,28
LAMPUNG	7	275,50	-	-	2	80,46	-	-	-	-	1	189,72	10	545,68
SUMATERA UTARA	1	104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	104,00
Grand Total	137	9.376,04	6	461,85	9	403,76	1	115,50	2	63,50	3	229,22	158	10.649,87

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Catatan : - Rincian izin-izin yang diterbitkan dibatasi oleh jangka waktu sehingga dimungkinkan adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

- Rekap data perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan surat keputusan Izin terbaru.

TABEL VI.6. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PKH) S.D. DESEMBER 2019

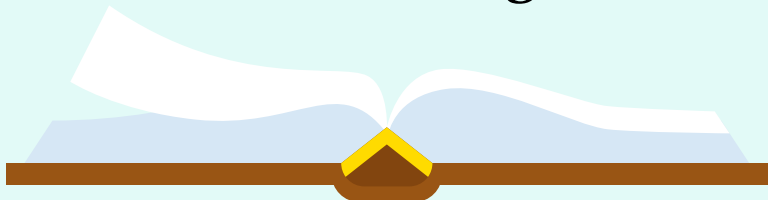
NO	PROVINSI	s/d tahun 2014				Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		TAMBAH	NON TAMBAH	Total (Rp.)	TAMBAH	NON TAMBAH	TAMBAH	NON TAMBAH	TAMBAH	NON TAMBAH	TAMBAH	NON TAMBAH	TAMBAH	NON TAMBAH	TAMBAH	NON TAMBAH	TAMBAH	NON TAMBAH	TAMBAH	NON TAMBAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Nangro Aceh D	107.647.318	18.765.768	126.413.086	254.584.811	0	271.317.900	83.837.666	4.889.841.328	487.088.026	0	161.658.400	0	326.051.929						
2	Sumatera Utara	387.161.120	2.089.301.910	2.476.463.030	128.000.000	102.384.000	1.175.266.023	104.556.035	1.462.972.600	403.285.506	1.325.121.137	0	1.618.354.453	3.130.960.942						
3	Sumatera Barat	3.680.927.920	348.583.764	4.029.511.684	128.000.000	102.384.000	1.175.266.023	104.556.035	1.462.972.600	403.285.506	1.325.121.137	0	1.618.354.453	3.130.960.942						
4	Riau	11.657.782.820	1.296.096.000	12.953.878.820	2.091.077.847	150.000.000	5.057.055.602	350.000.000	10.724.150.792	3.450.954.757	18.324.233.835	0	1.668.759.436	326.024.000						
5	Kepulauan Riau	996.714.615	0	996.714.615	1.000.000.000	0	0	0	5.115.823.618	312.542.480	19.113.400.342	0	2.363.313.698							
6	Jambi	9.660.667.944	5.897.413.971	15.558.081.915	8.172.466.000	1.402.237.191	5.616.129.961	1.713.123.999	5.470.331.476	1.905.292.136	6.551.400.234	0	2.186.922.695							
7	BENGKULU	3.329.156.959	439.298.985	3.768.455.944	2.860.541.810	196.170.214	1.500.030.000	253.203.492	1.892.241.799	306.911.423	10.554.420.717	0	1.009.174.973							
8	Bangka Belitung	19.616.128.789	87.559.839	19.703.688.628	5.364.589.921	8.940.000	7.483.643.931	0	8.170.977.921	20.055.766	6.820.854.637	0	38.492.000							
9	Sumatera Selatan	132.446.427.509	8.629.861.601	141.076.289.110	37.671.943.125	2.929.876.708	38.327.265.080	4.135.903.065	43.807.159.505	3.596.742.387	46.953.634.881	0	5.201.891.852							
10	Nusa Tenggara Barat	93.260.905.994	90.538.039	93.351.444.033	29.510.104.000	14.641.642	29.841.429.874	7.049.835	29.189.905.000	232.742.180	30.993.792.500	0	125.489.511							
11	Nusa Tenggara Timur	160.064.177	102.755.621	262.819.798	11.154.500	133.970.820	151.780.938	121.743.200	65.812.250	289.008.203	68.497.916	0	202.111.200							
12	Kalimantan Barat	46.183.622.694	20.192.993	46.203.815.687	12.331.381.616	7.680.000	18.950.902.048	1.920.000	66.430.496.348	120.058.113	1.840.504.021	0	388.320.000							
13	Kalimantan Tengah	223.444.790.590	221.168.000	223.665.958.590	152.098.031.956	120.848.000	144.091.887.796	120.848.000	222.652.140.029	364.256.000	206.234.840.101	0	785.686.400							
14	Kalimantan Selatan	714.884.679.577	93.823.571	714.978.503.148	305.661.591.975	1.532.400	342.570.422.310	1.532.400	320.972.887.012	1.532.400	372.086.948.958	0	1.710.000							
15	Kalimantan Timur	1.307.791.999.528	375.144.075	1.308.167.143.603	420.228.261.706	316.892.910	467.381.391.362	347.035.027	505.424.817.631	3.471.265.435	565.891.233.006	0	3.619.004.800							
16	Kalimantan Utara	3.168.686.552	0	3.168.686.552	1.650.299.875	0	16.176.129.419	911.868.400	22.737.306.035	6.611.499.750	35.507.407.207	0	293.064.631							
17	Sulawesi Utara	3.851.102.199	2.997.303	3.854.099.502	2.665.550.797	50.745	4.940.581.919	101.510	5.197.668.700	881.873.532	5.296.214.000	0	862.949.510							
18	Gorontalo	0	771.773.357	771.773.357	0	373.264.000	0	373.264.000	0	495.160.000	2.145.036.411	0	516.739.313							
19	Sulawesi Tengah	15.120.191.666	1.328.973.694	16.449.165.360	11.730.494.259	338.299.846	17.706.708.015	403.553.725	21.641.914.289	883.600.067	28.383.231.328	0	3.144.165.939							
20	Sulawesi Barat	716.160.442	0	716.160.442	818.594.276	0	0	0	0	363.393.360	0	0	363.393.360							
21	Sulawesi Selatan	1.794.081.614	1.972.590.895	3.766.672.509	196.215.460	503.814.606	2.379.201.584	475.844.382	3.591.765.890	954.589.018	4.280.116.744	0	736.460.081							
22	Sulawesi Tenggara	33.312.989.138	280.659.626	33.593.648.764	13.484.336.996	188.261	19.444.762.309	489.750.913	46.060.361.709	392.973.688	64.759.985.155	0	352.531.892							
23	Maluku	1.045.810.560	8.063.661	1.053.874.221	583.365.858	7.904.000	570.762.500	18.176.000	0	8.407.333	994.885.336	0	18.176.000							
24	Maluku Utara	67.971.171.471	0	67.971.171.471	52.133.890.458	0	44.167.023.051	0	52.166.889.511	0	76.690.983.919	0	111.805.586.580	0						
25	Papua Barat	0	514.100.000	514.100.000	0	152.780.000	1.665.853.139	339.760.000	3.881.918.474	339.856.000	2.384.660.000	0	1.609.226.501							
26	Papua	0	2.544.744.475	2.544.744.475	0	1.559.022.411	0	1.588.506.000	0	1.584.709.418	0	0	1.799.809.200							
TOTAL		2.694.588.871.196	27.134.407.148	2.721.723.278.344	1.060.646.477.246	9.440.692.583	1.169.469.544.761	13.614.925.119	1.381.547.881.917	31.620.502.064	1.507.201.402.385	28.039.937.479	2.091.907.902.067	29.660.991.868						

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan



KOMISI PENILAI AMDAL, AUDIT & DOKUMEN LINGKUNGAN

***Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan
Usaha dan Kegiatan***



TABEL VII.1. DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKOMENDASI DAN IZIN LINGKUNGAN TAHUN 2013-2019

No	JENIS KEGIATAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Survei Seismik	21	-	7	3	5	3	5
	SKIL	21	-	7	3	6	4	5
2	Pemboran	20	-	-	8	6	3	6
	SKIL	20	2	-	8	6	4	6
3	Ketenagalistrikan	1	-	1	1	1	-	1
	SKIL	1	-	1	1	1	-	0
4	Normalisasi Sungai	-	-	-	1	1	-	-
	SKIL	-	-	-	1	2	-	-
5	Kabel Laut	3	-	3	4	-	9	3
	SKIL	3	-	3	4	-	4	0
6	Pipa Gas	3	-	-	1	-	1	1
	SKIL	3	-	-	1	-	1	2
7	Pelabuhan	3	-	-	-	-	-	-
	SKIL	3	-	-	-	-	-	-
8	Tambang	-	-	-	-	-	-	1
	SKIL	-	-	-	-	-	-	1
9	Pekerjaan Umum		-	-	-	-	-	1
	SKIL		-	-	-	-	-	1
	JUMLAH	51	-	11	18	13	16	18
	SKIL	51	2	11	18	15	13	15

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data s.d. 31 Desember 2019

Keterangan:

SKIL : Surat Keputusan Izin Lingkungan

"0" : Ada Permohonan, tetapi SKIL dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS)

"-" : Tidak Ada Permohonan

TABEL VII.2. DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN IZIN LINGKUNGAN S.D. DESEMBER 2019

No.	JENIS KEGIATAN	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Minyak dan Gas (Migas)	SKKL SKIL	20 26	6 15	8 16	7 15	8 14	16 17
2	Limbah B3	SKKL SKIL	6 6	2 3	1 4	5 3	4 6	8 0
3	Ketenagalistrikan	SKKL SKIL	2 4	1 4	2 2	3 3	3 3	4 0
4	Pertambangan	SKKL SKIL	2 5	2 4	- 2	1 2	4 12	2 2
5	Pelabuhan	SKKL SKIL	2 3	2 2	4 5	19 20	3 0	6 0
6	Bandara	SKKL SKIL	2 6	- 1	1 1	4 4	1 1	4 0
7	Kereta Api	SKKL SKIL	1 1	- -	2 3	- -	1 1	- -
8	Nuklir	SKKL SKIL	- -	- -	1 2	- -	- -	- -
9	Bendungan	SKKL SKIL	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -
10	Normalisasi Sungai	SKKL SKIL	- 3	- -	- -	- -	- -	- -
11	Jembatan	SKKL SKIL	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
	JUMLAH	SKKL SKIL	37 41	13 29	20 36	39 47	24 37	40 19

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Keterangan:

SKKL : Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan

SKIL : Surat Keputusan Izin Lingkungan

Angka 0 : SKIL diterbitkan oleh Lembaga OSS

(-) : tidak ada permohonan

TABEL VII.3. PERKEMBANGAN PENERAPAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Audit	
		s/d Tahun 2018	s/d Tahun 2019
1	2	3	4
1.	Audit Lingkungan Hidup Wajib karena Ketidaktaatan	2	2
2.	Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala	16	23

Keterangan: Audit: Pihak yang diaudit

TABEL VII.4. PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT PERMASALAHAN DOKUMEN LINGKUNGAN

No.	Jenis Kegiatan	s/d Tahun 2015	s/d Tahun 2016	s/d Tahun 2017	s/d Tahun 2018	s/d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7
A. Jumlah Kegiatan yang Dikenakan Sanksi Administratif untuk Menyusun DELH/DPLH						
1.	Penerapan kebijakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dokumen lingkungan namun sudah berjalan	6	32	33	37	41
B. Jumlah Kasus dan Permasalahan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan						
1.	Penanganan permasalahan dokumen lingkungan dan izin lingkungan				17	21

TABEL VII.5. DAFTAR JUMLAH KOMISI PENILAI AMDAL DI INDONESIA

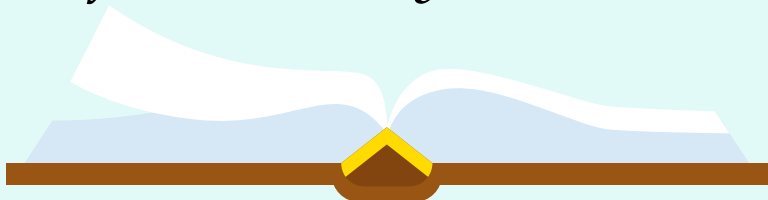
No	Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah KPA berlisensi	237	249	249	242	197

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data s/d 31 Desember 2019



KLHS DAN EKOREGION

***Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor***



**TABEL VIII.1. JUMLAH SATUAN DAN LUAS EKOREGION PULAU DAN KEPULAUAN
S.D. DESEMBER 2019**

No	Pulau	Nama Kelas	Kode	Luas (Km2)
1	2	3	4	5
1	Bali dan Nusa Tenggara	Dataran Fluvial Bali Nusa Tenggara	F	3.675,24
		Dataran Organik/Koral Bali Nusa Tenggara	O2	4.232,86
		Dataran Pantai Bali Nusa Tenggara	M	69,21
		Dataran Vulkanik Bali Nusa Tenggara	V3	1.069,66
		Pegunungan Denudasional Bali Nusa Tenggara	D1	8.517,73
		Pegunungan Struktural Bali Nusa Tenggara	S1	18.863,95
		Pegunungan Vulkanik Bali Nusa Tenggara	V1	19.906,05
		Perbukitan Denudasional Bali Nusa Tenggara	D2	4.749,39
		Perbukitan Karst Bali Nusa Tenggara	K2	3.470,26
		Perbukitan Struktural Bali Nusa Tenggara	S2	3.983,83
Perbukitan Vulkanik Bali Nusa Tenggara	V2	4.943,69		
JUMLAH				73.481,88
2	Jawa	Dataran Fluvial Jawa	F	21.837,81
		Dataran Organik/Koral Jawa	O2	158,61
		Dataran Pantai Selatan Jawa	M2	813,95
		Dataran Pantai Utara Jawa	M1	1.670,75
		Dataran Struktural Blok Selatan Jawa	S31	2.212,19
		Dataran Struktural Jalur Bogor - Kendeng - Rembang	S32	10.100,98
		Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang - Merapi - Raung	V3	20.844,76
		Pegunungan Struktural Blok Selatan Jawa	S11	2.606,75
		Pegunungan Struktural Jalur Bogor - Kendeng - Rembang	S12	1.959,89
		Pegunungan Vulkanik Jalur Gunung Karang - Merapi - Raung	V1	13.729,24
		Perbukitan Denudasional Jawa	D2	541,71
		Perbukitan Karst Jalur Bogor - Kendeng - Rembang	K2	1.186,37
		Perbukitan Karst Jalur Pangandaran - Karangbolong - Gunungsewu - Blambangan	K1	4.109,67
		Perbukitan Struktural Blok Selatan Jawa	S21	16.725,43
		Perbukitan Struktural Jalur Bogor - Kendeng - Rembang	S22	13.904,99
Perbukitan Vulkanik Jalur Gunung Karang - Merapi - Raung	V2	22.008,31		
JUMLAH				134.411,43
3	Kalimantan	Dataran Fluvial Kalimantan	F	95.807,24
		Dataran Gambut Kompleks Kahayan - Kapuas - Mahakam	O1	44.613,04
		Dataran Pantai Kalimantan	M	12.737,43
		Dataran Struktural Kompleks Meratus	S3	38.737,69
		Pegunungan Denudasional Kalimantan	D1	7.904,75
		Pegunungan Intrusif Batuan Beku Tua Kalimantan	V1	3.793,33
		Pegunungan Struktural Kompleks Meratus	S1	148.139,05
		Perbukitan Denudasional Kalimantan	D2	27.641,46
		Perbukitan Karst Kalimantan	K2	9.825,89
		Perbukitan Struktural Kompleks Meratus	S2	145.411,36
JUMLAH				534.611,23

No	Pulau	Nama Kelas	Kode	Luas (Km2)
1	2	3	4	5
4	Maluku	Dataran Fluvial Maluku	F	5.044,02
		Dataran Karst Maluku	K3	1.078,66
		Dataran Pantai Maluku	M	2.307,18
		Dataran Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	S32	1.355,52
		Dataran Vulkanik Kompleks Gamalama	V31	74,29
		Pegunungan Denudasional Maluku	D1	5.019,45
		Pegunungan Struktural Kompleks Halmahera	S11	11.577,77
		Pegunungan Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	S12	15.187,66
		Pegunungan Vulkanik Kompleks Gamalama	V11	1.059,21
		Perbukitan Denudasional Maluku	D2	2.955,45
		Perbukitan Karst Maluku	K2	17.502,95
		Perbukitan Struktural Kompleks Halmahera	S21	5.146,78
		Perbukitan Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	S22	5.078,01
		Perbukitan Vulkanik Kompleks Banda	V22	4.070,60
		Perbukitan Vulkanik Kompleks Gamalama	V21	726,55
JUMLAH				78.184,10
5	Papua	Dataran Fluvial Memberamo	F1	9.090,12
		Dataran Fluvial Nabire - Sarmi	F2	15.594,57
		Dataran Fluvial Seget - Bintuni	F3	11.779,88
		Dataran Gambut Kokonao - Digul	O12	14.684,90
		Dataran Gambut Memberamo	O11	6.651,50
		Dataran Gambut Nabire - Sarmi	O14	5.651,21
		Dataran Gambut Seget - Bintuni	O13	8.585,22
		Dataran Organik/Koral Kompleks Sorong	O2	497,70
		Dataran Pantai Barat Papua	M2	2.412,34
		Dataran Pantai Selatan Papua	M3	117.630,43
		Dataran Pantai Utara Papua	M1	1.513,76
		Dataran Struktural Jalur Jayawijaya	S31	7.618,38
		Dataran Struktural Jalur Utara	S32	5.068,32
		Pegunungan Glasial Puncak Jaya	G	3.320,09
		Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya	S11	72.948,44
		Pegunungan Struktural Jalur Utara	S12	48.534,32
		Perbukitan Karst Papua	K1	31.200,49
		Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya	S21	14.739,91
		Perbukitan Struktural Jalur Utara	S22	36.517,52
		JUMLAH		
6	Sulawesi	Dataran Fluvial Sulawesi	F	21.464,40
		Dataran Organik/Koral Sulawesi	O2	982,28
		Dataran Pantai Sulawesi	M	2.368,10
		Dataran Struktural Sulawesi	S3	100,60
		Dataran Vulkanik Kompleks Manado	V31	337,10
		Pegunungan Struktural Sulawesi	S1	99.952,70

No	Pulau	Nama Kelas	Kode	Luas (Km2)
1	2	3	4	5
		Pegunungan Vulkanik Kompleks Makassar	V12	1.803,30
		Pegunungan Vulkanik Kompleks Manado	V11	2.025,20
		Perbukitan Denudasional Sulawesi	D2	1.656,48
		Perbukitan Karst Sulawesi	K2	14.249,00
		Perbukitan Struktural Sulawesi	S2	36.576,05
		Perbukitan Vulkanik Kompleks Makassar	V22	1.987,27
		Perbukitan Vulkanik Kompleks Manado	V21	1.883,30
JUMLAH				185.385,78
7	Sumatera	Dataran Denudasional Kompleks Bangka Belitung - Natuna	D3	17.718,54
		Dataran Fluvial Sumatera	F	83.179,03
		Dataran Gambut Sumatera	O1	74.674,19
		Dataran Pantai Timur Sumatera	M	7.251,09
		Dataran Struktural Jalur Bukit Barisan	S32	46.142,46
		Dataran Vulkanik Jalur Bukit Barisan	V3	42.455,51
		Pegunungan Struktural Jalur Bukit Barisan	S12	78.277,29
		Pegunungan Vulkanik Jalur Bukit Barisan	V1	11.395,55
		Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung - Natuna	D2	1.204,78
		Perbukitan Struktural Jalur Bukit Barisan	S22	75.952,93
		Perbukitan Struktural Kompleks Kepulauan Riau	S23	5.596,20
		Perbukitan Struktural Kompleks Mentawai	S21	12.953,25
		Perbukitan Vulkanik Jalur Bukit Barisan	V2	17.879,20
JUMLAH				474.680,00

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

TABEL VIII.2. LUAS WILAYAH EKOREGION LAUT S.D. DESEMBER 2019

Kode	Ekoregion Laut	Luas (Km2)
1	2	3
E.L.1	Samudra Hindia Sebelah Barat Sumatera	782.861
E.L.2	Samudra Hindia Sebelah Selatan Jawa	655.549
E.L.3	Selat Malaka	111.343
E.L.4	Laut Natuna	360.402
E.L.5	Selat Karimata	270.859
E.L.6	Laut Jawa	437.978
E.L.7	Laut Sulawesi	323.866
E.L.8	Selat Makassar	288.005
E.L.9	Perairan Bali dan Nusa Tenggara	625.018
E.L.10	Teluk Tomini	70.020
E.L.11	Laut Halmahera	451.955
E.L.12	Laut Banda Sebelah Timur Sulawesi	160.361
E.L.13	Laut Banda Sebelah Selatan Sulawesi	169.160
E.L.14	Laut Seram dan Teluk Bintuni	140.040
E.L.15	Laut Banda	583.096
E.L.16	Samudra Pasifik Sebelah Utara Papua	459.857
E.L.17	Teluk Cendrawasih	93.369
E.L.18	Laut Arafuru	326.793
	JUMLAH	6.310.532

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

TABEL VIII.3. KEGIATAN REVIEW DAN BIMBINGAN TEKNIS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

No	Jenis Dokumen KLHS	Tahun 2015			Jumlah 2015	Tahun 2016			Jumlah 2016	Tahun 2017			Jumlah 2017	Tahun 2018			Jumlah 2018	Tahun 2019			Jumlah 2019
		Nas	Prov	Kab Kota		Nas	Prov	Kab Kota		Nas	Prov	Kab Kota		Nas	Prov	Kab Kota		Nas	Prov	Kab Kota	
I	Review KLHS (Telaahan dan Validasi)																				
1	RPJMN	-	-	-	-	-	4	2	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	RPJPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
3	RPJMD	-	-	1	1	2	4	28	3	35	-	2	-	6	-	7	6	-	-	-	7
4	KRP berdampak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	-	-	3	-	3	2	16	2	20	-	2	-	4	-	7	4	-	-	-	7
6	Rencana Rinci (RDTR)	-	-	3	-	3	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kawasan Strategis Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kawasan Strategis Provinsi	-	1	-	-	1	4	-	4	4	-	7	-	2	-	5	2	-	-	-	5
9	Kawasan Strategis Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kawasan Strategis Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kawasan Ekonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Laut Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Zonasi (RZWP3K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	8	-	10	8	-	-	-	10
14	Reklamasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H I		-	1	7	1	9	-	14	46	11	71	-	19	-	21	-	21	-	29	-	29
II	Bintek KLHS																				
1	RPJMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2	RPJPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
3	RPJMD	-	-	1	1	2	-	1	1	2	-	2	-	5	-	10	5	-	-	-	10
4	KRP berdampak	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
5	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	10	-	10
6	Rencana Rinci (RDTR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
7	Kawasan Strategis Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kawasan Strategis Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kawasan Strategis Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kawasan Strategis Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kawasan Ekonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Laut Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Zonasi (RZWP3K)	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	4	-	5	-	5	5	-	-	-	15
14	Reklamasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H II		-	3	1	1	5	-	3	1	1	5	-	9	-	10	-	10	2	35	-	57

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Ket :

- Data s/d Desember 2019
- Kegiatan mulai Agustus 2015
- Tahun 2017 Review hanya Hirarki Nasional dan Provinsi

TABEL VIII.4. STATUS VALIDASI KAJIAN INKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) PERIODE TAHUN 2017 - 2019

No	Provinsi	Pembahasan		Validasi	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5	6
1	DKI Jakarta	BA.28/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	31/12/2018	S.338/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/4/2019	09/04/2019
2	Banten	BA.03/PDLKWS/PKLHWS/01/2019	22/01/2019		
3	Jawa Barat	BA.06/PDLKWS/PKLHWS/4/2018	23/04/2018	S.775/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2018	12/07/2018
4	Jawa Timur	BA.01/PDLKWS/PKLHWS/06/2017	31/05/2017	S.1371/PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2017	06/10/2017
5	Jawa Tengah	BA.10/PDLKWS/PKLHWS/07/2017	20/07/2017	S.1670/PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2017	21/12/2017
6	DI. Yogyakarta	BA.07/PDLKWS/PKLHWS/07/2018	26/07/2018	S.1214/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/10/2018	30/10/2018
7	Nangroe Aceh Darussalam	BA.21/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	11/12/2018	S.510/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2019	20/05/2019
8	Sumatera Utara	BA.12/PDLKWS/PKLHWS/11/2018	01/11/2018	S.77/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2019	24/01/2019
9	Sumatera Barat	BA.02/PDLKWS/PKLHWS/06/2017	07/06/2017	S.1669/PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2017	21/12/2017
10	Riau				
11	Kepulauan Riau	BA.23/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	11/12/2018		
12	Jambi			S.1275/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/10/2019	14/10/2019
13	Sumatera Selatan	BA.04/PDLKWS/PKLHWS/02/2019	19/02/2019	S.902/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2019	14/08/2019
14	Bangka Belitung	BA.05/PDLKWS/PKLHWS/4/2018	23/04/2018	S.938/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2019	16/08/2019
15	Bengkulu	BA.12/PDLKWS/PKLHWS/10/2018	15/10/2018	S.80/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2019	24/01/2019
16	Lampung	Notulen Pembahasan	29/12/2017	S.166/PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2018	12/02/2018
17	Bali			S.1612/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2019	19/12/2019
18	Nusa Tenggara Barat	BA.13/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/08/2017	22/09/2017	S.1537/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06/11/2017
19	Nusa Tenggara Timur+B50			S.1570/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06/11/2017
20	Kalimantan Barat	BA.17/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	13/11/2018		
21	Kalimantan Tengah	BA.3/PDLKWS/PKLHWS/1/2018	30/01/2018	S.841/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2018	02/08/2018
22	Kalimantan Selatan	BA.07/PDLKWS/PKLHWS/07/2017	05/07/2017	S.169/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2018	12/02/2018
23	Kalimantan Timur				
24	Kalimantan Utara			S.414/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018	11/04/2018
25	Sulawesi Utara				
26	Sulawesi Barat	BA.12/PDLKWS/PKLHWS/08/2017	04/08/2017		
27	Sulawesi Tengah	BA.11/PDLKWS/PKLHWS/07/2017	21/07/2017	S.1534/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06/11/2017
28	Sulawesi Tenggara	BA.25/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	13/12/2018	S.213/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/3/2019	06/03/2019
29	Sulawesi Selatan	UN.56/PKTL/PDLKWS/PLA.3	09/03/2018	S.895/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2018	10/08/2018
30	Gorontalo			S.675/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2018	25/06/2018
31	Papua Barat	BA.22/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	11/12/2018	S.1490/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/11/2019	18/11/2019
32	Papua				
33	Maluku				
34	Maluku Utara				

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d Desember 2019

TABEL VIII.5. STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (RTR KSP) PERIODE TAHUN 2017-2019

No	Provinsi	Judul RTR	Pembahasan		Validasi	
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7
1	DKI Jakarta	RTR Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta	-		S.834/PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2017	29/05/2017
2	Banten					
3	Jawa Barat					
4	Jawa Timur	RTR KSP Pelabuhan Sendang Biru	BA.15/PDLKWS/PKLHWS/11/2017	27/11/2017	-	
		RTR KSP Agropolitan Ijen	BA.16/PDLKWS/PKLHWS/11/2017	27/11/2017	-	
		RTR KSP Agropolitan Willis	BA.17/PDLKWS/PKLHWS/11/2017	27/11/2017	-	
5	Jawa Tengah					
6	DI. Yogyakarta	RRTR SRS Kasultanan Yogyakarta	BA.18/PDLKWS/PKLHWS/11/2018	19/11/2018	S.1227/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/10/2019	07/10/2019
7	Nangroe Aceh Darussalam					
8	Sumatera Utara					
9	Sumatera Barat	RTR KSP Danau Maninjau	-		S.678/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2018	25/06/2018
10	Riau					
11	Kepulauan Riau					
12	Jambi	RTR KSP Pantai Timur	-		S.19/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/02/2017	01/02/2017
13	Sumatera Selatan					
14	Bangka Belitung	RRTR KSP Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Sadai	-		S.168/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/2/2019	26/02/2019
15	Bengkulu					
16	Lampung					
17	Bali					
18	Nusa Tenggara Barat	RTR KSP Agropolitan Alas Utan	BA.05/PDLKWS/PKLHWS/06/2017		-	
19	Nusa Tenggara Timur					
20	Kalimantan Barat					
21	Kalimantan Tengah					
22	Kalimantan Selatan	RTR KPS Batang Banyu	BA.11/PDLKWS/PKLHWS/10/2018	10/10/2018	S.132/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2019	12/02/2019
23	Kalimantan Timur	RTR KIO Malay	BA.9/PDLKWS/PKLHWS/8/2018	15/08/2018	S.146/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2019	14/02/2019
24	Kalimantan Utara					
25	Sulawesi Utara					
26	Sulawesi Barat					
27	Sulawesi Tengah					
28	Sulawesi Tenggara	RTR Pusat Bisnis Terpadu	-		S.1026/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/9/2018	14/09/2018
29	Sulawesi Selatan	RTR Substansi Kehutanan			SUBSTANSI KEHUTANAN S.195/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/12/2017 RTRW S.598/MENLHK PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2019	21/12/2017 20/05/2019
30	Gorontalo	RTR KSP Kota Gorontalo	BA.03/PDLKWS/PKLHWS/06/2017	13/06/2017	-	
31	Maluku	RTR KSP Danau Limboto	BA.04/PDLKWS/PKLHWS/06/2017	13/06/2017	S.1089/PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2017	28/07/2017
32	Maluku Utara					
33	Papua Barat					
34	Papua					

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d Desember 2019

TABEL VIII.6. STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PERIODE TAHUN 2017 - 2019

No	Provinsi	Pembahasan		Validasi	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5	6
1	DKI Jakarta	BA.27/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	20/12/2018	S.76/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2019	24/01/2019
2	Banten	-		S.197/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016 (evaluasi kelayakan SE MenLHK No.04/2015)	5/10/2016
3	Jawa Barat	Notulensi	19/08/2017	S.1226/MENLHK-PKTL/PDLKWS/IOTL.0/10/2019	07/10/2019
4	Jawa Timur				
5	Jawa Tengah	-		S.1263/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2017	6/10/2017
6	DI. Yogyakarta	-		S.1535/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	6/11/2017
7	Nangroe Aceh Darussalam				
8	Sumatera Utara				
9	Sumatera Barat	-		S.761/MENLHK-PKTL/PDLKWS/IOTL.0/7/2019	22/07/2019
10	Riau	-		S.418/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018	11/04/2018
11	Kepulauan Riau				
12	Jambi				
13	Sumatera Selatan				
14	Bangka Belitung				
15	Bengkulu	BA.15/PDLKWS/PKLHWS/11/2018	12/11/2018	S.862/MENLHK-PKTL/PDLKWS/IOTL.0/8/2019	09/08/2019
16	Lampung	Notulensi	22/12/2017	S. 370/PKTL/PDLKWS/PLA.3/04/2018	02/04/2018
17	Bali	BA.2/PDLKWS/PKLHWS/1/2018	26/01/2018	S.862/MENLHK-PKTL/PDLKWS/IOTL.0/8/2019	09/08/2019
18	Nusa Tenggara Barat	BA.8/PDLKWS/PKLHWS/7/2018	31/07/2018	S.513/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2019	20/05/2019
19	Nusa Tenggara Timur	-		S.584/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2018	24/05/2018
20	Kalimantan Barat	-			
21	Kalimantan Tengah				
22	Kalimantan Selatan				
23	Kalimantan Timur				
24	Kalimantan Utara				
25	Sulawesi Utara				
26	Sulawesi Barat				
27	Sulawesi Tengah				
28	Sulawesi Tenggara				
29	Sulawesi Selatan	-		S.761/MENLHK-PKTL/PDLKWS/IOTL.0/7/2019	22/07/2019
30	Gorontalo	-		VALIDASI PERTAMA S.195/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/12/2017 VALIDASI PERBAIKAN S.676/MENLHK PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2018	21/12/2017 25/06/2018
31	Maluku				
32	Maluku Utara				
33	Papua Barat				
34	Papua				

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d Desember 2019

TABEL VIII.7. STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PERIODE TAHUN 2017 - 2019

No	Provinsi	Pembahasan		Validasi	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5	6
1	DKI Jakarta	Notulensi Pembahasan	26/02/2018	S.344/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/3/2018	27/03/2018
2	Banten				
3	Jawa Barat	BA.19/PDLKWS/PKLHWS/11/2018	26/11/2018	S.1472/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2018	27/12/2018
4	Jawa Timur	BA.02/PDLKWS/PKLHWS/01/2019	14/01/2019	S.864/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2019	09/08/2019
5	Jawa Tengah	-		S.1363/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/12/2018	03/12/2018
6	DI. Yogyakarta	-		S.896/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2018	10/08/2018
7	Nangroe Aceh Darussalam				
8	Sumatera Utara				
9	Sumatera Barat	-		S.171/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016 (evaluasi kelayakan SE MenLHK No.04/2015)	14/09/2016
10	Riau	-		S.223/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/10/2016 (evaluasi kelayakan SE MenLHK No.04/2015)	12/10/2016
11	Kepulauan Riau	-		S.1115/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/9/2019	12/09/2019
12	Jambi				
13	Sumatera Selatan	BA.01/PDLKWS/PKLHWS/01/2019	11/01/2019	S.509/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2019	20/05/2019
14	Bangka Belitung	-		S.1536/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06/11/2017
15	Bengkulu	-		S.1634/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2019	27/12/2019
16	Lampung				
17	Bali	-		S.859/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2019	09/08/2019
18	Nusa Tenggara Barat				
19	Nusa Tenggara Timur				
20	Kalimantan Barat				
21	Kalimantan Tengah				
22	Kalimantan Selatan				
23	Kalimantan Timur				
24	Kalimantan Utara	-		S.222/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/10/2016 (evaluasi kelayakan SE MenLHK No.04/2015)	11/10/2016
25	Sulawesi Utara	-		S.38/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2018	17/01/2018
26	Sulawesi Barat	BA.4/PDLKWS/PKLHWS/1/2018	30/01/2018	S.415/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018	04/11/2018
27	Sulawesi Tengah	-		S.133/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2019	12/02/2019
28	Sulawesi Tenggara				
29	Sulawesi Selatan				
30	Gorontalo	BA.14/PDLKWS/PKLHWS/09/2017	28/09/2017	S.1533/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06/11/2017
31	Maluku	-		S.512/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2019	20/05/2019
32	Maluku Utara				
33	Papua Barat				
34	Papua	BA.26/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	30/01/2018	-	

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d Desember 2019

**TABEL VIII.8. PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL
S.D. DESEMBER 2019**

NO	URAIAN	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH NASIONAL			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PP RPPLH	PP RPPLH
1	2	3	4	5	6
1.	RPPLH Nasional	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Catatan : RPPLH Nasional disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

**TABEL VIII.9. PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
S.D. DESEMBER 2019**

NO	EKOREGION / PROVINSI	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH PROVINSI			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
A. Ekoregion Jawa					
1.	DKI Jakarta	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
2.	Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
3.	Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
4.	Banten	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
5.	Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
6.	D.I. Yogyakarta	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
B. Ekoregion Sumatera					
1.	Sumatera Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
2.	Bengkulu	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Proses Penyusunan	Proses penetapan
3.	Jambi	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
4.	Riau	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
5.	Sumatera Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun (Sudah Verifikasi)	Belum disusun	-
6.	Sumatera Utara	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
7.	Aceh	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun (Sudah Verifikasi)	Sudah disusun	Proses penetapan
8.	Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun (Sudah Verifikasi)	Sudah disusun	Proses penetapan
9.	Kepulauan Riau	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
10.	Kepulauan Bangka Belitung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
C. Ekoregion Kalimantan					
1.	Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
2.	Kalimantan Utara	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
3.	Kalimantan Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun (Sudah Verifikasi)	Sudah disusun	Proses penetapan
4.	Kalimantan Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Proses penyusunan	-
5.	Kalimantan Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Proses penyusunan	-

NO	EKOREGION / PROVINSI	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH PROVINSI			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
D. Ekoregion Sulawesi					
1.	Sulawesi Utara	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
2.	Gorontalo	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
3.	Sulawesi Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
4.	Sulawesi Tenggara	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
5.	Sulawesi Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
5.	Sulawesi Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Proses penyusunan	-
E. Ekoregion Bali Nusatenggara					
1.	Bali	Proses penyusunan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Nusa Tenggara Barat	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Nusa Tenggara Timur	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
F. Ekoregion Maluku					
1.	Maluku Utara	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Maluku	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
G. Ekoregion Papua					
1.	Papua Barat	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
2.	Papua	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Catatan : RPPLH Provinsi disusun oleh Pemerintah Provinsi, KLHK melakukan asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi

**TABEL VIII.10. PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
S.D. DESEMBER 2019**

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
A.	Ekoregion Jawa				
1.	Kota Cilegon - Banten	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
2.	Kab. Bandung - Jawa Barat	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Kab. Sukabumi - Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
4.	Kota Cimahi - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Proses penyusunan	-
5.	Kota Depok - Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
6.	Kota Bekasi-Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sedang disusun	-
7.	Kab. Karawang-Jawa Barat	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
8.	Kota Tasikmalaya-Jawa Barat	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
9.	Kab. Kebumen - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
10.	Kota Semarang - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
11.	Kab. Pemalang - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
12.	Kab. Wonogiri - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
12.	Kab. Grobogan - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
13.	Kab. Klaten - Jawa Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
14.	Kota Yogyakarta - DIY	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
15.	Kota Surabaya - Jawa Timur	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
16.	Kota Blitar - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
17.	Kab. Malang - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
18.	Kab. Bojonegoro - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
19.	Kab. Tuban - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
20.	Kab. Pasuruan - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
B.	Ekoregion Sumatera				
1.	Kab. Aceh Utara-Aceh	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
2.	Kab. Langkat-Sumut	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Kota Medan-Sumut	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
4.	Kota Batam-Kep. Riau	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
5.	Kab. Bintan-Kep. Riau	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
6.	Kota Pelawan-Riau	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
7.	Kota Pekanbaru-Riau	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
8.	Kab. Kuantan Singingi-Riau	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
9.	Kab. Kampar-Riau	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
10.	Kab. Pasaman-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
11.	Kab. Padang panjang-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
12.	Kab. Lima Puluh Kota-Sumbar	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
13.	Kota Solok-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Sedang disusun	Belum disusun	-
14.	Kab. Solok-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Sedang disusun	Belum disusun	-
15.	Kab. Merangin-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
16.	Kota Jambi-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
17.	Kab. Muaro Jambi-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
18.	Kab. Batanghari-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
19.	Kab. Ogan Komering Ulu-Sumsel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
20.	Kota Palembang-Sumsel	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
21.	Kab. Muara Enim-Sumsel	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
22.	Kab. Musi Banyuasin-Sumsel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
23.	Kab. Belitong-Kep. Babel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
24.	Kab. Belitong Timur-Kep. Babel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
25.	Kota Bandar Lampung-Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
26.	Kab. Lampung Tengah-Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
27.	Kab. Bengkulu Tengah-Bengkulu	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
C.	Ekoregion Kalimantan				
1.	Kota Tarakan -Kalimantan Utara	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
2.	Ka. Bulungan -Kalimantan Utara	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
3.	Kab. Nunukan-Kalimantan Utara	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
4.	Kab. Tanah Laut-Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
5.	Kota Pontianak-Kalimantan Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Proses penyusunan	-
6.	Kab. Kubu Raya-Kalimantan Barat	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
7.	Kota Samarinda-Kalimantan Timur	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
8.	Kota Balikpapan-Kalimantan Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
9.	Kab. Banjar-Kalimantan Selatan	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
10.	Kota Banjarmasin-Kalimantan Selatan	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
11.	Kota Palangkaraya-Kalimantan Tengah	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
12.	Kab. Kapuas -Kalimantan Tengah	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
13.	Kab. Lamandau -Kalimantan Tengah	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
14.	Kab. Gunung Mas -Kalimantan Tengah	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
D.	Ekoregion Sulawesi				
1.	Kab. Banggai Kepulauan-Sulteng	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
2.	Kab. Tojo Una-Una-Sulteng	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
3.	Kota Palu - Sulteng	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
4.	Kab. Donggala - Sulteng	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
5.	Kab. Gorontalo	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
6.	Kota Gorontalo	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
7.	Kab. Gorontalo Utara	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
8.	Kab. Pohuwato - Gorontalo	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
9.	Kab. Konawe Selatan - Sultra	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
10.	Kab. Bombana - Sultra	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
11.	Kab. Kolaka Timur - Sultra	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
12.	Kota Kendari - Sultra	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
13.	Kota Manado - Sulut	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
14.	Kota Makassar- Sulsel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
15.	Kab. Gowa - Sulsel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
16.	Kab. Maros – Sulsel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
17.	Kab. Pangkajene Kepulauan – Sulsel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
E. Ekoregion Bali Nusatenggara					
1.	Kab. Sabu Raijua-NTT	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Kab. Alor-NTT	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Kab. Belu-NTT	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
F. Ekoregion Maluku					
1.	Kab. Morotai-Malut	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
2.	Kab. Halmahera Utara-Malut	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
E. Ekoregion Papua					
1.	Kota Jayapura- Papua	Proses penyusunan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
2.	Kab. Sorong Selatan- Papua Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
3.	Kab. Manokwari Selatan-Papua Barat	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Catatan : RPPLH Kab/Kota disusun oleh Pemerintah Kab/Kota, KLHK melakukan asistensi teknis penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota

**TABEL VIII.11. KECENDERONGAN PERUBAHAN KINERJA JASA LINGKUNGAN
HIDUP SEBAGAI PENGATUR AIR PERIODE TAHUN 1996-2019**

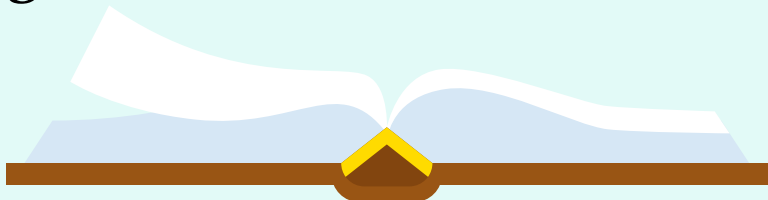
No	Kecenderungan Perubahan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup	Indeks Kecenderungan Jasa Lingkungan	Luas	
			Ha	%
1	2	3	4	5
1	Pulau Jawa	Meningkat	754.242,54	5,59
		Menurun	1.710.274,57	12,67
		Tetap	10.989.370,35	81,42
		Tidak Ada Data	43.063,46	0,32
		JUMLAH	13.496.950,93	100,00
2	Pulau Sumatera	Meningkat	3.387.626,31	7,08
		Menurun	13.636.026,04	28,51
		Tetap	30.467.346,98	63,69
		Tidak Ada Data	346.264,48	0,72
		JUMLAH	47.837.263,81	100,00
3	Pulau Kalimantan	Meningkat	2.626.667,30	4,90
		Menurun	14.093.097,59	26,31
		Tetap	36.459.220,01	68,05
		Tidak Ada Data	397.716,55	0,74
		JUMLAH	53.576.701,45	100,00
4	Pulau Sulawesi	Meningkat	2.558.944,72	13,66
		Menurun	4.661.227,41	24,88
		Tetap	11.335.327,99	60,50
		Tidak Ada Data	179.814,70	0,96
		JUMLAH	18.735.314,82	100,00
5	Pulau Maluku	Meningkat	412.003,01	5,18
		Menurun	1.349.471,77	16,95
		Tetap	5.846.785,84	73,43
		Tidak Ada Data	353.722,42	4,44
		JUMLAH	7.961.983,04	100,00
6	Pulau Papua	Meningkat	892.846,29	2,13
		Menurun	7.237.568,28	17,26
		Tetap	33.195.427,92	79,14
		Tidak Ada Data	617.296,63	1,47
		JUMLAH	41.943.139,12	100,00
7	Pulau Bali dan Nusa Tenggara	Meningkat	1.667.959,45	22,65
		Menurun	1.006.345,24	13,67
		Tetap	4.652.596,14	63,19
		Tidak Ada Data	36.295,58	0,49
		JUMLAH	7.363.196,42	100,00

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d. Desember 2019



DUKUNGAN MANAJEMEN

***Sekretariat Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan***



TABEL IX.1. REKAPITULASI SEBARAN PNS DAN CPNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH S.D. DESEMBER 2019

No.	UNIT KERJA	GOLONGAN															KET
		IV			III			II			I			JUMLAH			
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Sekretariat Dijen. Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	7	4	11	29	27	56	3	1	4	1	-	1	40	32	72	
II	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	7	7	14	36	35	71	-	1	1	-	-	-	43	43	86	
III	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	3	7	10	27	15	42	1	1	2	-	-	-	31	23	54	
IV	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	9	3	12	41	26	67	5	2	7	2	-	2	57	31	88	
V	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	6	6	12	18	8	26	2	1	3	-	-	-	26	15	41	
VI	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	3	4	7	14	11	25	1	2	3	-	-	-	18	17	35	
	JUMLAH	35	31	66	165	122	287	12	8	20	3	-	3	215	161	376	
1.	BPKH Wil. I Medan	1	-	1	28	12	40	10	5	15	-	-	-	39	17	56	
2.	BPKH Wil. II Palembang	1	-	1	27	14	41	7	3	10	-	-	-	35	17	52	
3.	BPKH Wil. III Pontianak	2	-	2	31	13	44	2	1	3	1	-	1	36	14	50	
4.	BPKH Wil. IV Samarinda	2	-	2	34	15	49	7	4	11	1	-	1	44	19	63	
5.	BPKH Wil. V Banjarbaru	3	-	3	27	15	42	7	6	13	1	-	1	38	21	59	
6.	BPKH Wil. VI Manado	4	-	4	24	12	36	8	1	9	-	-	-	36	13	49	
7	BPKH Wil. VII Makassar	-	2	2	32	18	50	6	5	11	-	-	-	38	25	63	
8.	BPKH Wil. VIII Denpasar	2	-	2	28	13	41	8	4	12	-	-	-	38	17	55	
9.	BPKH Wil. IX Ambon	3	-	3	23	8	31	15	2	17	-	-	-	41	10	51	
10.	BPKH Wil. X Irian Jaya	1	-	1	21	9	30	10	2	12	-	-	-	32	11	43	
11.	BPKH Wil. XI Yogyakarta	2	6	8	23	30	53	6	4	10	-	-	-	31	40	71	
12	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	1	-	1	11	9	20	6	2	8	-	-	-	18	11	29	
13	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	1	-	1	13	10	23	5	2	7	-	-	-	19	12	31	
14	BPKH Wil. XIV Kupang	3	-	3	17	8	25	4	1	5	-	-	-	24	9	33	
15	BPKH Wil. XV Gorontalo	1	1	2	13	3	16	6	-	6	-	-	-	20	4	24	
16	BPKH Wil. XVI Palu	3	-	3	16	8	24	6	-	6	-	-	-	25	8	33	
17	BPKH Wil. XVII Manokwari	2	-	2	17	1	18	11	1	12	-	-	-	30	2	32	
18	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	2	1	3	9	5	14	1	2	3	-	-	-	12	8	20	
19	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	1	-	1	20	5	25	3	1	4	-	-	-	24	6	30	

No.	UNIT KERJA	GOLONGAN																KET			
		IV				III				II				I					JUMLAH		
		L	P	JML		L	P	JML		L	P	JML		L	P	JML			L	P	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17		18		
20	BPKH Wil. XX Bandar Lampung	-	1	1	20	10	30	4	-	4		-	-	-	24	11		35			
21	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	2	1	3	24	4	28	1	1	2		-	-	-	27	6		33			
22	BPKH Wil. XXII Kendari	2	-	2	16	4	20	2	3	5		-	-	-	20	7		27			
	Jumlah	39	12	51	474	226	700	135	50	185		3	-	3	651	288		939			

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Keterangan:

IV L = Gol. IV Laki-laki

IV P = Gol. IV Perempuan

III L = Gol. III Laki-laki

III P = Gol. III Perempuan

II L = Gol. II Laki-laki

II P = Gol. II Perempuan

I L = Gol. I Laki-laki

I P = Gol. I Perempuan

TABEL IX.2. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH S.D. DESEMBER 2019

No.	UNIT KERJA	Status Pegawai	S3			S2			SARJANA (S1)			SARJANA MUDA			SLTA			SLTP				SD			TOTAL	JENIS KELAMIN		KET.
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	19	20	21	22	23	24	25		26	27	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
A. PUSAT																												
I	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	PNS	-	1	1	12	6	18	15	18	33	2	4	6	10	2	12	1	-	1	1	-	1	-	72	41	31	
		Upah	-	-	-	-	-	-	9	4	13	1	-	1	8	-	8	-	-	-	1	-	1	-	23	19	4	
II	Direktorat Rencana, Penggunaan & Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	PNS	1	-	1	14	12	26	22	18	40	3	5	8	7	4	11	-	-	-	-	-	-	86	47	39		
		Upah	-	-	-	-	-	-	6	3	9	-	-	-	3	2	5	-	-	-	-	-	-	14	9	5		
III	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	PNS	1	2	3	7	7	14	12	6	18	2	2	4	8	6	14	-	-	-	-	-	-	53	30	23		
		Upah	-	-	-	1	-	1	3	4	7	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	11	7	4		
IV	Direktorat Pengkukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PNS	2	-	2	8	7	15	21	12	33	5	3	8	21	10	31	1	-	1	1	-	1	-	91	59	32	
		Upah	-	-	-	-	-	-	15	6	21	2	-	2	14	-	14	-	-	-	-	-	-	37	31	6		
V	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	PNS	-	2	2	7	5	12	13	6	19	3	1	4	4	-	4	1	-	1	-	-	-	42	28	14		
		Upah	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	8	4	4		
VI	Direktorat Pecegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	PNS	-	-	-	6	3	9	6	10	16	1	1	2	7	1	8	1	-	1	-	-	-	36	21	15		
		Upah	-	-	-	1	-	1	1	2	3	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	8	4	4		
			PNS	4	5	9	54	40	94	89	70	159	16	16	32	57	23	80	4	-	4	2	-	2	380	226	154	
			Upah	-	-	-	2	1	3	36	20	56	4	1	5	31	5	36	-	-	-	1	-	1	99	74	27	
			4	5	9	56	41	97	125	90	215	20	17	37	88	28	116	4	-	4	3	-	3	428	300	181		
B. DAERAH																												
I	BPKH Wil. I Medan	PNS	-	-	-	4	-	4	12	3	15	3	5	8	21	9	30	1	-	1	-	-	-	58	41	17		
		Upah	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	6	-	6	-	-	-	1	-	1	9	8	1		
II	BPKH Wil. II Palembang	PNS	1	-	1	2	-	2	11	7	18	4	3	7	18	7	25	1	-	1	-	-	-	54	37	17		
		Upah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	10	-	-	-	-	-	-	10	8	2		
III	BPKH Wil. III Pontianak	PNS	1	-	1	6	3	9	12	5	17	1	-	1	14	5	19	1	-	1	1	-	1	-	49	36	13	
		Upah	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	11	1	12	1	-	1	-	-	-	15	13	2		
IV	BPKH Wil. IV Samarinda	PNS	-	-	-	4	1	5	16	11	27	3	2	5	20	5	25	-	-	-	1	-	1	-	63	44	19	
		Upah	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	12	5	17	1	-	1	-	-	20	14	6		
V	BPKH Wil. V Banjarbaru	PNS	-	-	-	7	-	7	8	7	15	1	3	4	22	11	33	-	-	-	1	-	1	-	60	39	21	
		Upah	-	-	-	1	1	2	6	2	8	1	1	2	10	1	11	-	-	-	-	-	-	23	18	5		
VI	BPKH Wil. VI Manado	PNS	1	-	1	5	-	5	12	7	19	-	1	1	22	5	27	-	-	-	-	-	-	53	40	13		
		Upah	-	-	-	-	-	-	3	5	8	-	-	-	5	2	7	-	-	-	-	-	-	15	8	7		

No.	UNIT KERJA	Status Pegawai	S3			S2			SARJANA (S1)				SARJANA MUDA				SLTA				SLTP				SD				TOTAL	JENIS KELAMIN		KET.
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	19	20	21	22	23	24	L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
VII	BPKH Wil. VII Makasar	PNS	-	-	-	2	3	5	17	9	26	3	2	5	14	9	23	-	-	-	1	-	1	60	37	23						
		Upah	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	1	1	12	1	13	-	-	-	-	-	-	18	13	5						
VIII	BPKH Wil. VIII Denpasar	PNS	-	-	-	4	1	5	14	5	19	2	4	6	18	8	26	-	-	-	-	-	-	56	38	18						
		Upah	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	10	9	1						
IX	BPKH Wil. IX Ambon	PNS	-	-	-	3	-	3	10	6	16	5	1	6	24	3	27	-	-	-	-	-	-	52	42	10						
		Upah	-	-	-	-	-	-	4	4	8	-	-	-	13	2	15	-	-	-	-	-	-	23	17	6						
X	BPKH Wil. X Irian Jaya	PNS	-	-	-	-	2	2	14	6	20	5	2	7	15	3	18	-	-	-	-	-	-	47	34	13						
		Upah	-	-	-	-	1	1	1	3	4	-	-	-	10	1	11	-	-	-	-	-	-	16	11	5						
XI	BPKH Wil. XI Yogyakarta	PNS	-	-	-	4	10	14	11	20	31	5	5	10	11	5	16	1	-	1	-	-	-	72	32	40						
		Upah	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	10	1	11	1	-	1	-	-	-	13	12	1						
XII	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	PNS	-	-	-	2	-	2	5	4	9	3	8	11	8	-	8	-	-	-	-	-	-	30	18	12						
		Upah	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	3	8	-	8	-	-	-	-	-	-	13	12	1						
XIII	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	PNS	-	-	-	4	2	6	10	2	12	3	7	10	3	1	4	-	-	-	-	-	-	32	20	12						
		Upah	-	-	-	-	-	-	2	5	7	2	1	3	10	2	12	-	-	-	-	-	-	22	14	8						
XIV	BPKH Wil. XIV Kupang	PNS	-	-	-	3	-	3	17	3	20	-	3	3	4	3	7	-	-	-	-	-	-	33	24	9						
		Upah	-	-	-	-	-	-	6	4	10	2	-	2	8	-	8	-	-	-	-	-	-	20	16	4						
XV	BPKH Wil. XV Gorontalo	PNS	-	-	-	2	1	3	6	2	8	5	1	6	6	-	6	-	-	-	-	-	-	23	19	4						
		Upah	-	-	-	-	-	-	2	5	7	-	-	-	15	2	17	-	-	-	-	-	-	24	17	7						
XVI	BPKH Wil. XVI Palu	PNS	-	-	-	4	3	7	14	5	19	3	1	4	3	-	3	-	-	-	-	-	-	33	24	9						
		Upah	-	-	-	-	1	1	2	1	3	3	-	3	11	3	14	-	-	-	-	-	-	21	16	5						
XVII	BPKH Wil. XVII Manokwari	PNS	-	-	-	4	-	4	12	1	13	1	1	2	13	-	13	-	-	-	1	-	1	33	31	2						
		Upah	-	-	-	-	-	-	1	9	10	1	1	2	10	1	11	4	-	4	-	-	-	27	16	11						
XVIII	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	PNS	-	-	-	3	1	4	8	4	12	-	2	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	20	12	8						
		Upah	-	-	-	-	-	-	4	1	5	-	-	-	8	3	11	-	-	-	-	-	-	16	12	4						
XIX	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	PNS	-	-	-	6	-	6	12	3	15	2	2	4	5	1	6	-	-	-	-	-	-	31	25	6						
		Upah	-	-	-	-	-	-	3	3	6	-	1	1	8	2	10	1	-	1	-	-	-	18	12	6						
XX	BPKH Wil. XX Bandar Lampung	PNS	-	-	-	2	4	6	13	6	19	-	-	-	9	3	12	-	-	-	-	-	-	37	24	13						
		Upah	-	-	-	-	-	-	2	3	5	3	1	4	6	-	6	-	-	-	-	-	-	15	11	4						
XXI	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	PNS	-	-	-	6	1	7	17	3	20	-	-	-	4	2	6	-	-	-	-	-	-	33	27	6						
		Upah	-	-	-	-	-	-	5	4	9	1	-	1	9	5	14	2	-	2	-	-	-	26	17	9						
XXII	BPKH Wil. XXII Kendari	PNS	-	-	-	1	-	1	19	6	25	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	22	8						
		Upah	-	-	-	-	-	-	3	7	10	1	-	1	9	-	9	-	-	-	-	-	-	20	13	7						
JUMLAH			3	-	3	78	32	110	270	125	395	51	55	106	255	81	336	4	-	4	5	-	5	959	666	293						
TOTAL PNS + UPAH			-	-	-	1	3	4	51	62	113	18	7	25	206	35	241	10	-	10	1	-	1	394	287	107						
TOTAL PNS + UPAH			3	-	3	79	35	114	321	187	508	69	62	131	461	116	577	14	-	14	6	-	6	1.353	953	400						

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

**TABEL IX.3. PERKEMBANGAN JUMLAH PNS BERDASARKAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN, PUSAT DAN DAERAH S.D. DESEMBER 2019**

No	Unit Kerja	PERENCANA		JLH. PERENCANA	SURTA				JLH. SURTA	Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)				JLH. PEH	PRANATA KOMPUTER				JLH. PRANATA KOMPUTER
		Ahli	Calon Ahli		Terampil	Calon Terampil	Ahli	Calon Ahli		Terampil	Calon Terampil	Ahli	Calon Ahli		Terampil	Calon Terampil	Ahli	Calon Ahli	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	PUSAT																		
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	5
2	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3	4	7	-	-	-	2	2	4	-	12	-	16	-	-	3	-	3
3	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1	-	1	1	1	3	-	5	6	-	8	1	15	-	-	-	-	-
4	Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan	-	-	-	1	-	1	-	2	5	-	8	-	13	-	-	-	-	-
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	3	3	6	-	-	1	4	5	4	-	1	-	5	-	-	-	-	-
	JUMLAH PUSAT	7	7	14	2	1	5	6	14	20	-	29	1	50	1	-	7	-	8
II	BPKH																		
1	BPKH Wil. I Medan	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	4	11	1	-	-	-	1
2	BPKH Wil. II Palembang	-	-	-	3	-	1	-	4	4	1	2	2	9	1	-	-	-	1
3	BPKH Wil. III Pontianak	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	2	10	-	-	-	-	-
4	BPKH Wil. IV Samarinda	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	13	4	21	-	-	-	-	-
5	BPKH Wil. V Banjarbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	3	15	-	-	-	-	-
6	BPKH Wil. VI Manado	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	4	2	11	-	-	1	-	1
7	BPKH Wil. VII Makassar	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	7	1	10	-	-	-	-	-
8	BPKH Wil. VIII Denpasar	-	-	-	4	-	3	-	7	8	1	3	3	15	-	-	-	-	-
9	BPKH Wil. IX Ambon	-	-	-	-	1	-	-	1	7	1	2	2	12	1	-	-	-	1
10	BPKH Wil. X Jayapura	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	6	2	16	-	-	-	-	-
11	BPKH Wil. XI Yogyakarta	-	-	-	3	-	2	-	5	4	-	10	-	14	-	-	-	-	-
12	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	3	1	14	-	-	-	-	-
13	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	-	-	-	1	1	1	-	3	7	-	5	2	14	-	-	-	-	-
14	BPKH Wil. XIV Kupang	-	-	-	-	-	4	-	4	6	-	5	1	12	-	-	-	1	1
15	BPKH Wil. XV Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	1	9	-	-	-	-	-
16	BPKH Wil. XVI Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6	2	14	-	-	-	-	-
17	BPKH Wil. XVII Manokwari	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	7	-	-	-	-	-
18	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-
19	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9	2	14	-	-	-	-	-
20	BPKH Wil. XX Lampung	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	7	1	11	-	-	-	-	-
21	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	7	15	-	-	-	-	-
22	BPKH Wil. XXII Kendari	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	9	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	12	2	13	-	27	102	9	108	48	267	3	-	1	1	5
	JUMLAH PUSAT + BPKH	7	7	14	14	3	18	6	41	122	9	137	49	317	4	-	8	1	13

No	Unit Kerja	ANALIS KEPEG		JLH. ANALIS KEPEG.	ARSIPARIS			JLH. ARSIPA RIS	PRANATA HUMAS CALON AHLI	JUMLAH PRANATA HUMAS	Perancang Peraturan Perundang-CALON AHLI		Pengelola Pengadaan Barang/Jasa CALON AHLI		JUMLAH PENGELOLA PENGADAAN BRG/JASA	TOTAL
		Ahli	Calon Ahli		Terampil	Ahli	Calon Terampil II				CALON AHLI	CALON AHLI	AHLI	CALON AHLI		
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
I	PUSAT															
1	Sekretariat Diteti Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1	3	4	3	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	14
2	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	30
3	Direktorat Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	23
4	Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
	JUMLAH PUSAT	1	3	4	4	1	1	5	1	1	1	1	1	1	2	99
II	BPKH															
1	BPKH Wil. I Medan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
2	BPKH Wil. II Palembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	15
3	BPKH Wil. III Pontianak	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	12
4	BPKH Wil. IV Samarinda	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	22
5	BPKH Wil. V Banjarbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
6	BPKH Wil. VI Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14
7	BPKH Wil. VII Makassar	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	12
8	BPKH Wil. VIII Denpasar	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	24	16
9	BPKH Wil. IX Ambon	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	17
10	BPKH Wil. X Jayapura	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	22
11	BPKH Wil. XI Yogyakarta	1	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	14
12	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
13	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	17
14	BPKH Wil. XIV Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
15	BPKH Wil. XV Gorontalo	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	14
16	BPKH Wil. XVI Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
17	BPKH Wil. XVII Manokwari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
18	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
19	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	14
20	BPKH Wil. XX Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	16
21	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
22	BPKH Wil. XXII Kendari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	1	-	1	6	-	4	10	-	-	-	8	3	-	11	321
	JUMLAH PUSAT + BPKH	2	3	5	10	1	4	15	1	1	1	9	4	-	13	420

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

TABEL IX.4. PERKEMBANGAN DIKLAT PENJENJANGAN PNS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN S.D. DESEMBER 2019

UNIT KERJA		DIKLAT PENJENJANGAN (orang)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		TAHUN 2014				TAHUN 2015				TAHUN 2016				TAHUN 2017				TAHUN 2018				TAHUN 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		LEMAHAS	SPATI	PIM TK.I	PIM TK.II	SPAMEN	SPAMA	ADJUM	JML	LEMAHAS	SPATI	PIM TK.I	PIM TK.II	SPAMEN	SPAMA	ADJUM	JML	LEMAHAS	SPATI	PIM TK.I	PIM TK.II	SPAMEN	SPAMA	ADJUM	JML	LEMAHAS	SPATI	PIM TK.I	PIM TK.II	SPAMEN	SPAMA	ADJUM	JML																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
A. PUSAT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	-	-	-	-	-	-	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2	Direktorat Perencanaan Kawasan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3	Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4	Direktorat Pengukuhan, Penatalaksanaan, Tenurial Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	-	-	-	1	-	1	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6	Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Terdapat perubahan Struktur Organisasi pada lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pusat pada tahun 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**TABEL IX.5. PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

I. UNDANG-UNDANG

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	UU Nomor 41	1999	Kehutanan	Masih berlaku dan ada perubahan
2	UU Nomor 19	2004	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang	Masih berlaku
3	UU Nomor 32	2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masih berlaku

II. PERATURAN PEMERINTAH

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PP. Nomor 44	2004	Perencanaan Kehutanan	Masih berlaku
2	PP. Nomor 2	2008	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Dephut	Sudah tidak berlaku
3	PP. Nomor 10	2010	Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
4	PP. Nomor 24	2010	Penggunaan Kawasan Hutan	Masih berlaku dan ada perubahan
5	PP. Nomor 60	2012	Perubahan PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
6	PP. Nomor 61	2012	Perubahan PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan	Masih berlaku
7	PP. Nomor 33	2014	Jenis Dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan	Masih berlaku
8	PP. Nomor 104	2015	Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Masih berlaku
9	PP. Nomor 105	2015	Penggunaan Kawasan Hutan	Masih berlaku
10	PP. Nomor 46	2016	Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Masih berlaku
11	PP. Nomor 46	2017	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	Masih Berlaku

III. PERATURAN PRESIDEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Perpres Nomor 28	2011	Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah	Masih berlaku
2	Perpres Nomor 88	2017	Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Masih berlaku

IV. INSTRUKSI PRESIDEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Instruksi Presiden Nomor 10	2011	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
2	Instruksi Presiden Nomor 6	2013	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
3	Instruksi Presiden Nomor 8	2015	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Masih berlaku
4	Instruksi Presiden Nomor 6	2017	Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Izin Baru Hutan Alam primer dan Lahan Gambut	Sudah tdk berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
5	Instruksi Presiden Nomor 8	2018	Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit	Masih Berlaku
6	Instruksi Presiden Nomor 5	2019	Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Masih Berlaku

V. PERATURAN MENTERI/ KEPUTUSAN MENTERI

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	683/Kpts-II/1981	1981	Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi	Masih berlaku
2	364/Kpts-II/1990; 519/Kpts/HK.050/7/1990; 23-VII-1990	1990	Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian	Masih berlaku
3	418/Kpts-II/1993	1993	Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian	Sudah tidak berlaku
4	292/Kpts-II/1995	1995	Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
5	250/Kpts-II/1996	1996	Perubahan Kepmenhut No.418/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian	Sudah tidak berlaku
6	613/Kpts-II/1997	1997	Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan	Sudah tidak berlaku
7	333/Kpts-II/1999	1999	Pedoman Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Hutan	Sudah tidak berlaku
8	32/Kpts-II/2001	2001	Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
9	70/Kpts-II/2001	2001	Penetapan Kawasan Lindung Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
10	146/Kpts-II/2003	2003	Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/Ex Kawasan Hutan Pengembangan Usaha Pertanian	Sudah tidak berlaku
11	230/Kpts-II/2003	2003	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Sudah tidak berlaku
12	P.31/Menhut-II/2005	2005	Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan	Sudah tidak berlaku
13	P.28/Menhut-II/2006	2006	Sistem Perencanaan Kehutanan	Sudah tidak berlaku
14	P.66/Menhut-II/2006	2006	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Huta	Sudah tidak berlaku
15	P.67/Menhut-II/2006	2006	Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan	Masih berlaku
16	P.26/Menhut-II/2007	2007	Perubahan Kedua Keputusan Menteri Kehutanan No.292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
17	P.62/Kpts-II/2007	2007	Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Kehutanan No. 292/Kpts-II/2007 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
18	23/MEN/XI/2007; P.52/Menhut-II/2008	2008	Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Penyelenggaraan Transmigrasi	Sudah tidak berlaku
19	P.43/Menhut-II/2008	2008	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
20	P.56/Menhut-II/2008	2008	Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan	Masih berlaku
21	P.38/Menhut-II/2008	2008	Perubahan Keempat Atas Kepmenhut No.292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
22	P.53/Menhut-II/2008	2008	Optimalisasi Peruntukan Areal hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Masih berlaku
23	P.48/Menhut-II/2009	2009	Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000	Sudah tidak berlaku
24	P.50/Menhut-II/2009	2009	Penegasan Status dan Fungsi Kawasan hutan	Sudah tidak berlaku
25	P.16/Menhut-II/2009	2009	Perubahan Kelima Atas Kepmenhut No. 292/Kpts-II/1995 tentang tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
26	P.6/Menhut-II/2009	2009	Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Masih berlaku
27	P.28/Menhut-II/2009	2009	Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah	Sudah tidak berlaku
28	P.02/Menhut-II/2010	2010	Informasi Kehutanan	Masih berlaku
29	P.06/Menhut-II/2010	2010	Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP	Masih berlaku
30	P.32/Menhut-II/2010	2010	Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
31	P.33/Menhut-II/2010	2010	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
32	P.34/Menhut-II/2010	2010	Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Masih berlaku dan ada perubahan
33	P.36/Menhut-II/2010	2010	Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Masih berlaku dan ada perubahan
34	P.42/Menhut-II/2010	2010	Sistem Perencanaan Kehutanan	Masih berlaku
35	P.47/Menhut-II/2010	2010	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
36	P.17/Menhut-II/2011	2011	Perubahan Atas P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
37	P.18/Menhut-II/2011	2011	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
38	P.19/Menhut-II/2011	2011	Penataan Batas Areal Kerja izin Pemanfaatan Hutan	Sudah tidak berlaku
39	P.20/Menhut-II/2011	2011	Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota	Masih berlaku
40	P.41/Menhut-II/2011	2011	Standar Fasilitas Saran dan Prasarana KPH Lindung Model dan KPH Produksi Model	Masih berlaku
41	P.44/Menhut-II/2011	2011	Perubahan Kedua Atas P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
42	P.49/Menhut-II/2011	2011	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030	Masih berlaku
43	P.50/Menhut-II/2011	2011	Penguatan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
44	P.54/Menhut-II/2011	2011	Perubahan Atas P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitas Sarana dan Prasarana KPH Lindung Model dan KPH Produksi Model	Masih berlaku
45	P.38/Menhut-II/2012	2012	Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
46	P.44/Menhut-II/2012	2012	Penguatan Kawasan Hutan	Masih berlaku
47	P.41/Menhut-II/2012	2012	Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
48	P.14/Menhut-II/2013	2013	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan	Sudah tidak berlaku
49	P.43/Menhut-II/2013	2013	Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan Tujuan Khusus	Masih berlaku
50	P.46/Menhut-II/2013	2013	Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Masih berlaku
51	P.47/Menhut-II/2013	2013	Pedoman Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Masih berlaku
52	P.62/Menhut-II/2013	2013	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Penguatan Kawasan Hutan	Masih berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
53	P.16/Menhut-II/2014	2014	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
54	P.25/Menhut-II/2014	2014	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
55	P.27/Menhut-II/2014	2014	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
56	P.28/Menhut-II/2014	2014	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
57	P.29/Menhut-II/2014	2014	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Masih berlaku
58	Peraturan Bersama Tiga Menteri dan Kepala BPN No. 79/2014, No. PB.3/menhut-II/2014, No. 17/PRT/M/2014, No. 8/SKB/X/2014	2014	Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam KH	Masih berlaku
59	P.16/MenLHK-II/2015	2015	Perubahan kedua atas Permenhut No.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Masih berlaku
60	P.50/Menlhk/Setjen/2016	2016	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
61	P.51/Menlhk/Setjen/KUM .1/12/2016	2016	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat di Konversi	Sudah tidak berlaku
62	P.81/Menlhk/Setjen/KUM .1/10/2016	2016	Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan	Masih berlaku
63	P.93/Menlhk/Setjen/KUM .1/12/2016	2016	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan	Masih berlaku
64	P.96/Menlhk/Setjen/Kum .1/11/2018	2018	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Masih berlaku dan ada perubahan
65	P.97/MENLHK/Setjen/Ku m.1/11/2018	2018	Tukar Menukar Kawasan Hutan	Masih berlaku
66	P.22/MENLHK/Setjen/Ku m.1/7/2018	2018	Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Masih berlaku
67	P.27/Menlhk/Setjen/Kum .1/7/2018	2018	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Masih berlaku dan ada perubahan
68	P.17/Menlhk/SETJEN/Ku m.1/5/2018	2018	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria	Masih berlaku dan ada perubahan
69	P.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019	2019	Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 27/Menlhk/Setjen/Kum.1 /7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Masih berlaku
70	P.42/Menlhk/Setjen/Kum .1/8/2019	2019	Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum. 1/5/2018	Masih berlaku
71	P.50/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019	2019	Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Masih berlaku

VI. SK. MENTERI (PIPIB)

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SK. 7416/Menhut-VII/IPSDH/2011	2006	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi I)	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
2	SK. 2771/Menhut-VII/IPSDH/2012	2012	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi II)	Sudah tidak berlaku
3	SK. 6315/Menhut-VII/IPSDH/2012	2012	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi III)	Sudah tidak berlaku
4	SK. 2796/Menhut-VII/IPSDH/2013	2013	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi IV)	Sudah tidak berlaku
5	SK. 2796/Menhut-VII/IPSDH/2013	2013	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi V)	Sudah tidak berlaku
6	SK. 3706/Menhut-VII/IPSDH/2014	2014	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VI)	Sudah tidak berlaku
7	SK. 6982/Menhut-VII/IPSDH/2014	2014	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VII)	Sudah tidak berlaku
8	SK. 2312/Menhut-VII/IPSDH/2015	2015	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VIII)	Sudah tidak berlaku
9	SK. 5385/Men-LHK-PKTL/IPSDH/2015	2015	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi IX)	Sudah tidak berlaku
10	SK. 2300/Men-LHK/PKTL/IPSDH/Pla.1/5/2016	2016	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi X)	Sudah tidak berlaku
11	SK. 6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016	2016	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI)	Sudah tidak berlaku
12	SK.351/MenLHK/SETJEN/PLA.1/7/2017	2017	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XII)	Sudah tidak berlaku
13	SK.6559/MenLHK/IPSDH/PLA.1/12/2017	2017	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIII)	Sudah tidak berlaku
14	SK.3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018	2018	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIV)	Sudah tidak berlaku
15	SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018	2018	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV)	Sudah tidak berlaku
16	SK. 7099/Menlhk-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019	2019	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
17	SK.851/Menlhk-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020	2020	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode I	Masih berlaku

VII. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SK.91/VII-PW/2006	2006	Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
2	P.01/VII-SET/2009	2009	Nama-nama Jabatan dan uraian Jabatan Non Struktural Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
3	P.02/VII-SET/2009	2009	Prosedur Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
4	P.03/VII-SET/2009	2009	Klasifikasi Arsip/Dokumen Pengukuhan dan Perubahan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
5	P.01/VII-SET/2010	2010	Peraturan Nama-nama Jabatan dan Uraian Jabatan Non Struktural Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
6	P.02/VII-SET/2010	2010	Prosedur Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
7	P.03/VII-SET/2010	2010	Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2010-2014	Sudah tidak berlaku
8	P.04/VII-SET/2010	2010	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2011	Sudah tidak berlaku
9	P.05/VII-SET/2010	2010	Petunjuk Teknis Pemetaan Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat, Penetapan Areal Kerja, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa	Sudah tidak berlaku
10	P.06/VII-SET/2010	2010	Mekanisme dan Tata Cara Penelaahan Peta Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
11	P.07/VII-SET/2010	2010	Standar Nomenklatur Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
12	P.08/VII-SET/2010	2010	Standar Biaya dan Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2012	Sudah tidak berlaku
13	P.1/VII-SET/2011	2011	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Masih berlaku
14	P.2/VII-SET/2011	2011	Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
15	P.3/VII-SET/2011	2011	Perubahan Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
16	P.4/VII-KUH/2011	2011	Petunjuk Teknis Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota	Masih berlaku
17	P.5/VII-KUH/2011	2011	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan	Masih berlaku
18	P.6/VII-KUH/2011	2011	Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
19	P.7/VII-SET/2011	2011	Renstra Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
20	P.8/VII-SET/2011	2011	Standar Kegiatan dan Biaya Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2010	Sudah tidak berlaku
21	P.9/VII-SET/2011	2011	Rencana Kerja Tahun 2012	Sudah tidak berlaku
22	P.1/VII-SET/2012	2012	Penetapan Kinerja Ditjen Planhut Tahun 2012	Sudah tidak berlaku
23	P.4/VII-SET/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemasangan Tanda Batas dan Pengukuran Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
24	P.5/VII-WP3H/2012	2012	Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP	Sudah tidak berlaku
25	P.6/VII-SET/2012	2012	Rencana Kerja Ditjen Planhut Tahun 2013	Sudah tidak berlaku
26	P.9/VII-SET/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dengan Menggunakan GPS	Masih Berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
27	P.10/VII-SET/2012	2012	Petunjuk Teknis Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota	Masih berlaku
28	P.11/VII-SET/2012	2012	Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2013	Sudah tidak berlaku
29	P.13/VII-PKH/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kehutanan melalui Mekanisme Kerjasama dengan pengelola hutan	Sudah tidak berlaku
30	P.14/VII-PKH/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dilimpahkan dari Menhut kepada Gubernur	Sudah tidak berlaku
31	P.15/VII-PKH/2012	2012	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
32	P.16/VII-SET/2012	2012	Mekanisme dan Tata Cara Penelaahan Peta Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Perubahan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
33	P.17/VII-SET/2012	2012	Pedoman Penyusunan Laporan Bidang Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
34	P.1/VII-SET/2013	2013	Penetapan Kinerja Tahun 2013	Sudah tidak berlaku
35	P.2/VII-SET/2013	2013	Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Tata Batas/Penetapan Kawasan Hutan	Masih berlaku
36	P.3/VII-SET/2013	2013	Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan	Masih berlaku
37	P.4/VII-SET/2013	2013	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2014	Sudah tidak berlaku
38	P.5/VII-SET/2013	2013	Standar, Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2014	Sudah tidak berlaku
39	P.6/VII-SET/2013	2013	Perubahan P.5/VII-SET/2013 tentang Standar, Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2014	Sudah tidak berlaku
40	P.7/VII-SET/2013	2013	Mekanisme Pengelolaan Data Spasial Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengukuhan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Masih berlaku
41	P.1/VII-Set/2014	2014	Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
42	P.2/VII-Set/2014	2014	Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dan Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai kawasan Hutan Dengan Menggunakan GNSS (Global Navigation Satellite System).	Masih berlaku
43	P.3/VII-IPSDH/2014	2014	Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Kehutanan	Masih berlaku
44	P.4 /VII/PKH/2014	2014	petunjuk teknik pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan.	Sudah tidak berlaku
45	P.5/VII-PKH/2014	2014	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dilimpahkan Menteri Kehutanan Kepada Gubernur	Sudah tidak berlaku
46	P.6/VII-PKH/2014	2014	Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kehutanan Melalui Mekanisme Kerjasama	Sudah tidak berlaku
47	P.7 /VII-Set/2014	2014	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2015	Sudah tidak berlaku
48	P.8/VII-Set/2014	2014	Standar Kegiatan Dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2015	Sudah tidak berlaku
49	P.4/PKTL-SET/2015	2015	Penggantian Biaya Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	Masih berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
50	P.5/PKTL-SET/2015	2015	Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Pemegang Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan Guna Membangun Kebun Bagi Masyarakat di Sekitar Lokasi Perkebunan	Masih berlaku
51	P.10/PKTL-SET/2015	2015	Perjanjian Kinerja Dirketorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	Sudah tidak berlaku
52	P. 1/PKTL/SETDIT/KEU.1/2/2016	2016	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Sudah tidak berlaku
53	P.2/ PKTL/SETDIT/OTL.1/3/2016	2016	Nama nama Jabatan dan Uraian Jabatan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Masih berlaku
54	P.3/SETDIT /PLA.2/9/2016	2016	Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan.	Masih berlaku
55	P.6/PKTL/SETDIT/OTL.1/12/2016	2016	Tentang Nama Jabatan Dan Uraian Jabatan Non Struktural Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan.	Masih berlaku
56	P. 7/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2016	2016	Tentang Prosedur Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan.	Masih berlaku
57	P.8/PKTL/SETDIT/PROEV/ Set.1/ 12/2016	2016	Penetapan Indikator Kinerja Utama	Masih berlaku
58	P.2/PKTL/SETDIT/KEU.1/2/2017	2017	Perjanjian Kinerja	Sudah tidak berlaku
59	P.3/PKTL/IPSDH/PLA.1/2017	2017	Petunjuk Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam Rangka Verifikasi PIPPIB	Masih berlaku
60	P.4/PKTL/REN/PLA.0/4/2017	2017	Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan	Masih berlaku
61	P.5/PKTL/SETDIT/KUM.1/4/2017	2017	Petunjuk Pelaksanaan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Berbasis Geospasial	Masih berlaku
62	P.9/PKTL/KUH/PLA.2/11/2018	2018	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Batas Pencadangan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Tidak Produktif dalam Rangka Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yg Dapat Dikonversi Tidak produktif untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria	Masih berlaku
63	P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/8/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen No. P.9/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2017 tentang Standar Kegiatan dan Biaya (SKB)	Masih berlaku
64	P.14/PKTL/SETDIT/KEU.1/12/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen No. P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2018 tentang Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018	Masih berlaku
65	P.10/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. P.8/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2017 tentang Prosedur Kerja Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017	Masih berlaku
66	P.12/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2018	2018	Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019	Masih berlaku
67	P.4/PKTL/SETDIT/KEU.0/3/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan NO. P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2018 tentang Perjanjian Kinerja Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018	Masih berlaku
68	P.2/PKTL/SETDIT/OTL.2/3/2018	2018	Prosedur Kerja Lingkup Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Masih berlaku
69	P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2018	2018	Perjanjian Kinerja Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018	Masih berlaku
70	P.5/PKTL/SETDIT/Kum.1/8/2018	2018	Petunjuk Teknis Penelitian Tim Terpadu dalam Rangka Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) tidak Produktif untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria	Masih berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
71	P.3/PKTL/SETDIT/OTL.2/3/2018	2018	Proses Bisnis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Masih berlaku
72	P.11/PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2018	2018	Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Wilayah Ekoregion	Masih berlaku
73	P.8/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2018	2018	Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019	Masih berlaku
74	P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen No.P.9/PKTL-STE/2015 tentang Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019	Masih berlaku
75	P.3/PKTL/REN/PLA.0/5/2019	2019	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan	Masih berlaku
76	P.4/PKTL/SETDIT/PLA.0/8/2019	2019	Sistem Informasi dan Dokumentasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan Berbasis Online	Masih berlaku
77	P.5/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2019	2019	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020	Masih berlaku
78	P.13/PKTL/SETDIT/Keu.0/12/2019	2019	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020	Masih berlaku
79	P.14/PKTL.SETDIT/Keu.0/12/2019	2019	Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020	Masih berlaku

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s/d 31 Desember 2019

TABEL IX.6. REKAPITULASI PERKEMBANGAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN S.D. DESEMBER 2019
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	SATKER/LOKASI	TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		DIPA 29		DIPA 29		DIPA 29		DIPA 29		DIPA 29		DIPA 29	
	JUMLAH PUSAT DAN UPT (Hil)	489.964.876		475.525.297		323.973.949		309.643.417		1.100.434.984.000		451.314.101	
I	PUSAT	87.536.170		149.006.457		85.261.301		97.567.002		197.038.900.000		137.921.527	
1	Sekretariat Dijen Planologi Kehutanan	46.638.662		147.790.383									
2	Dit. Perencanaan Kawasan Hutan	9.184.086		161.367									
3	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan SDH	6.744.454		146.080									
4	Dit. Pengukuhan, Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan	11.843.031		588.538									
5	Dit. Wilayah Pengelolaan dan Penyijapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan	7.894.256		164.348									
6	Dit. Penggunaan Kawasan Hutan	5.231.681		155.741									
Terdapat perubahan struktur organisasi di lingkup Dijen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2015. Berdasarkan Surat Kepala Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN-RB Nomor:B/809/D.II.PAN-RB/3/2015 tanggal 4 Maret 2015 yang dijadikan acuan untuk menjadikan Sekretariat Dijen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Satuan Kerja Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kehutanan Hidup dan Kehutanan dalam rangka percepatan proses penyusunan dokumen anggaran DIPA APBN-P Tahun 2015 Kementerian Kehutanan Hidup dan Kehutanan dengan Surat Direktur Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Nomor:S-791/AG/2015 tanggal 9 April 2015 perihal, Dijen Perbendaharaan dimohon untuk dapat menonaktifkan DIPA awal (DIPA APBN TA 2015) Satker eks Dijen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Satuan Kerja Pengelola Anggaran Lingkup Dijen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.													
1	Sekretariat Dijen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			-		61.170.688		62.165.336		68.605.187.000		61.951.150	
2	Dit. Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			-		6.128.014		15.388.583		46.935.172.000		49.242.011	
3	Dit. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			-		4.904.985		7.492.242		62.582.007.000		11.984.349	
4	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan SDH			-		5.664.127		4.789.033		9.691.605.000		4.630.325	
5	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor			-		3.552.840		3.881.732		5.416.763.000		5.748.694	
6	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan			-		3.840.647		3.850.076		3.808.166.000		4.364.998	
II	UPT (BPKH)	402.428.706		326.518.840		238.712.648		212.076.415		903.396.084.000		313.392.574	
1	BPKH Wilayah I Medan	25.407.071		19.889.747		14.264.847		13.025.078		72.255.265.000		14.515.385	
2	BPKH Wilayah II Palembang	22.937.892		15.629.007		12.853.256		10.187.869		55.371.428.000		13.479.029	
3	BPKH Wilayah III Pontianak	22.444.477		16.526.302		15.981.129		11.390.243		55.093.789.000		17.479.195	
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	35.719.338		17.745.963		14.478.620		12.955.264		49.276.973.000		16.583.716	
5	BPKH Wilayah V Banjarbaru	17.324.397		14.371.948		13.944.484		11.156.446		42.055.606.000		14.553.767	
6	BPKH Wilayah VI Manado	20.181.438		17.803.477		13.127.446		11.571.496		35.943.022.000		18.380.925	
7	BPKH Wilayah VII Makassar	22.294.271		15.018.531		12.947.387		12.912.028		64.993.982.000		20.324.724	
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	16.192.913		13.776.895		10.545.634		10.866.787		17.726.083.000		10.944.681	
9	BPKH Wilayah IX Ambon	14.137.294		15.687.781		10.793.966		9.919.392		43.364.257.000		16.996.124	
10	BPKH Wilayah X Jayapura	22.919.090		15.837.773		11.356.082		10.605.713		53.388.295.000		15.808.518	
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	12.175.435		13.136.486		12.968.888		10.835.954		15.531.506.000		13.538.153	
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	13.270.594		12.453.852		10.645.880		7.437.881		23.193.711.000		11.037.814	
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	13.745.916		10.919.962		7.214.389		6.680.340		23.474.701.000		11.207.461	
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	13.519.517		13.865.339		8.721.135		7.293.861		20.827.642.000		12.506.972	
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	8.330.826		10.297.687		7.833.624		6.854.885		15.204.544.000		14.469.640	
16	BPKH Wilayah XVI Palu	25.420.975		13.464.641		9.843.447		9.360.092		39.816.845.000		17.371.168	
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	20.910.863		15.215.686		10.838.703		10.687.948		53.011.482.000		16.578.627	

NO	SATKER/LOKASI	TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		DIPA 29		DIPA 29		DIPA 29		DIPA 29		DIPA 29		DIPA 29	
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	11.967.560		13.773.130		7.343.970		5.704.193		20.579.074.000		6.952.736	
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	18.903.803		16.981.723		7.634.787		7.759.089		47.663.351.000		11.357.055	
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	15.289.466		16.141.430		7.455.978		8.952.147		17.331.328.000		9.250.784	
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	18.046.998		12.637.354		10.738.039		7.800.506		91.529.244.000		15.823.273	
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	11.288.582		15.344.126		7.180.957		8.119.203		45.763.956.000		14.232.827	
III	DINAS KEHUTANAN	37.032.975		-		-		-		-		-	
1	Dinas Kehutanan Prov Banten	637.946		-		-		-		-		-	
2	Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	240.400		-		-		-		-		-	
3	Dinas Kehutanan Prov Jawa Barat	729.638		-		-		-		-		-	
4	Dinas Kehutanan Prov Jawa Tengah	945.362		-		-		-		-		-	
5	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY	775.524		-		-		-		-		-	
6	Dinas Kehutanan Prov Jawa Timur	610.800		-		-		-		-		-	
7	Dinas Kehutanan Prov NAD	1.000.448		-		-		-		-		-	
8	UPTD BPPK I Sumut	1.452.358		-		-		-		-		-	
9	UPTD BPPK II Sumut	649.200		-		-		-		-		-	
10	Dinas Kehutanan Prov Riau	1.097.822		-		-		-		-		-	
11	Dinas Kehutanan Prov Kep.Riau	774.880		-		-		-		-		-	
12	Dinas Kehutanan Prov Sumatera Barat	889.613		-		-		-		-		-	
13	UPTD BIPHUT Jambi	937.816		-		-		-		-		-	
14	Dinas Kehutanan Prov Bengkulu	1.260.648		-		-		-		-		-	
15	Dinas Kehutanan Prov Sumatera Selatan	881.165		-		-		-		-		-	
16	Dinas Kehutanan Prov Bangka Belitung	739.051		-		-		-		-		-	
17	UPTD IPH Lampung	941.353		-		-		-		-		-	
18	UPTD IPH Kalbar	1.205.640		-		-		-		-		-	
19	Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Tengah	1.427.857		-		-		-		-		-	
20	UPTD Planologi Balikpapan	636.957		-		-		-		-		-	
21	UPTD Planologi Samarinda	1.703.644		-		-		-		-		-	
22	UPTD Planologi Tarakan	671.950		-		-		-		-		-	
23	Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Selatan	965.655		-		-		-		-		-	
24	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Utara	1.687.487		-		-		-		-		-	
25	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Tengah	1.438.548		-		-		-		-		-	
26	Dinas Kehutanan Perkebunan Gorontalo	877.605		-		-		-		-		-	
27	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Selatan	1.659.326		-		-		-		-		-	
28	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Tenggara			-		-		-		-		-	
29	UPTD Balai IPH Kendari	1.547.621		-		-		-		-		-	
30	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Barat	872.250		-		-		-		-		-	
31	Dinas Kehutanan Prov Bali	864.922		-		-		-		-		-	
32	Dinas Kehutanan Prov NTB	998.540		-		-		-		-		-	
33	Dinas Kehutanan Prov NTT	847.400		-		-		-		-		-	

NO	SATKER/LOKASI	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
		DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29
34	Dinas Kehutanan Prov Maluku	1.260.776	-	-	-	-	-
35	Dinas Kehutanan Prov Maluku Utara	1.124.100	-	-	-	-	-
36	Dinas Kehutanan Prov Papua Barat	1.203.673	-	-	-	-	-
37	Dinas Kehutanan Prov Papua	1.475.000	-	-	-	-	-

Sumber : Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Keterangan:

Pada TA 2010 terdapat penerimaan Hibah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Planologi sebesar Rp 17.980.900.000,- namun sampai dengan Tahun Anggaran tidak diterima laporan keuangannya karena bukan kewajiban pihak negar donor (on budget treasury)

TABEL IX.7. PERKEMBANGAN REALISASI KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN S.D. DESEMBER 2019

NO	SATKER	TAHUN 2015				TAHUN 2016				TAHUN 2017				TAHUN 2018				TAHUN 2019			
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA
	TOTAL	474.309.223.000	395.107.950.429	83,43	43.666.607.716	323.973.948.000	296.802.622.118	91,61	27.171.326.882	309.643.417.000	292.169.092.692	94,35	17.484.324.308	1.100.324.984.000	584.151.090.483	53,08	516.283.893.517	461.314.101.000	422.699.646.291	93,64	28.714.464.709
	PUSAT	147.790.383.000	112.541.487.806	76,15	334.230.339	85.261.301.000	80.232.178.322	94,10	5.028.122.678	97.567.002.000	87.127.706.124	89,30	10.439.296.876	197.038.900.000	149.164.871.299	75,70	47.874.028.701	137.921.527.000	124.387.216.883	90,19	13.534.311.117
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	14.301.240.000	14.004.019.299	97,92	297.220.701																
2	Dit. Perencanaan Kawasan Hutan	161.367.000	161.355.011	99,99	11.999																
3	Dit. Inventarisasi dan Pemertan SDH	146.060.000	145.972.802	99,93	107.198																
4	Dit. Pengkutan, Penanaman, dan Pemertan SDH	988.538.000	951.748.536	93,75	36.789.464																
5	Dit. Wilayah Pengkutan dan Penyajian Hasil Pemertan Kawasan Hutan	164.346.000	164.345.755	100,00	2.245																
6	Dit. Pengkutan Kawasan Hutan	155.741.000	155.642.268	99,94	98.732																
Terdapat perubahan struktur organisasi di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2015																					
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	147.790.383.000	112.541.487.806	76,15	35.248.895.194	61.170.688.000	58.615.623.953	95,82	2.554.864.047	62.165.336.000	55.488.852.588	89,28	6.666.483.412	68.605.187.000	61.344.414.973	88,42	7.260.772.027	61.951.150.000	60.541.811.005	97,73	1.409.338.995
2	Dit. Perencanaan, Pengkutan, dan Pembentukan Wilayah Pengkutan Hutan	-	-	-	-	6.128.014.000	5.396.698.372	88,07	731.315.628	15.388.583.000	12.460.752.995	80,91	2.937.830.005	46.935.172.000	33.326.911.985	71,01	13.608.260.035	49.242.011.000	38.597.496.616	78,38	10.644.515.384
3	Dit. Pengkutan dan Penanaman Kawasan Hutan	-	-	-	-	4.904.995.000	4.688.018.338	95,58	216.966.462	7.492.242.000	7.148.013.084	95,41	344.228.916	62.582.007.000	36.592.741.257	58,47	25.988.265.743	11.984.349.000	10.833.344.671	90,44	1.146.004.329
4	Dit. Inventarisasi dan Pemertan SDH	-	-	-	-	5.664.127.000	5.005.454.513	88,37	658.672.387	4.789.033.000	4.533.888.915	95,09	235.144.085	9.691.605.000	9.152.523.838	94,44	539.081.162	4.630.325.000	4.522.982.949	97,68	107.342.451
5	Dit. Pengkutan dan Pembentukan Wilayah Pengkutan Usaha dan Kegiatan	-	-	-	-	3.552.840.000	3.147.896.013	88,60	404.943.987	3.850.076.000	3.333.030.849	84,38	217.045.151	5.416.783.000	5.047.583.435	93,18	388.199.965	5.748.894.000	5.683.278.186	98,86	65.415.814
6	Dit. Pengkutan dan Pembentukan Wilayah Pengkutan dan Sektor	-	-	-	-	3.840.647.000	3.378.286.333	87,96	462.360.167	3.881.732.000	3.843.167.693	99,01	38.564.307	3.808.166.000	3.700.715.831	97,18	107.450.169	4.364.898.000	4.203.303.656	96,30	161.684.144
	BPKH	328.518.840.000	283.166.462.623	86,72	43.352.377.377	238.712.648.000	216.570.443.996	90,72	22.142.204.004	212.076.415.000	205.031.386.588	96,68	7.045.028.432	903.396.094.000	434.986.218.184	48,15	465.408.854.516	313.392.574.000	298.212.430.008	95,16	15.180.143.592
1	BPKH Wilayah Medan	19.889.747.000	17.945.184.585	90,22	1.944.562.315	14.264.847.000	13.498.124.508	94,63	786.722.492	13.025.078.000	12.308.199.821	94,50	718.878.179	72.255.265.000	26.599.038.187	36,81	45.658.226.813	14.515.385.000	12.386.527.539	85,33	2.128.857.461
2	BPKH Wilayah II Palembang	15.029.007.000	14.041.409.486	89,84	1.587.597.514	12.853.256.000	11.349.641.036	88,30	1.503.814.964	10.187.869.000	10.115.354.142	99,29	72.514.858	55.371.428.000	28.881.678.962	52,16	26.489.749.038	13.479.029.000	12.780.272.557	94,82	688.756.443
3	BPKH Wilayah III Pontianak	16.528.302.000	15.078.522.452	91,24	1.447.779.548	15.881.126.000	14.317.586.010	89,59	1.663.942.990	11.390.243.000	11.116.440.531	97,60	273.802.469	55.093.789.000	30.865.793.100	56,02	24.227.995.900	17.479.195.000	17.075.958.113	97,69	403.236.887
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	17.745.963.000	16.430.679.964	92,59	1.315.283.036	14.478.620.000	12.794.465.827	88,37	1.684.154.373	12.955.264.000	12.770.529.388	98,57	184.734.812	49.276.973.000	20.381.194.474	41,36	28.886.778.526	16.583.716.000	13.838.703.351	83,45	2.745.012.649
5	BPKH Wilayah V Banjarmasin	14.371.946.000	14.184.113.750	98,69	187.834.250	13.944.484.000	13.080.597.919	93,80	863.886.081	11.156.446.000	11.053.834.766	98,08	102.611.234	42.055.606.000	22.684.480.480	53,89	19.391.125.520	14.553.767.000	14.491.799.787	99,57	81.987.213
6	BPKH Wilayah VI Manado	17.903.477.000	16.761.039.375	94,14	1.042.438.625	13.127.446.000	12.508.088.410	95,27	621.359.590	11.571.496.000	11.416.636.695	98,66	154.869.315	35.943.022.000	20.140.872.055	56,04	15.802.149.945	18.380.925.000	17.804.265.082	96,86	576.659.916
7	BPKH Wilayah VII Makassar	15.018.531.000	13.935.478.284	92,79	1.083.052.716	12.947.387.000	12.047.382.059	93,05	900.004.941	12.912.028.000	12.519.061.898	96,96	392.966.102	64.993.982.000	30.704.632.102	47,24	34.289.348.898	20.324.724.000	19.879.990.333	97,81	444.733.767
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	13.776.885.000	12.822.483.900	93,07	954.411.100	10.545.634.000	9.805.572.784	92,98	740.061.216	10.866.787.000	10.600.990.245	97,55	265.796.755	17.726.083.000	15.971.529.797	90,10	1.754.553.203	10.944.881.000	10.628.173.985	97,11	316.507.015
9	BPKH Wilayah IX Ambon	15.887.781.000	12.277.349.586	78,26	3.410.431.414	10.793.966.000	9.114.060.960	84,44	1.679.905.040	9.919.392.000	8.943.156.504	90,16	976.235.466	43.364.257.000	18.146.974.959	41,85	25.217.282.941	16.996.124.000	16.289.035.172	95,84	707.088.828
10	BPKH Wilayah X Jayapura	15.837.773.000	14.442.618.883	89,30	1.695.154.107	11.356.082.000	10.217.663.947	89,98	1.138.418.053	10.606.713.000	10.243.548.932	96,59	362.164.668	53.388.295.000	20.043.218.230	37,54	33.345.076.770	15.808.518.000	14.619.288.935	92,48	1.189.229.165
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	13.108.486.000	12.451.364.738	94,78	656.121.262	12.968.888.000	11.194.899.387	86,32	1.773.888.613	10.835.954.000	10.487.920.258	96,79	346.333.742	15.531.506.000	14.378.601.656	92,58	1.152.904.344	13.538.153.000	12.816.473.920	94,67	721.679.080
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Priang	12.453.852.000	10.855.400.275	87,17	1.598.451.725	10.645.880.000	9.910.460.668	93,09	735.928.332	7.437.881.000	7.262.228.064	97,64	175.652.336	23.193.711.000	13.852.431.104	59,72	9.341.279.986	11.037.814.000	10.120.994.216	91,69	916.819.784
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	10.919.962.000	9.756.591.446	89,35	1.163.460.554	7.211.389.000	6.623.277.795	91,81	591.111.205	6.680.340.000	6.626.391.862	99,19	53.948.118	23.474.701.000	15.294.405.030	65,15	8.180.295.970	11.021.461.000	11.021.806.702	98,34	185.654.286

NO	SATKER	TAHUN 2015				TAHUN 2016				TAHUN 2017				TAHUN 2018				TAHUN 2019			
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	13.865.339.000	12.630.168.590	91,09	1.235.170.410	8.721.135.000	7.746.123.981	88,82	975.011.019	7.293.861.000	6.990.304.838	95,84	303.556.162	20.827.642.000	13.746.789.236	66,00	7.080.872.764	12.506.972.000	11.543.013.946	92,29	983.950.054
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	10.297.687.000	9.833.612.534	95,49	464.074.466	7.833.624.000	7.700.673.106	98,30	132.950.894	6.854.885.000	6.559.778.663	95,69	295.106.337	15.204.544.000	11.266.465.953	74,10	3.938.078.047	14.469.640.000	13.981.739.073	96,63	487.900.927
16	BPKH Wilayah XVI Palu	13.464.641.000	13.216.362.948	98,16	248.278.052	9.843.447.000	9.638.883.016	97,92	204.563.984	9.360.092.000	9.315.791.874	99,53	44.300.126	39.816.845.000	26.931.573.509	67,64	12.885.271.491	17.371.168.000	17.313.845.738	99,67	57.322.262
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	15.216.686.000	13.034.133.640	85,66	2.181.552.360	10.838.703.000	9.532.751.275	87,95	1.305.951.725	10.687.946.000	10.257.814.916	95,98	430.133.084	53.011.482.000	24.159.358.649	45,57	28.852.123.351	16.578.627.000	15.405.841.389	92,93	1.172.785.611
18	BPKH Wilayah XVIII Aceh	13.773.130.000	12.016.704.348	87,25	1.756.425.652	7.343.970.000	6.132.982.417	83,51	1.210.987.583	5.704.193.000	5.612.404.561	98,39	91.788.439	20.579.074.000	7.412.487.797	36,02	13.166.586.203	6.952.736.000	6.861.459.774	98,89	91.276.226
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	16.981.723.000	11.103.269.876	65,38	5.878.453.124	7.634.787.000	6.814.426.317	89,25	820.360.683	7.759.089.000	6.989.961.790	90,09	769.127.210	47.663.351.000	10.002.337.316	20,99	37.861.013.684	11.357.055.000	10.744.789.662	94,61	612.265.338
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	16.141.430.000	9.539.185.995	59,10	6.602.244.005	7.455.978.000	6.801.607.568	91,22	654.370.432	8.952.147.000	8.456.189.859	94,46	495.957.141	17.331.328.000	11.298.775.635	65,19	6.032.552.365	9.250.784.000	8.964.561.843	96,91	286.222.157
21	BPKH Wilayah XXI Palembang	12.637.354.000	12.448.043.274	98,50	189.310.726	10.738.039.000	8.880.540.710	82,70	1.857.498.290	7.800.506.000	7.496.443.531	96,10	304.062.469	91.529.244.000	32.888.273.369	35,93	58.440.970.631	15.823.273.000	15.516.605.054	98,07	304.667.946
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	15.344.126.000	8.662.835.584	56,46	6.681.290.416	7.180.957.000	6.862.646.496	95,57	318.310.504	8.119.203.000	7.888.703.420	97,16	230.499.580	45.763.956.000	19.355.327.584	42,29	26.408.628.416	14.232.827.000	14.125.284.437	99,24	107.542.563
	DINAS KEHUTAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Dinas Kehutanan Prov Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Dinas Kehutanan Pertanian DKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Dinas Kehutanan Prov Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Dinas Kehutanan Prov Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Dinas Kehutanan Pertanian DIY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Dinas Kehutanan Prov Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Dinas Kehutanan Prov NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	UPTD BPKH I Sumut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	UPTD BPKH II Sumut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Dinas Kehutanan Prov Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Prov Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Dinas Kehutanan Prov Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	UPTD BIPHUT Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Dinas Kehutanan Prov Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Dinas Kehutanan Prov Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Dinas Pertanian dan Kehutanan Prov Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	UPTD IPH Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	UPTD IPH Kalbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	UPTD Planologi Balikpapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	UPTD Planologi Samarinda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	UPTD Planologi Tarakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NO	SATKER	TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALI- SASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALI- SASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALI- SASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALI- SASI
22	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kehutanan dan Pertambangan Prov Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	UPTD Balai IPH Kendari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Kehutanan Prov Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Kehutanan Prov NTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Kehutanan Prov NTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Prov Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Kehutanan Prov Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Dinas Kehutanan Prov Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Dinas Kehutanan Prov Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Keterangan:

- Pada TA 2010 terdapat penerimaan Hibah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebesar Rp 17.980.900.000,-, namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran tidak diterima laporan keuangannya karena bukan kewajiban pihak negara donor (on budget treasury)
- Terdapat perubahan struktur organisasi di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2015. Berdasarkan Surat Kepala Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN-RB Nomor: B809/D.II/PAN-RB/2015 tanggal 4 Maret 2015 yang dijadikan acuan untuk menjadikan Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Satuan Kerja Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka percepatan proses penyusunan dokumen anggaran DIPA APBN-P Tahun 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sehubungan dengan Surat Direktur Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Nomor: S-791/AG.2015 tanggal 9 April 2015 perihal, Ditjen Perbendaharaan dimohon untuk dapat menonaktifkan DIPA awal (DIPA APBN TA 2015) Salter eks Ditjen Planologi Kehutanan di Lingkup Kementerian Kehutanan. Sehingga terhitung bulan April 2015, Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Satuan Kerja Pengelola Anggaran Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

STATISTIK

BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

TAHUN 2019



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto
PO. Box 6506, Jakarta 10270, Telp. (021) 5730289, Fax. (021) 5734632